RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026

BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 2

(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan asas:
   a. transparan;
   b. responsif;
   c. efisien;
   d. efektif;
   e. akuntabel;
   f. partisipatif;

g. terukur;

h. berkeadilan; dan

i. berwawasan lingkungan.

(2) RPJMD bertujuan untuk :

a. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah;

b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan

c. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

(1) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun, Renstra SKPD, Renja SKPD dan rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian daerah.

(3) RPJMD merupakan penjabaran periode IV (Empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025.

(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. BAB IX Penutup.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Agustus 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

EDI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021
NOMOR 7.

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (7 - 89 /2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, serta mengacu pada RPJMN tahun 2020 -2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan fungsinya dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, dokumen dimaksud merupakan juga dokumen awal perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Muara Beliti , 25 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR GRAFIK..... xii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-11
1.4.1 Maksud..... I-11
1.4.2 Tujuan..... I-11
1.5. Sistematika Penulisan I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografi II-1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif II-1
2.1.2. Hidrologi II-5
2.1.3. Penggunaan Lahan..... II-6
2.1.4. Klimatologi..... II-7
2.1.5. Potensi Pembangunan Wilayah..... II-8
2.1.6. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Musi Rawas..... II-11
2.1.7. Aspek Demografi Kabupaten Musi Rawas..... II-13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-15
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-27
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-30
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-31
2.3.1. Urusan Wajib II-32
2.3.2. Urusan Pilihan II-58
2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-62
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-64
2.5. Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... II-82
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2. Neraca Daerah III-9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-21
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-28
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-32
3.3. Kerangka Pendanaan III-36
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-36
3.3.2. Analisis Pengeluaran Priodik Wajib dan Meningkat serta Prioritas Utama..... ..... III-48

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-51
3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya..... III-54
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....…… IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas..…….. IV-1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Urusan Pemerintahan…… IV-2
4.1.2. Analisa Pohon Masalah Terhadap Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....……..... IV-27
4.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia..... IV-27
4.1.2.2 PDRB..... IV-28
4.1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi..... IV-30
4.1.2.4 PDRB Per Kapita..... IV-32
4.1.2.5 Gini Ratio..... IV-33
4.1.2.6 Inflasi..... IV-35
4.1.2.7 Kemiskinan..... IV-36
4.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) IV-37
4.1.2.9 Indeks Kinerja Infrastruktur..... IV-39
4.1.2.10 Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)..... IV-48
4.1.2.11 Peningkatan Status Desa Melalui Program Pengentasan Daerah Tertinggal..... IV-48
4.1.2.12 Indeks Reformasi Birokrasi..... IV-49
4.1.2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat..... IV-49
4.2. Isu Strategis .....……. IV-50
4.2.1. Isu Strategis Global .....…….. IV-51
4.2.1.1 SDG's (*Sustainable Development Goals*) IV-51
4.2.1.2 Isu Stunting di Kabupaten Musi Rawas..... IV-52
4.2.1.3 Potensin Resesi Ekonomi Dunia Akibat Pandemi Covid-19..... IV-54
4.2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024..... IV-56
4.2.1.5 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... IV-57
4.2.1.6 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... IV-58
4.2.1.8 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026..... IV-60
4.2.1.7.1 Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Rawas..... IV-60
4.2.1.7.2 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS..... IV-62
4.2.1.7.3 Analisis Swot Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026..... IV-63

BAB V **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1**
5.1. RPJPD.....……. V-1
5.2. Visi RPJMD..... V-2
5.3. Misi RPJMD..... V-3
5.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD..... V-11
5.4.1. Tujuan..... V-11
5.4.2. Sasaran..... V-16
BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ……. VI-1**
6.1. Strategi .....…….. VI-5
6.2. Arah Kebijakan.....…… VI-8
6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RTRW Kabupaten Musi Rawas VI-13
6.4. Program Pembangunan Daerah .....…… VI-23
6.4.1 Program Setiap Perangkat Daerah..... VI-23
6.4.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar..... VI-23
6.4.3 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar VI-25
6.4.4 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan..... VI-28
6.4.5 Program Pembangunan Daerah Dengan Penunjang Pemerintah Daerah..... VI-30
6.5. Program Usulan Daerah..... VI-84
BAB VII **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH …… VII-1**
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....…… VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah…….. VII-4
BAB VIII **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH…. VIII-1**
8.1. Indikator Kinerja Utama.....…… VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Daerah …… VIII-13
BAB IX **PENUTUP ....…… IX-1**
9.1. Pedoman Transisi …….. IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan …… IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2019 …….	II-2
Tabel 2.2	Kecamatan dengan Ketinggian dan Jarak ke Kabupaten ……..	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Musi Rawas.....…	II-8
Tabel 2.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.....	II-14
Tabel 2.5	IPM Kabupaten Musi Rawas..... ……	II-15
Tabel 2.6	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Konstan Tahun 2016-2020 (Rp. Juta).....	II-17
Tabel 2.7	Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....……	II-18
Tabel 2.8	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Rp. Juta).....	II-19
Tabel 2.9	Perbandingan Capaian Kabupaten Terhadap Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....…..	II-20
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020…….....……	II-21
Tabel 2.11	Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten terhadap Capaian Provinsi dan Nasional…….……	II-22
Tabel 2.12	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020…….	II-23
Tabel 2.13	Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen)% Kabupaten Musi Rawas 2016-2020……	II-24
Tabel 2.14	Indikator Penduduk Miskin Kabupaten MusiRawas Tahun 2015-2020...…..	II-25
Tabel 2.15	PDRB Per Kapita (Milyar) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	II-26
Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-20200…….....	II-26
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020...….	II-27
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020....….	II-28
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020.....	II-30
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Ketenaga Kerjaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020…….	II-30
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 …	II-31
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020……..	II-31
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020……	II-33
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020.....	II-34
Tabel 2.25	Daerah Irigasi Kabupaten Musi Rawas…….....	II-37
Tabel 2.26	Struktur Ruang dan Fungsi Yang Diemban Kecamatan…….....	II-41
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-20202……..	II-44
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020…….……..	II-46
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	II-46
Tabel 2.30	Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020……	II-47
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020.....	II-50
Tabel 2.32	Bencana Alam Yang Terjadi di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2020..	II-51
Tabel 2.33	Jumlah Lakalantas dan Korban Meninggal Tahun 2016-2020……	II-53
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 ……..	II-57

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 …… II-57
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 …….……..... II-58
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... II-59
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... II-59
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020……. II-60
Tabel 2.40 Capaian KInerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....……. II-61
Tabel 2.41 Capaiak Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... II-62
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2020……..... II-63
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Perda dan Keputusan DPRD Yang Diputuskan Tahun 2018……..... II-64
Tabel 2.44 PDRB Perkapita (Ribu Rp) Kabupaten Musi Rawas 2016-2020…..... II-65
Tabel 2.45 PDRB Per Sektor (Persen) Kabupaten Musi Rawas 2016-2020…….. II-65
Tabel 2.46 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020. II-66
Tabel 2.47 Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020….. II-66
Tabel 2.48 Fokus Sumber Daya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2020…… II-67
Tabel 2.49 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan…….. II-67
Tabel 2.50 Alokasi Anggaran Tahun 2019…… II-68
Tabel 2.51 Alokasi Anggaran Tahun 2020…….. II-68
Tabel 2.52 Standar Peayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan……. II-69
Tabel 2.53 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019.. II-70
Tabel 2.54 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.. II-70
Tabel 2.55 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019…… II-71
Tabel 2.56 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020……. II-72
Tabel 2.57 Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2019……. II-73
Tabel 2.58 Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020……. II-74
Tabel 2.59 Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019…….. II-75
Tabel 2.60 Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019……. II-76
Tabel 2.61 Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020…… II-77
Tabel 2.62 Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2020…….. II-78
Tabel 2.63 Alokasi Anggaran Tahun 2019…… II-80
Tabel 2.64 Alokasi Anggaran Tahun 2020…… II-81
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 …….……. III-2
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....…… III-5

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiyayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun2016-2020..... III-7
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2016-2020 ..... III-9
Tabel 3.5 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020……. III-19
Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... III-29
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... III-30
Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... III-32
Tabel 3.9 Defisit Riil dan Penutupan Defisit Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020……. III-33
Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran..... III-34
Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Musi Rawas 2016-2020..... III-35
Tabel 3.12 Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2021-2026..... III-38
Tabel 3.13 Proyeksi Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2026..... III-44
Tabel 3.14 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2026.. III-45
Tabel 3.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahu 2021-2026..... III-46
Tabel 3.16 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... III-48
Tabel 3.17 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026……..... III-50
Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun2021-2026..... III-52
Tabel 3.19 Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026..... III-53
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... IV-2
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... IV-3
Tabel 4.3 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah Layak Huni..... IV-5
Tabel 4.4 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-6
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020 ……..... IV-6
Tabel 4.6 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020 ……..... IV-7
Tabel 4.7 Capaian Kinerja Tahun 2020..... IV-8
Tabel 4.8 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-8
Tabel 4.9 Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas..... IV-9
Tabel 4.10 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Admnistrasi Kependudukan Tahun 2020..... IV-10
Tabel 4.11 Status Desa Tahun 2020..... IV-11
Tabel 4.12 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-12
Tabel 4.13 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-12
Tabel 4.14 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-13
Tabel 4.15 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-14
Tabel 4.16 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-14
Tabel 4.17 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-15
Tabel 4.18 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-15
Tabel 4.19 Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020..... IV-16
Tabel 4.20 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Sampai Pada Tahun 2020..... IV-16

Tabel 4.21 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-17
Tabel 4.22 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-17
Tabel 4.23 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-18
Tabel 4.24 Capaian Kinerja Urusan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020... IV-18
Tabel 4.25 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... IV-19
Tabel 4.26 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... IV-19
Tabel 4.27 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... IV-20
Tabel 4.28 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-20
Tabel 4.29 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-21
Tabel 4.30 Capaian Kinerja Urusan Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-21
Tabel 4.31 Capaian Kinerja Urusan BPBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-22
Tabel 4.32 Capaian Kinerja Urusan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-22
Tabel 4.33 Capaian Kinerja Urusan BPPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-23
Tabel 4.34 Capaian Kinerja Urusan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-23
Tabel 4.35 Capaian Kinerja Urusan Balitbang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-24
Tabel 4.36 Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-24
Tabel 4.37 Laju Inflasi (Tingkat Produsen) Kabupaten Musi Rawas 2015-2020..... IV-35
Tabel 4.38 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020..... IV-36
Tabel 4.39 Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... IV-39
Tabel 4.40 Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020..... IV-40
Tabel 4.41 Jumlah Rumah di kabupaten Musi Rawas Tahun 2020..... IV-44
Tabel 4.42 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2019..... IV-45
Tabel 4.43 Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019..... IV-46
Tabel 4.44 Rekap Status Gizi Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan e-PPGBM..... IV-53
Tabel 4.45 Analisi Terhadap Dokumen Hasil KLHS..... IV-62
Tabel 4.46 Analisis SWOT Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas..... IV-63
Tabel 5.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun2005-2025, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, dan dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023..... ……. V-9
Tabel 5.2 Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.....…… V-12
Tabel 5.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan.....…….. V-14
Tabel 5.4 Matriks Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.....……. V-17
Tabel 5.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran..... V-25
Tabel 6.1 Analisis SWOT Terhadap Visi, Misi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.… VI-2
Tabel 6.2 Strategi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas……. VI-5
Tabel 6.3 Arahan Kebujakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 VI-9
Tabel 6.4 Arah Kebijakan RPJMD Menurut Sasaran dan Strategis..... VI-9
Tabel 6.5 Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas..... VI-14
Tabel 6.6 Kawasan Strategis Kabupaten Musi Rawas..... VI-15

Tabel 6.7 Arah Pembangunan Wilayah Berdasarkan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.....…….. VI-16
Tabel 6.8 Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas..... VI-33
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026..... …..…….. VII-2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan..... VII-5
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas ……..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas …… VIII-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025....……...	I-5
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen Perencanaan..……...……	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas ……	II-3
Gambar 2.2	Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasiikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Sarat Kabupaten Musi Rawas.....	II-6
Gambar 2.3	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Surat.....	II-7
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II-10
Gambar 2.5	Peta Sebaran Bencana Banjir/ Tanah Longsor Kabupaten Musi Rawas.....	II-11
Gambar 2.6	Peta Sebaran Bencana Angin Puting Beliung Kabupaten Musi Rawas.....	II-12
Gambar 2.7	Peta Sebaran Bencana Karhutla Kabupaten Musi Rawas.....	II-13
Gambar 2.8	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas……...	II-38
Gambar 4.1	Pohon Masalah Pada Pembangunan Daerah……	IV-26
Gambar 5.1	Logframe Perencanaan Integratif Misi 1.....	V-5
Gambar 5.2	Logframe Perencanaan Integratif Misi 2.....	V-6
Gambar 5.3	Logframe Perencanaan Integratif Misi 3.....	V-7
Gambar 5.4	Logframe Perencanaan Integratif Misi 4.....	V-8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....……...	II-36
Grafik 2.2	Kondisi Jembatan kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020...…….....	II-36
Grafik 2.3	Rumah tangga Dengan Akses Sanitasi Layak……	II-42
Grafik 2.4	Air Minum …….	II-42
Grafik 2.5	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020…….	II-43
Grafik 2.6	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016-2020…….	II-44
Grafik 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	II-45
Grafik 2.8	Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2020.....	II-47
Grafik 2.9	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2016-2020……...……	II-48
Grafik 2.10	Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020…….	II-48
Grafik 2.11	Persentase Penduduk Yang Berusia 17 Tahun ke atas/telah Menikah Yang Memiliki KTP Tahun 2016-2020.....	II-49
Grafik 2.12	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate/CPR) % Tahun 2016-2020.....	II-51
Grafik 2.13	Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020….....	II-52
Grafik 2.14	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020.....	II-53
Grafik 2.15	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020.....	II-54
Grafik 2.16	Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2016-2020.....	II-55
Grafik 2.17	Jumlah Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun) Tahun 2016-2020.....	II-55
Grafik 2.18	Jumlah Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun) Tahun 2016-2020.....	II-60
Grafik 4.1	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-4
Grafik 4.2	Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-4
Grafik 4.3	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-5
Grafik 4.4	Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TRF).....	IV-12
Grafik 4.5	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp Triliun) Tahun 2016-2020.....	IV-15
Grafik 4.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas 2016-2020....	IV-28
Grafik 4.7	PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas 2016-2020.....	IV-30
Grafik 4.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-31
Grafik 4.9	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2020.....	IV-34
Grafik 4.10	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2018.....	IV-35
Grafik 4.11	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020.....	IV-38
Grafik 4.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020.....	IV-39
Grafik 4.13	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-41
Grafik 4.14	Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-42
Grafik 4.15	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2016-2020.....	IV-44
Grafik 4.16	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-46
Grafik 4.17	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	IV-47
Grafik 4.18	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2016-2020.....	IV-60
Grafik 4.19	Peningkatan Status Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas.....	IV-51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini mencakup tahapan IV pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, kondisi global dan nasional penting untuk diperhatikan. Kondisi global yang menjadi tantangan s ekaligus peluang bagi pembangunan Musi Rawas kedepan antara lain

kondisi perekonomian global, pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global, stabilitas politik global yang dinamis, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama, adanya bonus demografi, serta kebijakan pembangunan nasional di Musi Rawas.

Untuk mendukung pembangunan Nasional maka penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 harus memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2025, utamanya adalah arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional wilayah Pulau Sumatera yang terkait dengan Musi Rawas, penentuan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran dengan prinsip *money follow programme priority*, serta pendekatan paradigma Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial (HTIS).

Adapun strategi pembangunan kewilayahan di Pulau Sumatera dalam RPJMN yang bisa menjadi perhatian Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi, dan hilirisasi komoditas unggulan yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
2. Mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal;
3. Mengembangkan industri kedirgantaraan;
4. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Sumatera dan memperhatikan pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah;
6. Pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multimoda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol;

7. Memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
8. Mengendalikan alih fungsi lahan dan melakukan upaya pencegahan terjadinya pembakaran lahan gambut;
9. Pembangunan desa terpadu yang mencakup pengembangan desa wisata, desa dijital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa;
10. Mengembangkan pembangunan alternatif untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan regional di Provinsi Sumatera Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 menyebutkan bahwa arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas hingga tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,11%-6,01% melalui sektor unggulan.
2. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,65% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3. Peningkatan IPM menjadi 69,00.
4. Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 76,07%, akses air minum layak sebesar 59,49%, dan akses sanitasi layak sebesar 51,70%.
5. Peningkatan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi.
6. Peningkatan produktivitas perikanan.

7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, dan Kawasan Minapolitan Tugumulyo.
8. Percepatan pembangunan Jalan Tol Musi Rawas-Lubuklinggau- Curup Bengkulu.
9. Pengembangan Perhutanan Sosial.

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini telah diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas yang terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan arahan dari dokumen RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005 -2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD 2005-2025

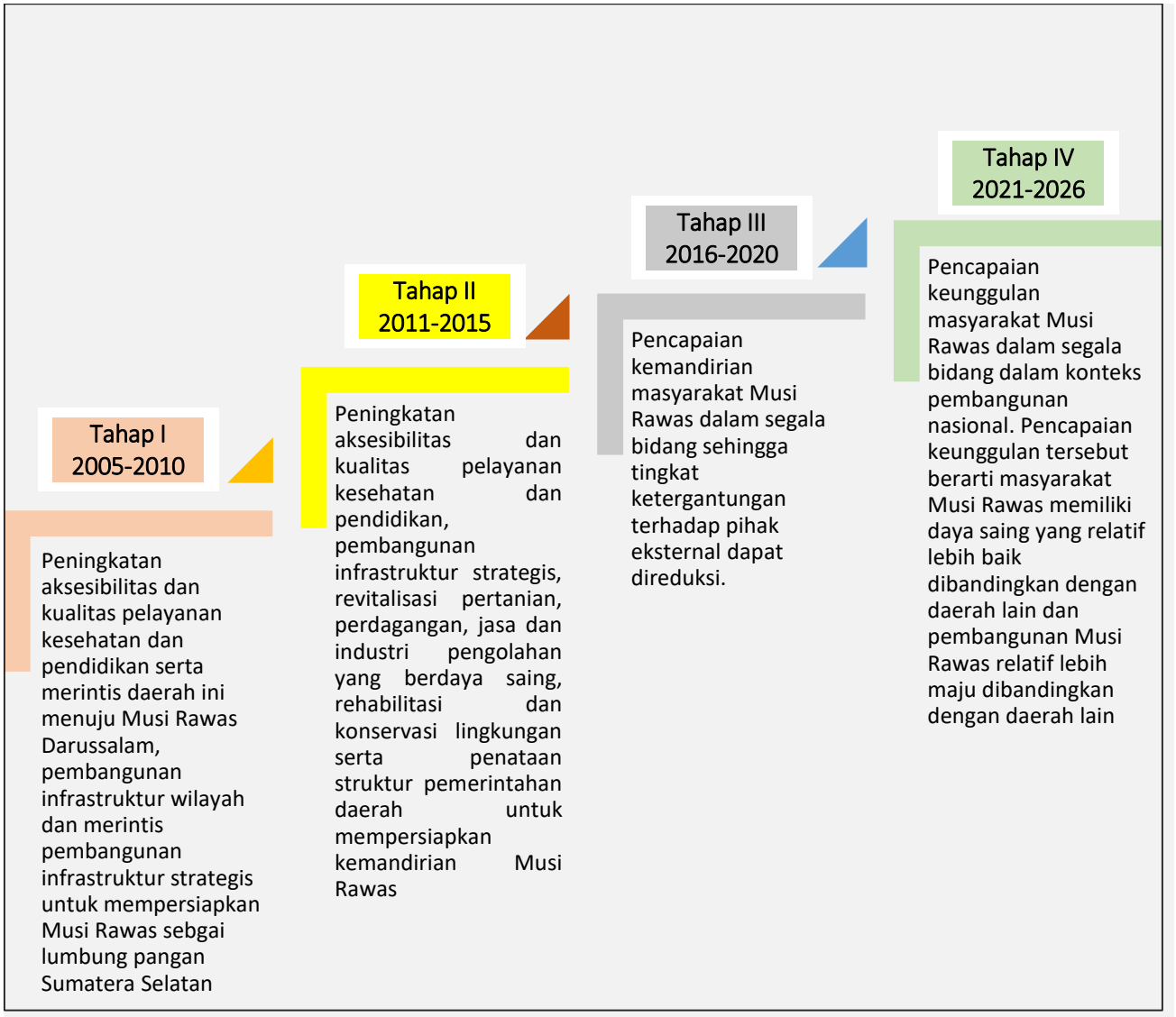

Sumber: RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2005-2025

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 masuk pada tahapan ke IV (2020-2025), dimana arah kebijakan pembangunan tahap IV ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang dalam konteks pembangunan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Musi Rawas memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Musi Rawas relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor Tahun 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan. RPJMD beserta perubahannya yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah beserta perubahannya, Renja perangkat daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. RKPD dan RKA perangkat daerah inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dan tahapan penyusunan RPJMD dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar1.2.

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

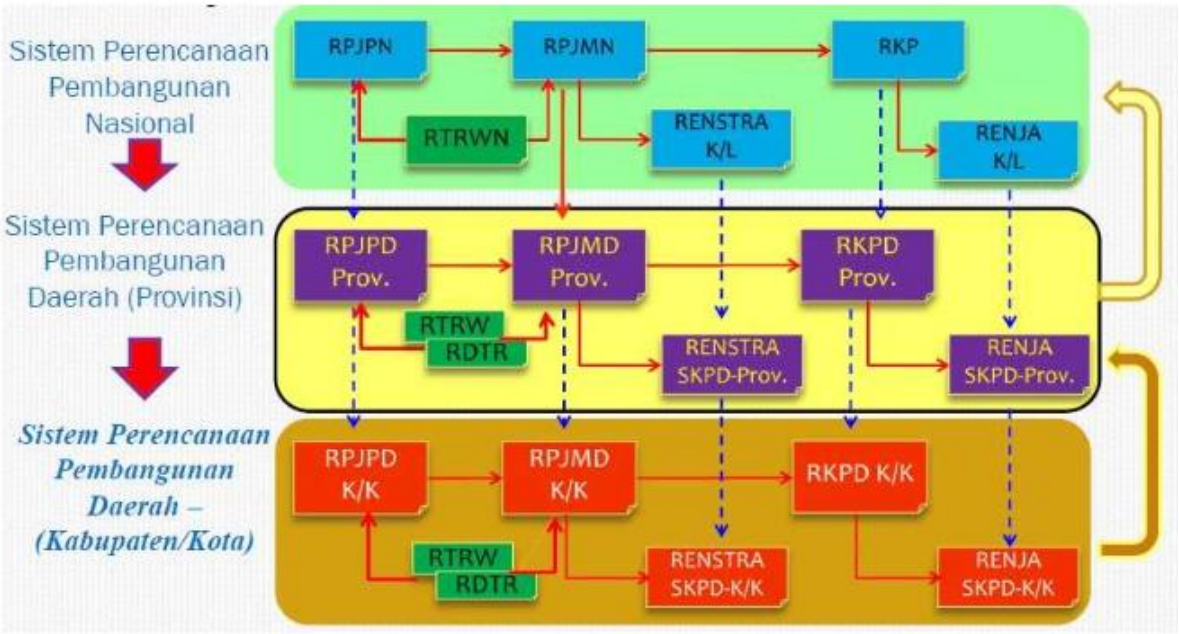

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Secara khusus RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang terdapat pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu : peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,11%-6,01% melalui sektor unggulan, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,65% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan), peningkatan IPM menjadi 69,00, peningkatan infrastruktur, jalan mantap sebesar 76,07%, akses air minum layak sebesar 59,49%, dan akses sanitasi layak sebesar 51,70%, peningkatan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan kawasan perkotaan Muara Beliti, kawasan agropolitan Muara Beliti, dan kawasan minapolitan Tugumulyo., percepatan pembangunan Jalan Tol Musi Rawas-Lubuklinggau-Curup Bengkulu dan Pengembangan Perhutanan Sosial.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini disusun dengan maksud untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta permasalahan dan kebutuhan daerah.

1.4.2 TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang berkelanjutan terhadap pembangunan jangka panjang;
2. Memberikan gambaran kondisi dan capaian kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Memberikan gambaran permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan dalam RPJMD lima tahun kedepan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **Bab I. Pendahuluan**
   - 1.1. Pendahuluan
   - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
   - 1.3. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
   - 1.4. Maksud dan Tujuan
   - 1.5. Sistematika Penulisan
2. **Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**
   - 2.1. Aspek Geografis dan Demografi
   - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
   - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
   - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
3. **Bab III. Gambaran Keuangan Daerah**
   - 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

4. **Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**
   4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas
   4.2. Isu Strategis

5. **Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
   5.1. RPJPD
   5.2. Visi RPJMD
   5.3. Misi RPJMD
   5.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD

6. **Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**
   6.1. Strategi
   6.2. Arah kebijakan
   6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Musi Rawas
   6.4. Program Pembangunan Daerah
   6.5. Program Unggulan Daerah

7. **Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
   7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
   7.2. Program Perangkat Daerah

8. **Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
   8.1. Indikator Kinerja Utama
   8.2. Indikator Kinerja Daerah

9. **Bab IX. Penutup**
   9.1. Pedoman Transisi
   9.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Ibukota Kabupaten Musi Rawas terletak di Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tentang persetujuan usulan nama ibukota dan lokasi pusat pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 berjumlah 406.196 jiwa dan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km^2 dengan kepadatan penduduknya mencapai 63,52 jiwa/km^2. Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transportasi darat dan udara. Melalui darat menggunakan angkutan umum (Kereta Api, Bus, Travel) dan Udara dengan Pesawat langsung dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke Bandara Silampari.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik letak geografi maupun demografi, secara geografis terletak pada posisi *102^0 07' 00" – 103^0 40' 10*" Bujur Timur dan 02^0 *20' 00" – 03^0 38' 00"* Lintang Selatan. Batas–batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.1

Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2019

No	Kabupaten	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Ogan Komering Ilir	18	18,359.04
2	Musi Banyuasin	14	14,266.26
3	Banyuasin	19	11,832.99
4	Muara Enim	20	7,383.90
5	Musi Rawas	14	6.357,17
6	Musi Rawas Utara	7	6,008.65
7	OKU Selatan	19	5,493.94
8	Lahat	22	5,311.74
9	Ogan Komering Ulu	12	4,797.06
10	OKU Timur	20	3,370.00
11	Ogan Ilir	16	2,666.07
11	Empat Lawang	10	2,256.44
13	Pali	5	1,840.00
14	Pagar Alam	5	633.66
15	Prabumulih	6	434.50
16	Lubuk Linggau	8	401.50
17	Palembang	16	400.61
	Total	**231**	**91.813,53**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas mencapai 635.717,15 Ha atau 6,39% terhadap luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari tabel 2.1 terlihat bahwa Kabupaten Musi Rawas menempati urutan kelima wilayah terluas di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas

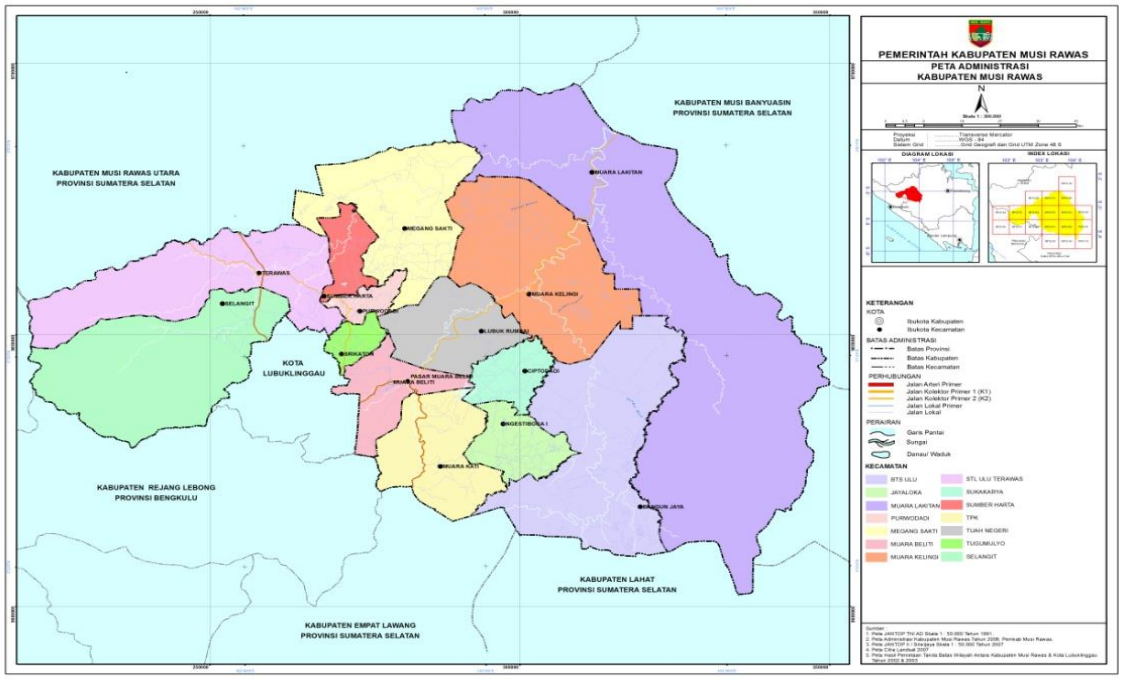

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang dengan ketinggian berkisar 125-200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari Utara sampai Selatan, khususnya di bagian Barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Untuk melihat topografi wilayah Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada *Tabel 2.2.*

Tabel 2.2

Kecamatan dengan Ketinggian dan Jarak ke Kabupaten

No	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	STL Ulu Terawas	130 – 200	54
2	Selangit	130 – 200	42
3	Sumber Harta	125 – 140	34
4	Tugumulyo	125 – 140	21
5	Purwodadi	125 – 140	36
6	Muara Beliti	125 – 140	3
7	TP. Kepungut	125 – 140	26
8	Jayaloka	125 – 150	42
9	Suka Karya	125 – 150	35
10	Muara Kelingi	125 – 150	36
11	BTS Ulu	125 – 150	61
12	Tuah Negeri	125 – 150	21
13	Muara Lakitan	125 – 150	73
14	Megang Sakti	125 – 150	56

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perwilayahan dipandang sebagai pembagian suatu wilayah yang luas ke dalam wilayah yang lebih kecil, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri umumnya berdasarkan wilayah administrasi. Hal serupa dapat pula ditujukan untuk wilayah dengan beberapa kesamaan seperti kondisi fisik, ruang lingkup pengaruh ekonomi dengan pusat pertumbuhan, bahkan kesamaan budaya dan adat istiadat yang berasal dari leluhur yang sama.

Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan Bukit Barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas ± 8,05% dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.

2. *Litosol* seluas ± 7,17% dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
3. *Asosiasi Latisol* hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
4. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana ±55,89 % berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.
5. *Podsolik* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
6. *Asosiasi Podsolik* hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan.

2.1.2. Hidrologi

Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar yang dapat dilayari sampai kehulunya. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus dan Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau, yakni Danau Aur, di Kecamatan Sumber Harta. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC), kayu pulai, kayu jabon, kayu karet dan jenis tumbuhan kayu lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, monyet, rusa dan kijang, ayam hutan, buaya dan jenis satwa liar lainnya merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang umumnya dapat dilayari yakni Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Semangus. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut.

2.1.3. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas.

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral seperti logam dan carbon. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai klasifikasi sedang untuk penyediaan serat. Luasnya mencapai 282.209,62 hektar atau 44,78% dari luas total wilayah. Klasifikasi tinggi mempunyai luas 238.531,31 hektar atau 37,85% yang berada di Kecamatan Muara Lakitan. Klasifikasi sangat tinggi di Musi Rawas mencapai 53.499,33 hektar atau 8,49% yang juga berada di Kecamatan Muara Lakitan seluas 29.545,56 hektar. Luasan untuk klasifikasi penyediaan serat rendah seluas 32.908,4 hektar atau 5,22% sedangkan yang sangat rendah seluas 23.020,31 hektar atau 3,65% dan berada di Kecamatan Tugumulyo dengan luas 4.526,24 hektar.

Gambar 2.2

Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas

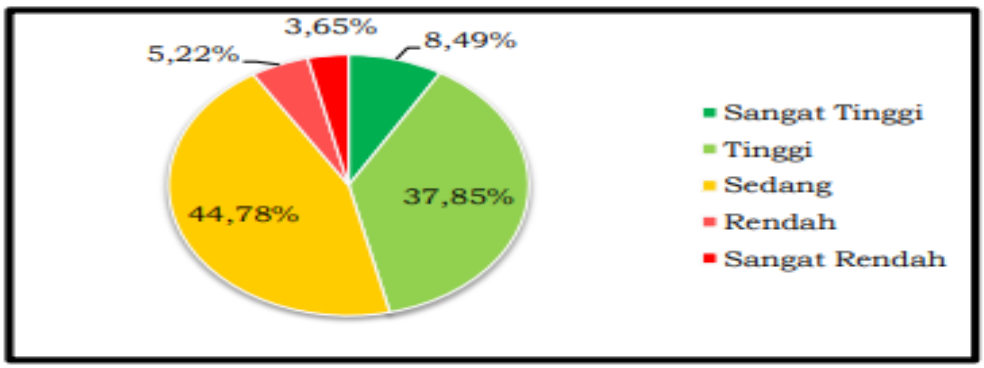

Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Penyediaan serat mempunyai potensi tinggi di penggunaan lahan dengan komoditas yang menghasilkan serat. Penggunaan lahan sawah, semak belukar dan hutan termasuk dalam klasifikasi tinggi. Padi di sawah merupakan bagian dari tanaman yang menghasilkan serat pangan, baik dari tumbuhannya maupun biji padi. Beberapa jenis pohon di hutan yang dimanfatkan seratnya untuk bahan baku industri. Contoh kayu jarum (softwood) dan kayu daun (hardwood) untuk dimanfaatkan seratnya untuk pulp dan kertas. Fauna yang ada di hutan juga menjadi sumber serat hewan. Kawasan hutan perlu dijaga kelestariannya selain untuk menjaga fungsi lindung juga melindungi sumber serat. Pemanfaatan hutan untuk bahan baku industri harus dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung. Penggunaan lahan lainnya memiliki potensi rendah untuk penyediaan serat seperti permukiman atau tegalan /ladang.

Gambar 2.3

Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

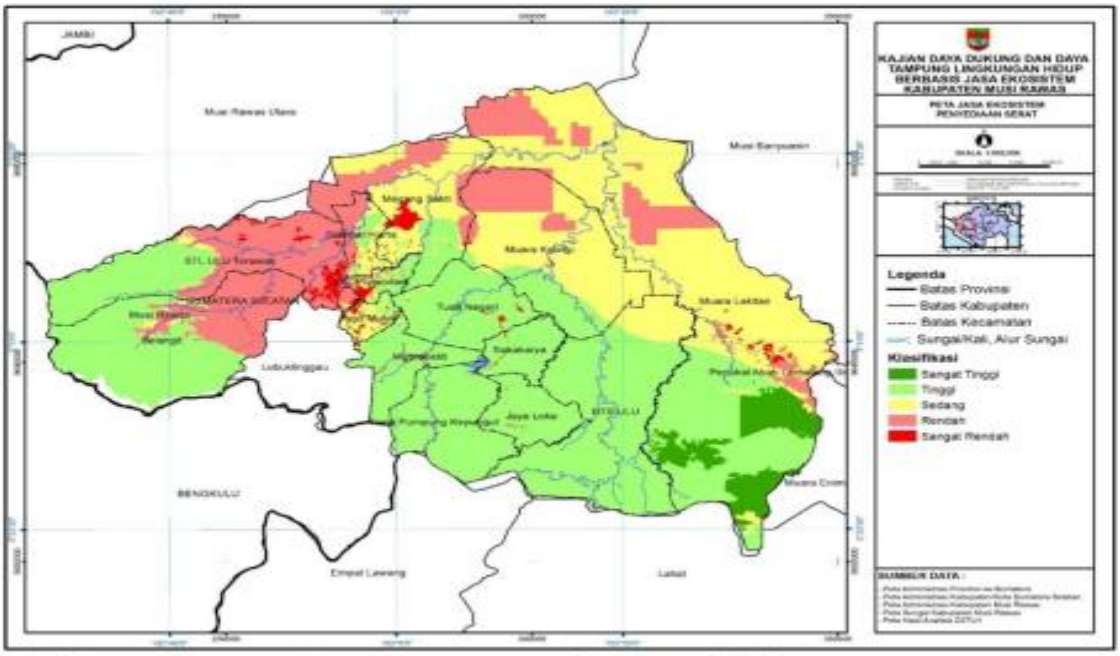

Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

2.1.4. Klimatologi

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaranatau pertemuan arus

udara. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan setiap tahun sangat bervariasi. Pada tahun 2020, curah hujan rata-rata per bulan sebesar 250,41 mm. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di bulan April dan Oktober. Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari dengan jumlah 28 hari hujan pada bulan tersebut.

Tabel 2.3

Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Musi Rawas

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	238.5	28
2	Februari	366	22
3	Maret	362.5	20
4	April	388	27
5	Mei	363	27
6	Juni	80	4
7	Juli	99.5	12
8	Agustus	240.5	9
9	September	89	8
10	Oktober	384.5	21
11	Nopember	310	21
12	Desember	83.5	15

Sumber : Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka, 2021

2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Sistem perkotaan wilayah kabupaten merupakan gambaran kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan (linkage) pada saat ini dan rencana antar kecmatan yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten (urban system). Mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan,

perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

   Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

   a. Kota Muara Beliti;

   b. Muara Lakitan

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah:

   a. Simpang Terawas (STL Ulu Terawas)

      Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:

      1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
      2. Kecamatan Selangit;
      3. Kecamatan Sumber Harta.

   b. Megang Sakti; Diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :

      1. Kecamatan Purwodadi
      2. Kecamatan Tugumulyo

   c. Simpang Semambang (Tuah Negeri) Adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas LubuklinggauPalembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani :

      1. Kecamatan Tuah Negeri;
      2. Kecamatan Muara Kelingi;
      3. Kecamatan Jayaloka;
      4. Kecamatan Sukakarya;
      5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
      6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut:

a. Tugumulyo (Kecamatan Tugu Mulyo);
b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi);
c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka);
d. Selangit (Kecamatan Selangit);
e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta);
f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi);
g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya);
h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut);
i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu).

Dalam rencana tata ruang Kabupaten Musi Rawas terdapat 14 (Empat Belas) Kawasan Strategis yang menjadi fokus pengembangan wilayah di Kabupaten Musi Rawas, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Bagan pengembangan wilayah dapat dilihat pada Gambar. 2.2

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

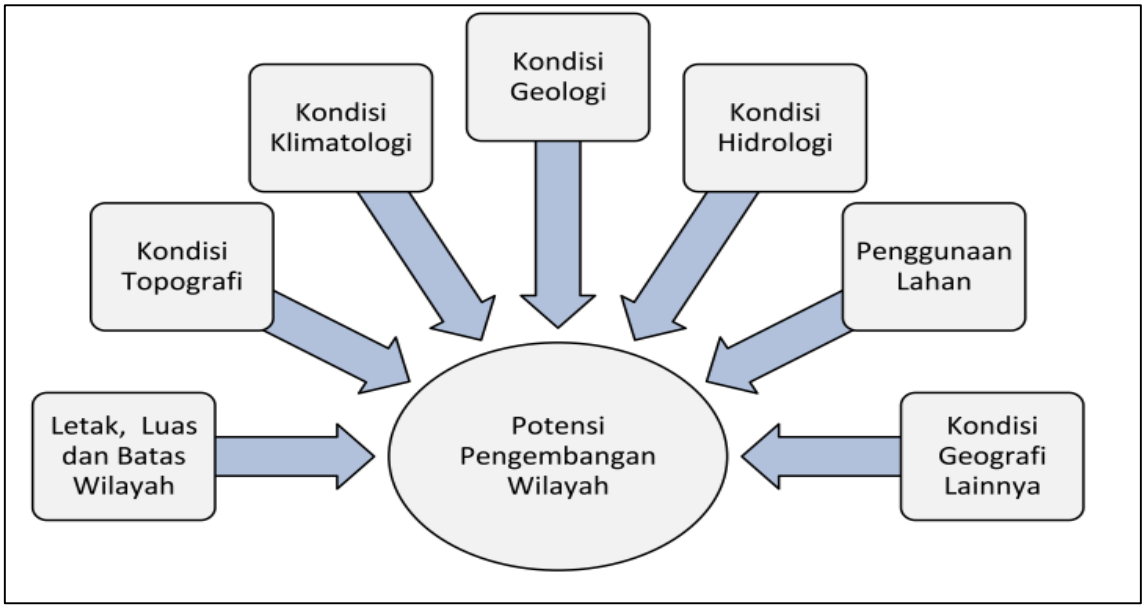

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Wilayah di Kabupaten Musi Rawas, dilihat dari topografi maka pengembangan wilayah akan dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, pegunungan ke lembah, lembah ke dataran, dataran ke lahan basah dan rawa gambut. Dari 635.717,15 Ha luas wilayah di Kabupaten Musi Rawas sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah yakni lahan perkebunan terutama komoditas kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa. Sedangkan pertanian terdiri dari komoditas hortikultura yaitu sayuran dan Buah-buahan. Tanaman cabai merupakan komoditas paling rutin dan terbanyak diproduksi di Kabupaten Musi Rawas. Untuk produksi buah-buahan terdiri dari durian, jeruk, nanas, pisang dan rambutan. Sedangkan tanaman biofarma terdiri dari jahe, kencur dan lengkuas.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas memiliki wilayah rawan bencana yang terdiri dari Rawan Banjir/Tanah Longsor, Rawan Angin Puting Beliung dan Rawan Kebakaran Hutan dan Ladang. Wilayah sebaran rawan bencana Banjir di Kabupaten Musi Rawas dapat terjadi pada beberapa kecamatan yaitu: Muara Lakitan, Muara Kelingi, BTS Ulu, Megang Sakti, STL Ulu Terawas, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit dan Tiang Pumpung Kepungut. Untuk melihat pola sebaran bencana banjir dapat dilihat pada gambar

Gambar 2.5

Peta Sebaran Bencana Banjir/ Tanah Longsor
Kabupaten Musi Rawas

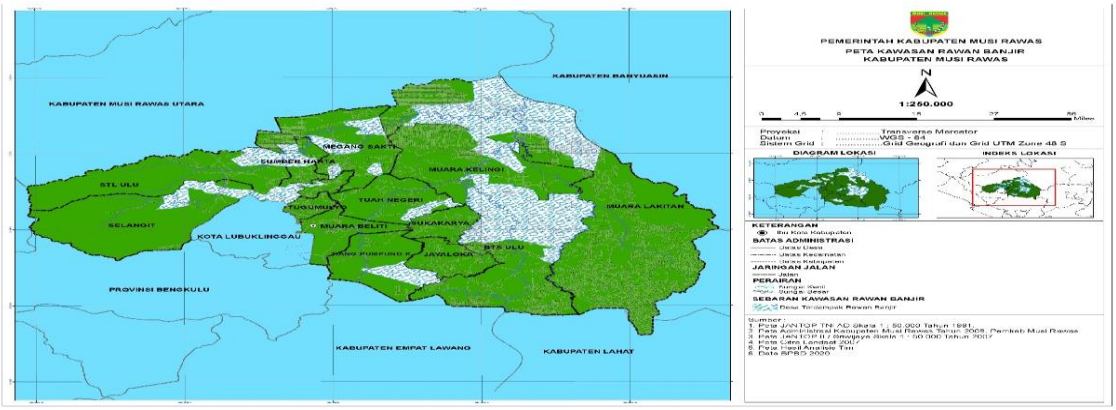

Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas

Wilayah rawan bencana Angin Puting beliung dapat terjadi di beberapa Kecamatan yaitu : Muara Lakitan, Megang Sakti, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit, Tiang Pumpung Kepungut, Tugumulyo, Muara Beliti dan Jayaloka. Untuk mengetahui sebaran wilayah rawan banjir dapat dilihat pada gambar :

Gambar 2.6

Peta Sebaran Bencana Angin Putting Beliung Kabupaten Musi Rawas

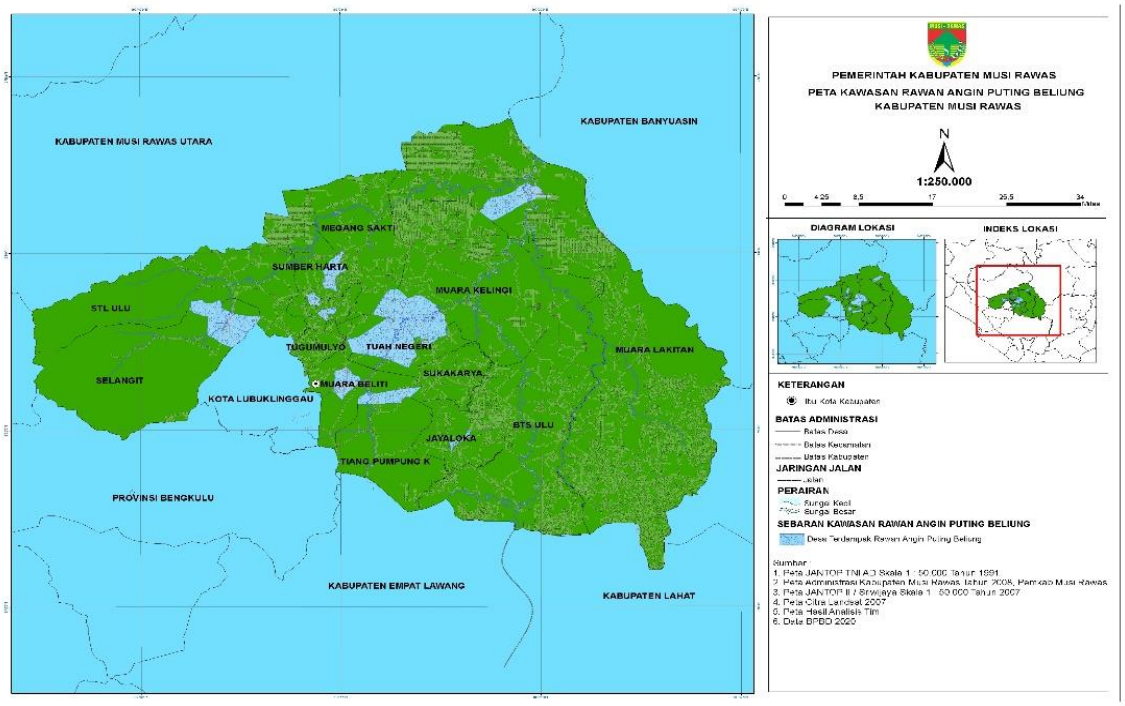

Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas

Sedangkan Wilayah rawan Karhutlah di Kabupaten Musi Rawas dapat terjadi di beberapa Kecamatan yaitu : Muara Lakitan, Megang Sakti, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit, Tiang Pumpung Kepungut, Tugumulyo, Muara Beliti dan Jayaloka. Untuk mengetahui sebaran wilayah rawan Karhutlah dapat dilihat pada gambar :

Gambar 2.7

Peta Sebaran Bencana Karhutlah Kabupaten Musi Rawas

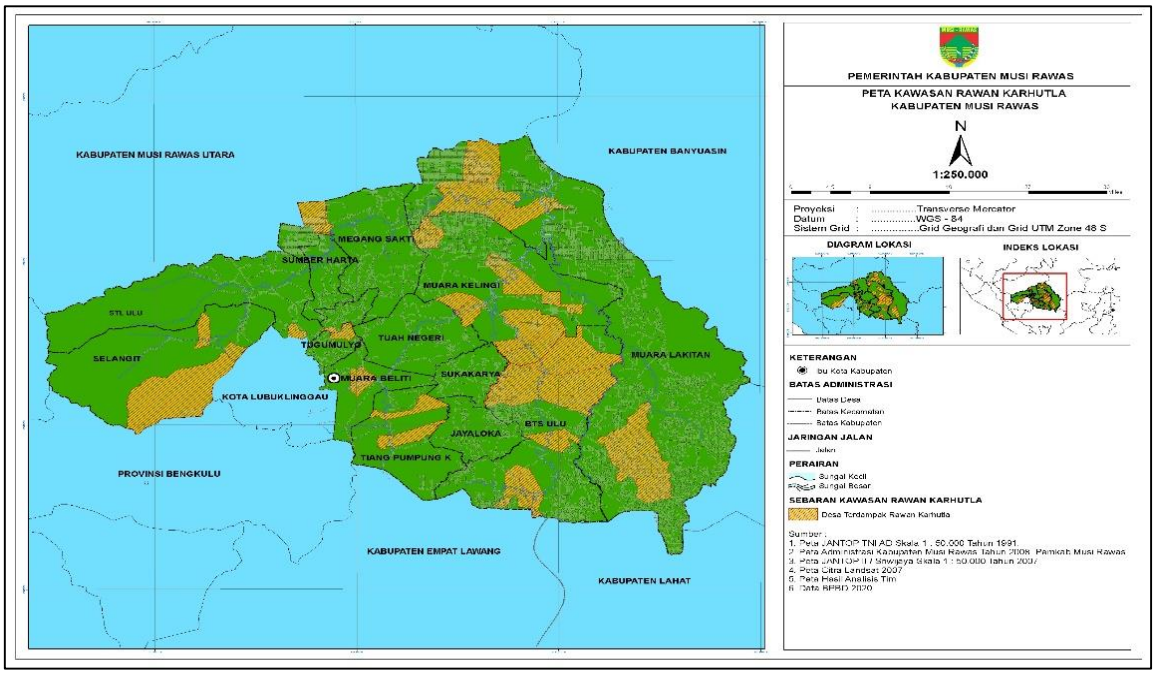

Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas

2.1.7.Aspek Demografi Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Dengan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km^2 dan jumlah penduduk sebanyak 406.196 jiwa maka *density* penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 63,52 jiwa/Km^2. Wilayah administrasi dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Tugumulyo dengan kepadatan penduduk 708,15 jiwa/Km^2, sedangkan Kecamatan Muara Lakitan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya terkecil yaitu 21,02 jiwa / Km^2 , seperti tabel 2.4.

Tabel 2.4

Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan ($Jiwa/Km^2$)
1	STL Ulu	596,92	32.987	54,00
2	Selangit	717,34	19.553	26,71
3	Sumber Harta	103,78	18.795	117,61
4	Tugumulyo	67,70	48.013	691,77
5	Purwodadi	63,26	16.009	248,92
6	Muara Beliti	175,63	27.070	150,60
7	TP. Kepungut	326,42	12.616	37,96
8	Jayaloka	160,46	16.624	100,42
9	Sukakarya	121,53	15.452	123,06
10	Muara Kelingi	645,82	43.336	64,55
11	BTS Ulu	751,54	30.453	38,95
12	Tuah Negeri	263,45	27.521	102,39
13	Muara Lakitan	1.963,54	41.647	20,69
14	Megang Sakti	399,78	56.120	136,81
Jumlah		**6.357,17**	**406.196**	**63,55**

Sumber : Mura Dalam Angka 2020, BPS

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat 3 (tiga) Fokus yaitu : a) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; b) Fokus Kesejahteraan Sosial; c) Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia seutuhnya yaitu manusia yang sehat baik jasmani dan rohani, beberapa indikator yang dikembangkan oleh Lembaga Internasional seperti *United Development Programme* (UNDP) untuk menukur keberhasilan pembangunan adalah *Human Development Index* (HDI). Konsep HDI sejalan dengan konsep bahwa sebagai alat dan tujuan akhir pembangunan. Untuk mengukur HDI itu adalah dengan menggunakan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita.

Konsep IPM ini menjelaskan seberapa besar manusia memperoleh akses akan hasil-hasil pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang diukur melalui peubah atau yang dikenal dengan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup).
2. Pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah).
3. Standar hidup layak (pengeluaran perkapita disesuaikan).

Gambaran IPM Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada Tabel 2.5 IPM Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2020.

Tabel 2.5

IPM Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
IPM					
Musi Rawas	64,75	65,31	66,18	66,92	66,79
Provinsi	68,86	68,24	69,39	70,02	70,01
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Angka Harapan Hidup (AHH)					
Musi Rawas	67,26	67,34	67,59	67,86	68,14
Provinsi	69,18	69,16	69,41	69,65	69,88
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47
Harapan lama					

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Sekolah (HLS)					
Musi Rawas	11,73	11,74	11,99	12,07	12,08
Provinsi	12,23	12,35	12,36	12,39	12,45
Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					
Musi Rawas	6,85	7,18	7,28	7,51	7,52
Provinsi	7,83	7,99	8,00	8,18	8,24
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48
Pengeluaran Perkapita Pertahun /Tahun (ribu)					
Musi Rawas	9.140,00	9.218,00	9.562,00	9.795	9.520,00
Provinsi	9.935,00	10. 220,00	10. 652,00	10. 937,00	10. 652,00
Nasional	10. 420,00	10. 664,00	11. 059,00	11. 299,00	11. 013,00

Sumber: BPS Provinsi Sumsel, BPS Nasional

Dari tabel 2.4 dapat dilihat angka IPM Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan sebagai menengah atau sedang, walaupun IPM mengalami perbaikan tiap tahunnya yaitu 66,92 di tahun 2019 dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 66,79, namun perkembangan yang cukup menggembirakan bila dilihat bahwa dimensi-dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu pada dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari *growth*-nya adalah angka harapan hidup relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau terus mengalami kenaikan, seiring dengan meningkatnya fasilitas dan pelayanan masyarakat. Perkembangan dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) relatif lebih lamban, walaupun banyak program/kegiatan untuk mendorong orang bersekolah lebih baik lagi, Hal ini terjadi karena masih belum tersebarnya secara merata sekolah tingkat lanjutan di tiap kecamatan akibat luasnya wilayah dan geografis.

Selanjutnya pada dimensi Pengeluaran Per Kapita mengalami penurunan, sehingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

b. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi riil suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan yang terkandung diantara cita-cita tersebut adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.717.873.50	4.982.203.0	5.289.729.30	5.585. 975,00	5 821,98
Pertambangan dan Penggalian	4.576.041.30	4.826.240.90	5.520.962.40	6.206.843.90	5 944,77
Industri Pengolahan	1.874.154	2.120.011.70	2.365.012.80	2.571.341.80	2 705,27
Pengadaan Listrik dan Gas	4.319.30	4.549.40	4.810.60	4.968,00	5,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.092,20	1.241,20	1.367,80	1.491,30	1,58
Konstruksi	898.330	965.589,10	1.061.482,60	1.138.880,10	1 109,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.155.904,90	1.365.057,10	1.528.122,30	1.700.907,90	1 793,01
Transportasi dan Pergudangan	70.261,90	74.552	82.104,70	91.072,70	88,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.520,90	51.560	57.840,70	65.884,50	66,71
Informasi dan Komunikasi	44.413,60	50.056,90	56.262,20	62.061,60	72,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	101.477,60	108.354,20	119.299,00	126.073,90	123,80
Real Estate	202.913,50	217.075,70	240.438,80	268.382,50	279,17
Jasa Perusahaan	2.394,20	2.768,50	3.135,00	3.578,70	3,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370.556,50	381.053,70	382.058,70	391.040,50	407,30
Jasa Pendidikan	443.332,70	449.178,80	487.352,70	531.587,20	527,47

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.269,10	115.131,00	122.726,20	131.608,30	146,80
Jasa lainnya	145.512,40	162.688,50	177.230,00	195.234,00	205,45
PDRB	14.758.367,50	15.877.312,30	17.499.935,80	19.076.932,10	19 303,45

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
**) Angka Sementara*

Berdasarkan data pada tabel 2.6 Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp.14,75 triliun meningkat menjadi Rp.19,30 triliun pada tahun 2020. Peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 5,58 triliun rupiah dan memiliki peranan dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel. 2.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 (%)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.97	31.38	30.23	29.28	30,16
Pertambangan dan Penggalian	31.01	30.4	31.55	32.54	30,80
Industri Pengolahan	12.7	13.35	13.51	13.48	14,01
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	14,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0,01
Konstruksi	6.09	6.08	6.07	5.97	5,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.83	8.6	8.73	8.92	9,29
Transportasi dan Pergudangan	0.48	0.47	0.47	0.48	0,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.34	0.32	0.33	0.35	0,35
Informasi dan Komunikasi	0.3	0.32	0.32	0.33	0,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.69	0.68	0.68	0.66	0,64
Real Estate	1.37	1.37	1.37	1.41	1,45
Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.51	2.4	2.18	2.05	2,11
Jasa Pendidikan	3	2.83	2.78	2.79	2,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.73	0.7	0.69	0,76
Jasa lainnya	0.99	1.02	1.01	1.02	1,06

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
**) Angka Sementara*

Tahun 2016-2019 merupakan tahun berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dengan *leading sector* yang menjadi unggulan selama ini sebagai penyumbang PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan 31.97 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 30,16 persen.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel. 2.8
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2016	2017	2018	2019	2020 (milyar)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,136,573.30	4,267,401.40	4,414,960.50	4,579,007.60	4 624,22
Pertambangan dan Penggalian	3,715,604.50	3,879,056.40	4,171,592.50	4,499,787.60	4 458,26
Industri Pengolahan	1,286,473.60	1,389,814.50	1,470,396.20	1,559,521.00	1 591,42
Pengadaan Listrik dan Gas	2,637.60	2,806.80	2,976.60	3,170.20	3,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	825.40	868.00	914.80	961.00	1,01
Konstruksi	583,962.50	637,001.40	690,364.40	734,633.20	724,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	732,866.20	792,840.70	847,078.90	905,843.40	904,65
Transportasi dan Pergudangan	49,761.00	51,227.00	54,714.50	59,503.10	56,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,854.60	29,564.50	31,765.70	34,540.90	34,35
Informasi dan Komunikasi	40,596.90	43,569.40	46,909.60	50,702.70	58,36

PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2016	2017	2018	2019	2020 (milyar)
Jasa Keuangan dan Asuransi	76,763.10	78,708.40	81,071.50	82,572.20	83,20
Real Estate	152,373.50	159,802.80	171,627.70	184,455.40	186,40
Jasa Perusahaan	1,720.10	1,838.90	1,978.30	2,129.20	2,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288,925.20	314,557.30	331,899.50	339,279.50	349,42
Jasa Pendidikan	332,863.30	350,683.80	378,083.40	408,133.40	389,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,850.60	87,791.60	93,018.40	98,681.00	105,08
Jasa lainnya	118,321.70	127,236.70	132,889.70	139,280.70	141,19
Produk Domestik Regional Bruto	11,629,973.10	12,214,769.80	12,922,242.10	13,682,202.20	13 713,75

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
**) Angka Sementara*

PDRB atas dasar harga konstan yang memiliki kontribusi paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 4,13 triliun Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.62 triliun.

Tabel 2.9

Perbandingan Capaian Kabupaten terhadap capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHB (Milyar)					
	Musi Rawas	14.758,37	15.758,31	17.495,01	19.065,04	19.303,45
	Provinsi	353 866,96	382 885,70	419 392,16	453 639,81	458 430,30
	Nasional	12.401.728,50	13.589.825,70	14.838.756.00	15.832.535,40	15.434.151,80
2	PDRB ADHK (Milyar)					
	Musi Rawas	11.629.973,06	12.214.769,79	12.921.706,39	13.680.636,92	13.713,752,65
	Provinsi	266.857,40	281.571,01	298.484,07	315.474,27	315.143,01
	Nasional	9.434.613,40	9.912.928,10	10 425 851,90	10.949.037,80	10.722.422,70

c. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi di harapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya, Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan masih dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Seperti

dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagai rangkaian dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.28	3,16	3,11	4,07	0,99
Pertambangan dan Penggalian	7.28	4,40	7,54	7,87	0,92
Industri Pengolahan	2.97	8,03	8,75	4,51	0,75
Pengadaan Listrik dan Gas	12.25	6,42	6,05	6,51	13,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.27	5,16	5,39	5,05	5,46
Konstruksi	9.49	9,08	7,44	7,35	- 1,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.02	8,18	6,59	7,07	- 0,02
Transportasi dan Pergudangan	2.12	2,95	6,81	8,75	- 4,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.66	6,14	7,45	8,74	- 0,56
Informasi dan Komunikasi	6.79	7,32	7,67	8,09	15,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.39	2,53	2,32	1,83	1,46
Real Estate	5.61	4,88	7,40	7,47	1,05
Jasa Perusahaan	5.56	6,90	7,58	7,63	7,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.96	8,87	5,51	2,22	2,99
Jasa Pendidikan	3.31	5,35	3,25	7,19	0,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.12	7,26	3,68	8,42	6,48
Jasa lainnya	7,44	7,53	4,44	4,81	1,37
PDRB Dengan Migas	5.25	5,03	5,79	5,87	0,24'

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
**) Angka Sementara*

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 0,24 atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya pandemi Virus Covid-19 di tahun 2020 tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas tetapi terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Secara Umum Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Musi Rawas masih berada diatas pertumbuhan Provinsi dan Nasional.

Beberapa sektor mengalami pertumbuhan minus seperti kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun ada satu sektor yang

mengalami peningkatan pada masa pandemi yaitu sector informasi dan komunikasi sebesar 15,10.

Tabel 2.11
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
terhadap capaian Provinsi dan Nasional

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas	5.25	5,03	5,79	5,87	0,24
Provinsi	5,04	5,51	6,04	5,71	-0,11
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

d. Gini Rasio

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur melalui pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun seberapa besar kemakmuran atau kue pembangunan tersebut terdistribusi secara merata ke semua populasi penduduk dalam suatu wilayah, salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan yang telah lama dikembangkan oleh ekonom Italian yang bernama *Girardo Gini* yaitu indeks Gini dan Kurve Lorenz, Angka Indeks Gini mempunyai besaran nilai antara 0 sampai dengan 1, apabila angka mendekati angka 1 (satu), maka kesenjangan pendapatan sangat tinggi, begitu juga sebaliknya mendekati angka 0 berarti kesenjangan sangat rendah. Gambaran umum perkembangan rasio gini Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016-2020

Tahun	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Nasional
2016	0.24	0.34	0.39
2017	0.28	0.36	0.39
2018	0.27	0.35	0.38
2019	0.24	0.33	0.31
2020	0.26*	0.34	0.39

Sumber: BPS Sumsel, 2020

Dari tabel 2.11 kinerja dari Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas mempunyai kecenderungan yang semakin menurun, Angka Gini Rasio Kabupaten Musi Rawas selama 5 (lima) tahun terakhir lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Trend selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio Musi Rawas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai metode produksi yang padat karya, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai buruh tani/perkebunan, buruh bangunan sehingga pembagian pendapatan relatif lebih merata atau disparitas pendapatan antarpenduduk relatif kecil, bila dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi.

e. Tingkat Inflasi

Pada tabel sebelumnya telah digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas yang diukur melalui pendekatan angka berlaku maupun harga konstan, secara umum PDRB menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, namun kedua metode tersebut mempunyai perbedaan mendasar yaitu PDRB harga konstan menunjukkan perkembangan nominal ekonomi karena menggunakan tahun dasar perhitungannya, sebaliknya harga berlaku menunjukkan angka riil dari PDRB pada tahun berjalan, dari pendekatan perhitungan ini, PDRB harga berlaku tidak dapat menggambarkan pertumbuhan output sebenarnya,

tingginya PDRB hanya menggambarkan kenaikan harga barang semata atau inflasi.

Angka Inflasi menunjukkan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus *(continue)* berkaitan dengan mekanisme pasar, dari perkembangan inflasi Kabupaten Musi Rawas dapat disajikan dalam tabel 2.13.

Tabel 2.13
Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) %
Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Musi Rawas	2,74	3,94	2,42	2,10	1,97
Provinsi Sumsel	3,68	2,96	2,74	2,96	1,55
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Dari tabel 2.13 angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,94 %, tingginya angka inflasi didominasi oleh kelompok Perumahan sebesar 0,19. Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. Angka optimal yang harus dijaga pada kisaran 0-5%.

e. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang bersifat dinamis, mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang terjadi.

Pada tingkat makro, data kemiskinan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik untuk meng-estimasi indikator kemiskinan makro seperti tingkat

kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Pada level ini, kemiskinan diukur dengan pendekatan *basic needs* (kebutuhan dasar), menggunakan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai rupiah yang setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada tingkat mikro, tersedia Basis Data Terpadu (BDT/DTKS) dari TNP2K yang berisi data rumah tangga sasaran *by name by address*. Data ini dapat digunakan sebagai target sasaran rumah tangga secara langsung dalam pelaksanaan program perlindungan sosial yang bermuara pada pengentasan kemiskinan baik secara lokal maupun nasional.

Dari tujuh belas tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, komponen pertama adalah Tanpa Kemiskinan. Target pencapaian SDGs poin pertama adalah : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya. Untuk mendukung target tersebut, maka ditetapkan dua indikator target yaitu:

1. Penurunan Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari.
2. Penurunan Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.

Penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan formula : Penduduk di atas garis kemiskinan = Jumlah/Total Penduduk - persentase penduduk miskin. Dengan demikian, maka jumlah penduduk miskin dan gambaran kemiskinan Kabupaten Musi Rawas ditunjukkan pada tabel 2.14.

Tabel. 2.14

Indikator Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	55.500	55.960	54.750	53.820	54,95
Persentase Penduduk Miskin	14,30	14,24	13,76	13,37	13.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,00	2,52	2,25	2,21	2,05

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,42	0,67	0,62	0,55	0,45
Garis Kemiskinan	377,135	392.740	427.595	437.854	467.766

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas 2019

Berdasarkan tabel di atas Tahun 2016 Persentase penduduk miskin sebesar 14,30 % mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2020 sebesar 13,50%. Penurunan terjadi secara signifikan seperti halnya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sehingga berakibat pada pemutusan kerja pada karyawan, penutupan lapangan usaha maupun aktivitas pada produksi.

f. PDRB Per Kapita (Milyar Rupiah)

Tabel 2.15
PDRB per Kapita (Milyar) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas	37,91	40,25	43,83	47,21	47,27

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas

PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 sebesar 37,91 milyar mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 PDRB per Kapita Kabupaten Musi Rawas mencapai 47,27 Milyar.

g. Ketenagakerjaan

Tabel 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas	-	2,80	3,23	2,91	3,29
Sumsel	4,31	4,39	4,23	4,53	5,51
Nasional	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas, BPS Prov Sumsel, BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 sebesar 2,80 berfluktuatif sampai dengan tahun 2020 TPT

Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan 3,29. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid 19 dan sesuai dengan himbauan pemerintah dalam pembatasan aktivitas hampir diseluruh bidang menyebabkan banyak Perusahaan merumahkan karyawan dan sebagian besar tenaga kerja mengalami pemutusan kontrak kerja.

2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas : Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni).

Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf	97,06	98,02	97,79	98,19	97,79	99,64
2	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,69	6,85	7,18	7,28	7,51	7,52
3	APK SD/MI/Paket A (%)	113,70	118,50	121,53	112,16	81,74	110,56
4	APK SMP/MTs/Paket B (%)	95,20	94,86	97,96	91,82	95,76	101,74
5	APK SLTA (%)	69,18	73,59	68,91	78,28	75,29	76,07
6	APM SD/MI/Paket A (%)	98,63	99,18	98,30	99,49	99,90	99,90
7	APM SMP/MTs/Paket B (%)	83,58	89,24	87,31	86,25	100,39	97,99
8	APM SLTA (%)	60,34	55,38	57,63	61,70	62,60	62,57

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan BPS Kab. Musi Rawas; BPS Prov. Sumsel

***Angka sangat sementara*

Indikator Rata-rata Lama Sekolah merupakan komponen penting dalam menentukan Indeks Pendidikan dan pendukung dalam Indeks Pembangunan Manusia. Indikator Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,69 sampai dengan tahun 2020 sebesar 7,52 atau mengalami peningkatan sebesar 0,83. Ada beberapa indikator mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seperti Angka Melak Huruf, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.

2) Kesehatan

Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IK: Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Persentase Kabupaten Musi Rawas Gizi Buruk dan Angka Kematian Ibu /100.000 KH. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam tabel 2.18.

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kematian bayi/1000 KH	10,60	8,87	13,47	6,46	3,98	3,1
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,18	67,26	67,34	67,59	67,86	68,14
3.	Persentase Balita gizi Buruk	0,15	0,15	0,090	0,070	0,75	0,45
4.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000/pddk)	169,85	171,84	102,96	164,86	96,01	94,01
5.	Penurunan Stunting	NA*	NA*	NA*	1.499	856	1.857

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya trend penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 sebesar 10,60 sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,1sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) juga mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 169,85 menjadi 94,01 pada tahun 2020.

Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 67,18 sampai dengan tahun 2020 sebesar 68,14. Peningkatan

tersebut didukung dengan peningkatan akses Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Primer (UKP) serta peningkatan preventif dan promotif. Sedangkan Gizi Buruk pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif.

Pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 berfluktatif. Pada tahun 2018, jumlah anak stunting sebesar 1.499 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 856 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah anak yang stunting meningkat kembali menjadi 1.857 jiwa. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan melalui dinas Kesehatan dan crosscutting dengan beberapa Perangkat Daerah dan stakeholders terkait, upaya penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu dengan program perbaikan gizi masyarakat.

3) Pertanahan.

Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Luas Lahan yang Bersertifikat.

Tabel 2.19

Capaiam Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Yang Bersertifikat	221.765,90	227.473,43	233.224,15	290.475,61	497.838,83	53.539.923

Sumber: Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2019 (Data Diolah)

Pada tabel dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4) Ketenagakerjaan

Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: Jumlah Penduduk yang Bekerja, Menurunnya angka pengangguran menjadi

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk yang bekerja	193.051	203.425	203.801	206.614	203.070	208.596
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,04	1,85	2,80	3,23	2,91	3,29
3.	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	197.071*	207.259	209.672	213.510	207.617	215.684

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun berfluktuatif dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019, dalam kata lain ini adalah nilai positif bagi kabupaten Musi Rawas dikarenakan penurunan tingkat pengangguran tersebut merupakan salah satu terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan TPT pada tahun 2020 kembali meningkat yaitu sebesar 3,29. Beberapa sektor produksi dan distribusi mengalami pembatasan aktivitas sehingga menyebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan dan kembali ke Kabupaten Musi Rawas.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, gedung kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

1) Kebudayaan

Ragam budaya di Musi Rawas, secara umum terbagi menjadi dua yaitu benda cagar budaya dan benda cagar budaya tak benda. Selain itu terdapat juga cerita rakyat,kuliner dan bahasa local. Sebagaimana daerah lain di provinsi Sumatera Selatan, kebudayaan Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi juga oleh budaya melayu, agama islam, agama hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

2) Seni

Capaian Kinerja Seni diukur dengan IKK : Jumlah Grup Kesenian. Pada tabel dapat dilihat bahwa jumlah Grup Kesenian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Kebudayaan KabupatenMusi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Group Kesenian	34	39	48	50	53	53

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

3) Pemuda dan Olahraga

Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Untuk jumlah Klub Olahraga per 10.000 dan jumlah gedung olahraga per 10.000 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara umum tetap dan tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Klub Olahraga per 10.000	26	26	26	26	26	26
2	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Aspek Pelayanan Publik terdiri atas 2 buah fokus yaitu:

a) Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib;

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaandan.

b) Fokus Layanan Urusan Pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan Pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah yaitu bidang urusan Pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja terhadap fokus layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan sebagai berikut :

2.3.1. Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA, Rasio guru: murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dapat dilihat pada Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas 2015-2019.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	106,80	97,04	98,41	99,89	100,64	105,99
2.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	106,4	98,49	95,03	99,26	99,75	97,99
3.	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI (%)	0,68	0,68	0,68	0,70	0,69	0,69
4.	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs (%)	0,43	0,43	0,43	0,46	0,43	0,43
5.	Rasio guru: murid SD/MI	1 : 12	1 : 12	1:15	1:20	1:22	1:20
6.	Rasio guru: murid SMP/MTs	1: 16	1: 16	1:20	1:25	1:30	1:23
7.	Rasio guru: murid per kelas rata- rata SD/MI	1:1,448	1:1,248	1:1,273	1:2,244	1:1,350	1:1.250
8.	Rasio guru: per kelas rata- rata murid SMP/MTs	1:2,215	1:2,180	1:2,090	1:2,002	1:2,359	1:2,148

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

2) Urusan kesehatan

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Musi Rawas Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas. Secara umum capaian kinerja

urusan kesehatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami penigkatan (dapat dilihat pada tabel 2.24).

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,63	7,70	11,39	12,71	12,82	7,80
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	1,40	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
5	Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	2,74	3,01	2,84	2,84	3,35	3,37
6	Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan	88,90	90	89,17	91,80	94,20	94,8
7	Cakupan desa kelurahan UCI	98,50	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Musi Rawas Gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	46,53	48,00	82,00	80,00	80,00	41,00
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,70	2,72	4.833,00	3.039,00	4.400,00	4.400,00
12	Cakupan kunjungan bayi	81,30	85,00	92,90	96,30	98,80	99,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

3) Urusan Pekerjaan Umum

a. Pekerjaan Umum

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan yang sangat tidak

kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

Berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) bahwa ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu N12 (ruas Maur-Terawas 36,20 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kab. Muratara-Terawas 9,3 Km), N13 (ruas Terawas-Batas Kota Lubuklinggau 24 Km), N15 (ruas Simpang Periuk-Muara Beliti13,5 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kota Lubuklinggau-Muara Beliti 9,88 Km), N16 (ruas Muara Beliti-Batas Kab. Musi Rawas 27,2 Km), dan N35 (ruas Batas Kab. Muba-Muara Beliti 78,26 Km). Jadi panjang Jalan Nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 148,64 Km. Sedangkan ruas Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ada 2 ruas yaitu P82 (ruas Simpang Periuk-Tugumulyo-Terawas 38 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas 33,28 Km) dan P83 (ruas Terawas-Taba Tinggi-Maur 56,25 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : Terawas-Batas Kab. Muratara 17 Km). Maka panjang Jalan Provinsi yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 50,28 Km. Kemudian Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km.

Berdasarkan Buku Saku Kabupaten Musi Rawas, Jalan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 151,96 Km, Jalan Provinsi 94,25 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. Dengan rincian Jalan Aspal sepanjang 262,733 Km, Koral sepanjang 208,358 Km, Jalan Rigid Beton sepanjang 54,664 Km, Pembukaan Jalan 29,29 Km, Jalan desa 1.753,49 Km dan Jalan Non Status sepanjang 63 Km. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 0,0022 Km/Ha. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada table berikut.

Grafik 2.1
Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

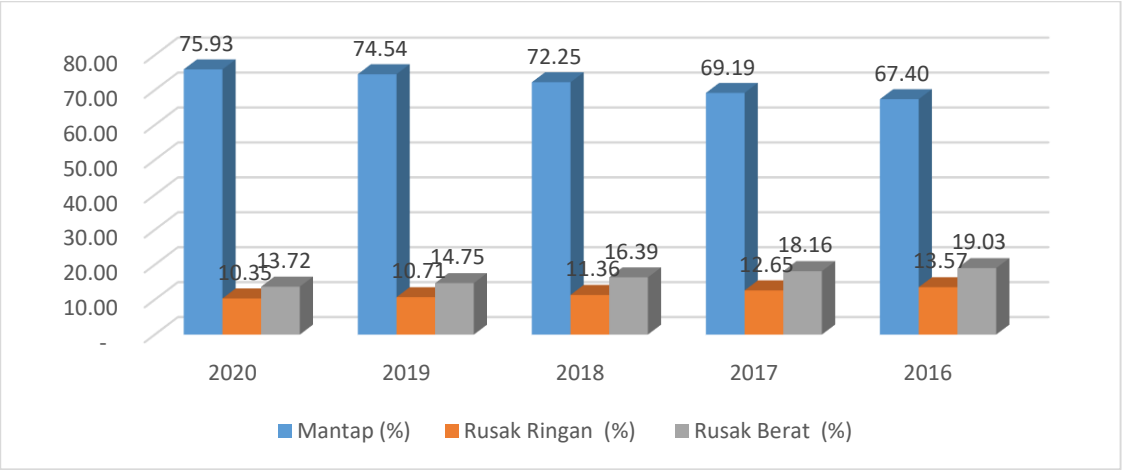

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Grafik 2.2
Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

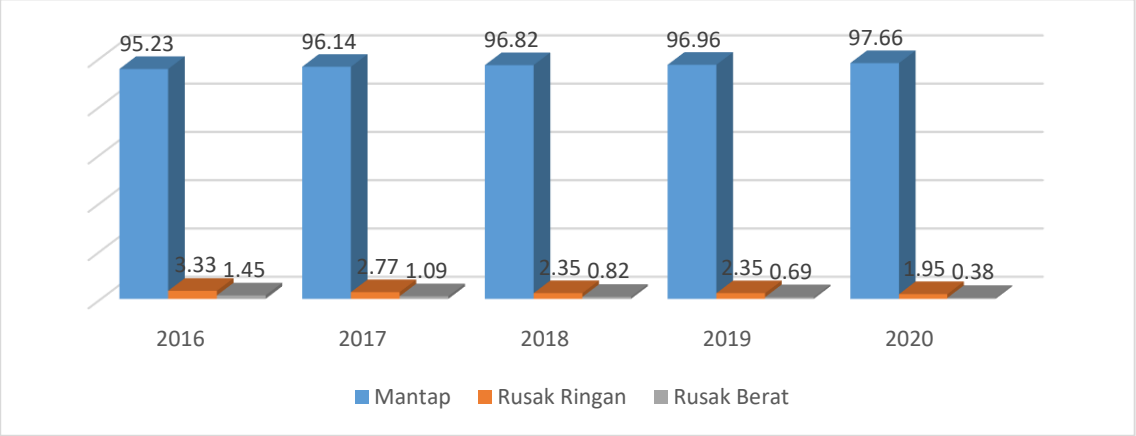

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, ada 2 (dua) DI Pusat (DI Kelingi-Tugumulyo 8.841 Ha dan DI Air Lakitan 9.500 Ha), 4 (empat) DI Provinsi (DI Air Deras I 1.461 Ha, DI Gegas 2.300 Ha, DI Air Satan 1.175 Ha dan DI Megang Tikip 1.077 Ha) dan 43 (empat puluh tiga) DI Kabupaten Musi Rawas (31 DI di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan 12 DI di wilayah Kab. Muratara).

Tabel 2.25
Daerah irigasi kabupten Musi Rawas

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKSI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras II	Sumber Harta		928
	DI Air Deras II (Aur)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	
	DI Air Deras II (Moyan)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	
2.	DI Megang Tikip	Purwodadi (Sumber Sari dan Wonosari)	Irigasi Teknis	912
3.	DI Air Tupak	Tugumulyo dan Purwodadi	irigasi Semi Teknis	778
4.	DI Ketuan Kecil/Bumi Agung	Muara Beliti (Bumi Agung)	irigasi Semi Teknis	593
5.	DI Pelita Jaya	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	400
6.	DI Air Kelingi SP II	Muara Kelingi	irigasi Semi Teknis	400
7.	DI Jajaran Baru	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	360
8.	DI Sri Kemuning	STL Ulu Terawas (Srimulyo)	irigasi Semi Teknis	360
9.	DI Air Nangka	Muara Lakitan (Semeteh)	irigasi Semi Teknis	360
10.	DI Sukamana	STL Ulu Terawas (Sukamana dan Kosgoro)	irigasi Semi Teknis	314
11.	DI Air Cecar SP III	BTS Ulu (Cecar SP III)	irigasi Semi Teknis	300
12.	DI Sukakarya	STL Ulu Terawas (Sukakarya)	irigasi Semi Teknis	250
13.	DI Sawah Pangeran	Mura Lakitan (sawah Pangeran)	irigasi Semi Teknis	250
14.	DI Sukaraya	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	246
15.	DI Sukarame	Sumber Harta (Sukarame)	irigasi Semi Teknis	200
16.	DI Dangku	Megang Sakti (dangku dan Sendang Sari)	irigasi Semi Teknis	200
17.	DI Air Kambil	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
18.	DI Pelita Jaya I	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
19.	DI Setia Marga	Mura Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
20.	DI Kosgoro	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	160
21.	DI Paduraksa	STL Ulu Terawas (Paduraksa)	irigasi Semi Teknis	150
22.	DI Sidomulyo	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	100
23.	DI Marga Baru	Muara Lakitan (Marga Baru)	irigasi Semi Teknis	100
24.	DI BPD Pendo	Purwodadi	Irigasi Teknis	361
25.	DI Kasang Tinggi	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	300
26.	DI Pelita Jaya II	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
27.	DI Sungai Pinang	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
28.	DI Paduraksa II	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	110
29.	DI Megang Sakti V	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
30.	DI Wonosari	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	50
31.	DI Q2 Wonorejo	Tugumulyo	irigasi Semi Teknis	30
	TOTAL			9412

Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

b. Penataan Ruang

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang dimanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Maka struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kecamatan Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional.Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Peta struktur ruang Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2.8

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas

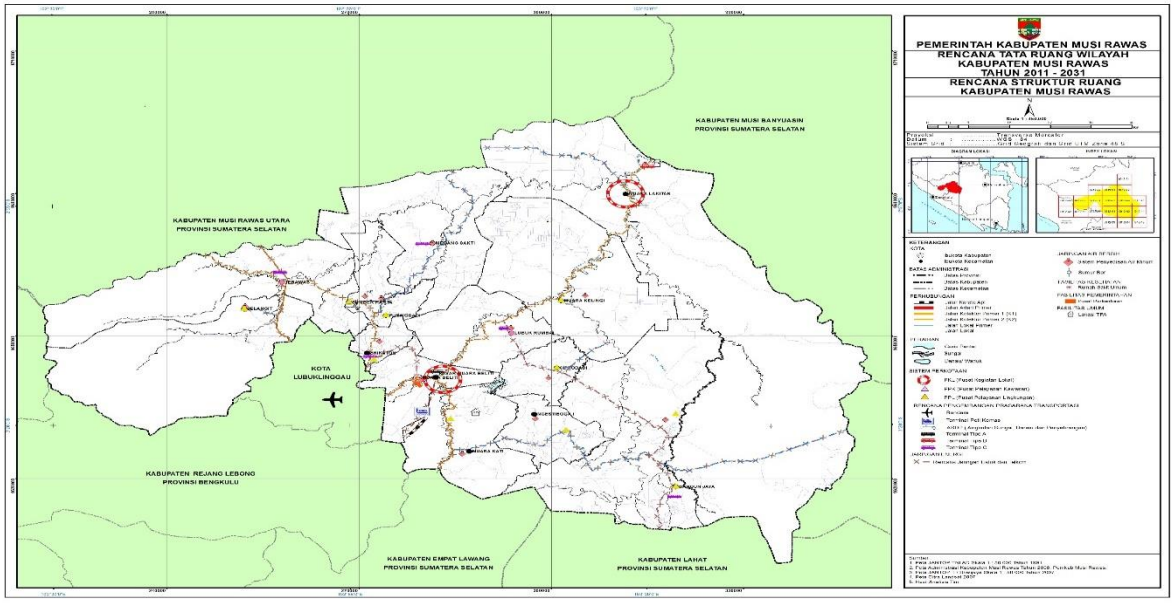

Pada gambar di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, maka arahan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

   Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

   a. Kota Muara Beliti;
   b. Muara Lakitan.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

   Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :

   a. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung dengan Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:
      1) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
      2) Kecamatan Selangit, dan
      3) Kecamatan Sumber Harta
   b. Megang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :
      1) Kecamatan Purwodadi dan
      2) Kecamatan Tugumulyo
   c. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;
      1) Kecamatan Tuah Negeri
      2) Kecamatan Muara Kelingi
      3) Kecamatan Jayaloka
      4) Kecamatan Sukakarya
      5) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
      6) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut:

a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugumulyo)
b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
d. Selangit (Kecamatan Selangit)
e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabelberikut:

Tabel 2.26
Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan

NO	KECAMATAN	HIRARKI	FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Megang Sakti	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
5	Simpang Semambang/ Tuah Negeri	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
6	Selangit	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Purwodadi	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	X
10	T.P. Kepungut	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
11	Jayaloka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	BTS. Ulu	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
13	Sukakarya	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
14	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031

Keterangan :

1. Pemerintah Kabupaten
2. Pemerintah Lokal
3. Ditribusi dan Koleksi
4. Industri
5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar
6. Jasa Persewaan dan Perbankkan,
7. Jasa Koperasi Unit Desa
8. Jasa Hukum dan Konsultasi
9. Pariwisata dan Jasa penginapan
10. Pendidikan
11. Kesehatan
12. Listrik
13. Telekomunikasi
14. Irigasi
15. Air Minum Bersih
16. Air Limbah

PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

Dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy di Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) sesuai dengan Perpres 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional melalui Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 88 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Informasi (JIGD) Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, telah disusun Roadmap Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah, koordinasi secara intensif dengan peningkatan kapasitas, peran dan fungsi antara stakeholder terkait, peningkatan kapasitas

dan jumlah PPNS melalui pelatihan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang, penambahan SDM planologi dan tenaga GIS dalam bidang penataan ruang dan peningkatan koordinasi dengan sektor terkait

c. Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2016 sebesar 69,58% meningkat 12,42 % pada tahun 2017 menjadi 78,22% dan 89,51% di tahun 2018 atau meningkat sebesar 14,43% berikutnya pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,08% atau 94,06% dan pada tahun 2020 menjadi 97,51%. Data akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

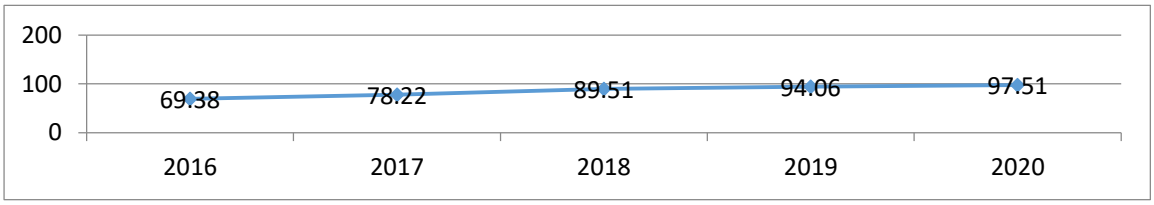

Sumber : Dinas Pu Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan

d. Air Minum

Akses air minum yang layak Kabupaten Musi Rawas hingga tahun 2020 mengalami penigkatan yaitu sebesar 98,04%. Nilai akses air bersih yang layak Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016-2020 dapat lihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Air Minum

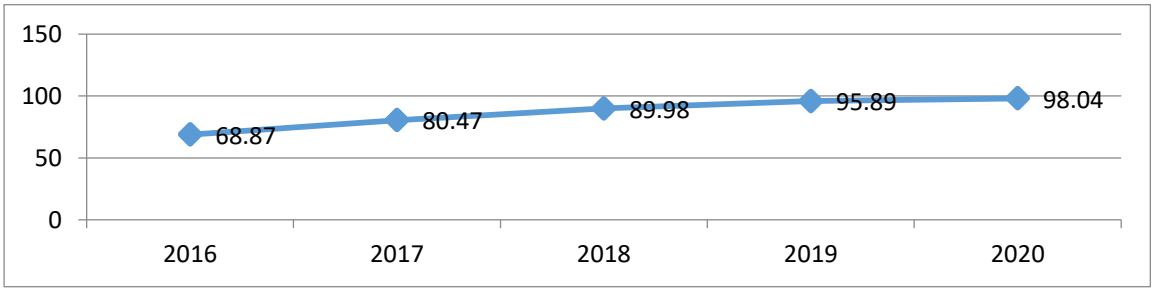

Sumber :Dinas Pu Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan

e. Rumah Tidak Layak Huni

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas setiap tahun mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2016 sebesar 64,97% menjadi 71,80% pada tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:

Grafik 2.5

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

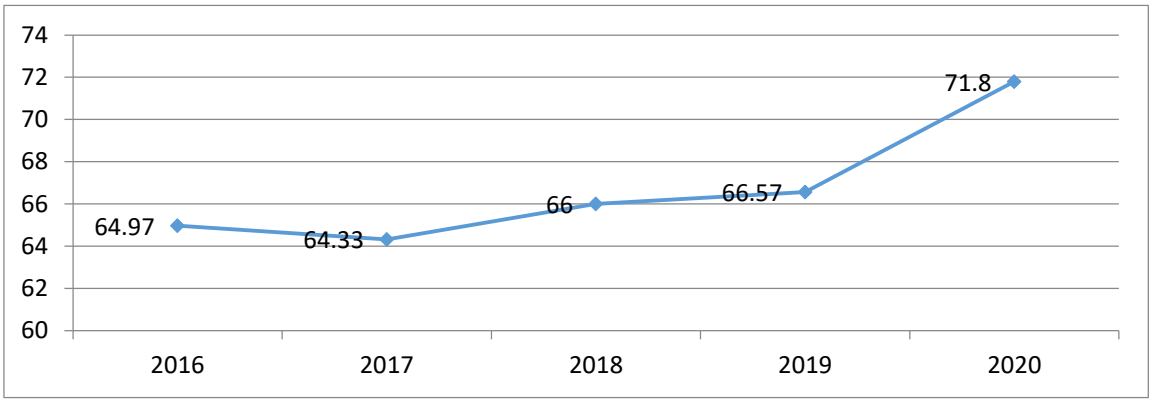

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2020

4) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 Angka Kriminalitas mencapai 7/10.000 penduduk.

Grafik 2.6

Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016-2020

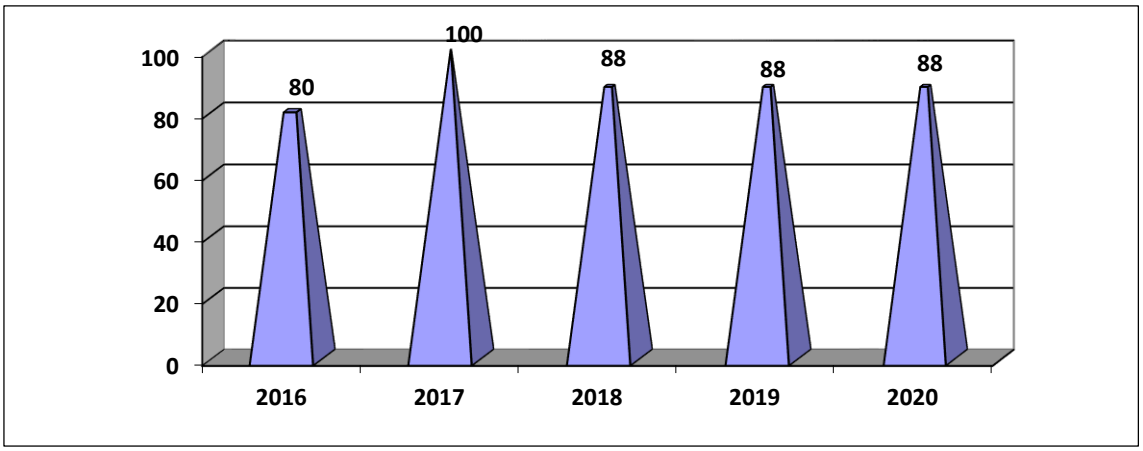

Sumber : Data SatPolPP Kabupaten Musi Rawas 2019

5) Urusan Sosial

Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan social dan perlindungan sosial. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang di Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2017 sebanyak 4 buah, sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani mencapai 50,47 % pada tahun 2019. Data urusan sosial dapat diliahat pada tabel berikut :

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016- 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)	5,04	5,17	16,06	30,45	50,47
2	Angka kemiskinan (%)	14,3	14,24	13,76	13,37	13,50

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2020

6) Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020

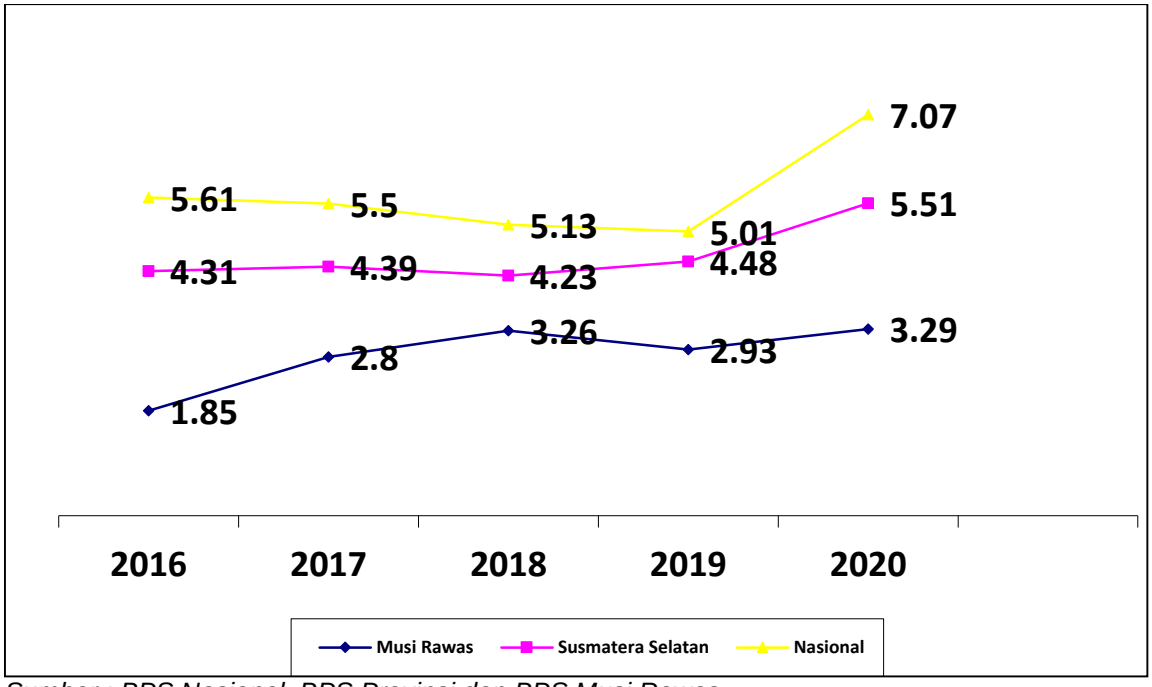

Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi dan BPS Musi Rawas

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, hal ini adalah nilai positif bagi kabupaten Musi Rawas. Apa bila dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional, TPT Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 jauh lebih baik yaitu 3,29 sedangkan Provinsi sebesar 5,51 dan nasional 7,07.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 74,14 lebih besar dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi yang mencapai sebesar 71,59. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupatenpada tahun 2020 mencapai sebesar 71,40 lebih besar dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi sebesar 68,65, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KABUPATEN	NA	74.14	74.35	71.59	71.40
2	PROVINSI	NA	71.59	69.50	68.69	68.65

Sumber : BPS Musi Rawas 2020

7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diukur dengan indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan setiap tahun semakin meningkat mencapai 56 persen di Tahun 2020. Sedangkan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengaplikasikan PPRG	30	20	45	70	56
2)	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Keluarga (%)	41	41	42	43	40
3)	Rasio KDRT (%)	0,0009	0,0015	0,003	0,0005	0,00055
4)	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,013	0,0329	0,0353	0,01	0,012
5)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (Nilai)	-	-	Pratama	Madya	Pratama

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas 2020

8) Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Grafik 2.8

Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2020

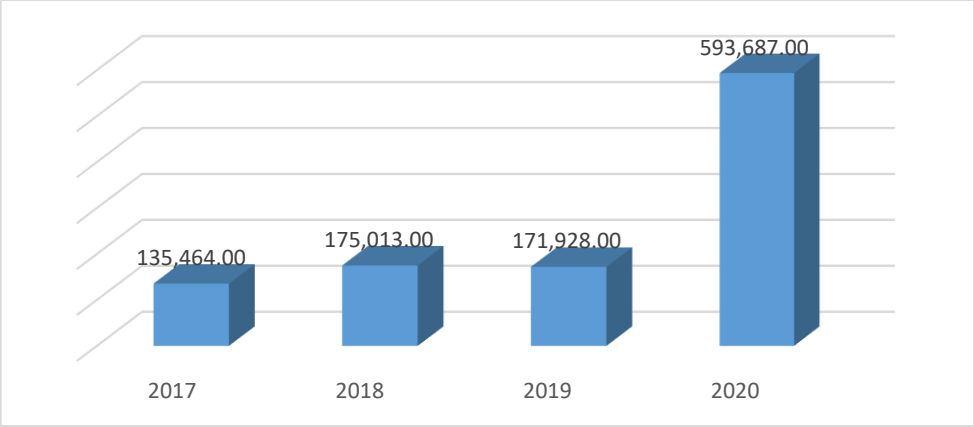

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Dari grafik di atas diketahui bahwa Kabupaten Musi Rawas di tahun 2016 ketersediaan pangan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 135.464 ton meningkat pada tahun 2019 menjadi 593.687 ton.

9) Pertanahan

Secara umum Kinerja Pertanahan yang diukur dengan Luas Lahan yang Bersertifikat di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikanpada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 luas tanah yang bersertifikat meningkat lebih signifikan sebesar 53.539.923 sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel 2.30

Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Yang Bersertifikat	221.765,90	227.473,43	234.297,19	290.475,61	497.838,83	53.539.923

Sumber: BPN, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Diolah)

10) Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas untuk urusan penangan sampah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 24,26 persen, dalam realisasinya sudah melebihi target sebesar 24,08 persen dengan capaian 101 persen.

Grafik 2.9

Persentase Penanganan Sampah Tahun 2016-2020

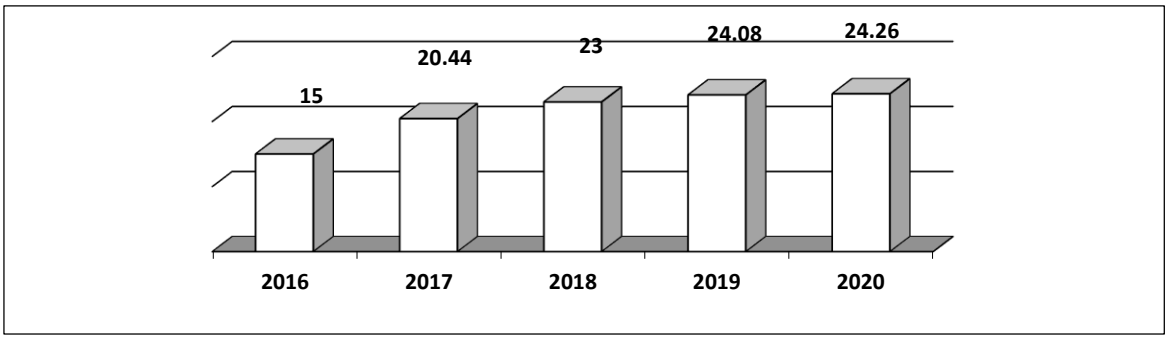

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

b. Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun terus mengalami kemajuan dari tahun 2016-2020, untuk tahun 2020 dengan capaian realisasi sebesar 60,98%, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10

Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

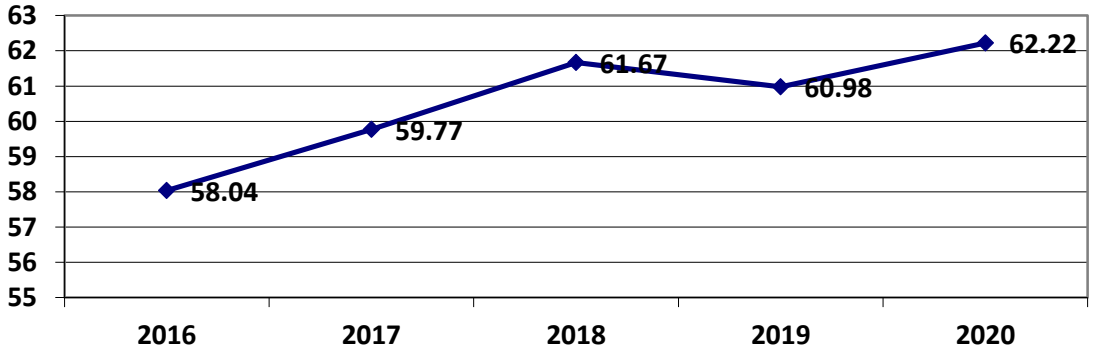

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP sebesar 99,44 %, untuk lebih lajut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11

Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2016-2020

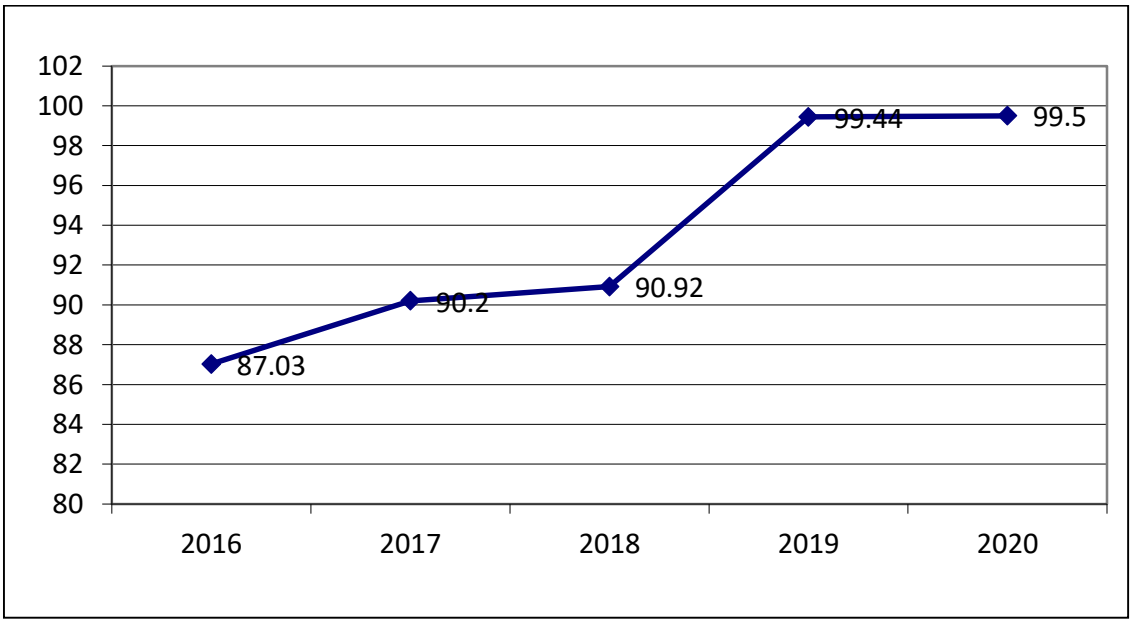

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

12) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif, Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG dan Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Aturan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	52	38	97	98,92	98,92
2	Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG (%)	60	64	64,00	71,42	21,43
3	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Aturan	0	0	65,00	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

13) Penanggulangan Bencana

Kabupaten Musi Rawas memiliki wilayah rawan bencana yang terdiri dari Rawan Banjir/Tanah Longsor, Rawan Angin Putting Beliung dan Rawan Kebakaran Hutan dan Ladang. Wilayah sebaran rawan bencana Banjir di Kabupaten Musi Rawas dapat terjadi pada beberapa kecamatan yaitu: Muara Lakitan, Muara Kelingi, BTS Ulu, Megang Sakti, STL Ulu Terawas, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit dan Tiang Pumpung Kepungut

Wilayah rawan bencana Angin Puting beliung dapat terjadi pada di beberapa Kecamatan yaitu : Muara Lakitan, Megang Sakti, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit, Tiang Pumpung Kepungut, Tugumulyo, Muara Beliti dan Jayaloka

Sedangkan Wilayah rawan Karhutlah di Kabupaten Musi Rawas dapat terjadi pada di beberapa Kecamatan yaitu : Muara Lakitan, Megang Sakti, Tuah Negeri, Sumber Harta, Purwodadi, Selangit, Tiang Pumpung Kepungut, Tugumulyo, Muara Beliti dan Jayaloka.

Sebagai daerah yang mempunyai potensi bencana alam Kabupaten Musi Rawas melakukan langkah-langkah monitoring untuk menekan terjadinya bencana alam. Selama tahun 2018-2020 bencana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dapat dililhat pada table berikut.

Tabel 2.32

Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2018-2020

No	Jenis Bencana	2018	2019	2020
1	Banjir	19	18	26
3	Gempa Bumi	-	-	-
4	Tanah Longsor	-	3	6
5	Kebakaran Hutan	-	-	-

Sumber: Mura Dalama Angka 2021 BPS Mura

14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terbaik, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Capaian ini menunjukkan keberhasilan cukup baik, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.12

Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalance rate/CPR) %

Tahun 2016-2020

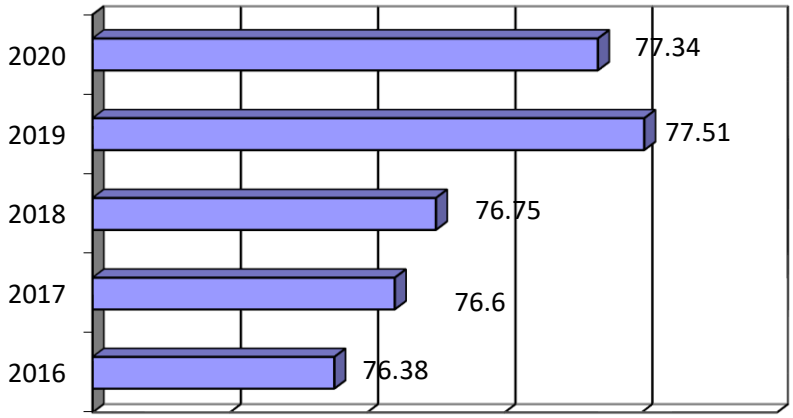

Grafik 2.13
Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2016-2020

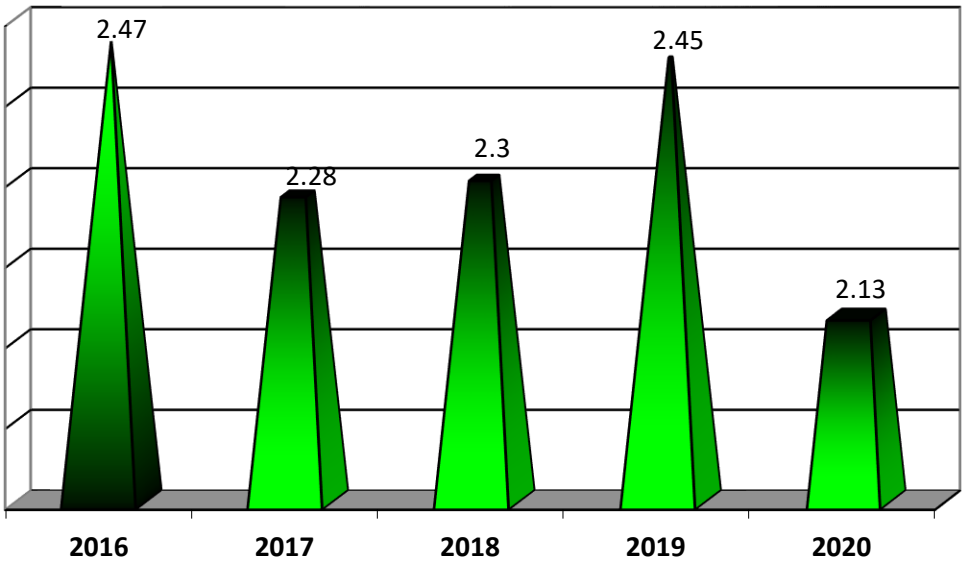

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Capaian angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dari grafik di atas pada tahun 2020 sebesar 2,13 bila di bandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 2,15 belum memenuhi target.

15)Perhubungan

Pada urusan perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 memiliki 5 terminal yang masing – masing berkapasitas 450 kendaraan dan daya tampung kendaraan sebesar 50 kendaraan, selain terminal Kabupaten Musi Rawas juga memiliki pelabuhan sungai sebanyak 3 pelabuhan sungai. Sedangkan angka kecelakaan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.33

Jumlah Lakalantas dan Korban yang Meninggal

Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Laka	Jumlah Meninggal
1	2016	99	66
2	2017	64	55
3	2018	57	60
4	2019	96	63
5	2020	48	32

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020

16)Komunikasi dan Informatika

Untuk menjadikan kabupaten musi rawas yang lebih maju dan bersaing maka bidang komunikasi dan informatika adalah hal yang paling berpengaruh untuk mejudkan keberhasilan tersebut diantara dengan keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Langka ini didukung dengan adanya peningkatan jaringan komunikasi, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada garafik berikut:

Grafik 2.14

Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Tahun 2016-2020

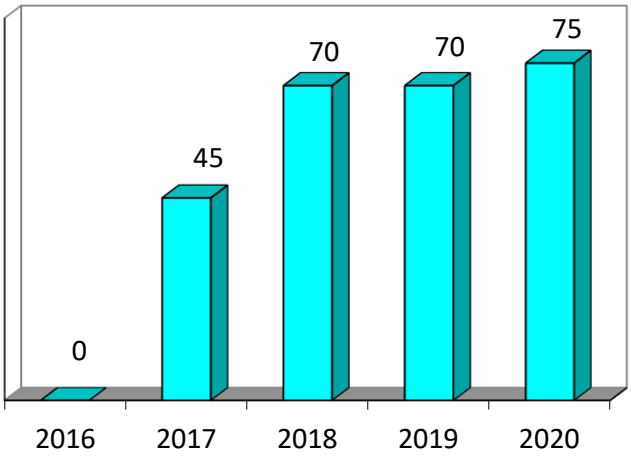

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan atau samakin membaik, ditahun 2016 persentase koperasi aktif sebesar 79,87 %, meningkat menjadi 79,91% di tahun 2017 meningkat pada tahun 2018 menjadi 79,94% akan tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 62,69% dan 62,80%, dan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.15
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

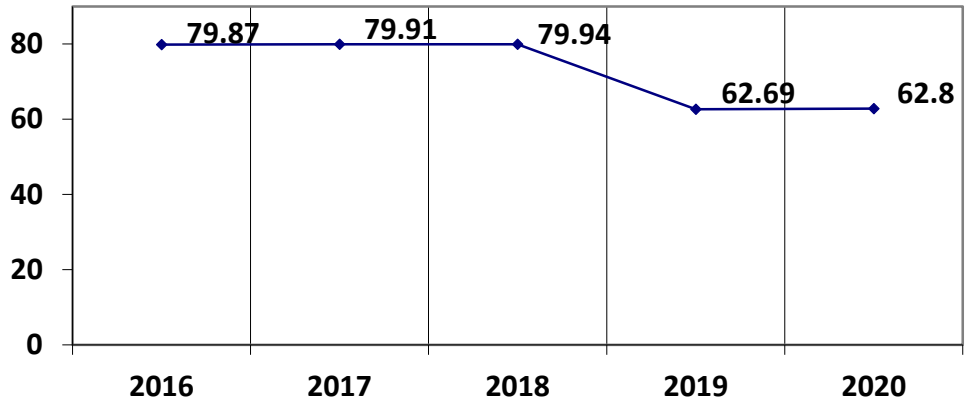

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2020

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)pada saat ini merupakan ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Untuk itu Kabuapaten Musi Rawas terus meningkatkan pertumbuhan UKM, pada saat ini pertumbuhan persentase UKM di Kabuapten Musi Rawas semakin baik dan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16

Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2016-2020

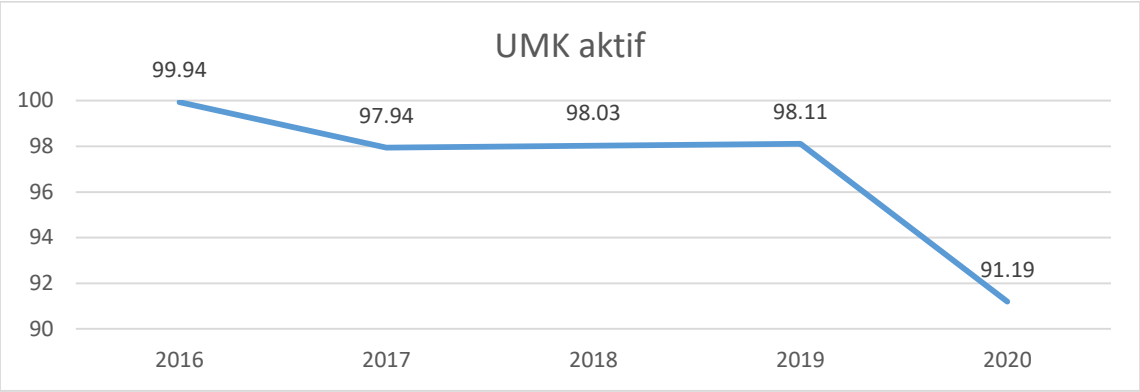

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2020

18) Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya pada nilai investasi berskala nasional, seperti tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2.17

Jumlah nilai Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun)

Tahun 2016-2020

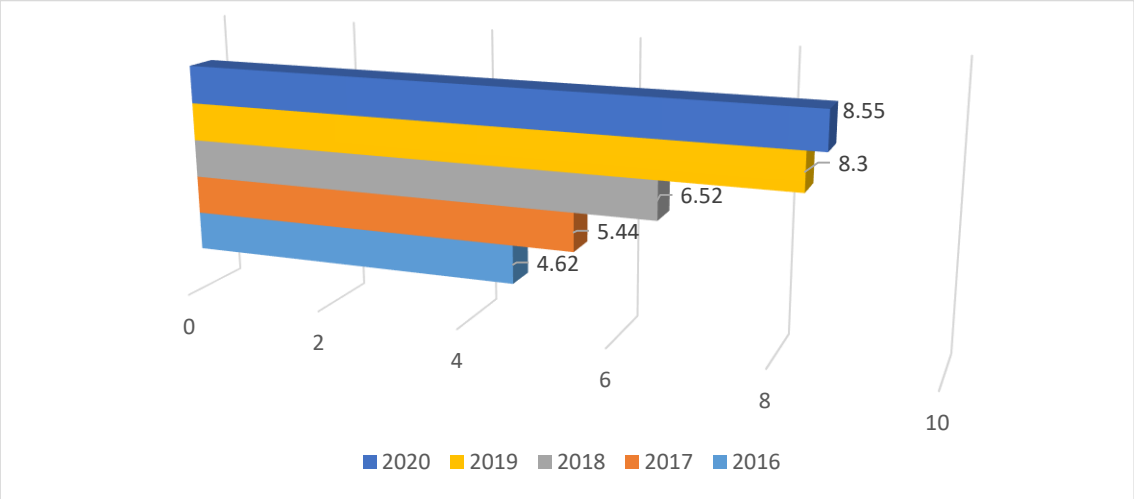

Sumber : *DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Tahun 2020*

19) Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu prioritas utama. Untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas dan trampil banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diantaranya dengan mendirikan organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga. Sampai dengan tahun 2019, jumlah prasarana olahraga sebanyak 3 unit dan organisasi kepemudaan mencapai 18 organisasi.

20) Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik mengevaluasi dan menyajikan informasi guna untuk mendukung kebijakan nasional dan provinsi. Penyediaan data yang terintegrasi dan selalu di update merupakan modal utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya.

21) Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan beberapa festival seni budaya yang didalamnya mengangkat kesenian lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali kesenian budaya lokal yang mulai disaingi dengan kebudayaan asing. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019 Kabupaten telah melaksanakan 25 kali festival seni budaya.

22) Perpustakaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: jumlah perpustakaan, persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, rasio jumlah pengunjung perpustakaan dan persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik.Tahun 2020 capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas cenderung meningkat, dapat dilihat dari data series pada tabelcapaian kinerja urusan perpustakaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah minat baca masyarakat

Kabupaten Musi Rawas meningkat didukung juga oleh fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	115	169	465	465	495
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	40,50	41,00	45	42,57	49,52
3.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	11,50	12,00	15	15,58	9,20
4.	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

23) Kearsipan

Kearsipan secara umum merupakan proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Kabupaten Musi Rawas dalam urusan kearsipan mengalami perbaikan dan peningkatan di setiap tahun. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola kearsipan, persentase OPD yang menerapkan kearsipan secara baku dan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku	54,00	52,00	60,00	60,00	60,00
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

2.3.2. Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmi-grasian. Indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan pilihan terurai kedalam matrik-matrik berikut ini:

1) Urusan Pertanian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan pertanian diukur dengan indikator: kontribusi sektor pertanianterhadap PDRB (%), produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, ubikayu ton/ha dan produktivitas sayuran dapat ditunjukan pada tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020.

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	32,67	31,97	31,38	30,21	29,31	30,16
2	Produksi padi (ton)	276,918	345.624	388,329	402,477	378,862	357.576
3	Produksi Jagung (ton)	9.014	42.275	53,874	71,339	29,496	80.553
4	Produksi Kedelai (ton)	3.192	3.527	7.540	5.249	7.640	77
5	Produksi Ubi Kayu (Ton)	39.621	46.602	212.623	62,985	22,184	22.516
6	Produksi Cabe (Kuintal)	1.977	9.785	2.757	39.060	13,227	30.591
7	Produksi Bawang Merah (Kuintal)	0	2.908	428	4.170	438	1.220
8	Produksi Nangka (Kuintal)	11.649	9.149	9.141	15.241	6.765	21.500
9	Produksi Jeruk (Kuintal)	49.846	24.359	38.817	56,983	43.655	40.767
10	Produksi Durian (Kuintal)	37.288	32.195	33.551	58.008	57.029	75.226
11	Produksi Duku (Kuintal)	8.388	10.168	1.348	12,414	23.309	20.723
12	Produksi Alpukat (Kuintal)	4.023	3.936	6.374	9.457	3.909	7.787
13	Produksi Daging (Ton)	2.880	3.010,35	3.035,00	3.131,97	3.162,17	3.192,66
14	Produksi Telur (Ton)	0	1.150,60	1.381,31	1.197,08	1.491,60	1.691,46

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dan Musi Rawas Dalam Angka 2021

2) Urusan Pariwisata

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (Orang/Tahun)	68.186	72.624	54.380	46.003	48.892	10.100
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,24	0,033	0.021	0.018	0.043	-

Sumber:Data BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

3) Urusan dan Perikanan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kelautan dan Perikanan diukur dengan indikator : Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	34.120,16	53.485,81	65.706,93	70.334,64	76.321,94	78.190,34
2	% Capaian target	21,52	33,74	115.14	116.31	119.10	115,14
3	Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun)	33,53	34,5	34,85	35,08*	36,49*	36,49*

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas hingga 2020 itu besar 90,19%. Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.18

Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Tahun 2016-2020

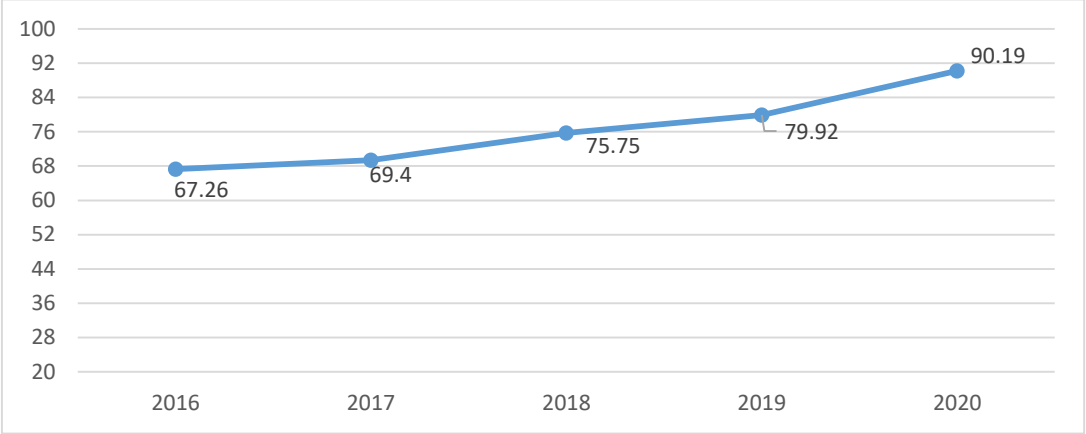

Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

5) Urusan Perdagangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan.

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,85	7,68	7,81	8,73	9,2*	7,87
2	Prosentase Sarana dan Prasarana Pasar Yang Layak (%)	-	45,76	49,15	57,63	64,41	44,07
3	Prosentase Usaha Perdagangan yang Memiliki Izin Usaha (%)	-	38,87	38,87	53,84	50,97	-
4	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	-	4.852				-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

6) Urusan Perindustrian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,22	12,64	13,51	13,94*	12,66
2	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	78,47	54,63	50,70	50,98	46,45
3	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	8,42	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

**) Angka sementara*

7) Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja : Transmigrasi swakarsa dan Transmigrasi umum (KK), prosentase Transmigrasi Swakarsa. Pada 2012 penempatan awal transmigrasi umum sebanyak 85 KK, pada tahun 2013 sebesar 115 KK dan untuk tahun selanjutnya tidak ada penempatan transmigrasi lagi.

Untuk target transmigrasi swakarsa dan transmigrasi umum pada tahun 2016-2020 direncanakan untuk lokasi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) atau Kawasan Perkotaan Baru (KPB) karena diperkirakan apabila terlaksana pembangunan KTM/KPB tersebut maka harus melaksanakan transmigrasi sisipan sebagai syarat tambahan. Namun ternyata pada tahun tersebut Kegiatan KTM/KPB yang menggunakan dana pusat tidak terlaksana sehingga target indikator tidak ada data penempatan.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Transmigrasi swakarsa KK)	-	-	-	-	-
2	Transmigrasi umum (KK)	-	-	-	-	-
3	Prosentase Transmigrasi Swakarsa (%)	2,77	2,77	2,77	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019
Keterangan: Untuk Tahun 2016 – 2020 Tidak ada Penempatan Transmigrasi lagi

2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Diberlakukannya penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan keberhasilan perencaan Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut dari tahun 2013, 2014, 2015 dan khusunya pada tahun 2016 Kabupaten Musi Rawa mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan atau Anugerah Pangripta Sriwijaya. Ditahun 2017 pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali mendapatkan Anugerah Pangrita Sriwijaya sebagai juara II ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dan kembali menjadi terbaik satu (1) pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2020 masuk dalam 10 besar terbaik tingkat Nasional.

2) Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian Kabupaten Musi Rawas telah memperoleh predikat WTP di tahun 2014, 2018, 2019 dan 2020. Penghargaan WTP merupakan penghargaan tertinggi akuntabilitas keuangan dari kementerian keuangan Republik Indonesia.

3) *Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan*

Dalam peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Musi Rawas, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus melaksanakan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2018 Persentase penyelesaian administrasi kepangkatan mencapai 111,09% dari target RPJMD 97,76%.

4) *Urusan Pengawasan*

Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan setiap tahunnya,capaian ini diukur dengan indicator Persentase OPD dengan nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kategori B, 60,08 ditahun 2017 mengalami peningkatan di tahun 201864,34 terus meningka menjadi 65,15 pada tahun 2019.

Selain itu hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang di lakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019, Kabupaten Mendapat prestasi sangat tinggi atau dengan skor 3,1637.

5) *Penelitian dan Pengembangan*

Sebagai daerah yang menyandang status daerah tertinggal,ini membuat Pemerintah Kabuaten Musi Rawas melakukan riset dalam pengentasan daerah tertinggal. Capaian ini 1 dari target capaian yang ditergetkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 sebanyak 2 riset. Adapun indikator kinerja lain yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan adalah, Jumlah UKM/KWT yang Dibina Menggunakan Teknologi Tepat Guna dan Jumlah Inovasi daerah.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 - 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM/KWT yang dibina menggunakan teknologi tepat guna	2	1	1	2
2	Jumlah Inovasi Daerah	1	1	2	1

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

6) Urusan Sekretariat Dewan

Sekretarian Dewan berfungsi sebagai pemberi layanan administratif dalam hal ini memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum baik itu perda dan keputusan DPRD yang diputuskan. Pada tahun 2017 produk hukum dan keputusan DPRD yang diputuskan sebanyak 28 perda dan 100 keputusan, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capin Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2018

No	Indikator	Terget RPJMD (Tahun 2018)	Ralisasi Tahun 2018	Capaian (%)
1	Jumlah Perda yang di tetapkan	30	28	93,33
2	Keputusan DPRD yang diputuskan	120	100	83,33

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1) Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi

yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per-kapita Kabupaten Musi Rawas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 2.40), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2.44
PDRB Perkapita *(Ribu Rp)* Kabupaten Musi Rawas 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB	37.915,95	40.258,51	43.838,89	47.211,86	47.279,70
2	ADHK 2010	29.878,75	30.971,77	32.379,14	33.878,14	33.588,92

Sumber : : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 yang paling tinggi didominasi oleh sektor Pertanian, pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Bidang Pertanian tercatat sebesar 31,97 persen. Secara nominal terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 30,16 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, pada tahun 2016 sebesar 31,01 persen sampai dengan tahun 2020 mencapai sebesar 30,80 persen.

Tabel 2.45
PDRB Per Sektor *(Persen)* Kabupaten Musi Rawas 2016 - 2020

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.97	31.38	30.23	29.28	30,16
Pertambangan dan Penggalian	31.01	30.4	31.55	32.54	30,80
Industri Pengolahan	12.7	13.35	13.51	13.48	14,01
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	14,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0,01
Konstruksi	6.09	6.08	6.07	5.97	5,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.83	8.6	8.73	8.92	9,29
Transportasi dan Pergudangan	0.48	0.47	0.47	0.48	0,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.34	0.32	0.33	0.35	0,35

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
Informasi dan Komunikasi	0.3	0.32	0.32	0.33	0,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.69	0.68	0.68	0.66	0,64
Real Estate	1.37	1.37	1.37	1.41	1,45
Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.51	2.4	2.18	2.05	2,11
Jasa Pendidikan	3	2.83	2.78	2.79	2,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.73	0.7	0.69	0,76
Jasa lainnya	0.99	1.02	1.01	1.02	1,06
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
**) Angka Sementara*

2) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan. Pada tahun 2016 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan pada tahun 2016 sebesar 75 mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 mencapai sebesar 81%.

Tabel 2.46
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	75	77	79	81	81

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

3) Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan dengan indikator Realisasi Nilai Investasi. Pada tahun 2016, Realisasi Nilai Investasi sebesar 4,62 mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 sebesar 8,62.

Tabel 2.47
Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi RawasTahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Nilai Investasi	4,62	5,44	6,52	8,30	8,62

Sumber: Dinas Penanaman Modan Perizinan Terpadu 2018

4) Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan Indikator Rasio terpenuhinya formasi pegawai, dan Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan. Pada tahun 2016, indikator Terpenuhinya Formasi Pegawai sebear 109,56 setiap tahunnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 mencapai 77,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya formasi kebutuhan pegawai tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pada beberapa tahun mengalami pengurangan formasi (moratorium pegawai). Sedangkan Indikator Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan pada tahun 2016 sebesar 133,33 mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2020 mencapai 133,49.

Tabel 2.48

Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio terpenuhinya formasi pegawai	109,56	97,95	93,91	77,34	77,34
2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan	133,33	107,60	64,94	133,49	133,49

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Rawas

a. Capaian Standar Pelayanan Mininal (SPM)

a) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tabel 2.49

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS	%	100	98.76	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang	%	100	100,00	100	98,76

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	92,25	100	100,00

Urusan Pendidikan selama tahun 2019 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 449.814.719.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 380.615.132.105 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.50
Alokasi Anggaran Tahun 2019

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	449.814.719.800	380.615.132.105	84,62 %

Urusan Pendidikan selama tahun 2020 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 389.704.373.073,- dengan realisasi sebesar Rp. 377.909.115.273,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.51
Alokasi Anggaran Tahun 2020

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	389.704.373.073,00	377.909.115.273,00	96,97 %

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel 2.52
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	100	97	100	92,4
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	%	100	94	100	95
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	99	100	99,2
4	Pelayanan kesehatan balita	%	100	99	100	90
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	97,3
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	91	100	83
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	83	100	93,1
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	86	100	86
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100	85	100	85
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	91	100	99
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	34
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus-HIV)*	%	100	98	100	54,4

Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Musi Rawas melaksanakan program yang terdiri dari 19 (sembilan belas) program dan 85 (delapan puluh lima) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 163.986.989.300 (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 67.019.185.000 (enam puluh tujuh milyar sembilan belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 96.949.804.300 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah).

Tabel 2.53

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 219

Uraian	Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja tidak langsung	67.019.185.000	59.957.839.485	89, 46 %
Belanja langsung	96.949.804.300	83.047.299.374	85,66 %
Total	163.968.989.300	141.005.138.859	85,99 %

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dana sebesar Rp. 211.996.747.036 (dua ratus sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah). Alokasi anggaran dan realisasi perjenis belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.54

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja operasi :			
	- Belanja Pegawai	69.312.327.807	65.797.315.022	94,93
	- Belanja Barang dan Jasa	74.956.226.655	61.684.118.940	82,29
2	Belanja Modal	67.728.192.574	62.352.842.094	92,06
Total		211.996.747.036	189.834.276.056	89,55

Pada Tahun 2020, terdapat 18 Program dan 82 Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program dan Kegiatan tersebut hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

c) Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum					
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	95,89	100	98,04
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dosmetik					
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dosmetik	%	100	94,06	100	98,32

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 141.046.547.855,00. Anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA– PD) 1.03.02.01 tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor 1.03.02.01 tanggal 5 September 2019.

Tabel 2.55
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	4.639.193.205,00
2	Belanja Tidak Langsung	17.308.903.000,00
3	Belanja Langsung	123.737.644.855,00
SURPLUS / (DEFISIT)		**(136.407.354.650,00)**

Dari dana tersebut, anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum adalah sebesar Rp. 24.248.495.205,-. Selain dana APBD, DPU CKTRP juga mendapat kucuran dana dari APBN dan dana dari APBD Provinsi, DAK Reguler dan DAK Afirmatif. Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung

penerapan dan pencapaian SPM ini dapat dilihat di Bab III Program dan Kegiatan.

Anggaran Pendapatan DPU CKTRP berasal dari hasil penerimaan Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Lain-lain BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas yang terealisasi sebesar Rp.

4.360.507.056,00 dari target sebesar Rp. 4.639.193.205,00. Operasional BLUD SPAM juga mendukung penerapan SPM untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh pagu Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 4.655.406.080,- dan pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 123.397.914.649.- Anggaran tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA–PD) 1.03.02.01 tanggal 18 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor 1.03.02.01 tanggal 19 September 2020.

Tabel 2.56
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	4.655.406.080
2	Belanja Tidak Langsung	13.067.494.987
3	Belanja Langsung	110.330.419.662
SURPLUS / (DEFISIT)		**(118.742.508.569)**

Dari dana tersebut, anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum adalah sebesar Rp..30.387.444.342,-. Selain dana APBD, DPU CKTRP juga mendapat kucuran dana dari APBN dan dana dari APBD Provinsi, DAK Reguler dan DAK Afirmatif. Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM ini dapat dilihat di Bab III Program dan Kegiatan.

Anggaran Pendapatan DPU CKTRP berasal dari hasil penerimaan Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Lain-lain BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas yang terealisasi sebesar Rp. 4.782.052.042,- dari target sebesar Rp. 4.665.406.080,- Operasional BLUD SPAM juga mendukung penerapan SPM untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

d) Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota	%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota	%	100%	100%	100%	100%

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2019 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.240.000.000.000,- dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.57
Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan
Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1.	**Program Pengembangan Perumahan** Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu	3.240.000.000.000,-	APBD

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2020 telah mengalokasikan dana dengan realisasi sebagai berikut

Tabel 2.58
Rincian Anggaran, Program Dan Kegiatan
Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	**Program Pengembangan Perumahan** - Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (APBD) - Peningkatan kualitas perumahan swadaya (DAK)	Rp. 6.946.540.913,- APBD = Rp.3.301.989.913,- DAK = Rp.3.644.551.000,-	APBD / APBN (DAK)

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kab/Kota	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	58,07%	100%	100%
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	58,07%	100%	100%
		Jumlah warga	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2019		2020	
		Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				

Alokasi anggaran tahun 2019 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal berjumlah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.59
Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
I	**PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM,KETENTERAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
	- Jumlah penegakan peraturan daerah dan peratuaran kepala daeah di Kabupaten/Kota	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	33.396.000,-
			2. Penegak Peraturan Perundang-undangan	148.540.000,-
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	1. Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat keamanan dalam Teknis pencegahan Kejahatan	101.460.000,

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
			1. Pengamanan Kegiatan Kegiatan/Hari Hari Penting 2. Peningkatan Pelayanan Pengamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	120.184.000,- 620.800.000,-
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pencegahan Bencana Kebakaran 2. Peningkatan Pelayanan Penanggulanga n Bahaya Kebakaran	34.430.000 59.500.000

Tabel 2.60

Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	Rp.75.900.000,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Rapat Koordinasi Darurat Bencana	Rp.36.700.000,-
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Pasca Bencana	Rp.30.350.000,-

Alokasi anggaran tahun 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal berjumlah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.61

Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
I	**PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM,KETENTERAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
	- Jumlah penegakan peraturan daerah dan peratuaran kepala daeah di Kabupaten/Kota	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	347.985.000,-
			2. Penegak Peraturan Perundang-undangan	22.810.000,-
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan	1. Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat	18.087.000,-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
		Pencegahan Tindakan Kriminal	keamanan dalam Teknis pencegahan Kejahatan	
			1. Pengamanan Kegiatan Kegiatan/Hari Hari Penting 2. Peningkatan Pelayanan Pengamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	57.481.900,- 846.108.900,-
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Program Peningkatan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	130.434.000,-

Tabel 2.62

Program, Kegiatan, Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	Rp.75.900.000,-
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Rapat Koordinasi Darurat Bencana	Rp.29.388.500,-
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Pasca Bencana	Rp.34.550.000,-

e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Bidang Rehabilitasi Sosial					
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	95,7	100	74,88
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	92	100	93,29
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	%	100	92,1	100	85,34
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	%	100	100	100	100
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial					
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100

Tabel 2.63
Alokasi Anggaran Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	1. Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	310.700.000	APBD dan APBN
	b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	2. Prosentase (%) Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	7.142.800.000	APBD dan APBN
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	3. Prosentase (%) Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.863.400.000	APBD dan APBN
	d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	4. Prosentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	APBD
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
	a. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	5. Prosentase (%) korban bencana daerah dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	39.800.000	APBD dan APBN

Tabel 2.64
Alokasi Anggaran Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Bidang Rehabilitasi Sosial**			
	a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti.	113.160.300	APBD
	b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.392.400	APBD
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31.103.928	APBD
	d. Rehabilitasi Sosial dasar khususnya Gelandangan	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna	7.308.300	APBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	dan Pengemis di luar Panti	sosial di luar panti.		
2.	**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**			
	a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tangap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	321.077.700	APBD

2.5. Evaluasi Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 telah terjadi penyebaran Pandemi Covid -19 yang terjadi di lebih dari 213 Negara di dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum dapat diperkirakan, penyebaran Pandemi Covid-19 akan berakhir bahkan Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan manusia terutama sektor kesehatan yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kemudian sektor strategis perekonomian juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan pertanian.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempedomani Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Mansyarakat dan Perekonomian Nasional

dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dalam APBD.

2. Melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang diperuntukan bagi sektor kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi.
3. Melakukan evaluasi terhadap capaian program sebagai upaya dalam penyusunan target program dalam RPJMD 2021-2026.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan masa lalu sangat penting untuk merancang keuangan masa depan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah Daerah, kondisi kewajiban Pemerintah Daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul, serta potensi dan tantangan ke depan. Secara umum gambaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi RawasTahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENDAPATAN**	**1.617.409.674.822,32**	**1.549.566.489.528,82**	**1.759.880.995.093,13**	**1.920.259.977.512,03**	**1.809.855.136.717,68**	**7,37%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.743.870.854,93**	**151.594.082.635,49**	**106.289.385.325,54**	**128.563.715.132,68**	**169.757.910.843,75**	**10,60%**
1.1.1	Pajak Daerah	24.228.776.676,00	26.940.641.904,00	27.303.822.001,97	35.576.484.545,00	83.591.212.096,00	25,37%
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.315.653.910,00	3.322.543.828,00	3.437.132.082,00	5.079.465.592,00	2.870.778.567,00	-0,17%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.258.122.651,22	4.981.890.993,24	4.818.254.972,20	5.272.947.955,83	5.680.382.616,96	2,67%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	63.941.317.617,71	116.349.005.910,25	70.730.176.269,37	82.634.817.039,85	77.615.537.563,79	3,46%
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.324.817.679.264,00**	**1.159.387.392.934,00**	**1.330.725.122.188,00**	**1.422.659.685.092,00**	**1.214.776.827.855,00**	**-1,96%**
1.2.1.	Dana bagi hasil Pajak / bagi hasil bukan Pajak	343.114.297.411,00	332.045.035.952,00	416.541.999.928,00	514.616.048.210,00	367.816.982.109,00	0,15%
1.2.2.	Dana alokasi umum	641.789.648.000,00	637.955.157.000,00	639.753.278.000,00	662.471.353.000,00	594.887.320.000,00	-1,33%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Dana alokasi khusus	339.913.733.853,00	189.387.199.982,00	274.429.844.260,00	245.572.283.882,00	252.072.525.746,00	-5,65%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**195.848.124.703,39**	**238.585.013.959,33**	**322.866.487.579,59**	**369.036.577.287,35**	**425.320.398.018,93**	**18,03%**
1.3.1.	Hibah	1.309.219.000,00	1.575.790.600,00	50.766.164.300,00	50.102.245.069,00	72.155.841.217,00	129,58%
1.3.2.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	42.383.222.303,39	64.703.062.697,35	62.617.938.029,59	106.428.203.218,35	66.444.072.829,00	11,56%
1.3.3.	Dana Penyesuaian	-	146.524.040.000,00	204.048.219.000,00	191.453.612.000,00	237.408.855.000,00	-100,00%
1.3.4.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	32.030.360.400,00	24.441.892.501,98	4.229.852.300,00	19.852.517.000,00	49.311.628.972,93	11,23%
1.3.5.	Pendapatan lainnya	120.125.323.000,00	1.340.228.160,00	1.204.313.950,00	1.200.000.000,00	-	14,60%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan periode tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 1.617.409.674.822,32 meningkat menjadi 1.809.855.136.717,68,00 pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,37%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada komponen PAD yaitu sebesar 7,37%, diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,03% dan dana perimbangan sebesar -1,96%.

Kontribusi terbesar PAD periode tahun 2016-2020 bersumber dari pajak daerah yang memberikan kontribusi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,37%. Sumber PAD lainnya yang memberikan kontribusi adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 3,46%.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit untuk diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan. Sedangkan, belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Musi RawasTahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**BELANJA**	**1.531.168.541.789,23**	**1.443.832.402.491,45**	**1.648.414.553.340,34**	**1.870.283.441.227,75**	**2.015.210.803.498,13**	**5,65%**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**761.895.331.503,00**	**719.267.617.417,00**	**780.583.763.340,00**	**890.036.554.600,00**	**1.029.705.817.104,46**	**6,21%**
2.1.1	Belanja Pegawai	539.446.116.376,00	458.544.823.902,00	494.549.944.061,00	553.167.485.057,00	606.768.271.267,86	2,38%
2.1.2.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.	Belanja Hibah	5.272.850.000,00	8.906.720.000,00	13.840.978.000,00	14.406.790.000,00	81.981.407.900,00	101,6%
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	2.686.250.000,00	-	-20.00%
2.1.5.	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	217.068.593.250,00	251.806.025.515,00	272.192.841.279,00	319.776.029.543,00	283.949.425.992,80	5,52%
2.1.6.	Belanja tidak terduga	107.771.877,00	10.048.000,00	-	-	6.845.105.050,00	237,51%
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**769.273.210.286,23**	**724.564.785.074,45**	**867.830.790.000,34**	**980.246.886.627,75**	**985.504.986.393,67**	**5,08%**
2.2.1.	Belanja Pegawai	28.789.955.104,00	53.421.422.469,00	57.117.946.165,00	43.538.138.729,00	50.411.026.973,00	11,86%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.159.155.074,00	353.676.088.143,00	448.730.295.330,50	505.782.553.200,75	473.710.687.679,62	12,5%
2.2.3.	Belanja Modal	432.324.100.108,23	317.467.274.462,45	361.982.548.504,84	430.926.194.698,00	406.015.937.073,00	-0,59%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2016-2020 sebesar 5,65%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada komponen belanja langsung sebesar 5,08% dan belanja tidak langsung sebesar 6,21%.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**9.857.177.887,60**	**4.939.580.276,69**	**47.257.812.030,06**	**156.378.406.932,85**	**206.318.568.283,13**	**99,57%**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	9.848.993.887,60	4.939.580.276,69	47.257.812.030,06	156.378.406.932,85	206.318.568.283,13	99,62%
3.1.2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.184.000,00	-	-	-	-	-100,00%
3.1.3.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**91.158.730.644,00**	**63.096.448.176,00**	**2.345.846.850,00**	**-**	**-**	**-100,00%**
3.2.1.	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	-	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-100,00%
3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	91.158.730.644,00	62.096.448.176,00	1.845.846.850,00	-	-	-100,00%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN NETTO	-81.301.552.756,40	-58.156.867.899,31	44.911.965.180,06	156.378.406.932,85	206.318.568.283,13	17,77%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	4.939.580.276,69	47.577.219.138,06	156.378.406.932,85	206.354.943.217,13	134.286.903.705,39	154,23%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui perhitungan likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Musi Rawas periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya disajikan pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET	-	-	-	-	-	-
2	ASET LANCAR	145.632.823.526,21	139.031.007.083,29	254.030.357.724,22	268.328.402.714,01	521.447.653.748,86	37,55%
3	Kas di Kas daerah	802.282.446,48	43.031.813.718,30	111.772.072.134,43	203.300.679.201,46	188.093.123.122,28	291,30%
4	Kas di bendahara pengeluaran	27.294.111,00	-	715,00	18.327.052,00	21.795.406.135,00	431,58%
5	Kas di bendahara penerimaan	-	-	-	-	-	-
6	Kas di bendahara BLUD/SPAM	2.557.180.942,21	3.496.214.132,76	4.297.738.974,42	2.469.255.691,67	4.909.255.867,54	17,71%
7	Kas di Bendahara JKN/FKTP Puskesmas	1.232.055.677,00	576.094.224,00	241.612.928,00	518.603.602,00	-	-100,00%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	382.875.729,00	140.277.864,00	624.982.181,00	282.331.834,65	26.063.851.853,00	187,24%
	Setara Kas	-	-	40.000.000.000,00	-	195.000.000.000,00	100,00%
9	Investasi jangka pendek	-	-	-	-	-	-
10	Piutang pajak	1.895.495.351,90	1.603.365.827,90	1.884.569.430,90	2.405.934.263,90	2.429.161.637,90	6,40%
11	Penyisihan piutang pajak daerah	(119.376.441,13)	(127.374.094,61)	(155.879.040,45)	(183.546.834,05)	(1.461.307.808,14)	87,05%
12	Piutang retribusi	4.659.275.776,68	4.669.991.776,68	4.683.527.776,68	4.697.815.776,68	4.710.035.776,68	0,27%
13	Penyisihan piutang retribusi	(4.648.078.496,68)	(4.658.418.496,68)	(4.671.954.496,68)	(4.686.242.496,68)	(4.698.462.496,68)	0,27%
14	Piutang dana bagi hasil Pemda lainnya	56.669.436.026,57	47.812.622.841,24	52.509.806.205,73	10.361.042.230,38	5.908.634.178,38	-43,18%
15	Penyisihan piutang dana bagi hasil	-	-	-	-	-	-
18	Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
19	Bagian tuntutan ganti rugi	-	-	-	-	-	-
20	Piutang lainnya	38.565.494.456,98	30.861.322.414,00	33.525.020.895,83	33.874.697.855,96	43.239.781.900,00	2,90%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang sah	(6.810.511.201,18)	(6.584.984.744,80)	(9.385.835.226,90)	(4.924.045.319,99)	(5.558.725.896,07)	-4,95%
22	beban dibayar dimuka	-	-	-	-	79.052.337,00	-
23	Persediaan	50.419.399.147,38	18.210.081.620,50	18.704.695.246,26	20.193.549.856,03	40.937.847.141,97	-5,07%
24	**Jumlah Aset Lancar**	145.632.823.526,21	139.031.007.083,29	254.030.357.724,22	268.328.402.714,01	521.447.653.748,86	37,55%
25	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	35.830.848.507,07	36.830.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	1,03%
26	Investasi non permanen	-	-	-	-	-	-
27	Pinjaman kepada perusaahaan negara	-	-	-	-	-	-
28	Pinjaman kepada perusaahaan daerah	-	-	-	-	-	-
29	Pinjaman kepada pemerintah daerah lain	-	-	-	-	-	-
30	Investasi dalam surat utang negara	-	-	-	-	-	-
31	investasi dalam proyek pembangunan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
32	investasi non permanen lain	-	-	-	-	-	-
33	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
34	Investasi Permanen	35.830.848.507,07	36.830.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	1,03%
35	Penyertaan modal pemerintah daerah	35.830.848.507,07	36.830.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	1,03%
36	Investasi permanen lain	-	-	-	-	-	-
37	Jumlah Investasi Permanen	35.830.848.507,07	36.830.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	1,03%
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang	35.830.848.507,07	36.830.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07	1,03%
39	**ASET TETAP**	3.227.880.342.049,03	3.235.362.949.677,05	3.631.004.055.944,89	3.743.239.534.567,76	3.630.978.539.754,60	2,98%
40	Tanah	208.155.605.065,05	208.878.823.065,06	379.439.226.065,05	365.109.924.053,30	355.317.153.595,30	14,30%
41	Peralatan dan mesin	338.277.557.240,42	372.502.685.522,89	429.996.084.558,18	485.828.839.458,41	505.851.922.924,41	10,58%
42	Gedung dan bangunan	819.434.889.691,82	947.243.346.518,99	1.074.591.332.209,69	1.140.910.267.786,76	1.150.979.644.358,76	8,86%
43	Jalan, irigasi, dan jaringan	3.255.403.300.127,68	3.573.995.478.710,11	3.872.965.346.466,69	4.138.998.401.155,96	4.206.543.588.260,66	6,62%
44	Aset tetap lainnya	32.105.341.162,95	35.572.220.698,00	41.606.526.025,00	48.208.352.125,10	47.255.460.575,10	10,15%
45	Konstruksi dalam pengerjaan	214.712.672.913,70	41.386.821.672,58	51.788.941.973,41	69.922.967.338,47	102.110.529.467,47	-16,96%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Akumulasi Penyusutan	(1.640.209.024.152,59)	(1.944.216.426.510,58)	(2.219.383.401.353,13)	(2.505.739.217.350,24)	(2.737.079.759.427,10)	13,65%
47	**Jumlah Aset Tetap**	**3.227.880.342.049,03**	**3.235.362.949.677,05**	**3.631.004.055.944,89**	**3.743.239.534.567,76**	**3.630.978.539.754,60**	2,98%
48	**DANA CADANGAN**	-	-	-	-	-	-
49	Dana cadangan	-	-	-	-	-	-
50	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
51	**ASET LAINNYA**	23.401.874.911,80	18.912.141.812,15	19.510.234.557,94	11.792.078.910,32	11.194.177.261,51	-16,84%
52	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
53	Tuntutan perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
54	Aset Kondisi Rusak Berat	-	2.535.237.589,00	2.253.483.483,00	2.768.280.884,00	2.904.700.084,00	100,00%
55	Tuntutan ganti Rugi	5.390.561.522,00	311.630.700,00	168.330.700,00	214.710.200,00	200.310.200,00	-56,09%
56	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
57	Aset tidak berwujud	189.113.150,00	302.708.150,00	191.811.796,37	157.666.009,37	113.714.415,62	-11,94%
58	Aset dan lain-lain	17.822.200.239,80	15.762.565.373,15	16.896.608.578,57	8.651.421.816,95	7.975.452.561,89	-18,21%
59	**Jumlah Aset lainnya**	23.401.874.911,80	18.912.141.812,15	19.510.234.557,94	11.792.078.910,32	11.194.177.261,51	-16,84%
60	**JUMLAH ASET**	3.432.745.888.994,11	3.430.136.947.079,56	3.941.875.496.734,12	4.060.690.864.699,16	4.200.951.219.272,04	5,17%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**KEWAJIBAN**	76.162.712.894,55	41.122.649.632,40	27.680.936.087,44	21.005.209.985,09	29.172.991.618,36	-21,33%
62	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**76.162.712.894,55**	**41.122.649.632,40**	**27.680.936.087,44**	**21.005.209.985,09**	**29.172.991.618,36**	-21,33%
63	Utang Perhitungan Pihak Ke-tiga (PFK)	27.264.358,00	15.242.012,00	558.000.000,00	234.254.164,65	23.505.866,00	-3,64%
64	Utang bunga	-	-	-	-	-	-
65	Bagian lancar utang dalam negeri- pemerintah pusat	-	-	-	-	-	-
66	Bagian lancar utang dalam negeri- pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
67	Bagian lancar utang dalam negeri- Lembaga keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
68	Bagian lancar utang dalam negeri- Lembaga keuangan bukan Bank	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Bagian lancar utang dalam negeri- Obligasi	-	-	-	-	-	-
70	Bagian lancar utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-
71	Pendapatan diterima dimuka	673.640.549,55	314.975.000,00	404.203.333,00	405.539.500,00	161.306.667,00	-30,05%
72	Utang Belanja	65.890.789.160,00	27.699.967.484,96	11.128.329.149,00	7.771.596.192,00	20.217.721.994,00	-25,57%
73	Utang jangka pendek lainnya	9.571.018.827,00	13.092.465.135,44	15.590.403.605,44	12.593.820.128,44	8.770.457.091,36	-2,16%
74	**Jumlah Kewajiban Jangka pendek**	76.162.712.894,55	41.122.649.632,40	27.680.936.087,44	21.005.209.985,09	29.172.991.618,36	-21,33%
75	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-	-
76	Utang dalam negeri- pemerintah pusat	-	-	-	-	-	-
77	Utang dalam negeri- pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
78	Utang dalam negeri- lembaga keuangan bank	-	-	-	-	-	-
79	Utang dalam negeri- lembaga	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	keuangan bukan bank						
80	utang dalam negeri- obligasi	-	-	-	-	-	-
81	utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-
82	Jumlah kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-	-
83	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**76.162.712.894,55**	**41.122.649.632,40**	**27.680.936.087,44**	**21.005.209.985,09**	**29.172.991.618,36**	-21,33%
84	**EKUITAS DANA**	**3.356.583.176.099,57**	**3.388.939.921.880,52**	**3.914.194.560.646,68**	**4.039.685.654.714,07**	**4.171.778.227.653,68**	5,58%
85	**EKUITAS DANA LANCAR**	-	-	-	-	-	-
86	Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	-	-	-	-	-	-
87	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
88	Cadangan piutang	-	-	-	-	-	-
89	Cadangan persediaan	-	-	-	-	-	-
90	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
	hutang jangka pendek						
91	**Jumlah Ekuitas Dana Lancar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
93	Diinvestasikan dalam jangka panjang	-	-	-	-	-	-
94	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-	-	-
95	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-	-	-
96	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	-	-	-	-	-	-
97	Ekuitas	3.356.583.176.099,57	3.388.939.921.880,52	3.914.194.560.646,68	4.039.685.654.714,07	4.171.778.227.653,68	5,58%
98	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-	-
99	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
100	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
102	JUMLAH EKUITAS DANA	3.356.583.176.099,57	3.388.939.921.880,52	3.914.194.560.646,68	4.039.685.654.714,07	4.171.778.227.653,68	5,58%
103	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.432.745.888.994,12	3.430.062.571.512,92	3.941.875.496.734,12	**4.060.690.864.699,16**	4.200.951.219.272,04	5,17%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas.

Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2016-2020 tersaji pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A,	**Rasio Likuiditas**					
1	Rasio Lancar (*Current Ratio*)	1,91	3,38	9,18	12,77	17,87
2	Rasio Quick (*Quick Ratio*)	1,25	2,94	8,50	11,81	16,47
B,	**Rasio Solvabilitas**					
3	Rasio total utang terhadap total aset	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio utang terhadap modal	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Berdasarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa rasio lancar pada tahun 2016-2020 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Rasio lancar pada tahun 2020 sebesar 17,87 yang berarti bahwa aset lancar adalah 17,87 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo, dan setiap Rp 1,00 utang dijamin oleh Rp 17,87 aset lancar, Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sangat likuid.

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick pada tahun 2020 sebesar 16,47 hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah Pemerintah Daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat yang mengurangkan persediaan pada total aset lancar. Meskipun persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di Pemerintah Daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar pada saat penghitungan rasio quick.

Rasio total utang terhadap terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aset, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Besar ratio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,01 hal ini berarti pengaruh utang terhadap aset sangat kecil.

Rasio utang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 ratio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar 0,01 hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga berpedoman UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perpaduan dari beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam impelementasinya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas juga diselenggarakan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup PAD, pendapatan dari dana perimbangan pusat - daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan Pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana Perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan

rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.

3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2016-2020 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaiki sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah. Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2020 dan mempedomani dokumen perencanaan RKPD, serta dibahas secara bersama sesuai

mekanisme ketentuan perundang-undangan, Kebijakan umum belanja daerah pada periode Tahun 2016-2020 adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program strategis daerah.
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial,
4. Memenuhi alokasi belanja sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah untuk pembiayaan fungsi pendidikan dan memenuhi alokasi belanja sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji untuk pembiayaan fungsi kesehatan, serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah.
6. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

7. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja perangkat daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgetting*).

Disamping kebijakan belanja yang dituangkan dalam RPJMD, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diantaranya:

1. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementrian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan kinerja kegiatan pembangunan,
3. Tujuan pembangunan *millenium* atau SDGs, yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
4. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada dan kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki resiko terkecil dan relatif tidak menganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai kegiatan tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran,
3. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran proporsi penggunaan anggaran periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	BELANJA	1.713.677.287.682,05	1.522.168.541.789,23	88,82	1.565.491.275.619,16	1.443.832.402.491,45	92,23	1.750.606.091.383,06	1.648.414.553.340,34	94,16	2.095.943.740.993,92	1.870.283.441.227,75	89,23	2.015.210.803.498,13	1.821.825.890.922	90,40
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	848.983.960.376,86	761,895.331.503,00	89,74	800.260.250.529,16	719,267,617,417.00	89.88	841,682,595,703.06	780,583,763,340.00	92.74	1,050,330,542,519.92	890,036,554,600.00	84.74	1,029,705,817,104.46	953,130,424,549.80	92.56
2.1.1	Belanja Pegawai	624.274.591.076,86	539.446.116.376,00	86,41	537.735.988.279,16	458,544,823,902.00	85.27	552,008,026,003.06	494,549,944,061.00	89.59	709,059,036,729.92	553,167,485,057.00	78.01	606,768,271,267.86	572,990,995,956.00	94.43
2.1.2.	Belanja subsidi	-	-	0,00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.	Belanja Hibah	6.563.938.000,00	5.272.850.000,00	80,33	9.681.910.000,00	8,906,720,000.00	91.99	16,447,031,200.00	13,840,978,000.00	84.15	17,140,440,000.00	14,398,040,000.00	84.00	83,954,531,000.00	81,981,407,900.00	97.65
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	100	-	-	0.00	-	-	0.00	2,695,000,000.00	2,695,000,000.00	100	0.00	0.00	0.00
2.1.5.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa	216,645,431,300.00	216,568,593,250.00	99.96	251,842,352,250.00	251,806,025,515.00	99.99	272,327,538,500.00	272,192,841,279.00	99.95	319,936,065,790.00	319,776,029,543.00	99.95	291,783,014,836.60	291,312,915,643.80	99.84
2.1.6.	Belanja tidak terduga	1,000,000,000.00	107,771,877.00	10.78	1,000,000,000.00	10,048,000.00	0.00	900,000,000.00	-	0.00	1,500,000,000.00	-	0.00	47,200,000,000.00	6,845,105,050.00	14.50
2.2.	BELANJA LANGSUNG	864,693,327,305.19	760,273,210,286.23	87.92	765,231,025,090.00	724,564,785,074.45	94.69	908,923,495,680.00	867,830,790,000.34	95.48	1,045,613,198,474.00	980,246,886,627.75	93.75	985,504,986,393.67	868,695,466,372.62	88.15
2.2.1.	Belanja Pegawai	31,817,906,000.00	28,789,955,104.00	90.48	54,288,294,000.00	53,421,422,469.00	98.40	60,478,073,750.00	57,117,946,165.00	94.44	50,120,954,960.00	43,538,138,729.00	86.87	50,411,026,973.00	38,935,834,343.00	77.24
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329,474,627,348.50	308,159,155,074.00	93.53	377,131,128,903.00	353,676,088,143.00	93.78	468,315,126,200.00	448,730,295,330.50	95.82	542,445,278,219.00	505,782,553,200.75	93.24	521,901,137,087.80	445,374,940,630.62	85.34
2.2.3.	Belanja Modal	503,400,793,956.69	423,324,100,108.23	84.09	333,811,602,187.00	317,467,274,462.45	95.10	380,130,295,730.00	361,982,548,504.84	95.23	453,046,965,295.00	430,926,194,698.00	95.12	413,192,822,332.87	384,384,691,399.00	93.03

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas diperoleh gambaran bahwa, proporsi realisasi belanja langsung lebih besar dibanding realisasi belanja tidak langsung setiap tahunnya, meskipun demikian alokasi dana APBD Kabupaten Musi Rawas untuk mendanai program pembangunan menunjukan tren meningkat dari 87.92 persen pada tahun 2016 naik menjadi 94.69 persen tahun 2017 dan naik menjadi 95.48 persen pada tahun 2018 tetapi turun menjadi 93.75 persen tahun 2019 karena adanya efisiensi belanja, sedangkan pada tahun 2020 proporsi realisasi belanja langsung 88.15 persen lebih rendah dibandingkan belanja tidak langsung 92.56 persen.

b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	**Belanja tidak langsung**					
1	Belanja gaji dan tunjangan	500,590,464,063.00	445,811,780,633.00	468,746,039,576.00	479,341,449,565.00	470,611,835,941.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	35,027,708,236.00	7,392,251,394.00	18,214,580,420.00	64,680,214,436.00	90,485,265,062.00
3	Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	3,409,000,000.00	4,768,000,000.00	6,406,000,000.00	8,029,300,000.00	8,020,678,000.00
4	Belanja Pungutan Pajak Derah (*)	-	972,791,875.00	1,145,824,065.00	1,008,542,100.00	3,822,022,625.00
B	**Belanja Langsung**					
1	Belanja Honorarium PNS (*)	6,207,492,000.00	20,961,651,250.00	24,711,130,000.00	15,844,108,500.00	10,627,704,200.00
2	Belanja uang lembur (*)	467,840,350.00	302,563,500.00	295,256,000.00	70,280,000.00	-
3	Belanja Premi Asuransi	-	219,760,000.00	1,656,000,000.00	5,180,152,000.00	6,560,045,628.00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,860,987,236.00	6,971,718,465.00	8,156,996,067.00	9,980,468,706.00	8,428,231,352.00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,055,405,880.00	1,907,528,667.00	1,540,878,416.00	1,650,972,000.00	1,621,695,000.00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,612,545,000.00	1,713,625,536.00	1,610,282,000.00	954,060,000.00	490,142,000.00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,536,949,000.00	2,301,526,500.00	2,564,728,000.00	2,798,801,000.00	1,010,002,000.00
8	Belanja makanan dan minuman	18,408,907,254.00	16,917,547,509.00	20,920,995,873.00	25,606,270,877.00	20,028,032,850.00
9	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	878,230,000.00	413,015,000.00	496,385,000.00	727,710,000.00	467,865,000.00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,977,700,500.00	3,207,539,000.00	3,721,480,500.00	5,553,933,200.00	2,951,035,000.00
11	Belanja Perjalanan Dinas	73,281,279,178.00	80,188,404,051.00	101,983,117,813.00	115,785,678,394.00	108,280,909,683.00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400,000,000.00	311,000,000.00	311,000,000.00	155,500,000.00	76,250,000.00
13	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	2,771,583,000.00	1,715,063,000.00	2,565,411,200.00	3,626,185,638.00	824,000,000.00
14	Belanja Pemeliharaan	3,816,784,460.00	15,610,200,155.00	18,899,828,185.00	13,353,595,434.00	21,823,448,076.00
15	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Gedung	-	577,700,000.00	550,000,000.00	187,000,000.00	150,000,000.00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	21,116,957,700.00	9,753,689,000.00	4,352,997,800.00	1,826,000,000.00	1,131,300,000.00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	4,500,000.00	-	-	-	-
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	650,000.00	-	1,404,000.00	2,100,000.00	76,780,000.00
19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	537,740,000.00	3,485,670,050.00	1,437,508,250.00	922,109,500.00	1,170,333,500.00
20	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,095,507,447.00	11,995,800.00	327,875,000.00	-	-
21	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,213,974,500.00	5,036,712,757.00	5,847,479,059.00	8,519,968,200.00	2,784,502,510.00
22	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	4,738,229,000.00	1,505,305,000.00	4,640,370,000.00	598,607,000.00	2,375,071,750.00
23	Modal Pengadaan Peralatan dapur	288,057,000.00	262,052,000.00	120,250,000.00	214,260,000.00	9,900,000.00
24	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00	894,015,000.00	1,006,886,200.00	1,782,546,000.00	1,187,250,000.00
25	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat studio	913,068,000.00	486,630,000.00	456,311,000.00	334,155,000.00	358,952,000.00
26	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	515,891,000.00	93,100,000.00	63,630,000.00	63,885,000.00	50,425,500.00
27	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	79,820,000.00	1,521,269,000.00	1,107,715,000.00	1,270,986,850.00	93,400,000.00
28	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan telepon	12,298,369,300.00	-	5,786,842,550.00	144,298,770.00	215,625,000.00
29	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenataan/Keamanan	-	39,355,500.00	3,700,000.00	347,385,000.00	304,790,000.00
30	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camping	-	-	-	-	-
	TOTAL	**710,109,640,104.00**	**635,353,460,642.00**	**709,648,901,974.00**	**770,560,523,170.00**	**766,037,492,677.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Berdasarkan tabel 3.7 di atas diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2016	710,109,640,104.00	1,621,827,272,433.23	43.78
2	2017	635,353,460,642.00	1,255,122,825,152.45	50.62
3	2018	709,648,901,974.00	1,378,567,558,911.34	51.48
4	2019	890,036,554,600.00	1,870,283,441,227.75	47.59
5	2020	953,130,424,549.80	1,821,825,890,922.42	52.32

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Tabel 3,8 di atas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2016-2020 rata-rata belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebesar 49,17%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan diharapkan belanja untuk pelayanan publik lebih meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, Efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,617,409,674,822.32	1,549,566,489,528.82	1,759,880,995,093.00	1,920,259,977,512.03	1,776,526,560,886.68
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1,531,168,541,789.23	1,443,832,402,491.45	1,648,414,553,340.34	1,870,283,441,227.75	1,821,825,890,922.42
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	91,158,730,644.00	63,096,448,176.00	2,345,846,850.00	-	206,354,943,217.13
	Defisit/Surplus Riil (1-2)	86,241,133,033.09	105,734,087,037.37	111,466,441,752.66	49,976,536,284.28	-45,299,330,035.74

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 3.9. Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.

Pada Tabel 3.9, menunjukkan bahwa periode tahun 2016-2020 realisasi APBD Kabupaten Musi Rawas mengalami surplus, Artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah masing-masing sebesar Rp 1.617.409.674.822,32 pada tahun 2016, Rp 1.549.566.489.528,82 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp1.759.880.995.093,00 pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.919.926.392.729,03 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp.1,776,526,560,886.68 dibantu oleh SILPA tahun sebelumnya sehingga mengalami surplus.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

NO	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2016-2020 tersaji pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah SILPA	9,848,993,887.60	-	4,939,580,276.69	-	47,257,812,030.06	-	206,354,943,217.13	-	161,055,613,181.39	-
2	Pelampauan PAD	(16,899,133,668.07)	(171.58)	(28,792,571,319.51)	(582.90)	(16,726,295,772.46)	(35.39)	(12,142,833,202.32)	(5.88)	8,425,798,641.75	4.08
3	Pelampauan Dana Perimbangan	(144,166,708,527.39)	(1,463.77)	(48,659,255,541.76)	(985.09)	(77,467,276,087.59)	(163.92)	(62,095,565,908.00)	(30.09)	14,733,696,927.00	7.14
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(15,060,420,600.00)	(152.91)	(1,536,442,260.00)	(31.10)	(4,367,622,150.00)	(9.24)	54,933,042,561.28	26.62	(55,488,794,963.07)	(26.89)
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	(182,508,745,892.82)	(1,853.07)	(121,622,546,392.71)	(2,462.20)	(102,056,840,821.72)	(215.96)	(225,660,299,766.17)	(109.36)	(193,384,912,575.71)	(93.71)
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	81,589,424,092.55	828.40	41,122,649,632.40	832.51	27,680,936,087.44	58.57	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2016-2020 terlihat adanya kecenderungan penurunan SiLPA ditahun 2017 tetapi cenderung naik di tahun 2018 dan 2019 karena adanya penerimaan dana bagi hasil provinsi atas kurang salur tahun sebelumnya dan adanya efisiensi anggaran, sedangkan di tahun 2020 terlihat adanya kecenderungan penurunan SiLPA, SiLPA bermakna positif jika merupakan hasil dari efektifnya PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Dari 7 (tujuh) jenis sumber penerimaan SiLPA terdapat 1 (satu) jenis saja yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA, yaitu sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Kondisi ini merupakan fakta yang kurang relevan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang harus makin akurat dalam perencanaan alokasi kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana ke depan jumlah SiLPA dapat diperkecil. Salah satu solusi untuk memperkecil SiLPA adalah pada saat mengajukan usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen penunjang lainnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke

belakang, Adapun proyeksi untuk periode 2021-2026, meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi belanja serta proyeksi pembiayaan.

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi keuangan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya retribusi daerah kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan PPKM selama masa Pandemi Covid-19. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan PMK No. 35/PMK.07/2020. Kemudian untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan pendapatan daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021. Diharapkan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2026 dapat meningkat, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan periode tahun 2021-2026 sebesar 0,64% dengan tahun dasar 2020 dan proyeksi tahun 2021 yang merupakan tahun pertama RPJMD maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tingkat Pertumbuhan
4	**PENDAPATAN**	**1.768.123.357.201,00**	**1.717.565.121.922,00**	**1.739.899.629.811,00**	**1.764.705.135.760,00**	**1.793.725.414.630,00**	**1.824.059.598.792,00**	**0,64**
4.1	***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	***199.079.974.521,00***	***219.303.196.226,00***	***234.317.655.638,00***	***251.781.787.082,00***	***273.438.274.159,00***	***296.387.856.068,00***	***8,29***
4.1.01	Pajak Daerah	86.173.894.375,00	100.203.083.833,00	115.584.492.194,00	132.501.016.413,00	151.755.399.304,00	173.223.012.672,00	14,99
4.1.02	Retribusi Daerah	4.315.733.125,00	3.071.510.925,00	3.238.820.431,00	3.427.172.315,00	3.614.375.843,00	3.859.390.879,00	(1,07)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.581.347.021,00	108.028.601.468,00	106.494.343.013,00	105.853.598.354,00	107.068.499.012,00	107.305.452.517,00	0,93
4.2	***PENDAPATAN TRANSFER***	***1.503.612.785.930,00***	***1.441.818.425.695,80***	***1.447.858.974.172,80***	***1.453.918.648.677,61***	***1.459.997.640.470,51***	***1.466.096.142.724,39***	***(0,49)***
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.434.813.691,000,00**	**1.368.891.385.070,00**	**1.370.803.987.851,00**	**1.372.735.716.660,00**	**1.374.686.762.757,00**	**1.376.657.319.315,00**	**(0,81)**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	280,774,098,000.00	224,252,734,950.00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	(4,03)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	606,181,929,000.00	594,887,320,000.00	594.887.320.000.00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	(0,37)
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	306,149,785,000.00	306,149,785,000.00	306.149.785.000.00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	-
4.2.01.02.01	Dana Intensif Daerah (DID)	52,341,267,000.00	52,341,267,000.00	52.341.267.000.00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	-
4.2.01.02.05	Dana Desa	189,366,612,000.00	191,260,278,120.00	193.172.880.901,20	195.104.609.710,00	197.055.655.807,00	199.026.212.365,00	1,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**68.799.094.930,00**	**72.927.040.625,00**	**77.054.986.321,00**	**81.182.932.017,0 0**	**85.310.877.713,20**	**89.438.823.409,00**	**5,39**

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tingkat Pertumbuhan
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.799.094.930,00	72.927.040.626,00	77.054.986.322,00	81.182.932.017,00	85.310.877.713,00	89.438.823.409,00	5,39
4.2.02.01.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya							
4.3	***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***	***65.439.596.750,00***	***56.443.500.000,00***	***57.723.000.000,00***	***59.004.700.000,00***	***60.289.500.000,00***	***61.576.600.000,00***	***(0,99)***
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.186.054.350,00						
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	1.200.000.000,00	2.200.000.000,00	3.200.000.000,00	4.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,24
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	53.253.542.400,00	55.243.500.000,00	55.523.000.000,00	55.804.700.000,00	56.089.500.000,00	56.375.600.000,00	1,15
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.768.123.357.201,00**	**1.717.565.121.922**	**1.739.899.629.811,00**	**1.764.705.135.760,00**	**1.793.725.414.630,00**	**1.824.059.598.792,00**	**0,64**

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2021-2026, pendapatan daerah diproyeksikan naik setiap tahunnya dari pendapatan tahun 2020, Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan, Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana perimbangan, dan PAD.

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016 – 2020 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak pendemi Covid-19 sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 8,29 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp. 199.070.974.521,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 296.387.856.068,-.

Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Pajak Daerah sebesar 14,49 persen dimana pada tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp. 86.173.894.375,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2026 sebesar Rp 173.223.012.672,-.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selain Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah tahun 2021-2026 diasumsikan sedikit menurun karena proyeksi TKDD pada RPJMN tahun 2020-2024 cenderung tidak ada kenaikan dikarenakan situasi ekonomi makro masih relatif belum pulih dari dampak pandemic Covid-19. Untuk proyeksi Dana Insentif Daerah tahun 2022–2026 diasumsikan tetap.

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi tahun 2021-2026 diasumsikan naik

sebesar 5,39% walaupun perkembangan tahun 2016-2020 sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan diasumsikan ada penurunan sebesar 0,99% dikarenakan nya berakhirnya hibah IPDMIP.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Seperti yang terlihat pada tabel 3.12, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, antara lain sebagai berikut:

1. E-monitoring pajak daerah merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : tapping box dan sejenisnya.Tujuan e-Monitoring Pajak Daerah :
    a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
    b) Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
    c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
    d) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
    e) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
    f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
3. Sosialisasi pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
5. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi
6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.

7. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
8. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
10. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;
11. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
12. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
13. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
14. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
15. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
16. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

b. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan relatif tumbu setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,36% untuk periode tahun 2022-2026., untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.712.565.121.922,00 dan di akhir periode RPJMD 2021 - 2026 meningkat menjadi Rp. 1.829.059.598.792,00.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan perincian:
   a. Belanja pegawai diperkirakan meningkat sebesar 0,74 persen sampai dengan tahun 2026 apabila dibandingkan dengan tahun awal periode di tahun 2021, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
   b. Belanja barang dan jasa diasumsikan turun dari tahun 2021 ke tahun 2026 21,83 persen. Namun demikian fluktuasi Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
   c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan tetap pertahunnya kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

2. Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,60 persen.
3. Belanja Tak Terduga sejak tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- per tahunnya.
4. Belanja Transfer diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 238.087.063.350,-

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan visi dan misi RPJMD;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Memenuhi alokasi belanja sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah untuk pembiayaan fungsi pendidikan;
5. Memenuhi alokasi belanja sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji untuk pembiayaan fungsi kesehatan;
6. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19;
7. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
8. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
9. Melaksanakan Belanja yang bersifat *earmarking* bersumber dari pendapatan transfer yang telah diatur secara jelas penggunaannya, seperti DAK, dan bantuan keuangan provinsi

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sebagamana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tingkat Pertumbuhan
5.	**BELANJA**	**1.832.421.446.761,00**	**1.712.565.121.922,00**	**1.734.899.629.811,00**	**1.759.705.135.760,00**	**1.798.725.414.630,00**	**1.829.059.598.792,00**	**0,02**
5.1	***BELANJA OPERASI***	***1.121.562.251.863,00***	***996.950.600.466,00***	***1.017.875.412.526,00***	***1.041.996.569.556,00***	***1.057.468.857.679,00***	***1.080.254.404.497,00***	***(0,60)***
5.1.01	Belanja Pegawai	558.981.425.376.00	554.862.908.665,00	571.127.374.811,00	568.534.848.489,00	583.782.768.764,00	592.244.341.500,00	0,74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.844.051.987,00	431.350.917.301,00	436.011.263.215,00	432.724.946.566,00	462.949.314.414,00	477.273.288.497,00	(21,83)
5.1.05	Belanja Hibah	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	40.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	-
5.2	***BELANJA MODAL***	***462.772.131.548,00***	***467.527.458.106,00***	***468.937.153.935,00***	***469.621.502.854,00***	***493.169.493.601,00***	***500.718.130.945,00***	***1,60***
5.3	***BELANJA TAK TERDUGA***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***-***
5.4	***BELANJA TRANSFER***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***-***
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

c. Proyeksi Pembiayaan

Adanya defisit atau surplus antara besaran pendapatan dengan belanja dipengaruhi oleh pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan direncanakan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA ini didapat dari efisiensi belanja dan juga adanya pelampauan pendapatan. SiLPA setiap tahunnya terus dipasang menurun, dengan asumsi terjadi perbaikan kinerja serapan anggaran sebagai akibat pembenahan kualitas perencanaan sehingga semua kegiatan yang direncanakan dapat dieksekusi dengan baik dan tepat waktu. Pengeluaran pembiayaan untuk selama 5(lima) tahun kedepan direncanakan untuk penyertaan modal ke BUMD. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021-2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**64.298.089.560**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.1	***Penerimaan Pembiayaan***	***74.298.089.560,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	74.298.089.560,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2	***Pengeluaraan Pembiayaan***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10..000.000.000,00	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

d. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.12, Tabel 3.13 dan Tabel 3.14 maka proyeksi APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN**	**1.768.123.357.201,00**	**1.717.565.121.922**	**1.739.899.629.811,00**	**1.764.705.135.760,00**	**1.793.725.414.630,00**	**1.824.059.598.792,00**
4.1	***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	***199.070.974.521,00***	***219.303.196.226,00***	***234.317.655.638.00***	***251.781.787.082.00***	***273.438.274.159.00***	***296.387.856.068,00***
4.1.01	Pajak Daerah	86.173.894.375,00	100.203.083.833,00	115.584.492.194,00	132.501.016.413,00	151,755,399,304.00	173.223.012.672,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.315.733.125,00	3.071.510.925,00	3.238.820.431,00	3.427.172.315,00	3,614,375,843.00	3.859.390.879,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.581.347.021,00	108.028.601.468,00	106.494.343.013,00	105.853.598.354,00	107.068.499.012,00	107.305.452.517,00
4.2	***PENDAPATAN TRANSFER***	***1.503.612.785.930,00***	***1.441.818.425.696,00***	***1.447.858.974.173,00***	***1.453.918.648.678,00***	***1.459.997.640.471,00***	***1,466.096.142.724,00***
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.434.813.691.000,00**	**1.368.891.385.070,00**	**1.370.803.987.851,00**	**1.372.735.716.660,00**	**1.374.686.762.757,00**	**1.376.657.319.315,00**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	280.774.098.000,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	606.181.929.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00
4.2.01.02.01	Dana Intensif Daerah (DID)	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00
4.2.01.02.05	Dana Desa	189.366.612.000,00	191.260.278.120,00	193.172.880.901,00	195.104.609.710,00	197.055.655.807,00	199.026.212.365,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**68.799.094.930,00**	**72.927.040.626,00**	**77.054.986.322,00**	**81.182.932.017,00**	**85.310.877.713,20**	**89.438.823.409,00**
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.799.094.930,00	72.927.040.626,00	77.054.986.322,00	81.182.932.017,00	85.310.877.713,00	89.438.823.409,00
4.2.02.01.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya						
4.3	***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***	***65.439.596.750,00***	***56.443,500.000,00***	***57.723.000.000,00***	***59.004.700.000,00***	***60.289.500.000,00***	***61.575.600.000,00***
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.186.054.350,00					

4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri	-	1.200.000.000,00	2.200.000.000,00	3.200.000.000,00	4.200.000.000,00	5.200.000.000,00
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	53.253.542.400,00	55.243.500.000,00	55.523.000.000,00	55.804.700.000,00	56.089.500.000,00	56.375.600.000.00
5.	**BELANJA**	**1.832.421.446.761,00**	**1.712.565.121.922,00**	**1.734.899.629.811,00**	**1.759.705.135.760,00**	**1.798.725.414.630,00**	**1.829.059.598.792,00**
5.1	***BELANJA OPERASI***	***1.121.562.251.863,00***	***996.950.600.466,00***	***1.017.875.412.526,00***	***1.041.996.569.556,00***	***1.057.468.857.679,00***	***1.080.254.404.497,00***
5.1.01	Belanja Pegawai	558.981.425.376,00	554.862.908.665,00	571.127.374.811,00	568.534.848.489,00	583.782.768.764,00	592.244.341.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.844.051.987,00	431.350.917.301,00	436.011.263.215,00	432.724.946.566,00	462.949.314.414,00	477.273.288.497,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	40.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00
5.2	***BELANJA MODAL***	***462.772.131.548,00***	***467.527.458.106,00***	***468.937.153.935,00***	***469.621.502.854,00***	***493.169.493.601,00***	***500.718.130.945,00***
5.3	***BELANJA TAK TERDUGA***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***
5.4	***BELANJA TRANSFER***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00
6	**PEMBIAYAAN**	**64.298.089.560,00**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.1	***PENERIMAAN PEMBIAYAAN***	***74.298.089.560,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	74.298.089.560,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	***10.000.000.00,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

3.3.2 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor atau belanja sejenis lainnya.

Sedangkan, belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya, Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama disajikan pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
A	**Belanja tidak langsung**	**539.027.172.299,00**	**458.944.823.902,00**	**494.512.444.061,00**	**553.059.506.101,00**	**572.939.801.628,00**	**3.02%**
1	Belanja gaji dan tunjangan	500.590.464.063,00	445.811.780.633,00	468.746.039.576,00	479.341.449.565,00	470.611.835.941,00	1.20%
2	Belanja Tambahan Penghasilan	35.027.708.236,00	7.392.251.394,00	18.214.580.420,00	64.680.214.436,00	90.485.265.062,00	25.81%
3	Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	3.409.000.000,00	4.768.000.000,00	6.406.000.000,00	8.029.300.000,00	8.020.678.000,00	11.23%
4	Belanja Pungutan Pajak Derah (*)	-	972.791.875,00	1.145.824.065,00	1.008.542.100,00	3.822.022.625,00	-5.09%
B	**Belanja Langsung**	**100.744.458.781,00**	**441.699.337.772,45**	**518.643.324.890,84**	**603.476.013.307,00**	**534.200.533.760,00**	**22.64%**
1	Belanja Honorarium PNS	6.207.492.000,00	20.961.651.250,00	24.711.130.000,00	15.844.108.500,00	10.627.704.200,00	-11.53%
2	Belanja uang lembur	467.840.350,00	302.563.500,00	295.256.000,00	70.280.000,00	-	-100.00%
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000,00	311.000.000,00	311.000.000,00	155.500.000,00	76.250.000,00	-16.83%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
4	Belanja khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS	2.771.583.000,00	1.715.063.000,00	2.565.411.200,00	3.626.185.638,00	824.000.000,00	-18.52%
5	Belanja Premi asuransi kesehatan	-	219.760.000,00	1.656.000.000,00	5.180.152.000,00	6.560.045.628,00	27.41%
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	18.408.907.254,00	16.917.547.509,00	20.920.995.873,00	25.606.270.877,00	20.028.032.850,00	17.87%
7	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	878.230.000,00	413.015.000,00	496.385.000,00	727.710.000,00	467.865.000,00	2.65%
8	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.977.700.500,00	3.207.539.000,00	3.721.480.500,00	5.55.933.200,00	2.951.035.000,00	6.94%
9	Belanja Perjalanan Dinas	73.281.279.178,00	80.188.404.051,00	101.983.117.813,00	115.785.678.394,00	108.280.909.683,00	8.43%
10	Belanja Perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-	-
11	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (kantor,mobil dinas,meubelair,peralatan dan perlengkapan dll)	10.877.507.947,00	317.467.274.462,45	361.982.548.504,84	430.926,194.698,00	384.384.691.399,00	70.21%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Dari data diatas, berdasarkan estimasi realisasi Tahun 2020, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Musi Rawas 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	**Belanja Operasi**	**747.627.688.874,00**	**745.288.267.053,00**	**763.331.828.089,00**	**792.518.396.657,00**	**779.598.784.669,00**	**789.911.149.819,00**
1	Belanja Pegawai	558.981.425.376,00	554.862.908.665,00	571.127.374.811,00	568.534.848.489,00	583.782.768.764,00	592.244.341.500,00
2	Belanja Barang dan Jasa	177.909.488.998,00	179.688.583.888,00	181.467.678.778,00	183.246.773.668,00	185.079.241.405,00	186.930.033.819,00
3	Hibah	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	40.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00
B.	**Belanja Tidak Terduga**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
C.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-**	**-**
1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH	**767.627.688.874,00**	**765.288.267.053,00**	**783.331.828.089,00**	**812.518.396.657,00**	**789.598.784.669,00**	**799.911.149.819,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.768.123.357.201,00	1.717.565.121.922,00	1.739.899.629.811,00	1.764.705.135.760,00	1.793.725.414.630,00	1.824.059.598.792,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.	Penerimaan Pembiayaan	74.298.089.560,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	TOTAL PENERIMAAN	**1.842.421.446.761,00**	**1.722.565.121.922,00**	**1.744.899.629.811,00**	**1.769.705.135.760,00**	**1.798.725.414.630,00**	**1.829.059.598.792,00**
	DIKURANGI						
4	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	**767.627.688.874,00**	**765.288.267.053,00**	**783.331.828.089,00**	**812.518.396.657,00**	**789.598.784.669,00**	**799.911.149.819,00**
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**1.074.793.757.887,00**	**957.276.854.869,00**	**961.567.801.722,00**	**957.186.739.103,00**	**1.009.126.629.961,00**	**1.029.148.448.973,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas (data diolah), 2021

Tabel 3.18 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2021. Ini dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (fiscal distress). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Kemudian, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program- program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

3.1. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
3.2. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah (Janji Bupati dan Wakil Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3.3. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.074.793.757.887,00	957.276.854.869,00	961.567.801.722,00	957.186.739.103,00	1.009.126.629.961,00	1.029.148.448.973,00
1..	Prioritas I	634.128.317.153,00	566.391.218.695,00	569.421.331.372,00	567.393.799.117,00	599.177.211.677,00	611.810.084.894,00
2.	Prioritas II	268.698.439.472,00	238.344.900.106,00	239.113.701.433,00	237.678.621.943,00	249.969.157.490,00	254.474.612.243,00
3.	Prioritas III	172.097.842.336,00	152.540.736.068,00	153.032.768.917,00	152.114.318.043,00	159.980.260.794,00	162.863.751.836,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas (Data diolah), 2021

3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas selain bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas,diharapkan juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi dan sumber pendanaan lainnya dari mitra pihak ketiga. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten maupun Perangkat Daerah Provinsi**.** Mitra pihak ketiga yang dimaksudkan adalah dari investor/swasta atau badan usaha lainnya yang bersedia untuk melakukan kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan melalui Penanaman modal/investasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan sumber pendanaan dari mitra pihak ketiga adalah :

1. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan pihak swasta atau dengan mitra pihak ketiga lain dengan perjanjian yang disepakati bersama melalui berbagai jenis skema pembiayaan.
2. Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sementara isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan pembangunan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai di masa datang yang didasarkan pada kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak/belum dapat diantisipasi.

Salah satu ancaman yang dimaksud diatas yaitu terjadinya wabah Pandemi Covid 19 yang masih terus berkepanjangan samapai saat ini, yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi dan telah menyebabkan banyak korban jiwa serta mempengaruhi hampir segala sendi kehidupan umat manusia terutama pertumbuhan ekonomi negara-negara didunia.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Permasalahan Per Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

1). Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.1) Pendidikan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf	97,06	98,02	97,79	98,19	97,79	99,64
2	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,69	6,85	7,18	7,28	7,51	7,52
3	APK SD/MI/Paket A (%)	113,70	118,50	121,53	112,16	81,74	110,56
4	APK SMP/MTs/Paket B (%)	95,20	94,86	97,96	91,82	95,76	101,74
5	APK SLTA (%)	69,18	73,59	68,91	78,28	75,29	76,07
6	APM SD/MI/Paket A (%)	98,63	99,18	98,30	99,49	99,90	99,90
7	APM SMP/MTs/Paket B (%)	83,58	89,24	87,31	86,25	100,39	97,99
8	APM SLTA (%)	60,34	55,38	57,63	61,70	62,60	62,57

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
***Angka sangat sementara*

Permasalahan:

a. Angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai tahap/tingkat kelas VIII pada sekolah lanjutan pertama, pada tahun 2020 sebesar 7,52 tahun sedangkan target pada tahun 2020 yaitu 8,20 tahun atau pada tingkat kelas IX sekolah lanjutan pertama ;
b. APM SMP/MTs/Paket B belum mencapai 100 % sebagaiman, pada tahun 2020
c. APM SMP/MTs/Paket B baru mencapai 97,99 %.

1.2) Kesehatan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kematian bayi/1000 KH	10,60	8,87	13,47	6,46	3,98	3,1
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,18	67,26	67,34	67,59	67,86	68,14
3.	Persentase Balita gizi Buruk	0,15	0,15	0,090	0,070	0,75	0,45
4.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000/pddk)	169,85	171,84	102,96	164,86	96,01	94,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

a. Angka harapan hidup pada tahun 2020 yaitu 68,14 tahun, hal ini belum memenuhi target pada tahun 2020 yaitu 69,27 tahun;
b. Masih adanya kasus gizi buruk, terlihat pada persentase gizi buruk pada tahun 2020 yaitu 0,45 %;
c. Masih adanya wabah penyakit menular, terutama wabah pandemi Covid 19;
d. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat yang masih rendah;

1.3) Pekerjaan Umum

Tingkat pencapaian target (jalan) :

Grafik 4.1

Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

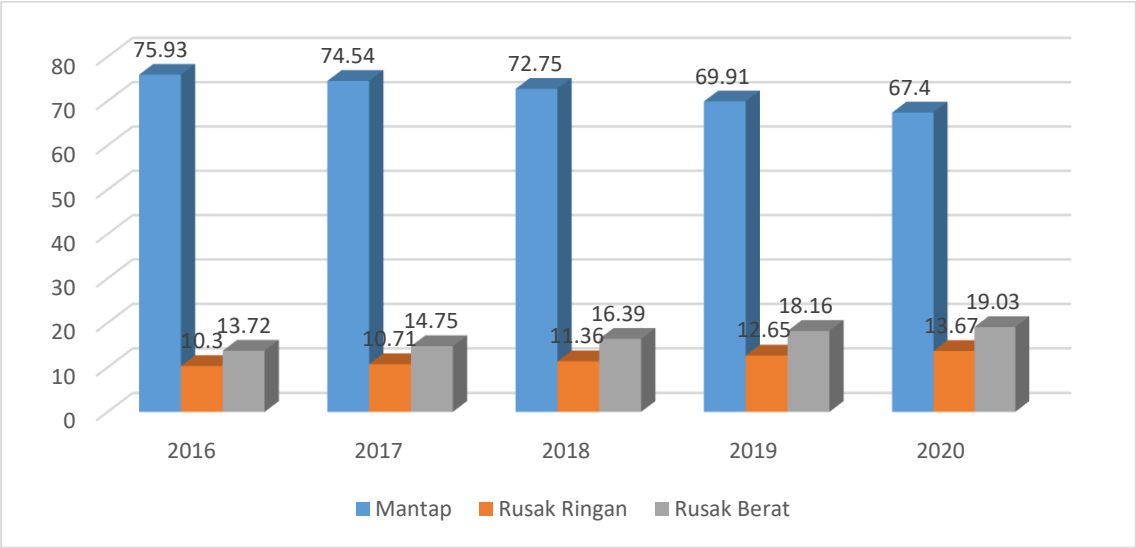

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah

Permasalahan :

Masih ada jalan yang belum dalam kondisis mantap, hal ini dapat dilihat dari persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2020, baru mencapai 75,93 %. Hal ini berarti masih ada sekitar 13,72 % jalan dalam kondisi rusak berat dan0,35 % dalam keadaan rusak ringan;

Tingkat Pencapaian Target (jembatan) :

Grafik 4.2

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

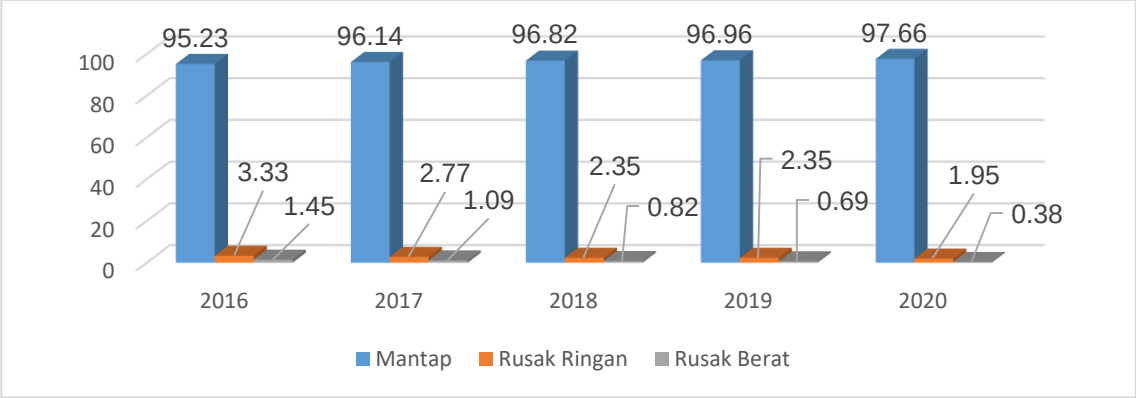

Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

1.4) Tata Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2031 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan saat ini, sehingga pada saat ini sedang dilakukan kembali penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang baru.

1.5) Kawasan Pemukiman Perumahan

Tingkat Pencapaian Target

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas setiap tahun mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2016 sebesar 64,97% menjadi 71,80% pada tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:

Grafik 4.3

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

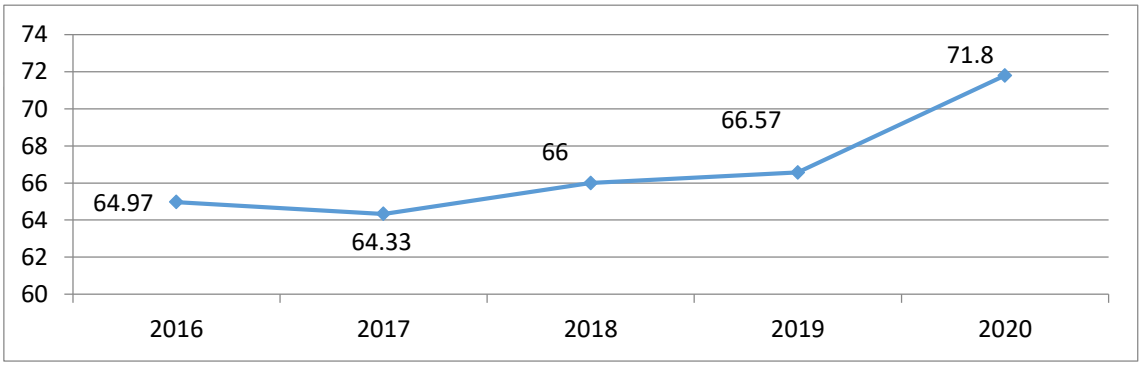

Tabel 4.3

Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah layak Huni

Tahun	Target	Realisasi
2016	80	64,97
2017	72,55	64,33
2018	74	66
2019	76	66,57
2020	78	71,8

Permasalahan :

Rasio rumah layak huni selama 5 (lima) tahun periode RPJMD sebelumnya, belum mencapai target yang ditetapkan.

1.7) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.4

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase Ketertiban Umum Dan Ketentram Masyarakat	90
2	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi kebakaran	90
3	Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	0
4	Persentase pendampingan Pembentukan relawan Pemadam Kebakaran di desa/ Kelurahan	0
5	Persentase pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan	0

Permasalahan:

a. Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran baru dapat dihitung setelah melihat realisasi tahun 2021;

b. Persentase pendampingan Pembentukan relawan Pemadam Kebakaran di desa/ Kelurahan baru dapat dihitung setelah melihat realisasi tahun 2021;

c. Persentase pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan baru dapat dihitung setelah melihat realisasi tahun 2021.

1.8) Sosial

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.5

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)	5,04	5,17	16,06	30,45	50,47
2	Angka kemiskinan (%)	14,3	14,24	13,76	13,37	13,50

Permasalahan :

Data yang kurang akurat tentang jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Musi Rawas sehingga belum maksimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2020 baru mencapai 50,47 %;

2). URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.1) Tenaga Kerja

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.6

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk yang bekerja	193.051	203.425	203.801	206.614	203.070	208.596
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,04	1,85	2,80	3,23	2,91	3,29
3.	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	197.071*	207.259	209.672	213.510	207.617	215.684

Permasalahan:

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,29 dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,93, pada tahun 2020 pengangguran terbuka berjumlah 7.088 jiwa. Sebagian besar masyarakat kabupaten Musi Rawas (angkatan Kerja) bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu dan mendapatkan upah mininum dibawah standar.

2.2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Capaian Kinerja

Tabel 4.7

Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengaplikasikan PPRG	30	20	45	70	56
2)	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Keluarga (%)	41	41	42	43	40
3)	Rasio KDRT (%)	0,0009	0,0015	0,003	0,0005	0,00055
4)	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,013	0,0329	0,0353	0,01	0,012
5)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (Nilai)	-	-	Pratama	Madya	Pratama

Permasalahan:

a. Belum maksimalnya kontribusi/produktivitas perempuan(ibu-ibu) dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dapat dilihat dari Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Keluarga pada tahun 2020 sebesar 40 %;

b. Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga.

2.3) Pangan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.8

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase pangan aman hasil pengawasan dan pembinaan (%)	80
2	Persentase penangan daerah rawan pangan	100
3	Ketersedian pangan(beras/ton)	593.687
4	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai AKG (%)	86

Permasalahan:

a. Persentase pangan aman hasil pengawasan dan pembinaan (%);

b. Belum terpenuhinya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2.4) Pertanahan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.9

Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Jumlah tanah aset	Jumlah tana aset bersertifikat sampai pada tahun 2020	Jumlah tanah aset belum bersertifikat sampai pada tahun 2020	Target sertifikasi tahun 2021	Target sertifikasi tahun 2021
1925 persil	1225 persil	700 persil	250 persil	450 persil

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Musi Rawas

Permasalahan:

a. Masih banyaknya aset tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang belum bersertifikat, pada tahun 2020 jumlah aset tanah belum bersertifikat sebanyak 700 persil;
b. Belum maksimalnya pemanfaatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, pada tahun 2020 sebanyak 276 persil aset tanah yang belum jelas peruntukannya.

2.5) Lingkungan Hidup

- Tingkat Pencapaian Target

Kabupaten Musi Rawas memiliki tiga macam sarana persampahan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) berjumlah satu, tempat pembuangan sementara (TPS) berjumlah 29 TPS, dan bank sampah berjumlah 27. Ketiga macam sarana tersebut tersebar di Kabupaten Musi Rawas, TPA berada di Desa Simpang Gegas, TPS tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

Permasalahan:

a. Kabupaten Musi Rawas memiliki tiga macam sarana persampahan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) berjumlah satu, tempat pembuangan sementara (TPS) berjumlah 29 TPS, dan bank sampah berjumlah 27. Ketiga macam sarana tersebut tersebar di Kabupaten Musi Rawas, TPA berada di

Desa Simpang Gegas, TPS tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

b. Permasalahan

c. Beberapa permasalaham di infrastruktur persampahan adalah:

2.6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4.10

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2020

NO	INDIKATOR PROGRAM	KETERANGAN REALISASI CAPAIAN				%TAS E	KET
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2020					
1	Persentase penduduk yang berusia 17 ke atas/telah menikah yang memiliki KTP	WAJIB KTP	288,913	MEMILIKI KTP	284,154	98.35	
2	Persentase Penduduk yang memilik KK	JUMLAH KK	125,960	MEMILIKI KK	116,727	92.67	
3	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	JUMLAH PENDUDUK	405,610	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	176,562	43.53	
4	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	130,415	MEMILIK AKTA 0-18 TAHUN	125,043	95.88	
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	PENDUDUK STATUS KAWIN (NON MUSLIM)	4,724	MEMILIK AKTA KAWIN	762	16.13	pasang
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian	STATUS CERAI HIDUP (NON MUSLIM)	51	MEMILIKI AKTA CERAI	14	27.45	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	PENDUDUK DILAPORKAN KEMATIAN	7,187	MEMILIKI AKTA KEMATIAN	4,158	57.85	
	Persentase Penduduk yang memiliki KIA	JUMLAH PENDUDUK USIA DIBAWAH 17 TAHUN	119,987	MEMILIKI KIA	24,284	20.24	

Sumber: Data Konsolidasi Semester I Tahun 2020 Dinas DukCaPil Kab. Musi Rawas

Permasalahan:

a. Belum maksimalnya jumlah penduduk yang memilik akta kelahiran;
b. Masih rendahnya kesadaran masyaraka dalam melaporkan peristiwa kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.

2.7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.11

Status Desa Tahun 2020

Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
0	44	136	6	0

Permasalahan :

a. Masih adanya desa tertinggal;
b. Belum adanya desa mandiri di Kabupaten Musi Rawas;

2.8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat Pencapaian Target

Grafik 4.4

Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020

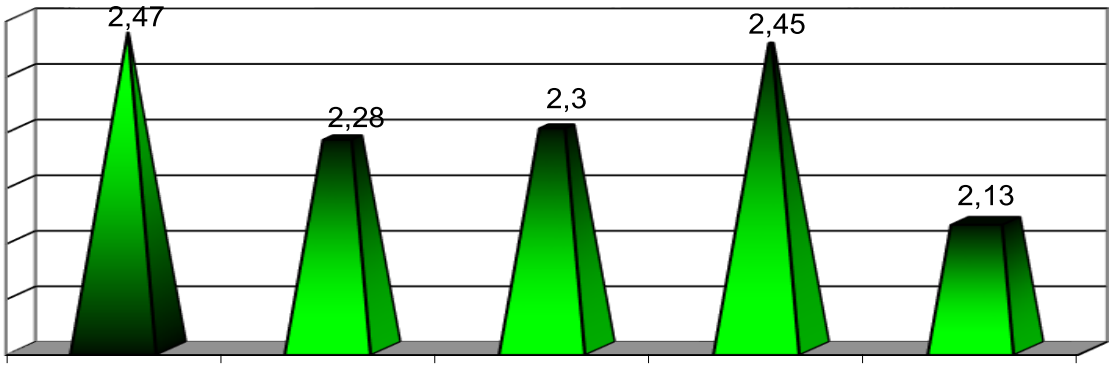

Permasalahan:

Capaian angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dari grafik di atas pada tahun 2020 sebesar 2,13 bila di bandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 2,15 belum memenuhi target.

2.9) Perhubungan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.12

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase ketersedian sarana dan prasarana infrastruktur Perhubungan	83
2	Persentase penurunan kejadian kecelakaan	67

Permasalahan :

a. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 memiliki 5 terminal yang masing – masing berkapasitas 450 kendaraan dan daya tampung kendaraan sebesar 50 kendaraan, selain terminal Kabupaten Musi Rawas juga memiliki pelabuhan sungai sebanyak 3 pelabuhan sungai, tetapi belum adanya terminal yang representatif;

b. Tidak adanya Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga Banyaknya kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi standar yang telah ditentukan.

2.10) Komunikasi dan Informatika

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.13

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase penuntasan blankspot aea	77
2	Persentase pemanfaatan dan pengembangan aplikasi	40
3	Persentase layanan penyebarlusan informasi pembangunan daerah	30

Sumber : Dinas Kominfo dan statistik 2020

Permasalahan :

a. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi (blank spot area);

b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas

2.11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.14

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase koperasi aktif	83
2	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	0,20

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2020

Permasalahan :

a. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM, sehingga masih ada koperasi yang belum aktif;
b. Rendahnya daya saing usaha Koperasi dan UMKM;

2.12) Penanaman Modal

Tingkat Pencapaian Target

Grafik 4.5

Jumlah nilai Investasi Berkala Nasional (Rp Triliun) Tahun 2016-2020

Permasalahan :

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sampai pada tahun 2020 sudah melampaui target yang ditetapkan, selanjutnya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu perlu adanya sarana dan prasarana pelayanan publik yang efektif dan efisien serta terintegrasi.

2.13) Kepemudaan dan Olahraga :

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.15

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase prestasi pemuda	79,33
2	Persentase prestasi olahraga	79,17

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga 2020

Permasalahan:

a. Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga di Tingkat Provinsi maupun Nasional, belum memuaskan.
b. Sarana dan Prasarana olahraga yang belum memadai, belum tersedianya gedung olahraga dan stadion.

2.14) Statistik

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.16

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Jumlah ketersediaan data/informasi/statistik daerah	3

Sumber : Dinas Kominfo dan Statistik 2020

Permasalahan :

Jumlah ketersediaan data/informasi/statistik daerah sampai pada tahun 2020 belum memenuhi target pada periode RPJMD sebelumnya.

2.15) Persandian

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.17

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase pengeloaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	25

Sumber : Dinas Kominfo dan Statistik 2020

Permasalahan :

Persentase pengeloaan persandian dan keamanan informasi di daerah sampai pada tahun 2020 belum memenuhi target pada periode RPJMD sebelumnya. Yaitu 80 %.

2.16) Kebudayaan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.18

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase lembaga adat yang aktif (%)	60

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2020

Permasalahan :

Masih rendahnya persentase lembaga adat yang aktif, tentu saja berpengaruh terhadap pemberdayaan, pengembangan, pelestarian adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional.

2.17) Perpustakaan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.19

Capaian Kinerja Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Indeks budaya literasi daerah	29,73
2.	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	15,50
3	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	12,66

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2020

Permasalahan :

Masih rendahnya tingkat budaya membaca masyarakat, hal ini ditandai dengan rendahnya indeks budaya literasi daerah pada tahun 2020 yang jauh lebih rendah dibandingkan indek literasi budaya nasional. Selain itu, dapat

2.18) Kearsipan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.20

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Sampai Pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai PadaTahun 2020
1	Persentase OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku	57,2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2020

Permasalahan :

a. Terbatasnya jumlah SDM Bidang Kearsipan;
b. Belum tersedianya gedung kearsipan yang representatif.

3). URUSAN PILIHAN

3.1) Perikanan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.21

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	78.190,34
2	Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun)	36,49*

Sumber : Dinas Perikanan 2020

Permasalahan :

a. Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun) masih rendah:

b. Belum optimalnya penanganan pasca panen hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah;

3.2) Pariwisata

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.22

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (Orang/Tahun)	68.186	72.624	54.380	46.003	48.892	10.100
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,24	0,033	0.021	0.018	0.043	-

Sumber:Data BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan :

a. Jumlah kunjungan wisata semakin menurun;

b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

3.3) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.23

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Persentase capaian peningkatan produksi tanaman pangan (%)	1
2	Persentase capaian peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1
3	Persentase capaian peningkatan produksi peternakan (%)	1

Sumber:Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan :

a. Alih fungsi lahan pertanian (padi irigasi teknis) menjadi lahan non pertanian , turut mempengaruhi capaian produksi tanaman pangan khususnya padi;

b. Terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, sehingga tidak semua lahan saah teraliri oleh aliran irigasi.

c. Sebagian petani melakukan usaha peternakan masih secara tradisional/usaha sampingan;

3.4) Perkebunan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.24

Capaian Kinerja Urusan Perkebunan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Persentase capaian peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	
	- Komoditas karet	1
	- Komoditas kelapa sawit	1

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang mandiri;
b. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani;
c. Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil perkebunan;

3.5) Perdagangan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.25

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,85	7,68	7,81	8,73	9,2*	7,87
2	Prosentase Sarana dan Prasarana Pasar Yang Layak (%)	-	45,76	49,15	57,63	64,41	44,07

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Masih banyaknya pasar yang kondisinya belum layak;

3.6) Perindustrian

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.26

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,22	12,64	13,51	13,94*	12,66
2	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	78,47	54,63	50,70	50,98	46,45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan :

Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.

3.7) Transmigrasi

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.27

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Transmigrasi swakarsa KK)	-	-	-	-	-
2	Transmigrasi umum (KK)	-	-	-	-	-
3	Prosentase Transmigrasi Swakarsa (%)	2,77	2,77	2,77	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Keterangan: Untuk Tahun 2016 – 2020 Tidak ada Penempatan Transmigrasi lagi

Permasalahan:

Sejak tahun 2016-2020 tidak ada penempatan Transmigrasi lagi di Kabupaten Musi Rawas.

4). URUSAN PENUNJANG

4.1) Sekretariat Daerah

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.28

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan metode kompetitif (%)	60
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Belum optimalnya pelayanan public pengadaan barang/jasa yang transparan dan profesional

4.2) Sekretariat DPRD

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.29

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan (%)	85
2	Persentase Surat Keputusan DPRD yang diputuskan (%)	85

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Belum optimalnya tata kelola kelembagaan DPR

4.3) Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.30

Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	86
2	Tingkat artisipasi masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	89
3	Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan OKP	74
4	Cakupan Pembinaan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	87
5	Angka Penanganan Konflik Sosial	84

Permasalahan:

a. Belum maksimalnya partisipasi penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Rawas;

b. Masih kurangnya jumlah ASN yang membidangi ilmu pemerintahan, sosial dan politik.

4.4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.31

Capaian Kinerja BPBD Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Indeks penurunan dampak resiko bencana	0
2	Persentase penanggulangan bencana(%)	0

Permasalahan:

a. Capaian indeks penurunan dampak resiko bencana baru akan dihitung setelah melihat capaian pada tahun 2021;
b. Persentase penanggulangan bencana baru akan dihitung setelah melihat capaian pada tahun 2021.

4.5) Perencanaan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.32

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Persentase kesesuaian program di RKPD dengan program RPJMD, RPJMD Provinsi dan RPJMN	95
2	Persentase usulan dari pemangku kepentingan yang terakomodir dalam dokumen RKPD	85
3	Persentase capaian kinerja tujuan dan asaran pembangunan daerah dalam RPJMD (%)	95

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

a. Keterbatasan pemahaman pemangku kepentingan tentang sistem,

mekanisme dan perencanaan partisipatif.

b. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian di Bappeda.

4.6) Pajak dan retribusi

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.33

Capaian Kinerja BPPRD Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Jumlah peningkatan pajak daerah	1,5 T

Sumber: BPPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

a. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mempu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD kabupaten Musi Rawas

b. Sarana aplikasi kurang memadai sehingga menghambat pelayanan pajak daerah

4.7) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.34

Capaian Kinerja BKPSDM Kab. Musi Rawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian PadaTahun 2020
1	Indeks Profesionalitas Aparatur	57,08
2	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian	88,02

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

a. Masih ada penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya

b. Belum meratanya sumber daya aparatur yang berkompetensi khusus.

4.8) Penelitian dan Pengembangan

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.35

Capaian Kinerja Balitbang Kab. Musi Rawas Sampai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai Tahun 2020
1	Jumlah Inovasi Daerah (Inovasi Daerah)	50

Permasalahan :

Belum otimalnya pemanfaatan hasil inovasi

4.9) Inspektorat

Tingkat Pencapaian Target

Tabel 4.36

Capaian Kinerja Inspektorat Kab. Musi Rawas Sampai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Sampai Tahun 2020
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti (%)	97,41
2	Level Maturitas SPIP	Level 3
3	Persentase PD yang memperoleh hasil Evaluasi SAKIP minimal kategori BB (%)	40
4	Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	20
5	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (%)	95,47
6	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	97,22
7	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Permasalahan :

a. Masih banyak perangkat daerah yang belum begitu memahami tentang SAKIP;

b. Masih rendahnya Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada di masing-masing urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan akibat, masalah utama dan sebab. Pentingnya analisa pohon masalah sehingga dapat diketahui akar-akar masalah sebagai penyebab dari masalah utama yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, kelompok-kelompok dari akar masalah nantinya dapat diangkat menjadi isu strategis daerah.

Gambar 4.1.

Pohon Masalah Pada Pembangunan Daerah

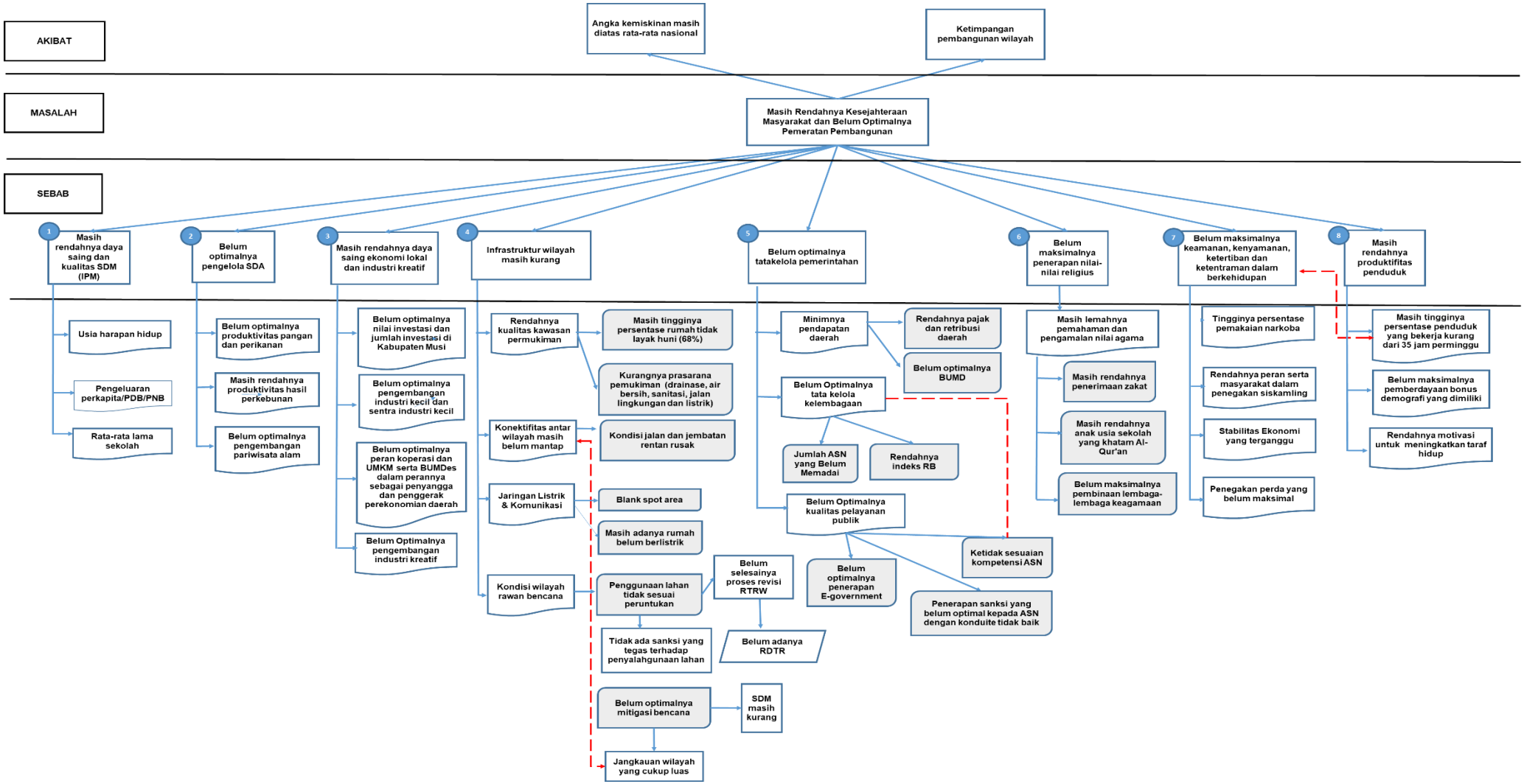

4.1.2 Analisa Pohon Masalah Terhadap Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Melalui 8 (delapan) penyebab masalah pada pohon masalah diatas, maka permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat diidentifikasi melalui evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan sebagai berikut :

4.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat Pencapaian Target

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2016-2019 dalam periode RPJMD 2016-2021 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya wabah Pandemi Covid 19. Capaian Kabupaten Musi Rawas senantiasa menunjukkan progress yang cukup signifikan tetapi masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Tinggi atau rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pada grafik berikut ini :

Grafik 4.6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

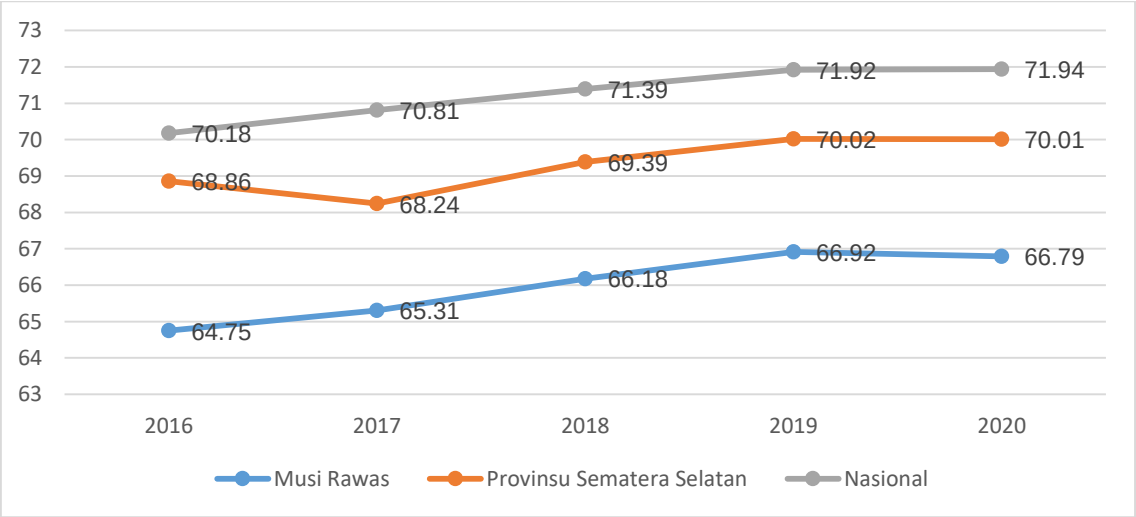

Sumber : BPS Provinsi Sumsel 2020

Permasalahan:

Target RPJMD pada Tahun 2021 (tahun terakhir) : belum tercapai, target RPJMD Tahun 2021 adalah 67,60 masih ada gap 0,81 %. Melalui intervensi terhadap upaya pencapaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli, diharapkan target IPM pada tahun terakhir RPJMD dapat tercapai. Selanjutnya pada periode RPJMD yang akan datang, untuk mencapai target IPM yang lebih tinggi dapat diupayakan melalui :

a. Bidang Pendidikan
   - Alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan amanat undang-undang (lebih dari 20 %);
   - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata serta peningkatan kulaitas pelayanan pendidikan.

b. Bidang Kesehatan
   - Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kesehatan.

c. Daya Beli

   Melalui upaya peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas maka kemampuan atau daya beli penduduk akan meningkat secara signifikan.

4.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat Pencapaian Target

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi rill ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan pembangunan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan realisasi PDRB dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku selama Tahun 2016-2020, seperti dalam grafik berikut ini :

Grafik 4.7

PDRB Atas harga Berlaku (Milyar Rupiah)

Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

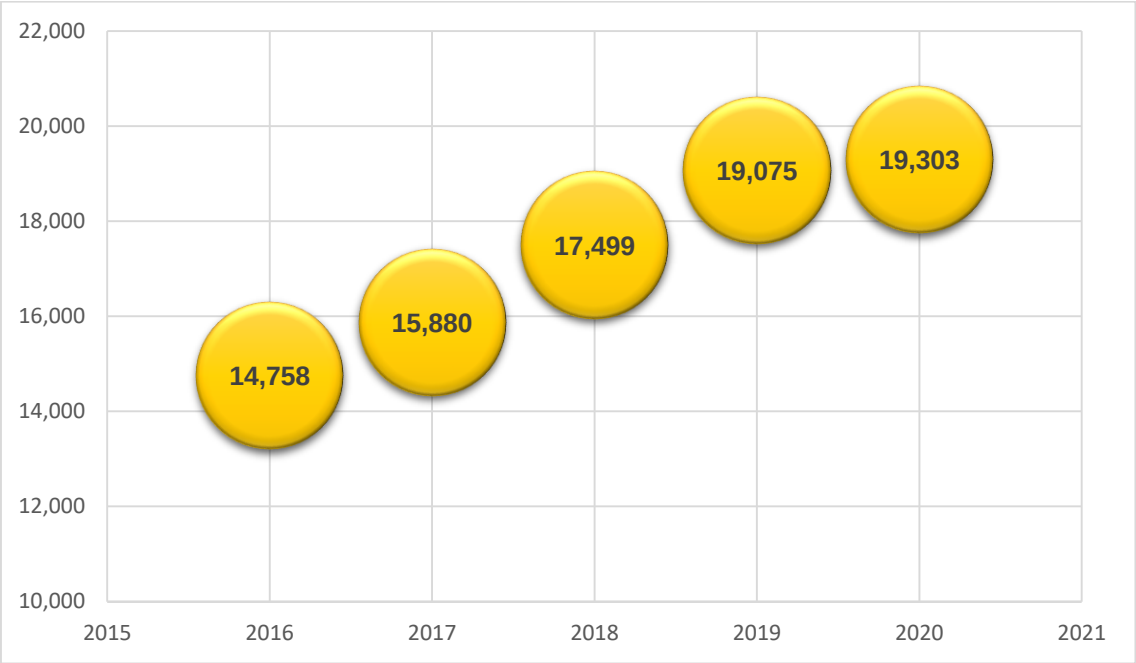

Berdasarkan grafik diatas, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat secara signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, bahkan capaian pada tahun 2020 telah melampaui target RPJMD yaitu Rp. 13.489.232.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 19.303.450.000.000,-. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku memiliki peranan besar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Permasalahan:

Tahun 2016-2020 merupakan tahun berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dengan *leading sector* yang menjadi unggulan selama ini sebagai penyumbang PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor pertambangan dan penggalian. Diharapkan pada periode RPJMD yang akan datang, untuk meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas maka seluruh sektor PDRB harus diupayakan seoptimal mungkin. Tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor

pertambangan dan penggalian, seperti halnya sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya.

Dengan melihat capaian PDRB selama 5(lima) tahun terakhir, tentunya kita semua berharap hal ini dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas pada peroide RPJMD yang akan datang.

4.1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pencapaian Target

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi modern yang ditujukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah/wilayah dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB dapat ditunjukkan berdasarkan struktur lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Musi Rawas pada kurun waktu 2016-2020 selalu diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun

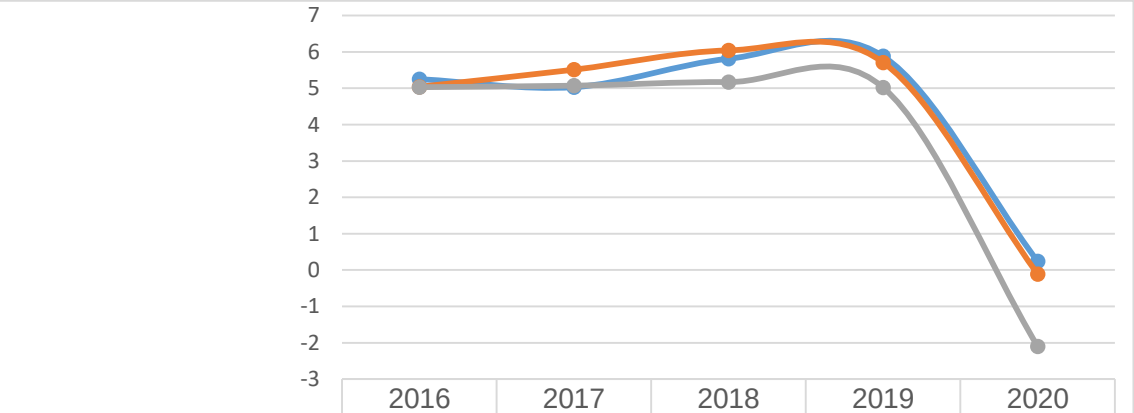

	2016	2017	2018	2019	2020
Musi Rawas	5.25	5.03	5.81	5.88	0.24
Sumatera Selatan	5.04	5.51	6.04	5.71	-0.11
Nasional	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.1

Dilihat dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dalam beberapa tahun terakhir menunjukan tren yang terus meningkat, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang berperan dan berkontribusi banyak pada PDRB. Namun Pertumbuhan Sektor Unggulan/ Sektor Primer pada tahun 2016-2020 yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pertumbuhannya cenderung statis hanya berkisaran 3 (tiga) persen, dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lain, sektor ini memiliki daya saing yang kuat namun pertumbuhannya lambat, sehingga posisi sektor pertanian merupakan kelompok sektor yang menunjukkan kecenderungan sebagai sektor yang tertekan tetapi berpotensi berkembang hal ini harus diupayakan oleh pemerintah karena mayoritas perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Rawas berada disektor tersebut artinya sangat sensitif terhadap kebijakan strategis dan faktor-faktor kondisi eksternal.

Permasalahan:

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2019, tetapi mengalami kemerosotan tajam pada tahun 2020 akibat wabah Pandemi Covid 19. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yaitu :

a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang tersedia;
b. Daya saing ekonomi lokal dan indutri kreatif yang relatif masih rendah;
c. Pandemi Covid 19 yang mulai mewabah di Kabupaten Musi Rawas pada awal tahun 2020.

Sektor pertanian merupakan komoditi unggulan daerah dan sangat berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

b). Laju Pertumbuhan Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan meningkat ini dikarenakan Luas Panen Sawah pada tahun 2017 sudah mencapai 58.213 Ha meningkat 7.885 Ha dari tahun 2016;
c). Sedangkan Palawija luas panen adalah sebesar 14.609 Ha juga meningkat sebesar 5.860 Ha. Perkebunan kopi meningkat dengan luas wilayah 3.782 Ha

menjadi 3.816 Ha;

d). Perkebunan sawit Mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu 35.221 Ha sebelumnya di tahun 2018 sebesar 34.789 Ha. perkebunan kelapa sawit luas areal terbesar berada di Kecamatan Muara Kelingi yaitu sebesar 10.107 Ha pada Tahun 2019 dan diikuti Muara Lakitan sebesar 8.787 Ha pada Tahun 2019;

e). Namun perkebunan karet mengalami penurunan luas areal pada tahun 2018 sebesar 133.921 Ha menjadi 131.538 Ha di tahun 2019. Kecamatan BTS Ulu adalah kecamatan dengan luas areal tanam terbesar untuk perkebunan karet yaitu 21.502 Ha pada tahun 2019 turun 12 Ha yang pada tahun 2018 seluas 21.514 Ha.

Ditinjau lebih lanjut sektor-sektor potensial seperti industri pengolahan dan Perdagangan perlu diperhatikan karena tren kenaikannya baik dan lebih baik pertumbuhannya dibandingkan sektor Pertanian.

1. Untuk Sektor Industri dan pengolahan tumbuh sebesar 6,06 persen atau Rp. 2,5 Triliun pada tahun 2019.
2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 6,94 atau Rp. 1,7 Triliun selama tahun 2019.

Kedua Sektor ini merupakan sektor sekunder yang sangat berpotensi untuk berkembang dan membantu sektor primer apabila sektor primer kurang berkembang.

4.1.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Tingkat Pencapaian Target

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Target Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.746.948 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 48.800.000.

Grafik 4.9

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 – 2020

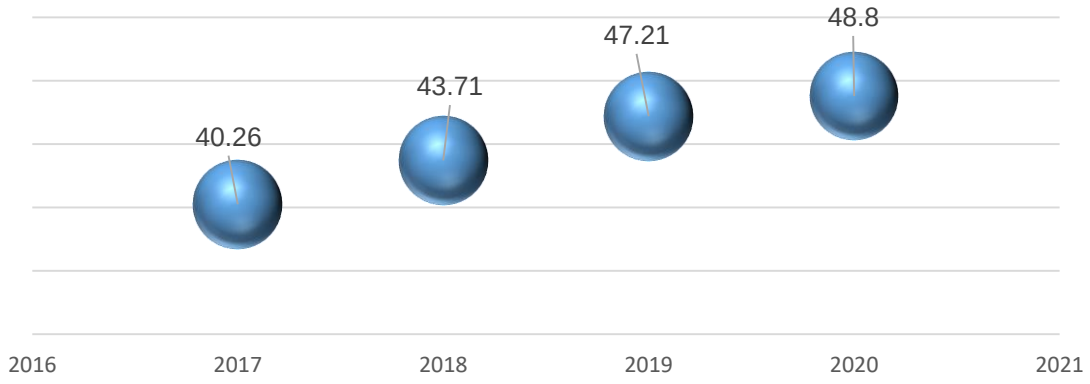

Sumber : PDRB Kab. Musi Rawas menurut Lapangan Usaha 2017-2020

Permasalahan:

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan angka PDRB per kapita dapat dilakukan melalui :

a. Meningkatkan produktifitas penduduk
b. Menekan laju inflasi

4.1.2.5 Gini Ratio

Tingkat Pencapaian Target

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, angka 0 menunjukan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukan tidak merata sempurna (ketimpangan pendapatan).

Grafik 4.10

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2018

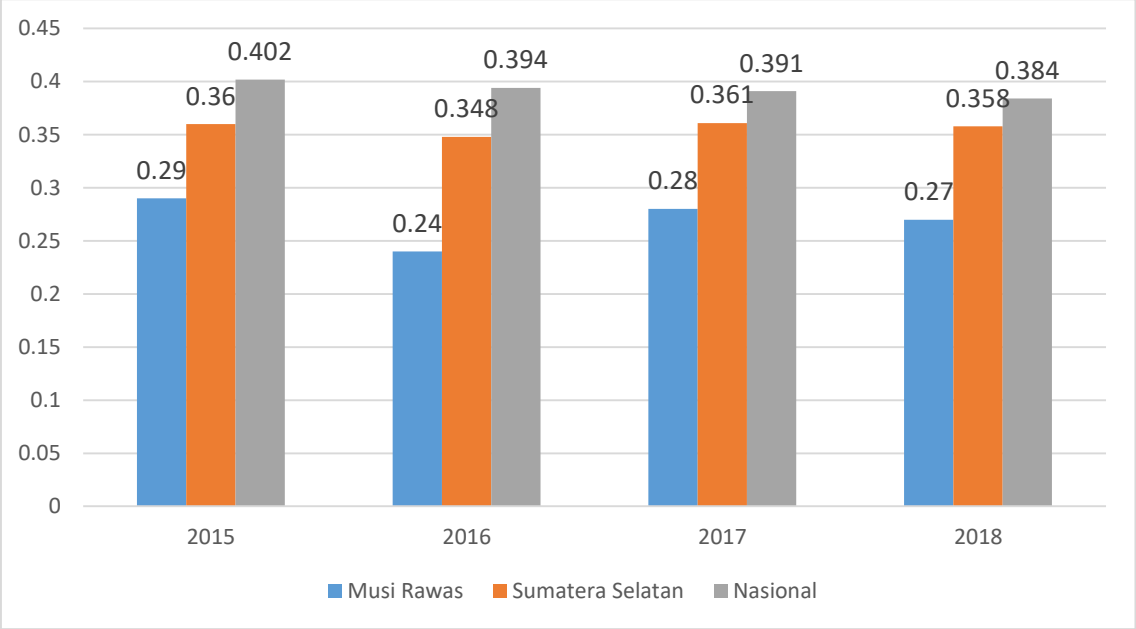

Sumber : BPS Sumsel Tahun 2019, BPS Mura 2019

Pada grafik gini ratio di Kabupaten Musi Rawas berfluktuatif, jika dilihat dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi hingga mencapai 0,270 persen di Tahun 2018. Penurunan kesenjangan ekonomi yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,240 persen namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 yaitu 0,280 persen dan tahun 2018 menjadi 0,27 persen. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional, maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2018 masih berada di bawah Provinsi Sumsel yang mencapai 0,358 dan Nasional yang mencapai 0,384.

Permasalahan :

Kabupaten Musi Rawas Gini Ratio mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini menunjukan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional.

Beberapa hal yang menyebabkan masih adanya ketimpangan pendapatan diantara penduduk yaitu :

Belum optimanya upaya pemerataan pembangunan, terutama dalam hal pembangunan Infrastruktur Wilayah. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang dimaksud menyangkut kualitas kawasan permukiman, tingkat kemantapan konektifitas antarwilayah, pemerataan dan kualitas jaringan listrik dan komunikasi, serta kondisi infrastruktur daerah rawan bencana.

4.1.2.6 Inflasi

Tingkat Pencapaian Target

Inflasi adalah Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Tabel 4.37

Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) Kabupaten Musi Rawas 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	5,16 %	4,86 %	1,54 %	2,42 %	2,17 %

Sumber: BPS

Permasalahan:

Beberapa faktor yang menjadi penyebab sering terjadinya inflasi antara lain :

a. Kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia;
b. Masalah keterbatasan pangan yang memacu kenaikan harga.

c. selain itu sektor yang mengalami tingkat inflasi empat besar paling tinggi adalah sektor perusahaan dan jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan air bersih, lalu sektor bangunan. Sedangkan rendahnya inflasi berada di sektor pertambangan dan penggalian.

Akan tetapi angka inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. Angka optimal yang harus dijaga pada kisaran 0-5%.

4.1.2.7 Kemiskinan

Tingkat Pencapaian Target

Angka Kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,50 % akibat dampak dari adanya wabah Covid-19, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan publik di Kabupaten Musi Rawas. Ketika persoalan-persoalan yang menjadi penyebab masih rendahnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang belum optimal di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas maka sampai pada saat itu juga Angka Kemiskinan belum dapat diturunkan seminimal mungkin.

Sampai dengan Tahun 2019, berkat dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kerja keras mandiri Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, telah berupaya maksimal mengentaskan kemiskinan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2015-2020.

Tabel 4.38

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	58.010	55.500	54.960	54.760	53.820	54.950
Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	15,13	14,30	14,24	13,76	13,37	13,50

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas 2020

Grafik 4.11

Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

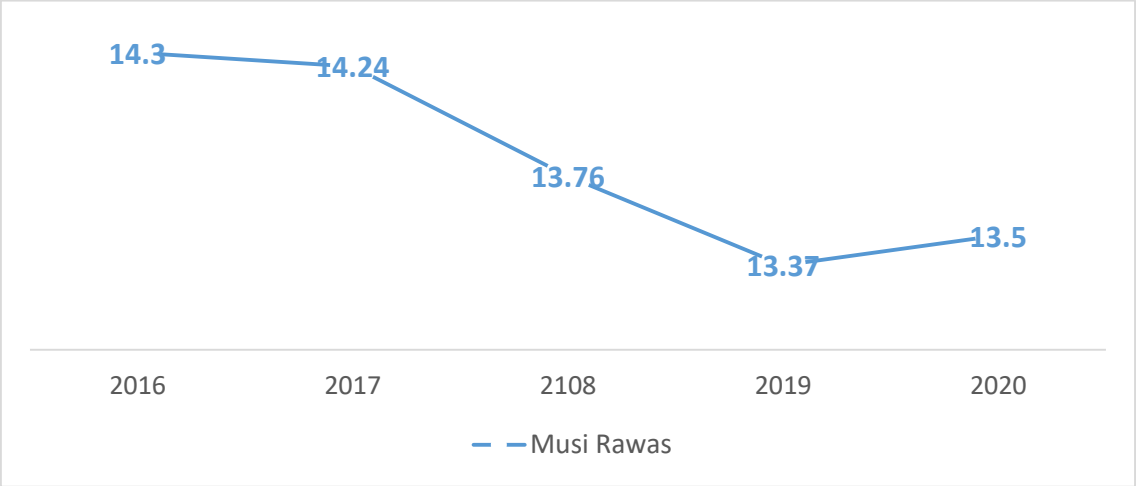

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Target RPJMD pada tahun 2020 untuk jumlah penduduk diatas garis kemiskinan belum tercapai, dengan Angka kemiskinan sebesar 13,50 %. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Musi Rawas yang hidup diatas garis kemiskinan sebesar 86,63 %, belum mencapai target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan sebesar 87,33 %.

Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.

4.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pencapaian Target

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dan penurunan antara tahun 2015-2020, pada tahun 2016 sebesar 2,04, mengalami penurunan menjadi 1,85 pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 2,80 dan pada tahun 2018 sebesar 3,23, mengalami penurunan kembali menjadi 2,91 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,29 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas agar anggaran dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya dukung yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Perhatian terhadap pengangguran perlu diberi porsi yang lebih, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 4.12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020

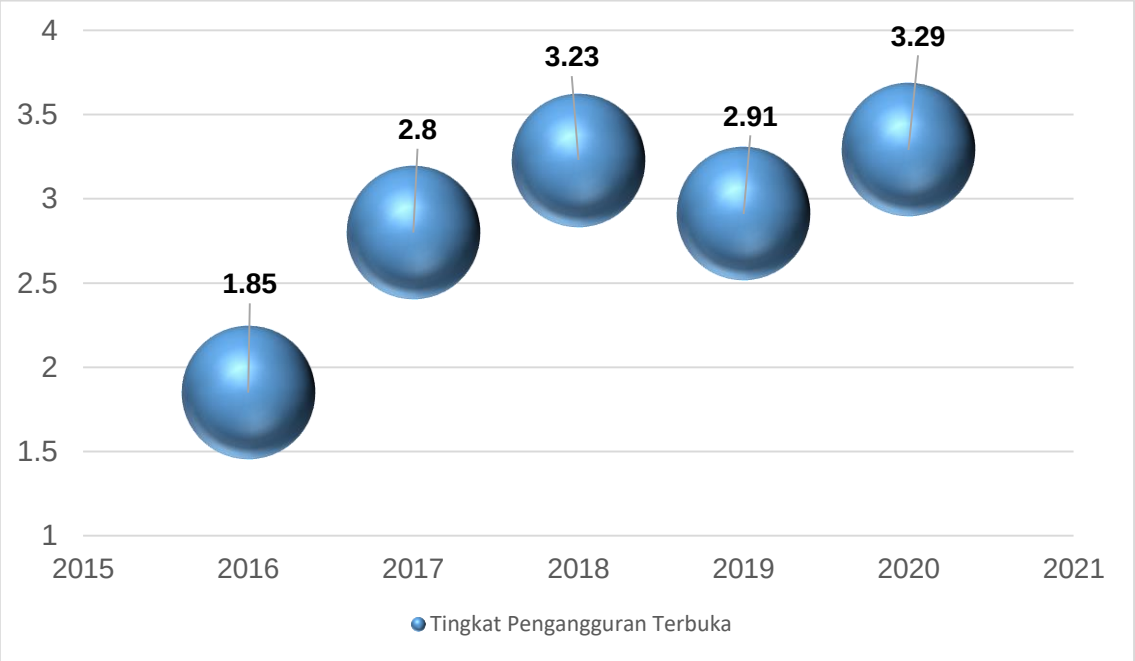

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas lebih rendah dibanding dengan Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Nasional, namun apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan, kabupaten Musi Rawas mempunyai angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Masih rendahnya produktivitas pekerja sektor formal
b. Masih banyak penduduk yang bekerja di sektor nonformal
c. Upah pekerja nonformal fluktuasi dan masih banyak yang dibawah UMK
d. Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak memiliki kemampuan yang cukup

untuk memasuki dunia kerja ataupun menciptakan lapangan kerja sendiri.

e. Selain dari itu juga, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA), rendahnya daya saing ekonomi lokal dan industri kreatif.

f. Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan formal, lebih diperparah lagi akibat terjadinya wabah Pandemi Covid 19.

4.1.2.9 Indeks Kinerja Infrastruktur

Fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas adalah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, diantaranya yang terkait secara langsung dengan kepentingan publik adalah :

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tingkat Pencapaian Target

Pada sektor infrastruktur Jalan, berdasarkan data Kabupaten Musi Rawas mempunyai Jalan Nasional (Arteri Primer) dengan panjang 148,64 Km, Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer) dengan panjang 50,28 km, dan Jalan Kabupaten (Kolektor dan lokal) dengan panjang 1.420,49 Km. Kondisi jalan dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.39

Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik (Km)	631,92 (44,96%)	677,43 (47,69%)	739,38 (50,05%)	773,82 (54,48%)	80.34 (56.76%)
2	Sedang (Km)	315,42 (22,44%)	305,42 (21,50%)	286,96 (20,20%)	285,08 (20,07%)	272.18 (19.16%)
3	Rusak Ringan (Km)	190,69 (13,57%)	179,68 (12,65%)	161,36 (11,36%)	152,13 (10,71%)	147.07 (10.35%)
4	Rusak Berat (Km)	267,46 (19,03%)	257,95 (18,16%)	232,79 (16,39%)	209,46 (14,75%)	194.89 (10.35%)\
Total		**1.420,49**	**1.420,49**	**1.420,49**	**1.420,49**	**1,420.48**

Sumber : Dinas PUBM Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Pada sektor infrastruktur Jembatan, total panjang jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Rawas adalah 3,763,38 meter. Pada tahun 2020

jembatan dalam kondisi baik sepanjang 3.344,20 m atau 88,86 %, kondisi sedang 331,22 m atau 8,80 %, kondisi rusak ringan 73,53 m atau 1,95 % dan kondisi rusak berat 14,43 m atau 0,39 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.40

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

No	Kondisi Jembatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	2.730,5 (84,31)	3.149,20 (86,60)	3.511,7 (88,30)	3.243,2 (87,95)	3,344.20 (88.86%)
2	Sedang	353,5 (10,92)	346,43 (9,53%)	339,36 (8,50%)	332,29 (9,01%)	331.22 (8.80%)
3	Rusak Ringan	107,8 (3,3%)	100,73 (2,77%)	93,66 (2,40%)	86,59 (2,35%)	73.53 (1.95%)
4	Rusak Berat	46,8 (1,455)	39,73 (1,09%)	32,66 (0,80%)	25,59 (0,69%)	14.43 (0.39%)
	Total	**3.238,6**	**3.636,09**	**3.977,38**	**3.687,67**	**3.763,38**

Sumber : Dinas PUBM Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Beberapa permasalah infrastruktur jalan dan jembatan:

a. Perencanaan Pembangunan Infrastrustur Jalan dan Jembatan Masih Berbasis Anggaran Belum Berbasis Database dan Kebutuhan: Belum tersedianya database jalan dan jembatan yang baik yang mudah diupdate dan berbasis spasial (*Integrated Road Management System* (IRMS) yang memuat data : Ujung dan Pangkal, Panjang, Lebar, Material, Lokasi yang rusak. Data yang tersedia baru dalam format tabular. Hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan (perbaikan, peningkatan, pelebaran jalan) yang belum mempertimbangkan skala prioritas, waktu pencapaian target, Selain itu perencanaan infrastruktur jalan belum berorientasi pada tuntas, sehingga banyak jalan yang umur pakainya sangat pendek karena tidak semua jalan dilengkapi dengan dokumen perencanaan (DED) yang lengkap.

b. Belum terintegrasinya jalan dan jembatan dengan kelengkapan pendukungnya: sebagian besar jalan kabupaten belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung (kelengkapan) jalan, seperti rambu-rambu, penerangan, dan marka jalan, selain itu fasilitas drainase, trotoar, dan bahu jalan juga

masih belum memadai. Pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman di Kabupaten Musi Rawas belum diikuti dengan kelengkapan fasilitas pendukung jalan seperti drainase, sehingga berakibat timbulnya genangan pada waktu musim penghujan. Sampai saat ini tidak ada database dan masterplan terkait dengan kelengkapan jalan, dan fasilitas jalan (drainase, trotoar, bahu jalan).

2. Infrastruktur Persampahan

Tingkat Pencapaian Target

Kabupaten Musi Rawas memiliki tiga macam sarana persampahan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) berjumlah satu, tempat pembuangan sementara (TPS) berjumlah 29 TPS, dan bank sampah berjumlah 27. Ketiga macam sarana tersebut tersebar di Kabupaten Musi Rawas, TPA berada di Desa Simpang Gegas, TPS tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.

Permasalahan:

Beberapa permasalaham di infrastruktur persampahan adalah:

a. Belum adanya konsep (masterplan/roadmap) pengelolaan sampah dari hulu ke hilir : Dokumen ini seharus ada dan memuat terkait dengan jumlah dan lokasi sebaran sarana dan prasarana persampahan, rencana dan target pencapaian, kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia. Sehingga dalam perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pada database yang aktual dan up to date;
b. Tingkat jangkauan (aksesibilitas) penanganan sampah masih sangat kecil, tidak semua kecamatan terlayani angkutan sampah, pelayanan sampah saat ini masih fokus di Muara Beliti, Tugumulyo, Megang Sakti sedangkan kecamatan lainnya belum terlayani.

3. Infrastruktur Jaringan Air Bersih

Tingkat Pencapaian Target

Cakupan layanan air bersih perpipaan dengan BLUD SPAM baru memenuhi 57,81 %, Pamsimas mencapai 0,31 %, sedangkan sisanya non perpipaan mencapai 41,88 %. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan berupa jumlah penduduk yang telah memiliki akses air minum yang layak dari pelayanan BLUD SPAM, PAMSIMAS dan sumur pribadi di Kabupaten Musi Rawas mencapai 95,89 %.

Grafik 4.13

Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap Air Minum Layak Tahun 2016 – 2020

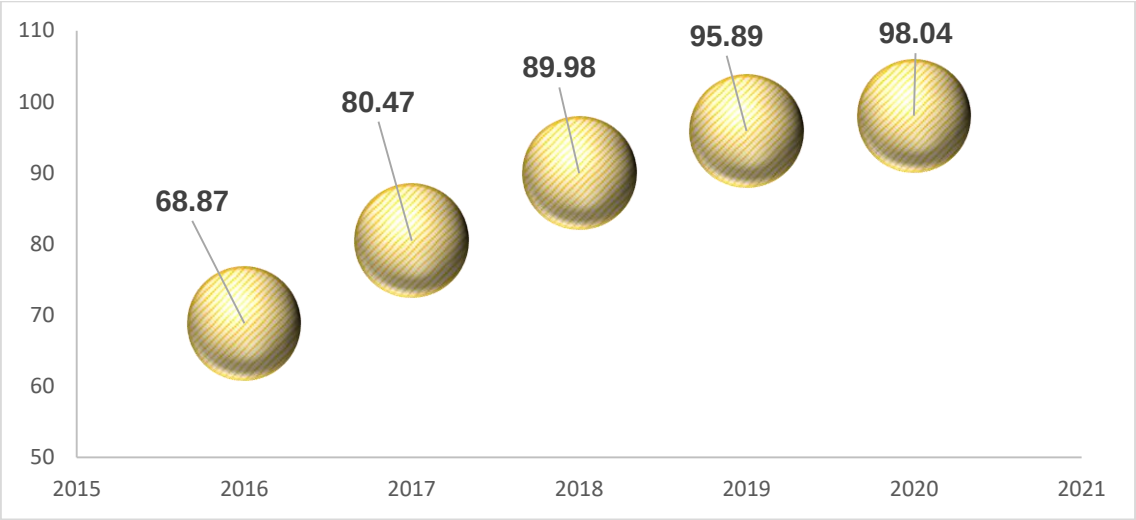

Sumber : Dinas PUCKTRP Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Permasalahan:

Beberapa permasalahan terkait dengan infrastruktur air bersih adalah:

a. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan yang masih rendah. Dikarenakan Keterbatasan idle capacity air bersih perpipaan BLUD SPAM.

b. Tingkat kebocoran/kehilangan air, sebesar 35 % dari jumlah air yang didistribusikan. Hal tersebut masih menunjukkan belum optimalnya pelayanan BLUD SPAM dalam mendistribusikan air bersihnya. Karena berdasarkan standar, seharusnya tingkat kebocoran/kehilangan air adalah 20%.

4. Infrastruktur Sanitasi

Tingkat Pencapaian Target

Berdasarkan data profil sanitasi cakupan layanan untuk *on site system* sebesar 92,17 % dari total penduduk Kabupaten Musi Rawas, yaitu terdiri atas sistem *on site* individual (tangki septik) mencakup 89,90 % dan sistem *on site* komunal (MCK, MCK++) mencakup 2,28 %. Jumlah rumah yang belum mempunyai sarana jamban sebesar 7,82 %. Sedangkan untuk drainasie belum tersedia dan terdata dengan baik, Namun berdasarkan hasil observasi, Jenis drainase yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas mayoritas adalah drainase sekunder sebesar 53% yang merupakan saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer, diikuti dengan 31% jenis drainase tersier dan 16% drainase primer.

Grafik 4.14

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Musi Rawas

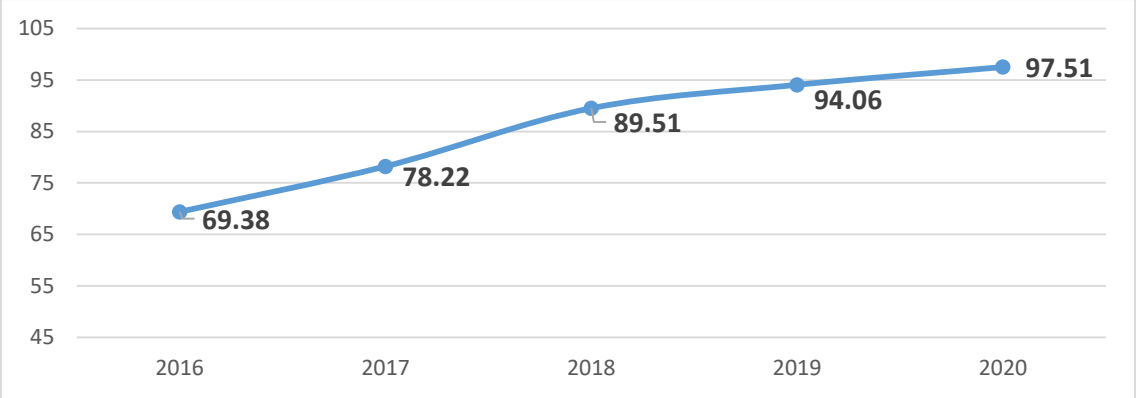

Permasalahan:

Beberapa permasalahan di infrastruktur sanitasi :

a. Sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Simpang Gegas Tidak berfungsi dengan optimal.

b. Belum adanya database drainase yang update, sehingga banyak kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase yang tidak terrecord dengan baik volume maupun sebarannya.

c. Masih bercampurnya jaringan sanitasi limbah domestik dengan jaringan

drainase dan jaringan irigasi, padahal secara fungsi seharusnya ketiga jaringan tersebut berbeda dan tidak bisa bercampur.

d. Belum ada mobil sedot tinja

e. Belum memiliki regulasi pengelolaan air limbah

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tingkat Pencapaian Target

Kabupaten Musi Rawas mempunyai data jumlah rumah berdasarkan data terakhir dari Dinas Kesehatan dan Musi Rawas Dalam Angka Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 125.960 unit dengan jumlah penduduk sebesar 403.393 jiwa. Dari jumlah rumah tersebut dikategorikan menjadi Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.41

Jumlah Rumah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Klasifikasi		Jumlah Rumah
		Rumah Layak	RTLH	
1	BTS Ulu	2.241	3.740	5.981
2	Jayaloka	9.789	370	10.159
3	Megang Sakti	1.573	4.401	5.974
4	Muara Beliti	4.336	958	5.294
5	Muara Kelingi	10.047	5.271	15.318
6	Muara Lakitan	12.623	5.026	17.649
7	Purwodadi	12.282	644	12.926
8	Selangit	10.328	1.870	12.198
9	Sukakarya	8.302	321	8.623
10	STL Ulu	791	3.876	4.667
11	Sumber Harta	8.196	1.358	9.554
12	Tiang Pumpung Kepungut	2.428	1.715	4.143
13	Tuah Negeri	5.844	2.424	8.268
14	Tugumulyo	1.666	3.540	5.206
Total		**90.446**	**36.431**	**125,960**

Sumber : Dinkes Kab. Musi Rawas Th. 2020 dan BPS Kab. Musi Rawas Th 2020

Tabel 4.42

Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 - 2019

Tahun	Jumlah RTLH	Pembangunan RLH	
		Unit	Sumber Dana
2016	37.907	324	APBN dan APBD
2017	37.583	400	APBN dan APBD
2018	37.183	847	APBN dan APBD
2019	36.336	624	APBN dan APBD

Sumber : Dinas Perkim Kab. Musi Rawas

Grafik 4.15

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2020

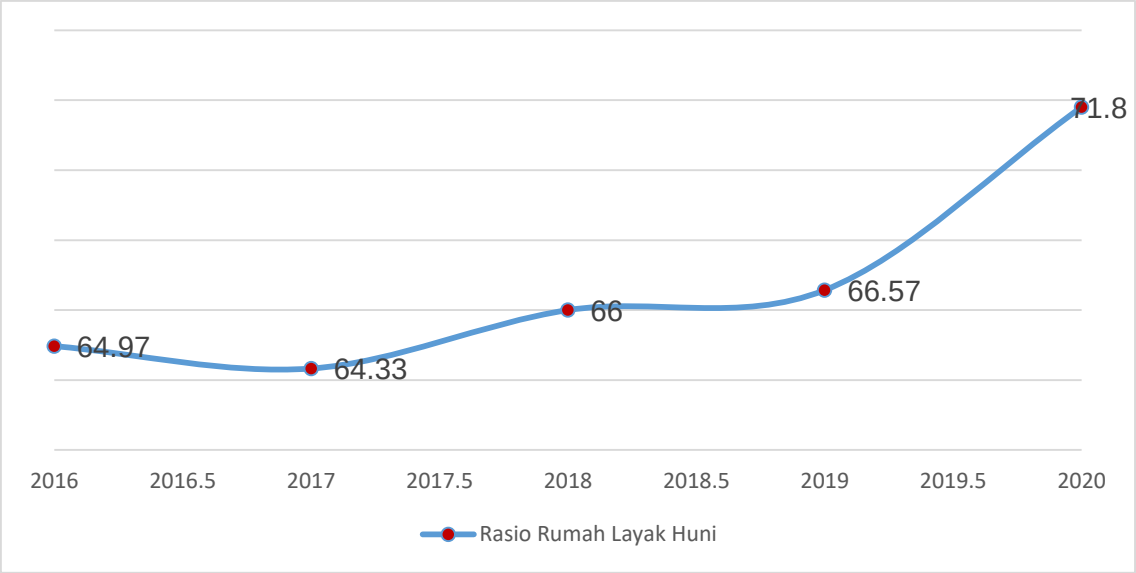

Keterbatasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan perumahan swadaya telah menambah jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Musi Rawas. Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan program lainnya dalam rangka penyediaan perumahan, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu MBR berupa Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas rumah menjadi layak huni.

Namun hal tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya mengingat jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Musi Rawas 36.336 unit berdasarkan Data Dinas Kesehatan dan Musi Rawas Dalam Angka Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan peran dan kontribusi besar Pemerintah Daerah untuk mendukung Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR di Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Kumuh dari Tahun 2017 dan diperbaharui pada Tahun 2019. Penentuan luasan Kawasan kumuh tersebut di lakukan bertahap berdasarkan Kajian Pendataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dilakukan pemetaan kawasan kumuh yang ada di 13 kelurahan di Kabupaten Musi Rawas. Pendataan kawasan kumuh tersebut di prioritaskan pada pemukiman yang padat penduduk, dengan kategori kumuh yaitu : Kumuh Berat, Kumuh Sedang, Kumuh Ringan, sebagai berikut :

Tabel 4.43

Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Desa/ Kelurahan)	Jumlah KK	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Tahun
1	Muara Beliti	Kel. Pasar Muara Beliti	1.389,93	297	6,839	Kumuh Sedang	2017
2	Megang Sakti	Kel. Megang Sakti	461,49	309	7,251	Kumu Sedang	2017
3	Muara Lakitan	Kel. Muara Lakitan	5.363,89	114	2,638	Kumu Sedang	2017
4	BTS Ulu	Kel. Bangun Jaya	1.512,53	246	5,677	Kumu Sedang	2017
5	Tugumulyo	Kel. Srikaton	302,91	805	9,5	Kumu Berat	2018
6	Purwodadi	Kel. Purwodadi	532,32	379	9,6	Kumu Ringan	2018
7	Sumber Harta	Kel. Sumber Harta	803,35	650	3,2	Kumu Ringan	2018
8	STL Ulu Terawas	Ke. Terawas	5.860	882	0	Tidak Kumuh	2018
9	Muara Kelingi	Kel. Muara Kelingi	1.361,77	836	8,87	Kumu Sedang	2019
10	Purwodadi	Kel. Mangunhargo	2,4	293	6,78	Kumu Sedang	2019
11	Megang Sakti	Kel. Talang Ubi	584	492	8,46	Kumu Sedang	2019
12	Selangit	Kel. Selangit	27,2	551	6,88	Kumu Sedang	2019
13	Jayaloka	Kel. Marga tunggal	1.990,97	517	6,88	Kumu Sedang	2019
Total			**20.192,76**	**6.371**	**81,955**		

Penetapan Kawasan kumuh tersebut sebagai acuan untuk membuat rencana program penataan dan peningkatan infrastruktur Kawasan Permukiman yang berkelanjutan, dengan harapan pelaksanaan kegiatan kedepannya akan lebih tepat sasaran. Sebagai upaya mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Musi Rawas ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Rawas dengan target rencana Pengurangan dan penanganan kawasan kumuh.

Permasalahan :

Permasalahan yang muncul Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

a. Belum ada sinkronisasi database perumahan dan permukiman yang update antara Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
b. Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Musi Rawas belum dilakukan secara komperhensif. Kabupaten Musi Rawas belum mempunyai Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dan Dokumen Rencana Penanganan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang juga dapat diacu dalam pembangunan infrastruktur di permukiman terkait dengan penanganan kawasan kumuh.
c. Terkait dengan perkembangan permukiman, belum ada regulasi terkait dengan perijinan perumahan dalam bentuk perumahan pengembang maupun kavling rumah. Hal ini berakibat pada kurangnya fasilitas perumahan (drainase, sampah, jalan) khususnya pada kavling perumahan yang dikembangan secara individu.

4.1.2.10 Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun terus mengalami kemajuan dari tahun 2016-2020, untuk tahun 2020 yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 63,86 dengan realisasi sebesar 62,22, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.16

Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

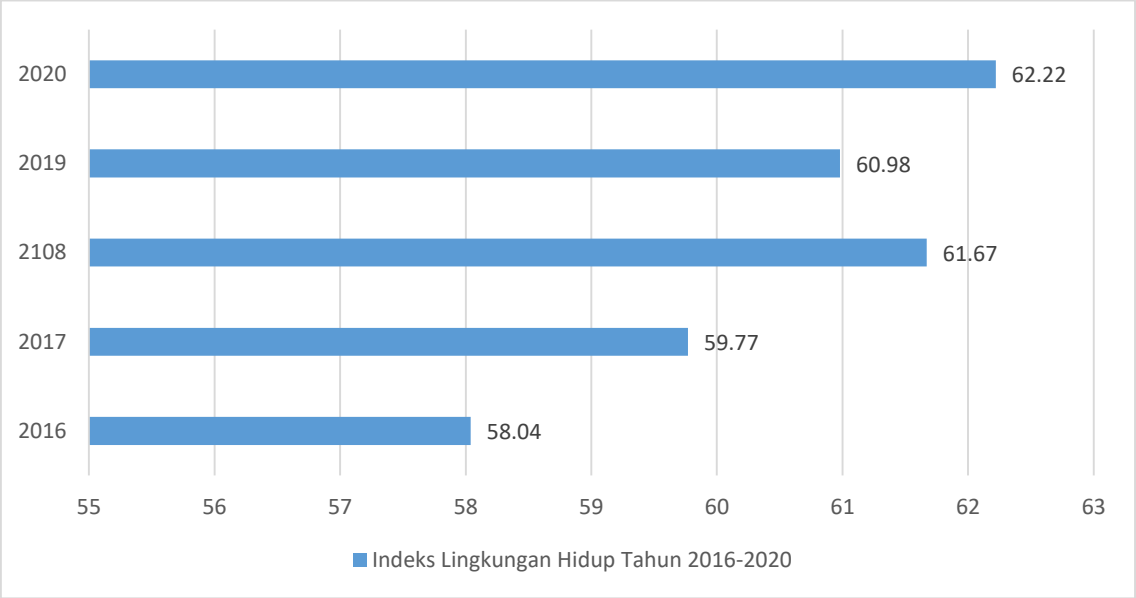

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

4.1.2.11 Peningkatan Status Desa Melalui Program Pengentasan Daerah Tertinggal

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Daerah Tertinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat kerja keras dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 maka Kabupaten Musi Rawas berhasil melepaskan status sebagai Kabupaten Daerah Tertinggal.

Grafik 4.17

Peningkatan Status Desa dalam Kabupaten Musi Rawas

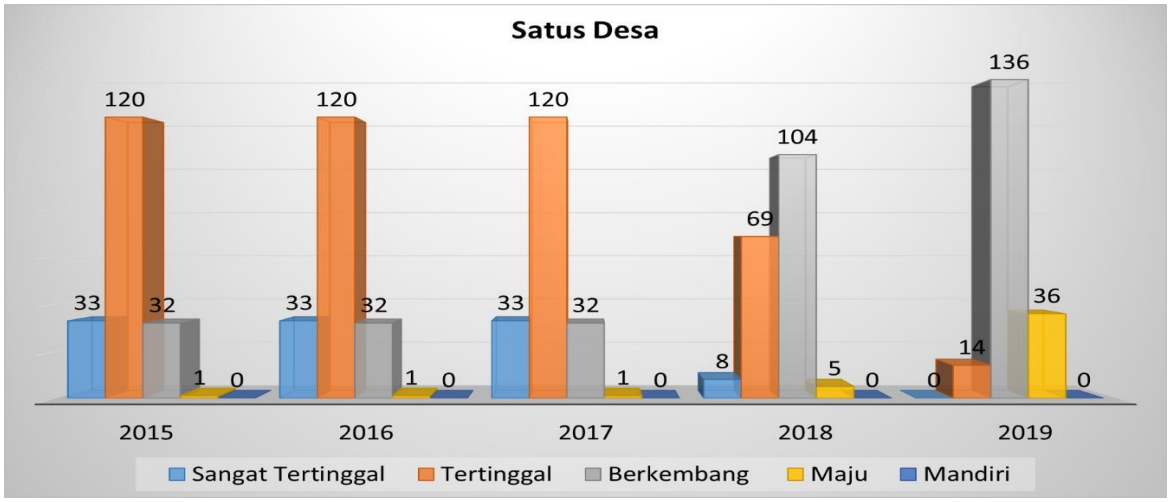

4.1.2.12 Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 , selanjutnya pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas baru pertama kali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada than 2019 dan telah melakukan upaya perbaikan pada penerapan reformasi birokrasi di tingkat prosedural dan tatakelola reformasi birokrasi.

Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/214/RB.06/2021 Tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 menetapkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah 51,12 dengan kategori “ CC”.

4.1.2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan

kegiatan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 adalah 81,99 dengan kategori baik. *(sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas).*

4.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penggalian isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2025 dilakukan dengan metodologi kajian data dan informasi serta focus group discussion dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2024 yang dimulai dari (1) Isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Musi Rawas, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Musi Rawas, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1 SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Dengan berakhirnya agenda pembangunan global *Millenium Development Goals (MDG's*) tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam agenda pembangunan global yang berkelanjutan tersebut terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, seta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Isu Stunting di Kabupaten Musi Rawas

Menurut Kementerian Kesehatan RI , stunting adalah kondisi pertumbuhan anak yang ditandai dengan tinggi badan anak kurang/tidak seimbang jika dibandingkan umurnya. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam pada tahun 2020 tercatat bahwa pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting, dengan jumlah jiwa yang mencapai 1.857 jiwa anak-anak yang mengalami stunting pada tahun 2020, hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan pada periode RPJMD mendatang. Melalui dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas bersama stakeholders terkait, upaya penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program antara lain program perbaikan gizi masyarakat. Berikut ini tabel rekap status gizi yang tercatat di setiap kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Musi Rawas :

TABEL 4.44

REKAP STATUS GIZI TAHUN 2020 KABUPATEN MUSI RAWAS BERDASARKAN e-PPGBM

No	Puskesmas	BB/U				TB/U					BB/TB					
		Sangat kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Stunting	Normal	Tinggi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risik o Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
	TERAWAS	3	13	1381	27	4	12	16	1368	12	0	7	1367	20	5	1
	SELANGIT	5	17	1072	21	22	13	35	1030	39	34	163	879	17	14	7
	Sumb. HARTA	12	39	969	28	29	27	56	965	17	24	42	914	49	11	4
	NAWANGSASI	25	156	1096	93	57	209	266	992	11	16	59	1019	114	45	21
	L. SIDOHARJO	21	113	810	94	1	15	16	78	1	1	4	82	3	2	4
	MANGUNHARJO	1	39	880	2	0	29	29	887	4	3	36	871	9	1	0
	MUARA BELITI	31	221	1853	63	105	185	290	1845	26	33	202	1780	86	45	15
	MUARA KATI	4	21	841	15	7	26	33	847	0	2	10	834	25	6	3
	JAYALOKA	3	27	1025	83	17	60	77	967	27	12	14	999	31	22	5
	CIPTODADI	25	98	837	19	64	108	172	675	69	82	72	682	49	12	7
	KARYA SAKTI	1	20	547	23	1	31	32	549	9	1	30	525	22	10	2
	MUARA KELINGI	10	17	1651	14	24	52	76	1592	15	4	17	1645	19	4	2
	CECAR	14	77	1292	86	31	62	93	1325	31	7	80	1317	38	19	5
	SUNGAI BUNUT	5	24	224	10	13	37	50	211	2	2	24	209	16	9	3
	AIR BELITI	24	72	1641	125	32	94	126	1686	39	21	64	1591	130	39	15
	MUARA LAKITAN	4	73	2309	24	3	39	42	2366	1	5	112	2242	34	11	5
	PIAN RAYA	3	52	624	38	7	45	52	657	7	0	39	633	28	9	7
	MEGANG SAKTI	30	149	3335	118	73	311	384	3182	41	72	202	3047	224	69	16
	KELINGI IV-C	4	7	65	5	4	8	12	65	4	1	4	67	5	2	1
	Jumlah (jiwa)	**225**	**1235**	**22452**	**888**	**494**	**1363**	**1857**	**21287**	**355**	**320**	**1181**	**20703**	**919**	**335**	**123**

4.2.1.3 Potensi Resesi Ekonomi Dunia Akibat Pandemi Covid-19

Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhir tahun 2019 telah terjadi penyebaran Pandemi Covid -19 yang terjadi di lebih dari 213 Negara di dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini belum dapat diperkirakan, penyebaran Pandemi Covid-19 akan berakhir bahkan Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan manusia terutama sektor kesehatan yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kemudian sektor strategis perekonomian juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan pertanian.

Guncangan berskala besar dari Pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan untuk menahan dampaknya telah menyebabkan ekonomi global dalam kontraksi yang sangat parah. Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan mengalami kontraksi 5,2 persen pada tahun ini. Kontraksi tersebut menjadi resesi yang terparah sejak Perang Dunia II dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan output per kapita yang parah sejak tahun 1870, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporan "***Global Economic Prospects***" yang dirilis pada 8 Juni 2020. Diperkirakan aktivitas ekonomi diantara negara-negara maju diperkirakan menyusut 7 persen pada tahun ini. Hal ini disebabkan terjadinya gangguan terhadap permintaan dan penawaran, perdagangan serta keuangan dalam negeri. Sementara itu, pasar dan ekonomi negara berkembang diprediksi mengalami kontraksi 2,5 persen sepanjang 2020. Ini menjadi kontraksi pertama negara berkembang sebagai sebuah kelompok, setidaknya dalam 60 tahun terakhir. Pendapatan per kapita diperkirakan menurun sebesar 3,6 persen, akan membawa jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrim tahun ini.

Dampak pandemi Covid 19 yang signifikan telah menghantam paling keras di negara-negara dengan penyebaran wabah paling parah, terutama negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Bank Dunia menilai bahwa pasar dan ekonomi negara memiliki kerentanan yang semakin besar akibat guncangan eksternal. Selain itu, disrupsi pada aktivitas belajar mengajar formal dan akses layanan kesehatan primer cenderung memiliki dampak jangka panjang pada pengembangan sektor sumber daya manusia.

Sehingga Kelompok Bank Dunia memprioritaskan penanganan kesehatan global dan keadaan darurat ekonomi. Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan global dapat membaik pada tahun 2021 dengan pertumbuhan menyentuh 4,2 persen. Sementara ekonomi negara-negara maju tumbuh 3,9 persen, untuk pasar dan ekonomi Negara berkembang (EMDEs) naik sekitar 4,6 persen, dengan asumsi pandemi Covid-19 dapat mereda sehingga langkah- langkah penanganan terhadap dampak buruk pandemi Covid 19 dapat berkurang pada semester kedua tahun 2020. Sebaliknya jika Pandemi Covid 19 terus berkepanjangan maka pergolakan di pasar keuangan dan perdagangan global akan kembali bermasalah, Bank Dunia memperkirakan ekonomi dunia pada tahun 2020 dapat mengalami kontraksi hingga 8 persen dengan EMDEs menyusut hingga 5 persen. Pemulihan pada tahun 2021 dapat terjadi dengan laju yang sangat lambat, yakni tumbuh sekitar 1 persen.

Masih dalam topik yang sama, IMF juga menggambarkan penurunan ekonomi ini sebagai yang terburuk sejak Depresi Besar (resesi berkepanjangan) pada 1930-an. IMF menyatakan Pandemi Covid 19 telah mendorong dunia ke dalam krisis yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan krisis akibat pandemic Covid 19 bisa menghabiskan US$9 triliun GDP global selama dua tahun. IMF memperkirakan pertumbuhan global akan kembali mencapai 5,8% tahun depan apabila pandemi berkurang di paruh kedua tahun 2020 dan pemulihan parsial diperkirakan terjadi pada tahun 2021 tetapi tingkat Gross Domestic Product (GDP) dunia akan tetap berada dibawah angka sebelum terjadinya Pandemi Covid 19. IMF juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara maju tidak akan kembali ke tingkat sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, setidaknya sampai pada tahun 2022. Ekonomi AS diperkirakan menyusut hingga 5,9% tahun ini, mencerminkan penurunan terbesar sejak tahun 1946. Angka pengangguran di AS diperkirakan melonjak hingga ke angka 10,4% tahun ini, Pemulihan parsial diperkirakan dimulai tahun 2021, di mana ekonomi AS diperkirakan tumbuh 4,7%.

Sedangkan Ekonomi China diperkirakan tumbuh sekitar 1,2% tahun ini, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak tahun 1976. Australia diperkirakan akan mengalami resesi pertama mereka sejak tahun 1991.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen. Kontraksi sebesar 5,32% itu merupakan yang terendah sejak triwulan I tahun 1999. Ketika itu, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 6,13%. Pertumbuhan ekonomi Q2 2020 ini juga yang terburuk sejak krisis 1998. Waktu itu pertumbuhan Indonesia minus 16,5 persen [sepanjang 1998]. Sementara itu pada Q2 2008 lalu, saat krisis finansial global melanda, Indonesia masih sanggup tumbuh 2,4 persen. Lalu secara keseluruhan sepanjang tahun pada krisis 2008, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 6,1 persen. Secara quarter to quarter (qtoq) pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19 persen. Sementara itu pada Q1 2020 secara qtoq Indonesia sudah tumbuh minus 2,41 persen.

4.2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 sebagaimana tertulis dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*." Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui tujuh misi pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (7) Mewujudkan masyarakat yang

berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yakni: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.2.1.5 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan; Penyebabnya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan dan kualitas SDM yang masih rendah. Hal ini terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang harus diimbangi dengan pemenuhan gizi, kemudahan dan kecukupan terhadap akses kesehatan, pendidikan.
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan rasarana : Menyebabkan ketimpangan pembangunan / pertumbuhan antar wilayah, sehingga harus dilakukan penyediaan sarana prasarana secara merata. Terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana transportasi secara nyata akan mempengaruhi perkembangan berbagai sector pembangunan terutama dalam mendukung pemasaran produk yang dihasilkan dari usaha masyarkat di daerah terpencil, arus lalu lintas perekenomian lintas wilayah, regional dan internasional akan

semakin lancar. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan wilayah maka pemenuhan prasarana kebutuhan dasar (irigasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dll) akan mudah terpenuhi.

3. Sumber Daya Alam belum dimanfaatkan secara optimal: Provinsi Sumsel memiliki SDA yang mellimpah dan lahan yang luas tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.
4. Sinergitas Percepatan Pembangunan Daerah yang belum optimal; Peningkatan kinerjadalam pengembangan wilayah dan tataruang, pengembangan kawasan perbatasan dan kerjasama pembangunan perlu dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi yang lebih baik dan sinergis.
5. Salah satu daerah tumpuan strategis pertumbuhan ekonomi nasional: Dengan kedudukan geografis dan kondisi geopolitan yang sangat terkendali maka Provinsi Sumsel sangat layak menjadi salah satu daerah tumpuan strategis pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan; Peningkatan kualitas SDM PNS/ASN yang professional dan reformasi birokrasi.

4.2.1.6 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023

Isu strategis pembangunan daerah Sumatera Selatan yang masih relevan dalam lima tahun mendatang yaitu :

1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Proporsi penduduk miskin di Sumatera Selatan masih tergolong cukup tinggi, bergerak fluktuatif serta capainnya tidak pernah lebih baik dari capaian nasional. Bahkan di tahun 2013 dan 2015 Proporsi penduduk miskin sempat mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk Menurunkan tingkat kemiskinan. Dari empat dimensi kemiskinanyaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Infrastruktur Dasar didapati bahwa permasalahan infrastruktur dasar dan Ketenagakerjaan-lah yang banyak mempengaruhi

penduduk miskin di Sumatera Selatan. Masih banyak penduduk miskin di Sumatera Selatan belum memiliki akses terhadap layanan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, air bersih,listrik dan rumah tinggal yang layak. Selain itu, banyak pula penduduk miskin yang tidak Memiliki mata pencaharian dan perkerjaan yang layak bahkan tidak berkerja sama sekali. Tantangan yang harus dihadapi dalam 5 tahun kedepan adalah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan untuk mencapai kemiskinan 1 (satu) digit.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
   a). Pendidikan
   b). Kesehatan :
      - Persentase Balita Gizi Buruk
      - Rasio Puskesmas dan Penduduk
      - Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
      - Jumlah Kasus HIV dan AIDS
      - Jumlah Kasus DBD
   c). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi
   - Pengangguran
   - Bonus Demografi

4. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan
   - Peningkatan Investasi
   - Ekonomi Kerakyatan
5. Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
6. Optimalisasi Reformasi Birokrasi
7. Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
8. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani
9. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
10. Pengembangan Sosial Budaya dan Olahraga

4.2.1.7 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

4.2.1.7.1 Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Rawas

Informasi geospasial dapat didefinisikan sebagai semua informasi yang menyangkut lokasi dan keberadaan suatu objek pada permukaan bumi. Saat ini tren pembuatan informasi geospasial seperti peta mengarah pada pembuatan peta-peta skala besar seperti skala 1:50.000. Penggunaan peta-peta skala besar ini digunakan seperti pada perancangan tata ruang kota dan desa. Informasi Geospasial (IG) diperlukan untuk implementasi kebijakan pembangunan secara efektif dan efesien. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 telah mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Pada pasal 45 ayat (4) dijelaskan jaringan informasi geospasial daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat. Hal ini menegaskan pentingnya kedudukan pemerintah daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan informasi geospasial. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk (1) menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat di pertanggungjawabkan; (2) mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi; dan (3) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan informasi geospasial, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 juga mengamanatkan pembangunan simpul jaringan pada seluruh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Pembangunan IG Dasar (IGD) ini penting, mengingat IGD menjadi acuan untuk IG Tematik (IGT). Sehingga, penting untuk menjamin keterpaduan informasi geospasial nasional, provinsi dan daerah. Pembangunan IGT yang terintegrasi dengan berpedoman pada norma, standar dan pedoman yang ditetapkan oleh BIG. Sementara pembangunan Infrastruktur IG (IIG), akan membangun sistem

pengelolaan dan akses terhadap IG, sebagai implementasi kebijakan teknis yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan lain untuk mempercepat akselerasi pelasanaan informasi geospasial dalam wujud Paket Kebijakan Strategis Ekonomi nomor VIII yang salah satunya berisi mengenai Kebijakan Satu Peta mengacu pada prioritas pemerintah untuk menetapkan satu referensi geospasial, satu standar, satu database dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional. Pada tanggal 1 Februari 2016, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan skala peta 1: 50.000.Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan solusi sempurna untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin penggunaan lahan. KSP bertujuan untuk membuat peta yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu GeoStandard, Satu Geodatabase, dan Satu GeoCustodian pada tingkat akurasi skala peta 1: 50.000. Tujuan utama dari kebijakan satu peta adalah sebagai standar referensi basis data Geo-Portal, serta bermanfaat sebagai acuan untuk memperbaiki data spasial, akurasi perencanaan tata ruang, akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. KSP penting karena akan mengurangi kerancuan informasi geospasial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengurusan perizinan, maupun proyek strategis. KSP penting untuk meminimalisir pulau-pulau informasi, duplikasi informasi, duplikasi alokasi sumberdaya, dan sebagainya.

Dalam rangka melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerbitkan peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 88 Tahun 2018 yang mengatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah pada Tahun 2018 selain itu telah disusun Roadmap Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah, petunjuk teknis penyelenggaraan Informasi Geospasial daerah Kabupaten Musi Rawas dan koordinasi secara intensif dengan peningkatan kapasitas, peran dan fungsi antara stakeholder terkait, peningkatan kapasitas dan jumlah PPNS melalui pelatihan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang, penambahan SDM planologi dan tenaga GIS dalam bidang penataan ruang dan peningkatan koordinasi dengan sektor terkait.

4.2.1.7.2 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil analisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat dimungkinkan untuk mengembangkan kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Pengembangan ini dimaksudkan untuk memperpendek jangkauan layanan pemerintahan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.45

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Ada	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam perumusan Program RPMD, Perangkat daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat daerah memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	kurang	Program terkait Dengan : pendidikan, kesehatan, pu dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat daerah memperhatikan kinerja layanan/jasa ekositem
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat daerah memperhatikan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	rentan	Program-program pembangunan	Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat daerah memperhatikan tingkat kerentanan dan kapasitas Adaptasi terhadap perubahan iklim
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	rentan	Program-program pembangunan	Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

4.2.1.7.3 Analisis Swot Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan melakukan analisis SWOT terhadap kondisi eksisting Kabupaten Musi Rawas dengan kondisi lingkungan dan kebijakan di tingkat provinsi, nasional dan internasional, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan.

Table 4.46

Analisis SWOT Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
1	**Kekuatan (*Strength*)**	• Kabupaten Musi Rawas memiliki lokasi yang strategis jika dilihat dari konstelasi regional, memiliki akses jalan arteri primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional yaitu Bandar Lampung-Bengkulu-Palembang-Jambi dan Padang, Selain itu terdapat juga akses transportasi udara yaitu Bandara Silampari dan akses transportasi kereta api yaitu Stasiun Kereta Api Lubuklinggau; • Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah pertanian, perkebunan dan perikanan yang unggul, dengan komoditi utama yaitu beras, karet, sawit dan ikan air tawar/budidaya perikanan. Telah menjadi pemasok kebutuhan beras dan ikan bagi kabupaten/kota daerah sekitar; • Memiliki potensi kekayaan alam hasil tambang seperti minyak, batubara, gas bumi; • Penduduk Musi Rawas yang heterogen berasal dari berbagai suku-suku antara lain Suku Sumatera , Suku Jawa dan lainnya, telah berpuluh tahun hidup berdampingan dengan rukun dan damai
2	**Kelemahan (*Weaknesses*)**	• Infrastruktur dasar jalan, jembatan dan listrik yang belum mantap; • Aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal; • Masih terdapat rumah tidak layak huni dengan jumlah unit yang cukup banyak; • Jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi 13,50 % atau 54.950 jiwa. Kelompok masyarakat miskin tersebut antara lain

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
		petani, buruh tani, kuli bangunan dan pengangguran; Bonus demografi yang dimiliki jika tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang optimal, maka hal ini akan berpotensi meningkatkan Angka Pengangguran. Selain itu juga, permasalahan pengangguran muncul karena pertambahan angkatan kerja tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian, pertambahan lapangan pekerjaan menjadi sulit untuk bertambah secara cepat jika tidak diiringi oleh pertumbuhan pada sektor-sektor riil yang lain; - Masih ada beberapa wilayah terutama kawasan permukiman dalam Kabupaten Musi Rawas yang belum bisa mengakses layanan komunikasi (blank spot area); - Beberapa wilayah rawan bencana alam, terutama bencana banjir; - Sebaran penduduk yang tidak merata jika dibandingkan luas lahan /area Kabupaten Musi Rawas. - Terdapat ribuan jiwa penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Taman Nasional Kerinsi Seblat (TNKS), sehingga dalam proses pemerataan pembangunan di kawasan tersebut terkendala dengan peraturan-peraturan yang ada; - Memiliki akses yang rendah terhadap pelabuhan laut, jarak tempuh yang jauh ke Ibukota Propinsi - Masih ada desa tertinggal, sehingga terjadi kesenjangan antar kawasan/desa. - Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) - Daya saing ekonomi lokal dan industri kreatif yang masih rendah, sehingga kontribusinya belum begitu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. - Industri pengolahan hasil pertanian yang belum optimal.
3	**Peluang (Opportunity)**	• Komitmen terhadap pelaksanaan Sustanaible Development Goals (SDGs). Indonesia adalah salah satu negara yang ikut mengesahkan SDG's sebagai kesepakatan pembangunan global. Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut hadir dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat bersama dengan 193 perwakilan negara-negara di dunia. Upaya pemerintah untuk melaksanakan

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
		SDGs menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Musi Rawas. • Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat, melalui APBN, DAK dan sebagainya tentu akan meringankan beban pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur; • Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan wujud nyata keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya. Jaminan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat; • Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Salah satu klausul yang berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa akan dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa. Hal ini tentu saja menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Musi Rawas yang memiliki potensi perekonomian yang khas di masing- masing wilayahnya. • Terdapatnya kebijakan pengembangan wilayah provinsi (RTRW Provinsi Sumsel Tahun 2006) yang memerankan Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu sumber utama pangan dan energi • Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain inovasi daerah dan pengembangan iptek guna mendorong pengelolaan, pemanfaatan potensi daerah bagi kesejahteraan rakyat; • Perkembangan inovasi dan kreativitas daerah di era otonomi daerah memberikan peluang bagi perkembangan unggulan daerah, antara lain pariwisata dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi.

NO	FAKTOR INTERNAL	URAIAN
4	**Ancaman (*Treath*)**	• Wabah Pandemi Covid 19 yang masih berkepanjangan, berpengaruh besar terhadap segala sektor / sendi kehidupan terutama kesehatan, sosial budaya dan ekonomi; • Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah membuka peluang masuknya tenaga kerja dari luar dengan kualitas dan kuantitas cukup tinggi, untuk berkiprah di dunia kerja dalam Kabupaten Musi Rawas; Seiring dengan pesatnya pembangunan maka potensi pencemaran lngkungan hidup akan semakin tinggi; • Alih fungsi lahan pertanian,khususnya persawahan menjadi bangunan, kolam air deras akan menyebabkan turunnya produksi beras; • Alih fungsi hutan / perkebunan karet rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit, yang notabene dikuasai oleh sekelompok orang/penanam modal akan berdampak buruk terhadap perekonomian rakyat dan keseimbangan alam; • Perkembangan otonomi daerah saat ini, telah menjadikan masing-masing pemerintah daerah harus bersaing dalam membangun perekonomian daerah, menarik investasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat; • Hampir seluruh kabupaten/daerah tetangga Kabupaten Musi Rawas mempunyai hasil pertanian/perkebunan dengan jenis komoditas yang sama, bahkan pengelolaannya lebih maju. Tentu saja hal ini menuntut kerja keras dan inovasi dari Kabupaten Musi Rawas untuk mengantisipasi ancaman yang ada • Tuntutan masyarakat dan kalangan dunia usaha tentang pelayanan publik yang mudah dan cepat semakin meningkat, sehingga setiap perangkat daerah harus melakukan inovasi baru untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

1. Tuntutan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan SDM.
2. Pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah dan belum merata serta belum inklusif.
3. Belum mantapnya kondisi infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan, kualitas kawasan permukiman serta jaringan komunikasi.
4. Relatif tingginya tingkat penggangguran terbuka (TPT) dan tingkat setengah pengangguran.
5. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi.
6. Upaya pelestarian alam dan kualitas lingkungan hidup yang belum optimal;
7. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan diatas maka Isu-Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) hal utama, yaitu :

1. Pelayanan birokrasi yang belum maksimal, sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan upaya yang optimal untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, peran DPRD sesuai dengan fungsinya, pelayanan perizinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, kapabilitas birokrasi yang efektif dan efesien, Sistem Informasi dan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan Publik dan tingkat Kepuasan Masyarakat;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga harus dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

merata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai;

3. Kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang religius dan kearifan lokal. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan iman dan takwa melalui pendidikan dan kegiatan keagamaaan, pelayanan social dalam upaya penurunan jumlah PMKS, peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa, prestasi pemuda dan olahraga, seni dan budaya daerah, ketertiban masyarakat/ masyarakat yang taat hukum;
4. Sarana dan prasarana dasar yang belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan pada lokasi-lokasi tertentu, pemanfaatan tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, permukiman yang layak huni, upaya konservasi lingkungan, serta pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam lainnya.
5. Masih belum optimalnya daya saing perekonomian dalam menggali potensi daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro, realisasi investasi dan kunjungan wisata.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tersebut harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025.

5.1 RPJPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, RPJMD 2021-2025 merupakan tahapan terakhir pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Musi Rawas. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah :

“Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius”.

Upaya-upaya untuk mewujudkan visi RPJPD tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi RPJPD, yaitu :

1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah.
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari.
4. Mewujudkan *”Good Governance”.*
5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius.

5.2 VISI RPJMD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)

Makna filosofis yang terkandung dari Visi tersebut adalah:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).

Mandiri	:	adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan ketercukupan ruang untuk hidup dan berkembang, ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
Bermartabat	:	yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

5.3 MISI RPJMD

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 “Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”, maka diupayakan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

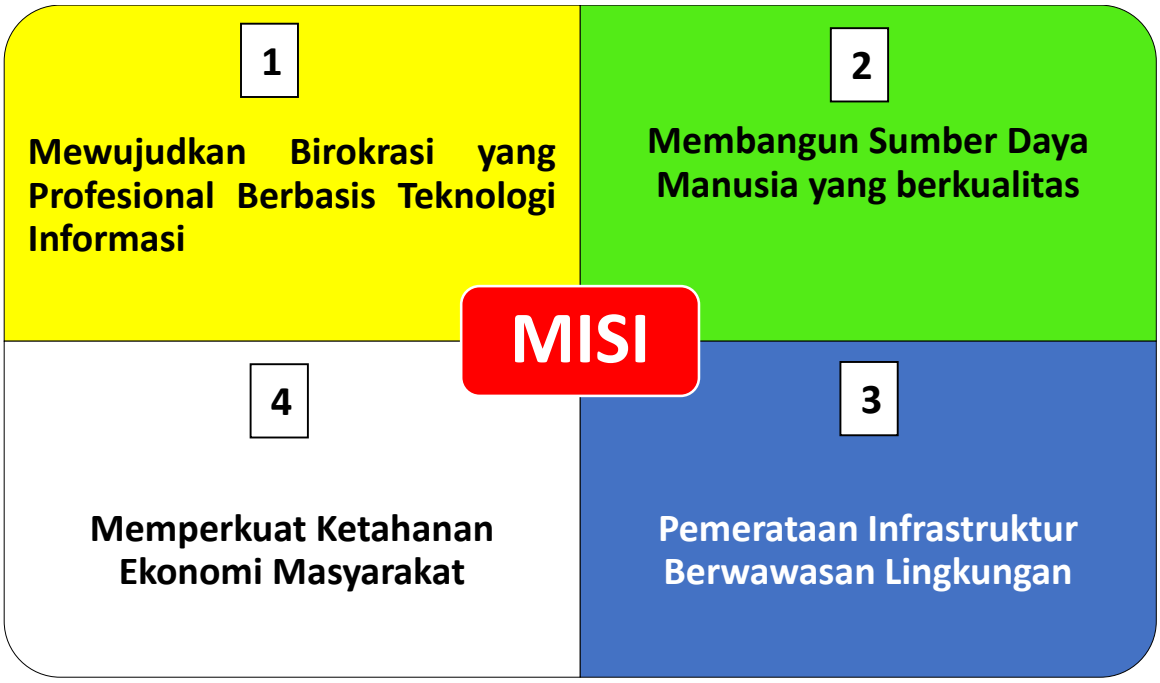

Dalam upaya penyamaan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai maka perlu dijabarkan dalam suatu kerangka berpikir perencanaan terintegrasi seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai misi kesatu ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar dibawah ini.

Gambar 5.1
Logframe Perencanaan Integratif Misi 1

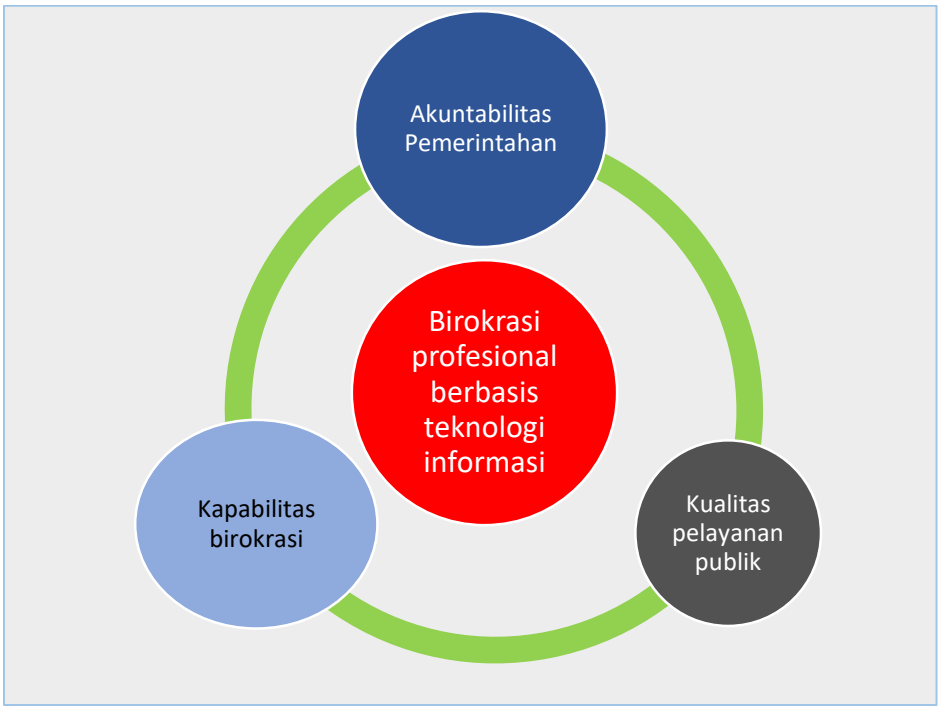

Dalam upaya mewujudkan Birokrasi yang profesional berbasis teknologi maka diperlukan unsur pendukung berupa tujuan dan sasaran

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2
Logframe Perencanaan Integratif Misi 2

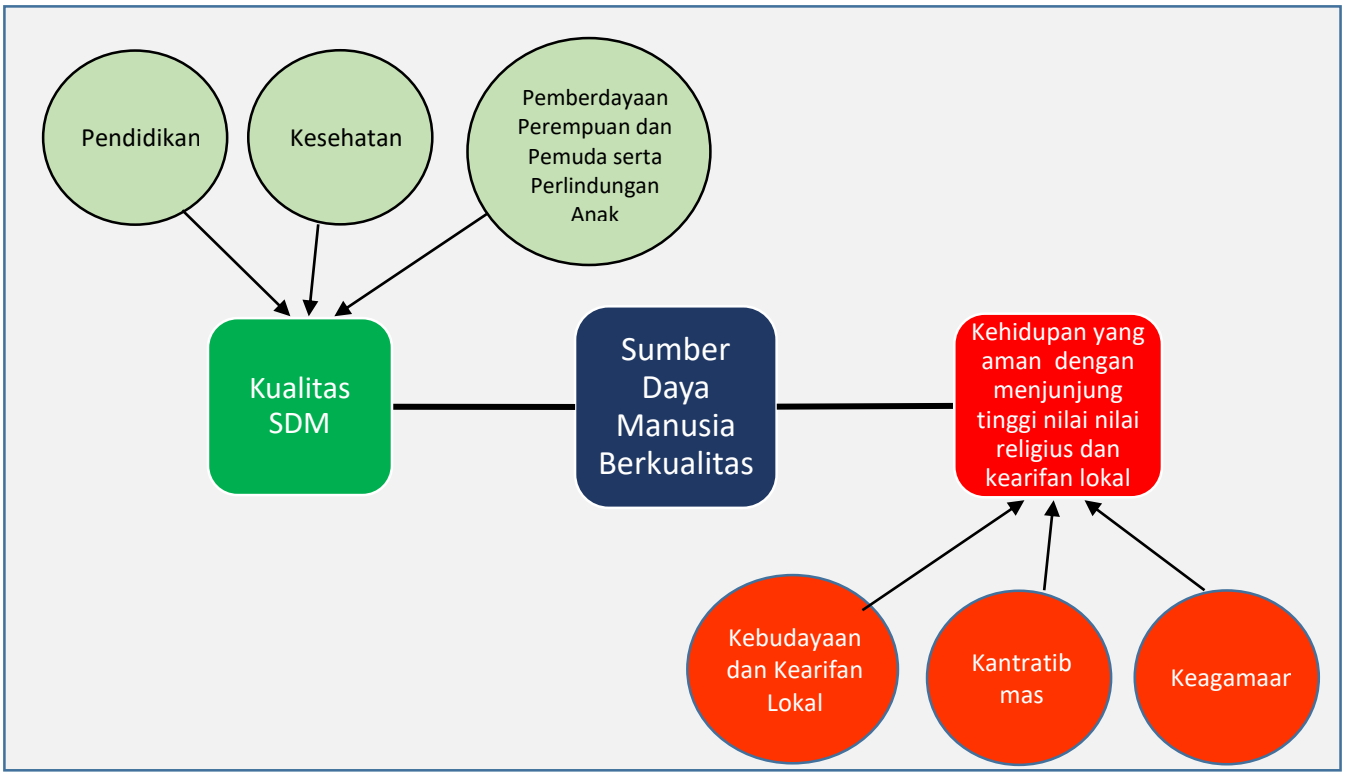

3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mencapai misi ketiga ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.3. dibawah ini.

Gambar 5.3
Logframe Perencanaan Integratif Misi 3

4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan.Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatan perkapitanya.

Untuk mencapai misi keempat ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.4. dibawah ini.

Gambar 5.4
Logframe Perencanaan Integratif Misi 4

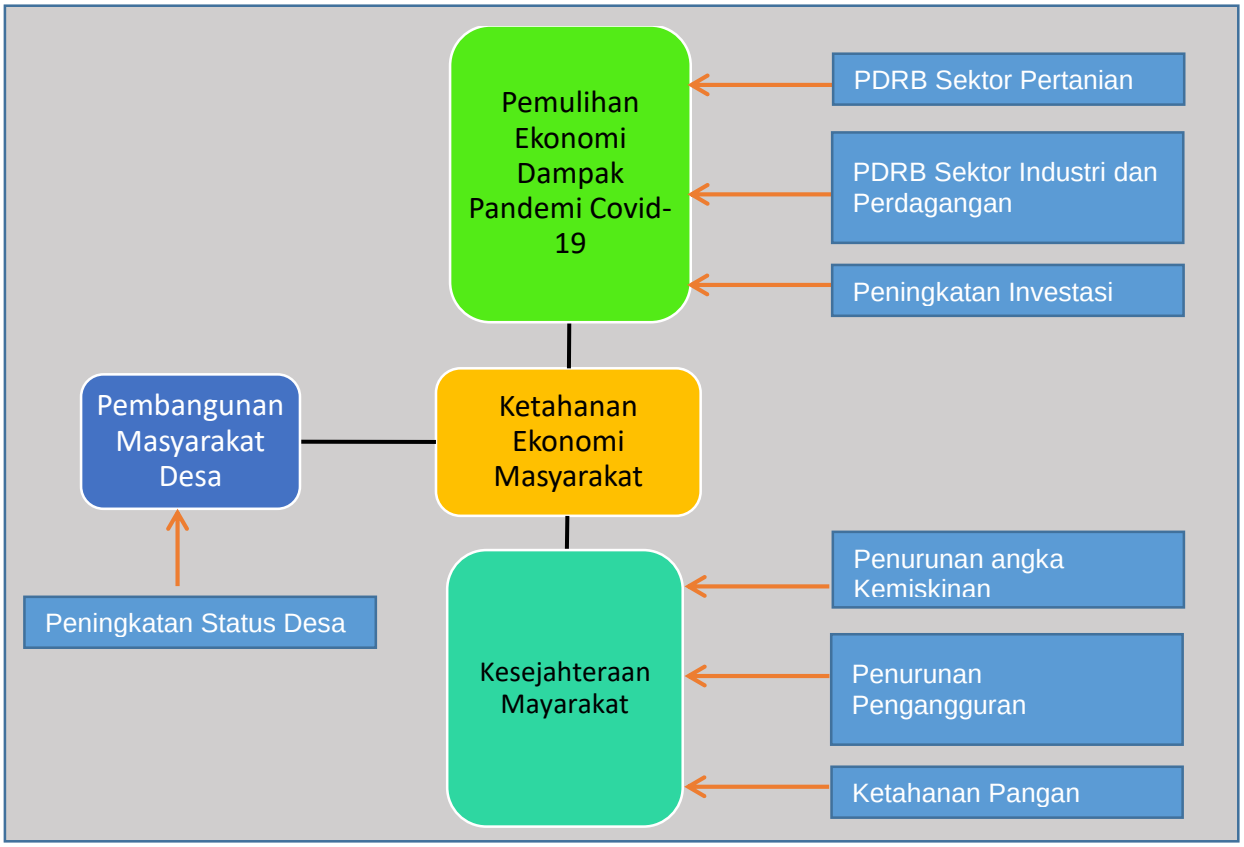

Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas diatas memiliki keselarasan dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2005-2025, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas
dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025,
Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 ,
dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sasaran Pokok RPJPD Kab Musi Rawas Tahun 2005-2025	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	MISI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	MISI RPJMD KAB. MUSI RAWAS Tahun 2021-2026
• Mewujudkan "Good Governance"	• Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, Dan Responsif.	1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi
• Mewujudkan Daya Saing Kabupaten Musi Rawas. • Mewujudkan Masyarakat yang Religius	• Peningkatan kualitas manusia Indonesia • Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	• Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, Dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, Dan Integritas. • Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, Dan Budaya Untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial Yang Agamis & Berbudaya, Dengan Ditopang Fisik Yang Sehat Melalui Kegiatan Olahraga, Sedangkan	2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran Pokok RPJPD Kab Musi Rawas Tahun 2005-2025	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	MISI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	MISI RPJMD KAB. MUSI RAWAS Tahun 2021-2026
			Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius.	
• Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan • Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang Asri dan Lestari	• Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar • Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	• Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan, Untuk Memperlancar Arus Barang Dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan Dan Keseimbangan Daerah.	3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan
• Mewujudkan Daya Saing Kabupaten Musi Rawas.	• Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing Pembangunan yang merata dan berkeadilan	• Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan • Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	• Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.	4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

5.4 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB
Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia	Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita
	2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal	3. Indeks Demokrasi	Indikator Komposit yang menunjukan Tingkat Perkembangan Demokrasi. Tingkat Capaian di Ukur Berdasarkan Pelaksanaan dan Perkembangan 3 Aspek, 11 Pariabel dan 28 Indikator Demokrasi	$= \left(\frac{Jumlah\ aspek\ Indeks\ Demograsi}{Jumlah\ total\ aspek\ ID}\right) X100\%$ Klasifikasi Tingkat Demokrasi dikelompokan menjadi 3 kategori, yakni ‘baik’ (indeks > 80). “sedang” (indeks 60-80) dan “buruk” (indeks <60)
Misi 3: Pemerataan Infrastruktur berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	4. Indeks Infrastruktur	Ukuran capaian kinerja infrastruktur dalam satuan indeks	Persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, rasio elektrifikasi
	2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	IKLH = IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Misi 4: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	6. PDRB	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian	$\frac{\text{Nilai tambah barang dan jasa sekarang dikurang Nilai Tambah barang dan jasa tahun sebelumnya}}{\text{Nilai tambah barang dan jasa tahun sebelumnya}} X\ 100$
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	Gambaran perkembangan perekonomian yang dilihat dari perubahan PDRB ADHK	Perbandingan PDRB ADHK dari tahun ke tahun
	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8. Pengeluaran perkapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selam sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli	$\frac{\text{Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga}}{\text{Jumlah Anggota Rumah tangga}} X\ 100$
	3. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	9. Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan.	$= (Indeks\ ketahanan\ sosial + indeks\ Ketahanan\ Ekonomi + indeks\ ketahanan\ lingkungan)$

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	51.12 (CC)	53,37 (CC)	55,62 (CC)	57,85(CC)	60.12 (B)	62.37(B)	64.62(B)
2.	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66.79	67	67,5	68,1	68,8	69,7	70,1
		Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal	Indeks Demokrasi		74	75	76	77	78	79
3.	Pemerataan infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan pemerataan	Indeks Infrastruktur	95,52	96	96,5	97	97,5	97,5	98

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
	berwawasan lingkungan	infrastruktur								
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.22	69.41	69,90	70,50	70.99	71.37	71.37
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	PDRB	19.303,450,000.000	20,125,776,970.000	21,232,694,703.000	22,400,492,912.000	23,632,520,022.000	24,932,308,623.000	26,303,585,597.000
			Pertumbuhan ekonomi	0.24	4.26	4,5%-5,5%	4,5%-5,5%	5%-6%	5%-6%	5%-6%
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.520.000	9.692.683	9.865.365	10.038.050	10.210.730	10.383.410	10.556.100
		Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	41,88	42,88	43,88	44,88	45,88	46,88	47,88

5.4.2. Sasaran

Berangkat dari tujuan serta indikator kinerjanya yang dikemukakan pada Tabel 5.2, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, beserta indikator sasarannya disajikan pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4
Matriks Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public	1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	1. Indeks RB	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB Ket : -AA : nilai >90-100, Predikat istimewa -A : Nilai > 80-90, predikat Sangat Baik -BB : Nilai .70-80, predikat Baik -B : Nilai >60-70, predikat Cukup Baik -CC : Nilai >50-60, predikat Cukup -C : Nilai >30-50, predikat Buruk -D : Nilai 0-30, predikat Sangat Buruk
			2. Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB
			3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	$" = (15\%n1) + (20\%n2) + (15\%n3) + (20\%n4) + (15\%n5) + (15\%n6)"$ n1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran n2 = pengelolaan anggaran belanja dalam APBD n3 = transparansi pengelolaan keuangan daerah n4 = penyerapan anggaran n5 = kondisi keuangan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
					n6 = opini BPK atas LKPD
		2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	4. Indeks SPBE	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang
			5. Indeks Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	IP = IP1 +IP2+IP3+IP4 Keterangan : IP= Indeks Profesionalisme -IP 1= Dimensi Kualifikasi -IP2= Dimensi Kompetensi -IP3= Dimensi Kinerja -IP4= Dimensi Disiplin
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	= nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	7. Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui perkembangan pendidikan	$= (\frac{I\ RLS - I\ HLS\ (min)}{2})$ I RLS = Indeks rata-rata lama sekolah I HLS (min) = Indeks harapan lama sekolah minimal
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	8. Indeks Kesehatan	indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat	$I\ Kesehatan = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara memperbandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laku	$= \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - laki}$

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
			10. Kabupaten Layak Pemuda	Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabuapaten/Kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan bebasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematik, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kamajuan dan kemandiriaan pemuda	Hasil penelitian dan penilaian Kementerian Pemuda dan Olahraga
			11. Status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pemban gunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam	Hasil penilaian dari Kementerian PPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
				kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	
3.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal	1. Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	12. Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Indeks komposit dari persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	$= \%jumlah\ penegakan\ perda + \%penanganan\ unjuk\ rasa$
		2. Terwujudnya keamanan dan kerukunan umat beragama	13. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	= Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%
		3. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	14. Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya (Benda atau tak berbenda) yang merupakan jati diri suatu masyarakat, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang	Adapun cara pengukuran Persentase warisan budaya dilestarikan adalah $\frac{jumlah\ warisan\ budaya\ yang\ dilestarikan}{\text{Jumlah warisan budaya yang ter data}}$ x 100%
			15. Indeks Budaya Literasi Daerah	Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkatan budaya membaca dan keilmuan serta keberadaan dan kondisi perpustakaan	= (UPLM/AM)x100% UPLM = Unsur pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan ke perpustakaan, perpustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
					AM= Aspek masyarakat
4.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	16. Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	Hubungan antar ruas jalan dengan ruas jalan lainnya,yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dengan tingkat kemantapan jan sebagai salah satu indikatornya	$\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik} + \text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Jalan} + \text{Jumlah Jembatan}} \text{ x } 100\%$
		2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	17. Indeks Infrastruktur Dasar	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik	Rata-rata dari jumlah total persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, dan rasio elektrifikasi
			18. Indeks Sumber Daya Air	Indeks Sumber Daya Air adalah penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) suatu wilayah dan Indeks Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan Yang Terlindungi (ILKT) dari daya rusak air. Semakin tinggi indeks yang dicapai	=80% IKSI + 20% ILKT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
				maka dapat dikatakan kinerja semakin baik	
5.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang serta ketahanan bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. IKLH	Parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	= IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)
		2. Meningkatnya penataan ruang	20. Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW adalah penilaian kesesuaian realisasi penataan ruang terhadap recana peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW. Semakin tinggi persetase yang dicapai maka tingkat ketaatan dinilai semakin baik.	$= \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$
		3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	21. Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	Angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bencana yang tertangani maka semakin tinggi juga persentase dampak penurunan resiko bencana	= Bencana yang tertangani x jumlah bencana
6.	Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	22. PDRB sektor pertanian	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya}} \text{ X } 100$

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
		2. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	23. PDRB sektor Industri	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}}$ X100
			24. PDRB sektor perdagangan	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}$ X1
		3. Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	25. Persentase peningkatan investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang} - \text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}$ X100
7.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat kemiskinan	26. Angka kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$(Pa) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{q} \left[\frac{z-yi}{z}\right] a$ $a = 0,1,2$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...q), y, <z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi
		2. Menurunnya tingkat pengangguran	27. Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	$= \left(\frac{Jumlah\ Pengangguran}{Angkatan\ Kerja}\right) \times 100\%$
		3. Meningkatnya Ketahanan Pangan	28. Indeks Ketahanan Pangan	Capaian ketahanan Pangan dan Gizi Kab/Kota/provinsi dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayag dibandingkan dengan wilayah yang lain	Hasil hitungan food security and Vurnerability (FSVA) yaitu analisis ketahanan dan kerentanan Pangan
8	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	4. Meningkatnya status desa	29. Persentase Peningkatan Desa Maju	Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.	$= \left(\frac{Jumlah\ desa\ maju\ tahun - jumlah\ desa\ maju\ tahun\ dasar}{Jumlah\ desa\ maju\ tahun\ dasar}\right) x100\%$

Tabel 5.5

Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Visi : TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Misi 1 Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi									
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	51.12	53,37	55,62	57,85	60,12	62,37	64,62
			Nilai SAKIP	B (67,51)	B (68,52)	BB (70,01)	BB (71,02)	BB (72,03)	BB (73,5)	BB (73,5)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,54	81,52	81,51	81,52	81,54	81,56	81,57
		Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2.79	2.85	2.95	3.1	3.5	4	4.3
			Indeks Profesionalitas ASN	57,08	60	62,92	65,84	68,76	71,68	74,6
		Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,02	88,03	88,04	88,05	88,06	88,07	88,08
	Misi 2 Membangun sumber daya manusia yang berkualitas									
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	68.95	69,17	69,39	69,61	69,83	70,5	70,27
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	78,4	78,8	79,2	79,5	79,8	80,3	80,6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,45	86,45	87,45	88,45	89,45	90,45	91,45
			Kabupaten Layak Pemuda	0	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
			Status Kabupaten Layak Anak	600 Pratama	650 Pratama	700 Madya	725 Madya	745 Madya	770 Madya	790 Madya
	Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal	Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	94%	94%	96%	97%	98%	98%	100
		Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72	73	74	75	76	77	78
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	60	60	70	72	74	79	77
			Indeks Budaya Literasi Daerah	29,73	29,8	30	30,5	31	31,5	31,5
	Misi 3 Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan									
3.	Meningkatkan kualitas dan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	90,33	91,26	92,19	93,12	94,06	95	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
	infrastruktur	wilayah								
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman,Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	95,52	96	96,5	97	97,5	97,5	98
			Indeks Sumber Daya Air	46,53	48	52	56	60	64	68
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	62.22	69.41	69,90	70,50	70.99	71.37	71.37
		Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	91,18	94	96	97	98	99	100
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	47.36	48,27	50	51,72	53,57	55,17	58,62
	Misi 4 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat									
4	Pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 5.821,98 milyar	Rp 5.938,42 Milyar	Rp.6.057,19 milyar	Rp 6.178,33 milyar	Rp 6.301,90 milyar	Rp 6.427,94 milyar	Rp 6.556,50 milyar
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1591,42 Milyar	Rp 1636,85 milyar	Rp 1682,29 milyar	Rp 1727,73 milyar	Rp 1773,16 milyar	Rp 1818,60 milyar	Rp 1841,32 milyar
			PDRB sektor perdagangan	Rp 904,65 Milyar	Rp 943,6 milyar	Rp 982,5 milyar	Rp 1021,4 milyar	Rp 1060,3 milyar	Rp 1099,2 milyar	Rp 1138,1 milyar
		Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	Rp 8.628.894.884.016,60	5	8	11	14	17	17

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.5	13.35	13.2	13.05	11.9	10.85	9.9
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,29	3,25	3,21	3,15	3,09	3,04	2,98
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,53	77,72	77,94	78,18	78,44	78,74	78,74
	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	24,19	29,56	34,94	40,32	45,69	51,07	56,47

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan integratif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam bab VI RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada Kekuatan *(Strength),* Kelemahan *(Weakness),* Peluang *(Opportunity)* dan tantangan atau ancaman *(threat)* secara bersama-sama. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 6.1
Analisis SWOT terhadap Visi Misi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026

MISI	*STRENGHT* (KEKUATAN)	*WEAKNESS* (KELEMAHAN)	*OPORTUNITY* (PELUANG)	*THREATS* (TANTANGAN)
1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi.	1. Fungsi Kebijakan dan regulasi 2. Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang semakin membaik 3. Telah memiliki berbagai macam sistem informasi yang baik 4. Adanya inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 5. Pola kepemimpinan yang visioner 6. Komitmen pemerintah Daerah Musi Rawas untuk meningkatkan Nilai SAKIP 7. Kemampuan birokrasi yang memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan keputusan"keputusan politik	1. Belum optimalnya pelayanan publik 2. Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa 3. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi (blank spot area)	1. Besarnya upaya pemerintah pusat dalam upaya reformasi birokrasi 2. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 kepada masyarakat 3. Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan 4. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin luas	1. Masih rendahnya melek teknologi masyarakat untuk mengakses layanan e-government 2. Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	1. Menguatnya kinerja cakupan layanan kesehatan Kabupaten Musi Rawas 2. Adanya lembaga yang memfasilitasi	1. Indeks Pembangunan manusia yang masih rendah dibanding provinsi 2. Belum optimalnya peran perempuan dalam	1. Komposisi penduduk dengan usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif 2. Heterogenitas Budaya Masyarakat	1. Adanya arus globalisasi 2. Perkembangan IPTEK yang pesat

MISI	*STRENGHT* (KEKUATAN)	*WEAKNESS* (KELEMAHAN)	*OPORTUNITY* (PELUANG)	*THREATS* (TANTANGAN)
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	pembangunan 3. Pengembangan pendidikan masih pada pemenuhan akses belum menuju kepada kualitas 4. Belum mantapnya sarana dan prasarana pendidikan 5. Jangkauan cakupan pelayanan sosial dasar bagi PMKS Belum Menjangkau Secara Luas		
3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan.	1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang cukup merata	1. Banyak prasarana jalan dan jembatan yang belum dalam kondisi mantap 2. Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur pedesaan 3. Pembangunan yang masih belum merata	1. Adanya upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan 2. Banyaknya peluang pembiayaan pembangunan aternatif	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan
4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	1. Terdapatnya potensi pertambangan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, emas, perak, biji besi	1. Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian 2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya	1. Meningkatnya permintaan global atas komoditi pangan dan energy 2. Berlakunya MEA	1. Terjadinya wabah Pandemi Covid 19 2. Pembangunan yang lebih merata dan inklusif untuk mengatasi ketimpangan

MISI	*STRENGHT* (KEKUATAN)	*WEAKNESS* (KELEMAHAN)	*OPORTUNITY* (PELUANG)	*THREATS* (TANTANGAN)
	2. Terdapatnya potensi pertanian dan perkebunan seperti sawah, karet, kelapa sawit, hutan produks. 3. Letak geografis Kabupaten Musi Rawas yang dilintasi jalan arteri primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung-Bengkulu-Palembang-Jambi dan Padang. 4. Lebih dari 70% wilayah Musi Rawas merupakan lahan datar, sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya secara optimal. 5. Tersedianya tenaga kerja produktif lebih kurang 277.350 jiwa. 6. Tersedianya infrastruktur (jalan dan listrik) yang telah menghubungkan dan melayani seluruh Ibu Kota Kecamatan. 7. Potensi wisata yang beragam	Manusia 3. Penduduk Miskin yang tinggi 4. Kurangnya Sarana Prasana 5. Kurangnya Pasokan Listrik 6. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal 7. dan minat investasi masih kecil 8. Penerapan teknologi sangat terbatas	(Masyarakat Ekonomi ASEAN) 3. Adanya Prioritas Nasional Untuk Pembangunan Daerah 4. Banyaknya program-program pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daerah potensial yang berorientasi hasil khususnya pariwisata dan pertanian 5. Meluasnya ekonomi Pasar	daerah 3. Perubahan iklim global bagi akan berdampak pada pertanian Musi Rawas 4. Pertumbuhan penduduk yang relative tinggi 5. Persaingan perdagangan internasional dan liberalisasi yang makin terbuka dan ketat 6. Menggali sumber-sumber penerimaan 7. Mengefektifkan dan mengefisienkan pengeluaran pembangunan 8. Pengembangan system inovasi daerah

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.

Tabel 6.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 2. Meningkatkan implementasi SAKIP 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 4. Menggali sumber-sumber PAD
		2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi teknologi informasi
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 2. Pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	1. Peningkatan layanan pendidikan dasar 2. Peningkatan layanan pendidikan non formal
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas 2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan untuk seluruh masyarakat Musi Rawas 3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	1. Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan 2. Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Pemuda 3. Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak
	2.Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal	1. Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan 2. Mewujudkan kondisi yang lebih tertib, aman, tenteram dan nyaman
		2. Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan
		3. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Meningkatkan peran aktif pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan 2. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya 3. Meningkatkan minat budaya gemar membaca
3.Pemerataan Infrastruktur berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah
		2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	1. Penanganan infrastruktur pemukiman secara terpadu menuju

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Permukiman, Irigasi)	pemukiman yang sehat dan layak 2. Pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA/irigasi kewenangan kabupaten 3. Optimalisasi jaringan irigasi dan pembangunan daerah irigasi baru
	2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan Ketahanan Bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan yang Berkelanjutan
		2. Meningkatnya Penataan Ruang	Meningkatkan pengembangan struktur Ruang
		3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Pengembangan System Kewaspadaan Dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1. Pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan tehnologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan 2. Penerapan Manajemen Pasca Panen
		2. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Sektor Perdagangan	Meningkatkan usaha industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi local
			Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran
		3. Meningkatnya investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas
	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Sosial
		2. Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru
		3. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menyediakan Pangan Berkualitas Bagi Masyarakat
	4. Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Meningkatnya status desa	1. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana desa 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Peningkatan kesejahteraan penduduk

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, permasalahan pembangunan, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penanaman Modal Menuju Pembangunan Berkelanjutan	Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Pengembangan Infrastruktur Wilayah Berwawasan Lingkungan	Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas	Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat

Perincian arah kebijakan menurut Sasaran dan Strategi pada RPJMD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.4
Arah Kebijakan RPJMD Menurut Sasaran dan Strategi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 2. Meningkatkan implementasi SAKIP 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 4. Menggali sumber-sumber PAD	1. Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan 2. Peningkatan kinerja perangkat daerah 3. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja 4. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan objek pajak dan realisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, transparansi pelaporan dan kepatuhan wajib pajak
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi teknologi informasi	1. Penerapan Manajemen pelayanan public yang berorientasi terhadap peningkatan kepuasan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat 2. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publlik	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 2. Pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi	1. Penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas 2. Peningkatan kedisiplinan aparatur 3. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
4. Meningkatnya Derajat Pendidikan	1. Peningkatan layanan pendidikan dasar 2. Peningkatan layanan pendidikan non formal	1. Sekolah gratis 2. Perlengkapan sekolah gratis 3. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 4. Pembangunan dan peningkatan serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal 5. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar 6. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal 7. Peningkatan kualitas Aparatur tenaga Pendidik
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata 2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan untuk seluruh masyarakat Musi Rawas 3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	1. Layanan Kesehatan Terjangkau 2. Layanan rujukan pasien dan pendamping pasien 3. Satu mobil Ambulance tiap desa 4. Pembangunan/ Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 5. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kesehatan
6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat 2. Pemenuhan Hak Anak 3. Regulasi Perlilndungan Anak
	Pemenuhan indikator kabupaten layak Pemuda	Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Organisasi Kepemudaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7. Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Mayarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) 3. Pemberantasan penyakit masyarakat
8. Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan	1. Bantuan pondok pesantren tiap kecamatan 2. Pendirian rumah tahfidz dari kecamatan ke desa 3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
9. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Meningkatkan peran aktif pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan 2. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya	1. Penguatan lembaga adat 2. Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya
	3. Meningkatkan minat budaya gemar membaca	Penguatan pengelolaan perpustakaan
10. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah	Jalan mulus dan merata sampai ke desa-desa
11. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Permukiman, Irigasi)	Penanganan infrastruktur pemukiman secara terpadu menuju pemukiman yang sehat dan layak	1. Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang sehat dan layak huni 2. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih 3. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman. 4. Pengembangan kawasan ibukota
	1. Pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA/irigasi kewenangan kabupaten 2. Optimalisasi jaringan irigasi dan pembangunan daerah irigasi baru	Pengembangan dan pengelolaan system irigasi pertanian partisipatif

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
12. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan yang Berkelanjutan	1. Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 2. Peningkatan pengelolaan persampahan
13. Meningkatnya Penataan Ruang	Meningkatkan pengembangan struktur Ruang	1. Peningkatan pengembangan struktur ruang 2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang 3. Meningkatkan Kualitas Dokumen Tata Ruang
14. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana 2. Mitigasi Bencana Secara Terpadu 3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
15. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan tehnologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan 2. Penerapan Manajemen Pasca Panen	1. Bantuan peminjaman alat berat gratis untuk pembukaan lahan di tiap kecamatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Fasilitasi Pengelolaan Pasca Panen 4. Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian dalam Arti Luas 5. Pengembangan Penguatan Pasar Produk Pertanian dalam Arti Luas
16. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatkan usaha industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal	1. Fasilitasi Legalisasi Usaha Bagi IKM Untuk Perlindungan Usaha Dan Persaingan Usaha 2. Pembinaan Pada Pelaku Usaha Industri 3. Fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar dom estic dan ekspor serta e-commerce 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Industri Kecil
	Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran	1. Pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah 3. Penguatan ekonomi kreatif

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
17. Meningkatnya investasi di Kabupaten Musi Rawas	Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas	1. Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan investasi
18. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Pemberian Santunan kematian 2. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 3. Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
19. Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru	Penciptaan peluang kesempatan kerja
20. Meningkatnya ketahanan pangan	Menyediakan Pangan Berkualitas Bagi Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, Keamanan, Dan Penguatan Cadangan Serta Konsumsi Pangan yang Beragam
21. Meningkatnya Status Desa	1. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana desa 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Peningkatan kesejahteraan penduduk	1. Optimalisasi anggaran pembangunan 2. Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan formal dan non formal 3. Gerakan Pola Hidup Sehat 4. Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan

6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Musi Rawas

Mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sehingga diperlukan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing kecamatan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada.

Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan melaksanakan

program 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun dan program tahunan, bahkan dengan peraturan yang baru menjadi 20 (dua puluh) tahunan.

Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Musi Rawas, pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan pada pengembangan (1) Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti; (2) Pengembangan kawasan utama kawasan lindung (TNKS), kawasan pertanian, dan kawasan permukiman perkotaan; (3) Pengembangan kawasan strategis; (4) Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tabel 6.5

Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas

Pusat Kegiatan	Lokasi	Prioritas
1	*2*	*3*
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Muara Beliti dan Muara Lakitan	Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, jasa dan simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Megang Sakti 2. Simpang Semambang (Tuah Negeri) 3. Simpang Terawas (STL Ulu Terawas)	Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani Kegiatan Skala Kecamatan atau beberapa Desa: (1) Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Tugumulyo; (2) Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. (3) Kecamatan Selangit, STL Ulu Terawas dan Sumber Harta
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ibukota dari Kecamatan: 1. Tugumulyo 2. MuaraKelingi 3. Jayaloka 4. Selangit 5. Sumber Harta 6. Purwodadi 7. Ciptodadi 8. Muara Kati Baru I 9. Bangun Jaya	Pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani Kegiatan Skala antar Desa
4. Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertanahan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
5. Kawasan Strategis Provinsi	1. Kawasan Agropolitan Muara Beliti 2. Kawasan Minapolitan Tugumulyo	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi.

Pusat Kegiatan	Lokasi	Prioritas
1	*2*	*3*
	3. Kawasan Koridor Lubuklinggau-Muara Beliti	

Rancangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas juga memberikan arahan tentang pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kategori dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.6
Kawasan Strategis Kabupaten Musi Rawas

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
1	Kawasan Perkotaan Muara Beliti	Kawasan Strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik pusat Agropolitan (*Agropolitan Center*) dan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas	1. Muara Beliti merupakan ibukota Kabupaten Musi Rawas sejak ditetapkan tahun 2004 sehingga kawasan ini sedang dan akan terus dibangun; 2. Muara Beliti mengemban peran ibu kota kabupaten dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, dan *Agropolitan Center;* 3. Muara Beliti akan menjadi pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi kabupaten dan pusat utama dari system perkotaan Kabupaten Musi Rawas; 4. Dalam struktur ruang provinsi, Muara Beliti telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2	Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup	Keberadaaan TNKS juga menjadi sumber kehidupan bagi wilayah Kabupaten Musi Rawas, tapi lebih dari itu adalah Provinsi Sumatera Selatan, Karena hulu Sungai Musi dan Sungai Lakitan. Sehingga perlu penanganan konkrit terkait dengan pelestarian kawasan lindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya arah pengembangan wilayah berdasaarkan potensi unggulan kecamatan dapat sajikan dalam tabel 6.6. Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 6.7
Arahan Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

No	Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
1	STL Ulu Terawas	Pertanian Perkebunan Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - ODTW Alam - ODTW Budaya
2	Selangit	Pertanian Perkebunan Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - ODTW Alam
3	Purwodadi	Pertanian Peternakan	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan
4	Tugumulyo	Pertanian Pariwisata Perikanan	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perdagangan - Agro Wisata dan Wisata kuliner - Kawasan Minapolitan
5	Sumber Harta	Pertanian Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - ODTW Alam
6	Muara Beliti	Pertanian Perkebunan Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - Kawasan Ternak - ODTW Alam
7	Tiang Pumpung Kepungut	Pertanian Perkebunan Perternakan	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - Kawasan Perternakan
8	Jayaloka	Pertanian Perkebunan Perternakan Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - Kawasan Perternakan - ODTW Alam
9	Sukakarya	Pertanian Perkebunan Perternakan Pariwisata	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - Kawasan Perternakan - ODTW Alam
10	Muara Kelingi	Pertanian Pariwisata Pertambangan	- Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan - ODTW Alam - Kawasan Pertambangan
11	BTS Ulu	Perkebunan Kehutanan Pertambangan	- Kawasan Perkebunan - Kawasan Peternakan - Kawasan Hutan - Kawasan Pertambangan

No	Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
12	Tuah Negeri	**P**ertanian	- Kawasan Perkebunan - Kawasan Peranian - Kawasan Peternakan
13	Muara Lakitan	Pertanian Perternakan Kehutanan	- Kawasan Pertanian - Kawasan Peternakan - Kawsan Hutan
14	Megang Sakti	Pertanian Perkebunan Perternakan Kehutanan	- Kawasan Pertanian Kawasan Perkebunan Kawasan Perternakan Kawasan Hutan

a. Kecamatan Tugumulyo

Pengembangan Kecamatan Tugumulyo diarahkan sebagai sektor pertanian dan holtikultura khususnya tanaman padi,cabe, tomat, ketimun, kacang panjang. Dan dilihat dari sektor ternak (seperti kerbau, sapi, kambing, dan juga jumlah ternak unggas) dan perikanan budidaya (seperti ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan belut, dan ikan hias). Dari sisi sektoral, sumber pertumbuhan wilayah adalah pertanian tanamaan pangan, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kecamatan Tugumulyo diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas pertanian;
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Peningkatan benih berlabel/bersertifikasi;
- Peningkatan akses permodalan khususnya bagi petani skalakecil;
- Pengadaan bibit unggul, inseminasi buatan;
- Peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- Peningkatan pembenihan dan pembesaran ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan belut dan ikan hias;
- Pemasaran benih ikan dan ikan konsumsi;
- Pengembangan wisata agro dan kuliner.

b. Kecamatan Purwodadi

Pengembangan Kecamatan Purwodadi diarahkan sebagai sentra produksi pangan khususnya padi, palawija, hortikultura, ternak, dan perikanan budidaya. Dari sisi sektoral, sumber utama pertumbuhan daerah adalah pertanian, perdagangan, dan perkebunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kabupaten Purwodadi perlu diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pemantapan jaringan irigasi dan penyuluhan.
- Peningkatan efisiensi distribusi input produksi : sarana pertanian, bibit unggul,pupuk, pakan ternak.

- Pemantapan prasarana dengan fokus jalan produksi dan pasar produk pertanian.
- Peningkatan dukungan akses permodalan, yang bias dilakukan melalui subsidi kredit dan didukung penjaminan produksi pertanian.
- Pemberdayaan koperasi petani.

c. Kecamatan Muara Lakitan

Pengembangan Kecamatan Muara Lakitan diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra pertambangan khususnya batubara yang terdapat di sungai semangus dan sungai pinang, kandis Kecamatan Muara Lakitan. Namun demikian untuk perspektif jangka panjang, pengembangan daerah ini juga diarahkan pada sektor-sektor unggulan dengan basis utama perkebunan, khususnya komoditi karet dan kelapa sawit.

Sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sumber utama pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pemantapan dan pemeliharaan infastruktur jalan.
- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus: penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani.
- Peningkatan dukungan pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.

d. Kecamatan Sumber Harta

Pengembangan Kecamatan Sumber Harta diarahkan sebagai sentra produksi perkebunan khususnya karet, kayu manis, dan pinang. Sedangkan sektor pariwisata khususnya Danau Aur. Sektor perikanan dan perkebunan berperan penting bagi perekonomian daerah dan merupakan sumber utama pertumbuhan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, serta didukung jaminan kelancaran distribusi pupuk, pakan ternak dan alsintan.
- Peningkatan dukungan akses kredit modal.
- Peningkatan infrastruktur jalan.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani.
- Pengembangan agrowisata.
- Pemasaran benih ikan dan ikan kosumsi.
- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pemantapan jaringan irigasidan penyuluhan.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses kesehatan.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.

e. Kecamatan BTS Ulu

Pengembangan Kecamatan BTS Ulu diarahkan sebagai sentra produksi Peternakan dan Perkebunan, khususnya komoditi karet, kopi, kelapa, sapi potong, dan ayam petelur. Sektor peternakan dan sektor perkebunan merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan.
- Pemanfaatan bibit unggul.
- Jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah.
- Peningkatan infrastruktur jalan.
- Pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.

f. Kecamatan Muara Kelingi

Pengembangan Kecamatan Muara Kelingi diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama Perkebunan, dan pertanian, khususnya karet, sawit, tanaman padi, tanaman palawija (seperti jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah) dan tanaman sayuran (seperti tomat, cabe, kacang panjang, terung, ketimun, buncis, kangkung, bayam) dan buah-buahan seperti durian, duku dan semangka. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah.
- Peningkatan efisiensi distribusi input produksi : sarana pertanian, bibit unggul dan pupuk, dukungan pemberdayaan koperasi petani.

g. Kecamatan Muara Beliti

Pengembangan Kecamatan Muara Beliti diarahkan sebagai sentral produksi sektor perkebunan seperti karet dan sawit. Sektor perkebunan berperan penting bagi perekonomian daerah dan merupakan sumber utama pertumbuhan. Sedangkan untuk lahan perairan sebagai besar di manfaatkan untuk sawah dan

dilihat dari sektor ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam ras. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pengendalian kompetisi lahan untuk pertambangan, pertanian, dan perkebunan - Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan.
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Peningkatan produktivitas pertanian khususnya melalui dukungan penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan.
- Peningkatan jalur logistik dan pemasaran.
- Peningkatan akses permodalan bagi petani, peternak dan petani perkebunan rakyat.

h. Kecamatan Tuah Negeri

Pengembangan Kecamatan Tuah Negeri diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama sektor perkebunan (seperti karet). Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah.
- Peningkatan infrastruktur jalan.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani.

i. Kecamatan STL Ulu Terawas

Pengembangan Kecamatan STL Ulu Terawas diarahkan untuk memacu pertumbuhannya dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Percepatan pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, yakni tanaman pangan padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan peternakan sapi potong, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, domba, kambing,dan itik/entok. Kecamatan ini juga bertopang pada subsektor tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit. Komoditas karet menjadi sumber penghassilan utsms penduduk di desa/kelurahan di kecamatan ini dan juga kecamatan ini terdapat kawasan wisatan yakni Bukit Cogong. Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, peningkatan distribusi pupuk dan alsintan.
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan.
- Peningkatan akses permodalan bagi petani.
- Peningkatan akses pemasaran.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.
- Peningkatan akses pendidikan menengah.

j. Kecamatan Sukakarya

Keadaan alam kecamatan Sukakarya yang memiliki jenis tanah podsolik sangat baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet. Keunggulan inilah yang kemudian diamanfaatkan penduduk guna bercocok tanam tanaman pertanian pangan maupun tanaman perkebunan karet. Pengelolaan perkebunan karet yang menjadi salah satu masyarakat masih menjadi produk unggulan di sub sektor perkebunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah.
- Peningkatan infrastruktur jalan.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani.

k. Kecamatan Selangit

Pengembangan Kecamatan Selangit diarahkan sebagai sentra produksi perkebunan utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor perkebunan (seperti perkebunan karet dan kopi). Percepatan pertumbuhan perkebunan sangat penting mengingat besarnya pangsa dalam struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas usaha pertanian melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan.
- Peningkatan dukungan akses permodalan melalui subsidi kredit pertanian dan sertifikasi tanah.
- Peningkatan infrastruktur jalan produksi.
- Pemberdayaan koperasi pertanian.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.
- Peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.

l. Kecamatan Megang Sakti

Pengembangan Kecamatan Megang Sakti diarahkan sebagai sub sektor tanaman pangan meliputi tanaman padi dan palawija (seperti jagung, kacang, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Dari sektor perkebunan yang menjadi unggulan di kecamatan megang sakti adalah kelapa sawit dan karet. Sedangkan sektor peternakan Kecamatan Megang Sakti mempunyai jenis ternak berbagi 3 yaitu ternak besar (seperti sapi potong, sapi perah, dan kerbau), ternak kecil (seperti kambing, domba, dan babi), sedangkan

jenis ternak unggas (seperti ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam kampung, itik). Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Peningkatan dukungan akses permodalan.
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan fokus pada peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan.
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan produksi.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani dan peternak.

m. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Pengembangan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama sektor perkebunan (seperti karet). Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet.
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah.
- Peningkatan infrastruktur jalan.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani.

n. Kecamatan Jayaloka

Pengembangan Kecamatan Jayaloka diarahkan untuk sektor pertanian terutama sub sektor tanaman perkebunan komoditas karet menjadi sumber penghasilan utama penduduk di setiap desa/kelurahan di kecamatan ini. Tanaman sayuran yang diusahakan di kecamatan jayaloka berupa cabe, kacang panjang, terung, buncis, kangkung, dan bayam, sedangkan tanaman palawija yang diusahakan berupa jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Peningkatan dukungan akses permodalan.
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan fokus pada peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan.
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan produksi.
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani dan peternak.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menegah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua.

Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah, dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari PD di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing PD di Kabupaten Musi Rawas, yang sangat berpengaruh dalm menunjang keberhasilan program prioritas utama.

6.4.1 Program Setiap Perangkat Daerah

Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.4.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar

1. Pendidikan

Program pada Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Pendidikan
2) Program Pengembangan Kurikulum
3) Program Pendidik dan tenaga Kependidikan
4) Program Pengendalian Izin Pendidikan

2. Kesehatan

Program-program urusan kesehatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Program-program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4) Program Pengembangan Permukiman
5) Program Penataan Bangunan Gedung
6) Program Penyelenggaraan Jalan
7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program-program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengembangan Perumahan
2) Program Kawasan Permukiman
3) Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program-program urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program-program urusan Sosial yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pemberdayaan Sosial
2) Program Rehabilitasi Sosial
3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4) Program Penanganan Bencana

6.4.3 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program-program urusan Tenaga Kerja yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2) Program Penempatan Tenaga Kerja
3) Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program-program urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2) Program Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6) Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Program-program urusan Pangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Program-program urusan Pertanahan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Izin Lokasi
2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
4) Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
5) Program Penetapan Tanah Ulayat
6) Program Pengelolaan Tanah Kosong
7) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
8) Program Penatagunaan Tanah

5. Lingkungan Hidup

Program-program urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10) Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pendaftaran Penduduk
2) Program Pencatatan Sipil
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengendalian Penduduk
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

8. Perhubungan

Program-program Urusan Perhubungan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

9. Komunikasi Dan Informatika

Program-program urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Informasi dan Komunikasi Publik
2) Program Aplikasi Informatika

10. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program-program urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
6) Program Pengembangan UMKM

11. Penanaman Modal

Program-program urusan Penanaman Modal yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2) Program Promosi Penanaman Modal
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

12. Kepemudaan Dan Olahraga

Program-program urusan Kepemudaan dan Olahraga yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

13. Statistik

Program-program urusan Statistik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

14. Persandian

Program-program urusan Persandian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

15. Kebudayaan

Program-program urusan Kebudayaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengembangan Kebudayaan
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3) Program Pembinaan Sejarah
4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

16. Perpustakaan

Program-program urusan Perpustakaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pembinaan Perpustakaan
2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

17. Kearsipan

Program-program urusan Kearsipan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Arsip
2) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

6.4.4 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Program-program urusan Kelautan dan Perikanan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Program-program urusan Pariwisata yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2) Program Pemasaran Pariwisata
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Program-program urusan Pertanian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5) Program Penyuluhan Pertanian

4. Kehutanan

Program-program urusan Kehutanan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

6. Perdagangan

Program-program urusan Perdagangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4) Program Pengembangan Ekspor
5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

7. Perindustrian

Program-program urusan Perindustrian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

8. Transmigrasi

Program-program urusan Transmigrasi yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

6.4.5 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Penunjang Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Perencanaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Keuangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Kepegawaian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian Dan Pengembangan

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Penelitian Dan Pengembangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

7. Sekretariat DPRD

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Sekretariat DPRD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

8. Sekretaris Daerah

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Sekretariat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3) Program perekonomian dan pembangunan

9. Inspektorat

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Inspektorat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

10. BPBD

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program BPBD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program penanggulangan bencana

11. Kecamatan

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Kecamatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

12. Kesbang Pol

Program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah berupa Program-Program Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:

1) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Tabel 6.8
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Musi Rawas

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		URUSAN WAJIB															
1		**LAYANAN DASAR**															
		Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi															
		Tujuan 1.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bagi pemenuhan pelayanan publik															
		Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase SOTK sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82%	55.109.805	84%	60.620.786	86%	66.709.864	88%	73.371.851	90%	80.697.036	92%	88.751.740	Sekretariat Daerah (Bag. Perencanaan Keuangan Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Umum)
			2. Persentase PD yang mendapat pendampingan RB	50%	75		100%		100%		100%		100%		100%		
			3. Persentase peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada setda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			4. Persentase Administrasi Keuangan setda yang terlaksana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			5. Persentase dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja setda yang di selesaikan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			6. Persentase pelayanan pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			7. Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			8. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dan rumah tangga KDH / WKDH dan Sekretaris daerah	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
			9. Persentase pelayanan rumah tangga KDH,WKDH dan Sekda	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			10. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Pendampuingan Pelayanan Publik	50%	50%		75%		100%		100%		100%		100%		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Perangkat daerah yang di dampingi penyusunan LPPD	100%	100%	55.457.680	100%	47.953.448	100%	48.498.793	100%	49.098.672	100%	49.758.539	100%	50.305.773	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem dan Kerjasama, Bag. Hukum,)
			2. persentase Perangkat daerah yang di dampingi penyusunan laporan SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			3. persentase kasus batas wilayah yang diselesaikan	50%													
			4. persentase MoU antar daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			5. Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			6. Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan Bidang Keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			7. Persentase Berkas Kebijakan Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan yang Dimanfaatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	laporan kebijakan perekonomian yang dimanfaatnkan	100%	100%	3.208.948	100%	3.529.843	100%	3.882.827	100%	4.271.110	100%	4.698.221	100%	5.168.043	Sekretariat Daerah (Bag, Ekonomi, Bag. Administrasi Pemerintahan, Bag. Pengadaan Barang Jasa)
			persentase pemantauan pelaksanaan kebijakan SDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			persentase Peningkatan pelaksanaan Administrasi pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			persentase ketepatan waktu pelaksanaan PBJ	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai	100%	100%	12.544.768	100%	13.172.006	100%	13.830.607	100%	14.522.137.000	100%	14.522.137	100%	15.248.244	**Inspektorat**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			peraturan														
			Persentase ASN Inspektorat yang memiliki sertifikat kompetensi Auditor dan/atau P2UPD	86,44%	89,83%		91,53%		93,22%		94,92%		94,92%		96,61%		
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Inspektorat	54,82	55,06		55,16		55,16		55,26		55,26		55,36		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Inspektorat	25,27	25,3		25,35		25,4				25,45		25,5		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Inspektorat	5	5		5		5		25,45		5		5		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase realisasi pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT dan mandatori kebijakan pengawasan	95%	95%	4.699.817	96%	4.934.808	97%	5.181.548	98%	5.440.626	99%	5.712.657	100%	5.998.290	**Inspektorat**
			Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 3	15 PD	15 PD		17 PD		19 PD		21 PD		23 PD		25 PD		**Inspektorat**
			Jumlah PD yang menerapkan penilaian risiko	36 PD	36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		**Inspektorat**
			Jumlah rekomendasi BPK, Inspektorat dan APIP lainnya yang tuntas ditindaklanjuti	2386 rekom	2386 rekom		2395 rekom		2400 rekom		2405 rekom		2410 rekom		2415 rekom		**Inspektorat**
			Jumlah PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal kategori BB	25 PD	25 PD		28 PD		31 PD		35 PD		38 PD		40 PD		**Inspektorat**
			Persentase pengaduan yang ditelaah dan diteruskan pada proses pemeriksaan khusus	89%	90%		91%		92%		93%		94%		95%		**Inspektorat**
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase ketersediaan dokumen sistem, kebijakan dan prosedur pengawasan yang mendukung capaian kapabilitas APIP sesuai IACM	90%	90%	1.717.760	92%	1.803.648	94%	1.893.830	96%	1.988.522	98%	2.087.948	100%	2.192.345	**Inspektorat**
			Nilai rata-rata hasil peer reviu antar Irban	70%	70%		72%		74%		76%		78%		80%		**Inspektorat**
			Persentase PD yang didampingi dan dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	20%	20%		30%		34%		38%		42%		46%		**Inspektorat**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase target aktivitas rencana aksi pencegahan korupsi yang terealisasi	95,47%	95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		**Inspektorat**
			Jumlah PD yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0	2 OPD		2 OPD		3 OPD		3 OPD		3 OPD		3 OPD		**Inspektorat**
			Persentase ASN yang tertib melaporkan LHKASN dan tidak terlibat dalam pungutan liar	80%	70%		87%		89%		91%		93%		95%		**Inspektorat**
			Nilai hasil evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi	70,00	70,00		70,35		70,70		71,06		71,41		71,77		**Inspektorat**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP BPKAD	75.00	75.00	30.000.000	75.50	35.000.000	76.00	37.500.000	76.30	40.000.000	77.00	42.500.000	77.50	45.000.000	**BPKAD**
			- Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	71.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		76.00		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	**BPKAD**
		Program Pengelolaan Barang Millik Daerah	Persentase Tingkat Pengelolaan Aset Daerah	90%	90%	1.500.000	91%	2.500.000	92%	2.750.000	93%	3.000.000	94%	3.250.000	95%	4.000.000	**BPKAD**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	89%	90%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	**BPPRD**
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap kontribusi Pendapatan Daerah	89%	90%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	**BPPRD**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	6.597.146,100	100%	7.256.860,710	100%	7.982.546,781	100%	8.401.431,459	100%	9.658.881,605	100%	10.624.770,065	**BAPPEDA**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Bappeda	31.97%	32%		33%		34%		35%		36%		37%		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Bappeda	25%	25%		26%		27%		28%		29%		30%		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Bappeda	4.94%	4.95%		4.96%		4.96%		4.97%		4.98%		4.98%		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional	90%	95%	2.800.000	95%	3.080.000	100%	3.388.000	100%	3.726.800	100%	4.099.480	100%	4.509.428	**BAPPEDA**
			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tahunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen perencanaan tahunan yang selaras RPJMD, RPJMD Provinsi dan RPJMN	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Persentase Ketersediaan Informasi Pembangunan Daerah	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Nilai Pemenuhan pengukuran kinerja Kabupaten	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Nilai Kualitas pengukuran kinerja Kabupaten	80%	85%		90%		92%		94%		98%		100%		
			Nilai Implementasi pengukuran kinerja Kabupaten	80%	82%		84%		86%		88%		89%		90%		
			Tingkat Capaian Kinerja Minimal Daerah	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Persentase Rekomendasi Capaian Kinerja yang ditindaklanjuti	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Strategis	100%	100%	3.525.000	100%	3.877.500	100%	4.265.250	100%	4.691.775	100%	5.160.953	100%	5.677.048	**BAPPEDA**
			Persentase Renstra yang selaras dengan RPJMD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tahunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen perencanaan tahunan yang selaras dengan perencanaan strategis	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Rata-rata Aspek Pengukuran Kinerja	80%	85%		90%		92%		94%		98%		100%		
			Nilai Rata-rata Aspek Kualitas Pengukuran	80%	84%		86%		88%		90%		93%		95%		
			Nilai Rata2 Aspek Implementasi Pengukuran Kinerja	80%	82%		84%		86%		88%		89%		90%		
			Tingkat Capaian Kinerja Minimal PD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Hasil Evaluasi PD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	BB	BB	1.002.307	BB	1.100.000	BB	1.250.000	BB	1.300.000	BB	1.350.000	BB	1.350.000	**Balitbang**
			Nilai Indeks Proffesional Pegawai	71	71		73		75		75		77		77		**Balitbang**
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	75%	75%	1.012.189	80%	2.400.000	85%	2.500.000	90%	2.600.000	95%	2.800.000	100%	2.800.000	**Balitbang**
			Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomoi dan Pembangunan	75%	-		75%		80%		85%		90%		100%		**Balitbang**
			Persentase Meningkatnya Reward Hasil Riset dan Inovasi	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		**Balitbang**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai peraturan	90%	93%	53.128.490	95%	53.128.490	96%	58.441.339	98%	64.285.474	100%	70.714.021	100%	77.785.423	**Sekretriat DPRD**
			Persentase Laporan Keuangan Sesuai Peraturan dan Tepat Waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase Dokumen pelaporan Tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase Laporan BMD Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kopetensi (Orang)	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase Pegawai yang tidak Mendapat Hukuman disiplin	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase pelayanan administrasi DPRD tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase pelayanan keuangan DPRD tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Risalah Rapat Persidangan yang di buat tepat waktu	90%	93%	51.567.261	95%	51.567.261	96%	56.723.987	98%	62.396.386	100%	68.636.024	100%	75.499.627	**Sekretriat DPRD**
			Persentase Aspirasi Masyarakat yang dipasilitasi	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Persentase Pokir yang dipasilitasi	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan	100%	100%	6.157.062,200	100%	6.647.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	BKPSDM
			Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Dokumen Pengelolaan BMD yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kumulatif Nilai Rata-Rata Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi ASN BKPSDM	26,55	27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		32,00		
			Nilai Rata-Rata Dimensi Kinerja ASN BKPSDM	25,12	25,50		25,60		25,70		25,18		25,19		26,00		
			Nilai Rata-Rata Dimensi Disiplin ASN BKPSDM	5	5		5		5		5		5		5		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100	363,243	100	4,801,428	100	5,281,571	100	5,809,728	100	6,390,701	100	7,029,771	**Kesbangpol**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,15	33,5		36,75		39,10		41,35		43,2		45,10		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	13,33		21,08		25,17		5,00		64,58		100		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan publik yang baik	10	15	4.383.976	25	7.306.627	35	10.229.277	45	13.151.928	55	16.074.579	70	20.458.555	**Diskominfo**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	75%	4.252.447.918	80%	4.465.070.314	85%	4.688.323.830	87%	4.922.740.021	90%	5.168.877.022	95%	5.427.320.873	**Disbudpar**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100,00	100	3.705.720.176	100	5.772.424.680	100	5.217.087.280	100	5.763.837.280	100	5.978.137.280	100	6.253.087.280	**Disperpus Arsip**
			Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100		100		100		100		100		100		
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi	30,10	30,10		30,50		30,80		4,00		4,25		4,5		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas ...														
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas ...	25	25		28		30		33		37		40		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas	5	5,00		5,30		5,75		6,00		6,25		6,50		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan dokumen pengaanggaran, dokumen pelaporan kinerja, dokumen pelaporan keuangan dan dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100	4.765.78 ,632	100	5.368. 000	100	6.663. 000	100	7.841. 000	100	9.578.00 0	100	10.604.000	**Dinas Perikanan**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas	15	15		16		17		18		19		20		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Perikanan	25.50	25.50		28.50		28.05		30.85		33.93		37.32		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Perikanan	5.00	5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Yang Dipenuhi (%)	95	95	26.156.0 00	95	46.04 0.000	95	47.05 5.000	95	48.07 0.000	95	49.085.0 00	95	49.085.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Yang Dipenuhi (%)	95	95		95		95		95		95		95		
			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuh (%)	95	95		95		95		95		95		95		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	1.278.160.000	100,00	7.276.64 5,086	100,00	7.968. 909,5	100,00	8.750. 100,5	100,00	9.618. 460,6	100,00	10.562.6 59,920	100,00	10.779.467,1 11	**Dinas Perkebunan**
			Persentase laporan keuangan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			sesuai peraturan dan tepat waktu					95		54		09					
			Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas	BB	BB	7.130,582	BB	7.487,111	BB	7.861,467	BB	8.254,540	BB	8,667,267	BB	9,100,631	**DLH**
			Indeks Profesionalitas ASN DLH	58.08	59.00		60.00		60.10		63.00		66.00		70.00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	5.414,087	100%	6.521,507	100%	6.521,507	100%	6.521,507	100%	6.521,507	100%	6.521,507	**Disperindag**
			Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Nilai rata-rata dimensi kompetensi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,14%	15%		15%		20%		20%		25%		20%		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25%	25%		25%		26%		26%		27%		28%		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin	5%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	100%	100%	5.803.790,664	100%	6.693.288,797	100%	7.754.360,556	100%	8.961.968,067	100%	10.399.970,621	100%	11.439.967,683	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Komulatif Nilai Rata-rata Kompetensi dan Kualifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	81		85		88		90		95		100		
			Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja ASN Dinas Ketahana Pangan	80	83		87		90		95		95		100		
			Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	90		90		95		97		100		100		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan publik dan penyelenggaraan tata kelola yang baik	94,73	95	3.129,310	96	3.215,651	97	3.362,101	98	3.431,678	99	3.551,700	99	3.338,088	**BPBD**
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	90%	100%	270.447.443,862	100%	283.969.816,055	100%	298.168.306,858	100%	313.076.722,201	100%	328.730.558,311	100%	345.167.086,226	**Dinas Pendidikan**
			Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase kualifikasi Pendidikan ASN	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	45%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
			Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	190,000,000	100%	210,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	**Dinas Kesehatan**
			Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
		'Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah daerah yang profesional dan terstandarisasi	80%	100	90.475.000	100	102.000.000	100	109.780.000	100	120.758.000	100	120.758.000	100	120.758.000	**RS. Sobirin**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	70,92	71	8.552.000	72	8.800.700	73	8.975.300	74	9.336.300	75	9.592.800	76	9.948.800	**Dinas PUBM**
			Indeks Profesionalisme ASN	59,68	60		61		62		63		64		65		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Persentae, Pelanggaran, Pelaporan kinerja dan Keuangan, Serta Pengelola BMD Yang terbit tepat waktu dan Sesuai Peraturan (%)	100	100	38.143.218	100	41.957.540	100	46.153.294	100	50.768.623	100	55.845.485	100	61.430.034	**DPUCKTRP**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kumulatif Nilai rata-rata dimensi kuaifikasi dan komponen ASN DPU CKTRP	18,4	18,6		18,8		19		19,4		19,8		20		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN DPU CKTRP	25,06	25,15		25,25		25,35		26		25,45		25,5		
			Nilai rata-rata dimensi Disiplin ASN DPU CKTRP	5	5		5		5		5		5		5		
			Persentase Tersedianya perencanaan teknis yang berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase terlaksananya pengawasan dan pengendalian teknis (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	100%	100%	5.679.733	100%	7.552.965	100%	7.774.965	100%	8.189.965	100%	8.199.965	100%	7.579.965	**Dinas Perkim**
			2. Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			3. Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			4. Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	12%	12%		20%		25%		30%		35%		405%		
			6. Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik	78%	78%		80%		83%		85%		87%		90%		
			7. Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	12,000,000	100%	13,200,000	100%	14,520,000	100%	15,972,000	100%	17,569,200	100%	19,326,120	**Satpol PP & Damkar**
			Komulatif nilai rata-rata demensi kompetensi dan kualifikasi ASN Satpol PP dan Damkar	30,15	33,50		36,75		39,10		41,35		43,20		45,10		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai rata-rata dimensi kinerja Satpol PP dan Damkar	25,10	25.55		25,80		26'10		26,60		27,10		27,35		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Satpol PP dan Damkar	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan serte pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	BB	4.942.335	100	5.247.766	100	5.494.750	100	5.695.250	100	5.900.250	100	27.280.351	**Dinas Sosial**
			Kumulatif Nilai Rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Sosial	52,26	53,00		54,00		55,00		56,00		57,00		58,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja Dinas Sosial	27,42	27,42		27,50		27,50		27,50		27,58		27,58		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Sosial	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100,00%	100%	5.002.731,620	100%	5.352.731,620	100%	5.694.436,320	100%	6.682.626,240	100%	7.450.888,860	100%	8.225.575,500	**Disnakertrans**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN	23,19%	23,19%		23,20%		24,50%		24,70%		25,00%		25,00%		
			Nilai Rata-rata dimensi kinerja ASN	25,15%	25,15%		25,15%		25,16%		25,17%		25,17%		25,17%		
			Nilai Rata-rata Disiplin ASN	5,00%	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	2.799.796	100%	3.079.775	100%	3.387.753	100%	3.726.528	100%	4.099.181	100%	4.099.181	**Dinas PP-PA**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas PPPA	57,61	63,37		65,90		68,54		71,28		74,13		77,10		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas PPPA	25,00	26,00		27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas PPPA	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	5.689.808,104	100%	6.258.788	100%	6.468.880	100%	6.907.760	100%	7.159.661	100%	7.159.661	**Disdukcapil**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.65%	41.65 %		42.65%		43.65%		44.65%		45.65%		46.65%		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25%	26%		27%		28%		29%		30%		30%		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		
			Persentase Sapras Yang Sesuai Standar Pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	5.500.555,175	100%	9.192.409,392	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	**Dinas PMD**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas PMD	32,50	32,60		32,70		32,80		32,90		33,00		33,10		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja	25,16	25,20		25,25		25,30		25,35		25,40		25,45		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ASN Dinas PMD														
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas PMD	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Meningkatnya kinerja individu ASN Dinas PMD	37 Orang	37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		
			Meningkatnya kedisiplinan ASN Dinas PMD	37 Orang	37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan	28,64	29,64	5.768.598,054	30,64	6.345.457,859	31,64	6.980.003,645	32,64	7.678.004,010	33,64	8.445.804,411	34,64	8.445.804,411	**DPPKB**
			Kumulatif Nilai rata-rata Dimensi Kompetensi dan Kualifiksi ASN DPPKB	58,64	60,64		62,64		64,64		66,64		68,64		70,64		
			Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja DPPKB	25,00	26,00		27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		
			Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN DPPKB	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%	5.801.763,690	100%	5.870.000	100%	5.940.000	100%	6.100.000	100%	6.170.000	100%	6.240.000	**Dinas Perhubungan**
			Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan standar akutansi pemda	37%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		
			Persentase Dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	57%	60%		70%		75%		80%		85%		90%		
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kopetensi dan Kualitas ASN Dinas	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai peraturan	80%	80%	3.963.330,270	85%	5.743.996,324	85%	6.869.795,589	85%	8.207.154,707	85%	9.536.033,648	85%	11.093.099,578	**Dinas Koperasi UKM**
			Persentase Laporan Keuangan sesuai Peraturan dan tepat waktu	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Persentase Laporan BMD Sesuai Aturan dan tepat waktu	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	70%	70%		80%		80%		80%		80%		80%		
			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	9.839.223,217	100%	10.823.145,539	100%	11.905.460,093	100%	13.096.006,102	100%	14.405.606,712	100%	15.846.167,383	**DPMPTSP**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan serte pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	90	4.942.335	100%	5.247.766	100%	5.494.750	100%	5.695.250	100%	5.900.250	100%	27.280.351	**Dispora**
			Kumulatif Nilai Rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Pemuda dan Olahraga	30,15	33,50		36,75		39,10		41,35		43,20		45,10		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	25,15	25.55		25,80		26'10		26,60		27,10		27,35		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Pemuda dan Olahraga	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	1.668.666,913	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	**Kec. Tuah Negeri**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Tuah Negeri	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Tuah Negeri	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tuah Negeri	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	7.393.500	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	**Kecamatan Tugumulyo**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Tugumulyo	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Tugumulyo	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tugumulyo	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	9.912.739	100%	10.904.013	100%	11.994.414	100%	13.193.856	100%	14.513.242	100%	15.964.566	**Kecamtan Megang Sakti**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Megang Sakti	11,32	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Megang Sakti	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Megang Sakti	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	3.291.986,526	100%	3.621.185,179	100%	3.983.303,696	100%	4.381.634,066	100%	4.819.797,473	100%	5.301.777,220	**Kecamatan Purwodadi**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Purwodadi	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Purwodadi	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Purwodadi	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	7.393.500	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	**Kec. STL Ulu Terawas**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan,	100%	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	9.800.000	**Kec. BTS Ulu**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan BTS. Ulu	10,90	12,00		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan BTS. Ulu	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan BTS. Ulu	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	6.336.688.785	100%	7.604.026.542	100%	8.364.429.196	100%	9.284.516.408	100%	11.141.419.689	100%	13.369.703.628	**Kec. Selangit**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Selangit	22,63	25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Selangit	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Selangit	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	5.000.000	100%	6.500.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	9.500.000	100%	9.800.000	**Kec. TPK**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	10,90	12,00		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut														
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	6.000.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	**Kec. Jayaloka**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Jayaloka	10,90	12,00		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Jayaloka	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Jayaloka	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	6.336.688,785	100%	7.604.026,542	100%	8.364.429,196	100%	9.284.516,408	100%	11.141.419,689	100%	13.369.703,628	**Kecamatan Muara Beliti**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Beliti	17,19	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Beliti	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara Beliti	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan,	100%	100%	8.393.500	100%	9.872.200	100%	10.759.420	100%	11.735.362	100%	12.808.898	100%	12.989.788	**Kecamatan Sumber Harta**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Sumber Harta	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Sumber Harta	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Sumber Harta	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	3.059.176	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	3.998.747	100%	4.659.050	100%	5.402.774	**Kec. Muara Kelingi**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Kelingi	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Kelingi	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara Kelingi	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	2.592.756	100%	4.992.756	100%	5.592.756	100%	6.592.756	100%	7.592.756	100%	7.592.756	**Kec. Sukakarya**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Sukakarya	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Sukakarya	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Sukakarya	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	9.600.000	**Kec. Muara Lakitan**
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Lakitan	10,41	11,00		12,00		13,00		14,00		15,00		16,00		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Lakitan	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara Lakitan	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi															
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang disajikan	10%	15%	2.382.935	35%	3.216.962	55%	3.693.549	75%	4.170.136	95%	4.646.723	100%	4.765.870	**Diskominfo & Statsistik**
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang diintegrasikan	10%	15%	3.540.200	35%	4.779.270	55%	5.487.310	75%	6.195.350	95%	6.903.390	100%	7.080.400	**Diskominfo & Statsistik**
			Persentase Desa yang tersedia jaringan TIK	10%	15%	3.540.200	35%	4.779.270	55%	5.487.310	75%	6.195.350	95%	6.903.390	100%	7.080.400	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang disusun dan dipublikasikan	10%	20%	185.000	35%	249.750	50%	277.500	70%	314.500	85%	342.250	100%	370.000	**Diskominfo & Statsistik**
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi yang diamankan	5%	10%	150.000	35%	202.500	50%	225.000	70%	255.000	90%	285.000	100%	300.000	**Diskominfo & Statsistik**
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan dengan Jumlah Jabatan	50%	50%	2.581.510,400	60%	3.675.000	70%	3.775.000	80%	3.800.000	90%	3.925.000	95%	3.925.000	**BKPSDM**
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi Jabatan ASN	58,39%	58,39%		58,50%		58,60%		58,70%		58,80%		58,90%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Dimensi Kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	25,19	25,19		25,30		25,40		25,60		25,70		25,80		
			Persentase OPD yang Memberikan Tunjangan Kinerja	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase PNS yang Mendapatkan Satya Lancana	14,25%	14,25%		16%		18%		20%		22%		24%		
			Nilai Dimensi Disiplin ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4,99	4,99		4,99		4,99		4,99		4,99		4,99		
			Nilai Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	12,65	12,65		13,00		13,25		13,50		13,75		14,00		
			Persentase Regulasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	90%	90%		92%		94%		96%		98%		100%		
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang didukung TI	57%	60%		75%		75%		75%		75%		75%		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi Aparatur ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	14,25	14,25	4.954.686	14,75	6.495.000	15	6.495.000	15,25	6.495.000	15,50	6.495.000	16	6.495.000	**BKPSDM**
		Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan pelayanan public	50%	50%	300.000	75%	330.000	100%	390.000	100%	420.000	100%	450.000	100%	480.000	**Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)**
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Regulasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	600.000	100%	700.000	100%	725.000	100%	725.000	100%	750.000	100%	750.000	**BKPSDM**
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	90%	90%		92%		94%		96%		98%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang didukung TI	57%	60%		75%		75%		75%		75%		75%		
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang mengakses pelayanan dokumen kependudukan	94.09%	100%	130.189,500	95.09%	175.600	96.09%	200.000	97.09%	262.000	98.09%	300.200	99.09%	300.200	**Disdukcapil**
			Persentase pengaduan pelayanan pendaftaran penduduk yang di tindak lanjuti	85%	86%		87%		88%		89%		90%		91%		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang mengakses pelayanan dokumen pencatatn sipil	29.74%	32.74%	106.044,800	35.74%	178.900	38.74%	195.000	41.74%	231.000	44.74%	267.000	47.74%	267.000	**Disdukcapil**
			Persentase pengaduan pelayanan pencatatan sipil yang di tindak lanjuti	85%	86%		87%		88%		89%		90%		91%		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase akses layanan administrasi kependudukan	100%	100%	2.283.078,100	100%	2.511.385	100%	2.651.700	100%	2.776.555	100%	2.929.355,500	100%	2.929.355,500	**Dsdukcapil**
			Persentase ASN yang bersertifkat layanan	10%	15%		20%		25%		30%		35%		40%		
			Persentase Inovasi Pelayanan yang tercipta	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase terselenggara sertifikasi mutu layanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase terlaksananya perjanjian kerja sama pemanfataan data kependudukan	0	5%		10%		15%		20%		25%		30%		
			Persentase data penduduk yang berada di desa/kelurahan dengan data pada SIAK	94%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	persentase data profil kependudukan yang akurat	94%	95%	0	96%	100,000	97%	135,000	98%	160,000	99%	200,000	100%	200,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	190,000,000	100%	210,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	**Dinas Kesehatan**
			Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan sesuai standar akuntansi Pemda														
			Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
			Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
		'Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah daerah yang profesional dan terstandarisasi	80%	100	90.475.000	100	102.000.000	100	109.780.000	100	120.758.000	100	120.758.000	100	120.758.000	**RS. Sobirin**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	70,92	71	3.552.000	72	3.600.700	73	3.675.300.000	74	u	75	4.192.800.000	76	4.448.800.000	**Dinas PUBM**
			Indeks Profesionalisme ASN	59,68	60		61		62		63		64		65		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Persentae, Pelanggaran, Pelaporan kinerja dan Keuangan, Serta Pengelola BMD Yang terbit tepat waktu dan Sesuai Peraturan (%)	100	100	38.143.218	100	41.957.540	100	46.153.294	100	50.768.623	100	55.845.485	100	61.430.034	**DPUCKTRP**
			Kumulatif Nilai rata-rata dimensi kuaifikasi dan komponen ASN DPU CKTRP	18,4	18,6		18,8		19		19,4		19,8		20		
			Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN DPU CKTRP	25,06	25,15		25,25		25,35		26		25,45		25,5		
			Nilai rata-rata dimensi Disiplin ASN DPU CKTRP	5	5		5		5		5		5		5		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Misi 2 Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas															
		Tujuan 2.1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas															
		Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan															
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PAUD dalam kondisi Baik	70%	100%	123.719.388,900	100%	129.905.358,346	100%	136.400.626,263		143.220.657,576	100%	150.381690.455	100%	150.381.690,455	**Dinas Pendidikan**
			Persentase SD,SMP dalam kondisi Baik	75%	75,50%		76,00%		76,30%		76,50%		77,00%		77,30%		
			Persentase PAUD Cukup Sarpras	65%	65,30%		66,00%		66,30%		67,00%		67,30%		68,00%		
			Persentase SD,SMP Cukup Sarpras	65%	65,30%		66,00%		66,30%		67,00%		67,30%		68,00%		
			Persentase Lembaga Penerima Subsidi	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Siswa Penerima Subsidi	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		
			Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Kunjungan Pembinaan Pengawas Sekolah	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Siswa Berprestasi	20%	20%		25%		30%		30%		30%		35%		
			Persentase guru berprestasi	25%	25%		25%		30%		35%		35%		35%		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang mengembangkan kurikulum	33,00%	33%	113.388.500	45%	119.057.925	50%	125.010.821	55%	131.261.362	60%	137.824.430	75%	137.824.430	**Dinas Pendidikan**
			Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Anti Korupsi	15,00%	25%		30%		35%		40%		45%		50%		
		Program Pendidik Dan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase kualifikasi guru berpendidikan S1	85,96%	65%	46.954.000	70%	48.923.000	75%	51.368.885	80%	53.938.379	85%	56.635.298	90%	56.635.298	**Dinas Pendidikan**
			Persentase guru bersertifikasi	74,83%			75%		75,30%		75,60%		75,80%		76%		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang mendapat izin operasional	361	1,31%	14.987.000	1,31%	15.736.350	1,31%	16.523.168	1,64%	17.349.326	2,29%	18.216.792	2,29%	18.216.792	**Dinas Pendidikan**
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang mengembangkan bahasa dan sastra daerah	10%	20%	14.613.000	40%	15.343.650	60%	16.110.883	80%	16.916.374	100%	17.762.193	100%	17.762.193	**Dinas Pendidikan**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan															
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (5 M)	54%	80%	220.000.000	85%	250.000.000	90%	260.000.000	95%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	**Dinas Kesehatan**
			Persentase upaya kesehatan keluarga dan gizi	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Indeks keluarga sehat	12 indikator	12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		
			Cakupan Penemuan Kasus penyakit menular termasuk covid-19 dan penyakit tidak menular	72,93%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan vaksin covid-19	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan Surveilans Aktif 3 T (Tracing, Testing dan Treatmen)	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan kasus penyakit menular yang ditatalaksanakan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan Kasus penyakit tidak menular (PTM) yang ditatalaksanakan sesua standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase penyembuhan (kuratif dan rehabilitatif) termasuk penyakit covid-19	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase peningkatan layanan kesehata termasuk covid-19	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase angka kesembuhan penyakit	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase peningkatan tatalaksana rehabilitatif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase meningkatnya kemitraan dibidang pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan obat covid-19	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan fasyankes sesuai standar termasuk covid-19	78%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketersediaan SDMK yang berkompeten di bidang kesehatan	100	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	**Dinas Kesehatan**
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase manajemen layanan kesehatan yang sesuai standar	100%	100%	1.000.000	100%	1.010.000	100%	1.020.000	100%	1.030.000	100%	1.040.000	100%	1.040.000	**Dinas Kesehatan**
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu aktif (Termasuk promosi 5M dll)	75,60%	80%	600,000	85%	610,000	90%	620,000	95%	630,000	100%	640,000	100%	640,000	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Desa Siaga Aktif / Desa Tanggap Covid19	54, 53 %	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	90 %	100 %	33,000,000	100 %	65,200,000	100 %	82,300,000	100 %	90,530,000	100 %	90,530,000	100 %	90,530,000	**RS. Sobirin**
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Prosentase peningkatan kapasitas SDM	90 %	100 %	755,000	100 %	792,750	100 %	832,350	100 %	874,000	100 %	920,000	100 %	966,000	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB (%)	69,86	70,00	3.393.300	70,25	3.732.630	70,50	4.105.893	70,75	4.516.482,300	71,00	4.968.130,530	71,25	4.968.130,530	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia yang Aktif (BKL) (%)	89,44	89,46		89,48		89,50		89,52		89,54		89,56		
			cakupan Anggota BKR Ber-KB (%)	69,80	69,82		69,84		69,86		69,88		69,90		69,92		
			Persentase UPPKS yang Aktif (%)	44,48	45,00		46,00		47,00		48,00		49,00		50,00		
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	25	30	436.131.000	35	479.744.100	35	527.718.510	40	580.490.361	40	638.539.397	45	678.539.397	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan	4	5		6		7		8		9		10		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengendalian penduduk														
			Persetase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100		100		100		100		100		100		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	75	75,25	5.057.102,400	75,50	5.562.812,640	75,75	6.119.093,904	80	6.731.003,294	80,25	7.404.103,624	80,50	7.404.103,624	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Indeks Kepuasan Layanan Fasiliasi KB	0	70		70,25		70,50		70,75		80		80,25		
			Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1,25	1,24		1,23		1,22		1,21		1,20		1,90		
			Persetase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70	70,20		70,30		70,40		70,50		70,60		70,70		
			Persentase kampung kb dengan katagori purna	25	30		30		35		35		40		40		
		Sasaran 2.1.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak															
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah PUG	75%	77%	303.260	80%	333.586	82%	366.945	85%	403.639	87%	444.003	90%	444.003	**Dinas PPPA**
			Persentase perempuan yang aktif di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	15%	18%		20%		23%		25%		27%		30%		
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	70%	73%	253.368	75%	278.704	77%	306.574	80%	337.232	82%	370.955	85%	370.955	**Dinas PPPA**
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender	65%	67%	360.449	70%	396.494	73%	475.793	75%	523.372	77%	575.709	80%	575.709	**Dinas PPPA**
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang valid	70%	72%	46.700	75%	51.370	77%	61.644	80%	73.973	82%	88.767	85%	88.767	**Dinas PPPA**
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	75%	77%	474.563	80%	522.020	82%	626.424	84%	689.066	85%	757.973	90%	757.973	**Dinas PPPA**
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	81%	82%	49.930	83%	200.0	84%	220.0	85%	220.0	86%	240.000	87%	240.000	**Dinas PPPA**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu					00		00		00					
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang dibina	100%	0	2.090.000	80%	2.299.000	86%	2.528.900	90%	2.781.790	94%	3.059.969	100%	3.365.965	**Dispora**
			Persentase Pemuda yang mengikuti dialog Pemuda yang Inklusif	0	0		80%		86%		90%		94%		100%		
			Persentase Pemuda yang dibina	0	0		80%		86%		90%		94%		100%		
			Persentase Pemuda yang mengikuti dialog Pemuda yang Inklusif	0	100%		80%		86%		90%		94%		100%		
			Persentase Pemuda yang aktif berorganisasi	0	100%		80%		86%		90%		94%		100%		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standarisas	100%	100%	10.181.500	80%	11.199.650	84%	12.319.615	92%	13.551.576	96%	14.906.734	100%	16.397.407	**Dispora**
			Persentse Pelatih yang memiliki sertifikat pelatih	0	0		80%		84%		92%		96%		100%		
			persentase penyelenggaran kejuaraan olahraga	50%	50%		80%		84%		92%		96%		100%		
			Persentase Sekolah yang mendapatkan pembinaan olahraga	50%	50%		80%		84%		92%		96%		100%		
			Jumlah Olahraga Rekreasi dan tradisional yang diKembangkan	0	0		25 cabor		25 cabor		25 cabor		25 cabor		25 cabor		
			persentase atlet berprestasi yang mendapatkan apresiasi	0	0		80%		84%		92%		96%		100%		
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gugus Tugas Pramuka yang aktif	0	0	100.000	80%	110.000	84%	121.000	92%	133.100	96%	146.410	100%	161.051	**Dispora**
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang perusahaan yang menerapkan syarat kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan	55,00%	57%	170,000	60%	260,000	63%	299,000	67%	343,800	71%	395,300	75%	454,500	**Dinas Tenaga Kerja**
			Persentase perusahaan yang menerapkan regulasi pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial	75,00%	75%		75%		80%		80%		85%		85%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase penanganan pengaduan terhadap kasus perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan	33,33%	40%		47%		56%		67%		77%		89%		
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (5 M)	54%	80%	220,000,000	85%	250,000,000	90%	260,000,000	95%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	280,000,000	**Dinas Kesehatan**
			Persentase upaya kesehatan keluarga dan gizi	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Indeks keluarga sehat	12 indikator	12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		
			Cakupan Penemuan Kasus penyakit menular termasuk covid-19 dan penyakit tidak menular	72,93%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan vaksin covid-19	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan Surveilans Aktif 3 T (Tracing, Testing dan Treatmen)	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan kasus penyakit menular yang ditatalaksanakan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan Kasus penyakit tidak menular (PTM) yang ditatalaksanakan sesua standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase penyembuhan (kuratif dan rehabilitatif) termasuk penyakit covid-19	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase peningkatan layanan kesehata termasuk covid-19	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase angka kesembuhan penyakit	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase peningkatan tatalaksana rehabilitatif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase meningkatnya kemitraan dibidang pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan obat covid-19	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan fasyankes sesuai standar termasuk covid-19	78%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tujuan 2.2 Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai nilai religius dan kearifan lokal															
		Sasaran 2.2.1 Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat															
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90	2.500.000	90	2.750.000	90	3.025.000	90	3.327.500	90	3.660.250	90	4.026.275	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar**
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	96	97	1.000.000	97	1.100.000	98	1.210.000	98	1.331.000	98	1.464.100	100	1.610.510	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar**
			Tingkat Waktu tanggap daerah pelayanan willayah managemen kebakaran	97	97		97		98		98		100		100		
		Sasaran 2.2.2 Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama															
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pemberian bantuan bidang keagamaan	100%	100%	31.720.000	100%	43.842.000	100%	43.976.200	100%	44.123.820	100%	44.286.202	100%	44.286.202	**Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)**
			2. Persentase berkas kebijakan bidang sosial dan kemasyarakatan yang di manfaatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	86	87	353.380	88	1.024.882	89	1.505.025	90	2.033.182	91	2.614.155	92	3.253.225	**Kesbangpol**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90	373,263	91	1,933,675	92	2,413,818	93	2,941,975	94	3,522,948	95	4,162,018	**Kesbangpol**
			Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendi dikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90		91		92		93		94		95		
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Organi sasi Masyarakat dan OKP	74	75	373.263	76	726.271	77	1.206.414	78	1.734.571	79	2.315.544	80	2.954.614	**Kesbangpol**
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan Pembinaan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	87	88	383.280	89	1.054.497	90	1.534.640	91	2.062.797	92	2.643.770	93	2.954.614	**Kesbangpol**
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	84	85	983.430	86	1.343.313	87	1.823.456	88	2.351.613	89	2.932.586	90	3.571.656	**Kesbangpol**
		Sasaran 2.2.3 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal															
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	75	70	2.166.073,200	75	2.274.376,860	80	2.501.814,546	85	2.751.996	90	3.027.195,600	95	3.329.915,160	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	70	367.000	75	385.350	80	404.617,500	85	424.484,375	90	446.090,794	95	468.395,333	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Program Pembinaan Sejarah	0	45	357.000	50	374.850	55	393.592,500	60	413.272,125	65	433.935,731	70	455.632,518	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	70	260.000,030	75	273.000,031	80	286.650,033	85	300.982,534	90	316.031,661	95	331.833,244	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	47,167	47,167	10,558,545	47,167	2.800.000	48,00	3.500.000	50,0	3.500.000	50,50	4.000.000	50,50	4.500.000	**Dinas Perpustakaan dan kearsipan**
			Rasio pengunjung perpustakaan	9,50	10,25		12,50		15,00		17,50		18,00		19,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup	Cukup		Cukup		Baik		Baik		Baik		Baik		
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	0	1,00	85.000	1,00	125.000	1,00	145.000	2,00	145.000	2,00	165.000	2,00	165.000	**Dinas Perpustakaan dan kearsipan**
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	0	0		9		14		18		23		23		
		Misi 3 Pemerataan Infrastruktur berwawasan Lingkungan															
		Tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur															
		Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah															
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pembangunan Jalan	6,77	12,79	353,170,000	17,44	434,190,000	17,44	467,540,000	17,44	486,390,000	17,44	506,240,000	17,44	645,090,000	**Dinas PU Bina Marga**
			Persentase Peningkatan Jalan	16,32	12,08		16,57		17,70		18,28		19,05		20,00		
			Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5,55	8,59		17,89		20,04		22,90		25,04		26,04		
			Persentase Pembangunan Jembatan	20,00	17,50		10,00		15,00		17,50		20,00		20,00		
			Persentase Peningkatan Jembatan	16,67	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		
			Persentase Jembatan Yang terpelihara	21,05	15,79		15,79		15,79		15,79		15,79		15,79		
			Persentase Perencanaan Teknis yang tersusun	80	83		85		90		95		100		100		
			Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	79	80		81		83		85		90		90		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase ketersediaan fasilitas transportasi layak fungsi	70%	75%	1.255.80	80%	1.950.000	85%	2.460.000	90%	2.715.000	95%	2.900.000	100%	3.122.250	**Dinas Perhubungan**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	50%	55%	0	60%		65%		70%		75%		80%		
			Survey Kepuasan Masyarakat	2 Kali	2 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
		Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Permukiman, Irigasi)															
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Negara yang Laik Fungsi (%)	92,77	93	8.787.618	93,15	9.666.380	93,35	10.633.018	93,45	11.696.320	93,55	12.865.952	93,65	14.152.547	**Dinas PUCKTRP**
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Minum per SPAM IKK (%)	23	25	9.617.741	27	10.579.515	29	11.637.467	31	12.801.213	33	14.081.335	35	15.489.468	**Dinas PUCKTRP**
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Rumah Tangga Bersanitasi per IPAL Komunal (%)	90,15	90,35	3.152.834	90,65	3.468.117	91	3.814.929	91,35	4.196.422	91,65	4.616.064	92	5.077.671	**Dinas PUCKTRP**
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase sarana penunjang yang tersedia (%)	21,43	28,57	18.366.246	28,57	20.202.871	35,71	22.223.158	35,71	24.445.473	35,71	26.890.021	42,85	29.579.023	**Dinas PUCKTRP**
			Persentase sarana penunjang yang terpelihara (%)	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase Jangkauan Jaringan Listrik (%)	34,77	35,5		36,7		37,9		39,1		40,3		42		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (%)	25	30	7.000.000	44	18.370.000	58	20.207.000	72	22.227.700	86	24.450.470	100	26.895.517	**Dinas PUCKTRP**
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	20,94	22	37.087.921	23	21.550.000	25	58.600.000	27	57.075.000	29	64.975.000	31	70,750,000	**Dinas PUCKTRP**
			Persentase Prasarana Penunjang, Personalia, dan Dokumentasi dalam Kondisi Baik (%)	13,96	14		16		17		18		19		20		
			Persentase Produktivitas Tanam (%)	6,98	7		8		8		9		10		10		
			Persentase P3A (%)	4,65	5		5		6		6		6		7		
			Persentase Peningkatan Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air (%)	55,76	59		62		65		68		72		75		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan pelayanan dasar rumah korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai standar	100%	100%	100.000	100%	30.105.000	100%	42.900.000	100%	34.550.000	100%	33.350.000	100%	22.850.000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase warga negara terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota	100%	100%												
		Program Kawasan Permukiman	PersentasePemenuhan kebutuhan MBR mendapatkan akses bantuan peningkatan RTLH	70%	1%	3,847,000	29%	50,495,000	50%	49,540,000	75%	49,440,000	85%	48,665,000	100%	48,140,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	0	10%	25,035,000	30%	28,285,000	50%	31,285,000	75%	31,285,000	85%	28,285,000	100%	26,285,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase PSU Perumahan yang layak	40%	5%	46.500.000	30%	100.500.000	40%	85.450.000	60%	85.450.000	75%	75.450.000	100%	70.450.000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang Teregistrasi dan Tersertifikasi	60%	0%	0	10%	100,000	30%	100,000	50%	100,000	75%	100,000	100%	100,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Tujuan 3.2 Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan Ketahanan Bencana															
		Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup															
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun sesuai dengan aturan	100%	100%	45,000	100%	45,000	100%	55,000	100%	65,000	100%	70,000	100%	75,000	**DLH**
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Emisi GRK	1.68%	1.68%	679,000		933,000	1.63%	983,000	1.61%	1,046,000	1.59%	1,095,000	1.59%	1,152,000	**DLH**
			Indeks Kualitas Air	63.33	63.33		63.46		63.86		63.98		63.91		63.91		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Kualitas Udara	99.99	90.37		90.48		90.58		90.69		90.98		90.98		
			Indek Tutupan Hutan dan Lahan	33.60	41.07		42.91		44.75		46.59		47.93		47.93		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah RTH dan Hutan Kota yang di pelihara	100%	100%	293,000	100%	340,000	100%	350,000	100%	360,000	100%	350,000	100%	350,000	**DLH**
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha/kegiatan yang patuh dalam mengelola B3 dan Limbah B3	57.68%	60.00%	35,000	64.00%	40,000	68.00%	48,000	72.00%	57,600	76.00%	69,120	76.00%	82,944	**DLH**
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait lingkungan hidup	90	90	110,000	90	119,250	90	129,338	90	140,342	90	152,350	90	164,350	**DLH**
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang di akui	0	3	30,000	3	60,000	3	70,000	3	70,000	3	80,000	3	80,000	**DLH**
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyulluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	65,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	**DLH**
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	240,000	100%	420,000	100%	420,000	100%	420,000	100%	420,000	100%	420,000	**DLH**
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Pencemaran Lingkungan yang terselesaikan	100%	100%	50,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	**DLH**
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	24.26%	27.00%	3,020,000	31.00%	6,674,000	34.00%	7,069,200	37.00%	6,558,500	40.00%	6,116,000	40.00%	6,454,000	**DLH**
			Jumlah Sampah yang diangkut ke TPA	1000	1500		2100		2700		3300		3600		3900		**DLH**
		Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Penataan Ruang															
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang yang Aktual (Perda RTRW Revisi dan	0	0	845,912	6,67	930,503	20	1,023,554	33,33	1,125,909	46,67	1,238,500	60	1,362,350	**Dinas PUCKTRP**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RDTRK) (%)														
			Persentase Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang Diterbitkan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Evaluasi Ketidaksesuaian Tata Ruang (%)	100	100		100		100		100		100		100		
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100,000	100%	29,355,000	100%	42,150,000	100%	34,550,000	100%	33,350,000	100%	22,850,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase warga negara terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota	100%	100%												
		Program Kawasan Permukiman	Persentasepemenuhan Kebutuhan MBR Mendapatkan Akses Bantuan Peningkatan RTLH	70%	1%	3,847,000	29%	50,495,000	50%	49,540,000	75%	49,440,000	85%	48,665,000	100%	48,140,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani	0	10%	25,035,000	30%	28,285,000	50%	31,285,000	75%	31,285,000	85%	28,285,000	100%	26,285,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase PSU Perumahan yang layak	40%	5%	46.500.000	30%	100.500.000	40%	85.450.000	60%	85.450.000	75%	75.450.000	100%	70.450.000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil Yang Teregistrasi Dan Tersertifikasi	60%	0%	0	10%	100,000	30%	100,000	50%	100,000	75%	100,000	100%	100,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Di Atas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	100%	0%	0	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	100%	100%	550,000	100%	700,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	400,000	100%	100,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0	100%	350,000	100%	350,000	100%	200,000	100%	350,000	100%	350,000	100%	350,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Objek Landreform (Tol) Yang Siap Diretribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente	0%	0%	0	100%	1,200,000	100%	1,100,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	900,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat Yang Ditetapkan	0	0%	0	20%	950,000	40%	850,000	60%	700,000	80%	700,000	100%	700,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong Yang Dimanfaatkan	0	0%	0	20%	1,500,000	40%	1,450,000	60%	1,400,000	80%	1,350,000	100%	1,300,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Di Atas Izin Lokasi	100%	0%	0	20%	500,000	40%	500,000	60%	500,000	80%	500,000	100%	500,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Hak Pemilikan Sertifikat Tanah	50%	10%	54,700,000	20%	32,700,000	40%	22,700,000	60%	12,700,000	80%	10,700,000	100%	10,700,000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Sasaran 3.2.3 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana															
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanggulangan bencana	75	77	3,212,504	80	3,308,910	82	3,375,080	85	3,548,340	90	3,702,145	82.8	3,429,396	**BPBD**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Misi 4 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat															
		Tujuan 4.1 Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan															
		Sasaran 4.1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian															
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	4.500.000	92	12.770.000	93	15.430.000	94	18.590.00	95	21.250.000	96	21.750.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Holtikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Holtikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Perternakan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	7.920.000	92	15.650.000	93	17.650.000	94	24.650.000	95	26.650.000	96	26.650.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Tanam Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produtivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivtas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produkttivitas Peternakan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program pengendalian	Persentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91	660.000	92	3.250.	93	4.670.	94	5.090.	95	6.510.00	96	6.510.000	**Dinas Pertanian dan**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Capaian Produktivitas Peternakan (%)	90	91		92	000	93	000	94	000	95	0	96		**Peternakan**
			Persentase Capaian Produktivitas Telur (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian	Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91	370.000	92	1.470.000	93	1.570.000	94	1.670.000	95	1.770.000	96	1.770.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	4.900.000	92	7.200.000	93	8.650.000	94	10.100.000	95	11.550.000	96	11.550.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Tanam Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Petani Pengguna Bibit Unggul Persertifikat	3.790.500	100,00	4.681.500	100,00	5.091.150	100,00	5.596.765	100,00	6.152.941,500	100,00	6.762.248,650	100,00	7.434.973.515	**Dinas Perkebunan**
			Persentase Petani Pengguna Pupuk sesuai Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK)		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Penurunan Angka Losis		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Peningkatan Luas Lahan yang diremajakan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Peningkatan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penerapan Good Agriculture Practice (GAP)														
			Persentase Benih Bersertifikat		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Alsintan	4.850.000	100	5.215.000	100	4.869.000	100	5.615.900	100	5.859.990	100	6.710.989	100	7.339.087.900	**Dinas Perkebunan**
			Persentase Peningkatan Jalan Produksi		100		100		100		100		100		100		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kasus Kebakaran Kebun	475.000	40	560.000	35	575.000	30	604.500	25	638.850	20	672,435	15	713,678,500	**Dinas Perkebunan**
			Persentase Penurunan Konflik Lahan Perkebunan		40		35		30		25		20		15		
			Persetase Luas Kebun yang Terbakar		40		35		30		25		20		15		
			Persentase Hospot yang berkurang		40		35		30		25		20		15		
			Persentase Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) Sertifikat, Akte Notaris dan Surat Pengakuan Hak (SPH)		100		100		100		100		100		100		
			Menurunnya Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)		40		35		30		25		20		15		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanam Baru	390.000	100	395.000	100	406.500	100	413.650	100	421.515	100	430.166,500	100	439.683,150	**Dinas Perkebunan**
			Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		40		35		30		25		20		15		**Dinas Perkebunan**
			Persentase Peningkatan Harga Komoditi Perkebunan		100		100		100		100		100		100		
			Persentase Peningkatan pasar		100		100		100		100		100		100		
			Persentase Peningkatan Usaha Kemitraan Perkebunan		100		100		100		100		100		100		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Petani Sesuai Standar Teknis	95,000	100	145,000	100	159.500	100	175.450	100	192,995	100	212.294,500	100	233.523,950	**Dinas Perkebunan**
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Luas lahan potensial budidaya yang dimanfaatkan	8,000	8,000	3.088.598,470	8.000	4.245.000	8.000	4.620.000	8.000	5.010.000	8.000	5.395.000	8.000	5.780.000	**Dinas Perikanan**
			Luas lahan pekarangan yang	4%	0.1		0.4		0.1		0.10		0.10		0.80		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dimanfaatkan (hektar)														
			Persentase pemanfaatan tenologi/inovasi perikanan	12	7.50%		8.13%		6.25%		6,25%		6,25%		34,38%		
			Persentase teknologi/inovasi baru yang dimanfaatkan	40	2.33%		3.49%		3.49%		3,49%		3,49%		16,29%		
			Persentase Pelaku usaha Pemanfaatan teknologi /Inovasi	20	1.16%		1.74%		1.74%		1,74%		1,74%		8,12%		
			Persentase peningkatan Luas Lahan perikanan budidaya	0,25	(0,22)		(0,31)		0,40		0,45		0,50		0,55		
			Persentase pe ningkatan pembudidaya ikan yang berpengetahuan tentang budidaya perikanan	4,65	4,75		4,90		5,10		5,25		5,40		5,55		
			Persentase peningkatan luas lahan budidaya yang dikendalian terhadap hama penyakit ikan	0,75	0,78		0,80		0,83		0,85		0,87		0,90		
			Persentase peningkatan pemanfaatan bibit unggul	0,63	0,65		0,69		0,71		0,73		0,75		0,79		
			Persentase peningkatan benih ikan unggul yang dihasilkan BBI	0,95	(0,15)		(0,20)		1,15		1,20		1,25		1,30		
			Persentase peningkatan benih ikan unggul yang dihasilkan UPR	0,62	0,68		0,73		0,76		0,79		0,82		0,85		
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Luas Perairan Umum yang dimanfaatkan	0	2,384.83	223.000	2,384.83	278.000	2,384.83	330.000	2,384.83	400.000	2,384.83	470.000	2,384.83	535.000	**Dinas Perikanan**
			Persentase peningkatan kelembagaan nelayan kecil yang terbentuk	0	2%		4%		6%		8%		10%		15%		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaat teknologi / inovasi Pengelolaan hasil dan pemasaran	1	2	966.925	3	1.058.000	3	1.171.000	3	1,.284.000	3	1.397.000	14	1.510.000	**Dinas Perikanan**
			Persentase teknologi/ inovasi Pengelolaan hasil dan Pemasaran	7%	10%		15%		15%		15%		15%		70%		
			Persentase pemanfaatan teknologi/ inovasi perikanan	7%	10%		15%		15%		15%		15%		70%		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	Jumlah Lumbung Pangan dan Kelengkapannya yang Dibantu Untuk Masyarakat	35 Unit	1 Unit	824.400.000	1 Unit	906,840,000	1 Unit	997.524.000	1 Unit	1.097.276.400	1 Unit	1.207.004.040	1 Unit	1,327,704,444	**Dinas Ketahanan**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kemandirian Pangan	Jumlah Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Desa	10 Ton	4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		**Pangan**
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Konsumsi Energi	82,9	80	768.200.000	80	1.000.220.000	84,3	1.185.122.000	88,6	1.276.114.200	92,6	1.373.805.620	97,2	1,511,186,182	**Dinas Ketahanan Pangan**
			Nilai Konsumsi Protein	104,5	88		94		97		100		100		100		
			Persentase peningkatan produk pangan olahan	88,3	90		91,7		93,4		95,1		96,8		98,5		
			Persentase desa yang memanfaatkan Lahan Pekarangan untuk tanaman pangan	28,14%	42,21%		57,29%		67,84%		78,90%		89,45%		100%		
			Persentase Gapoktan yang Mandiri	7,05%	2,50%		2,50%		2,60%		2,70%		2,80%		2,90%		
			Persentase Ketersedian Pangan sesuai dengan kebutuhan Pangan	80%	80%		85%		85%		88%		88%		95%		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	83 Ton Beras, 25 Ton Gabah	10 TON		12 TON		14 TON		16TON		18 TON		20 TON		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	17,85%	13%	226,000,000	20%	270,000,000	25%	306,000,000	33,30%	343,100,000	50%	381,410,000	100%	394,410,000	**Dinas Ketahanan Pangan**
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman	80%	80%	311,200,000	82%	364,497,980	84%	400,947,778	86%	441,042,556	88%	485,146,811	90%	519,020,494	**Dinas Ketahanan Pangan**
		Sasaran 4.1.2 Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan															
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	15%	25%	100,000	25%	110,000	25%	120,000	35%	130,000	35%	140,000	50%	140,000	**Disperindag**
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Pasar Yang Ditingkatkan	5%	10%	6,885,383	15%	7,150,000	20%	10,000,000	22%	10,000,000	25%	10,000,000	30%	10,000,000	**Disperindag**
			Persentase capaian pendapatan pasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan stok barang	80%	80%	545,029	85%	750,000	85%	780,000	85%	800,000	90%	830,000	90%	830,000	**Disperindag**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Yang Dipromosikan	5%	10%	500,000	10%	500,000	15%	500,000	20%	500,000	25%	500,000	30%	500,000	**Disperindag**
			Persentase peningkatan jaringan pemasaran	5%	10%		10%		15%		20%		25%		30%		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	40	50	207,309	55	6,715,000	60	6,720,000	65	6,760,000	70	6,750,000	75	6,705,000	**Disperindag**
			Persentase alat -alat ukur (UTTP) yang bertanda tera sah (%)	30%	40%		50%		55%		60%		65%		70%		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pembinaan kelembagaan IKM	5	10	1,000,000	10	1,100,000	20	1,250,000	30	1,350,000	40	1,400,000	50	1,500,000	**Disperindag**
			Persentase pelaku IKM bersertifikat	0 IKM	2 IKM		3 IKM		6 IKM		9 IKM		12 IKM		15 IKM		
			Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri	5 IKM	5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		
			Persentase produk IKM berdaya saing (%)	5	5		10		15		20		25		30		
			Persentase peningkatan infrastruktur sentra industri	-	-		5		5		10		15		20		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pembinaan Kelembagaan IKM	10	15	300,000	20	320,000	30	350,000	35	370,000	40	380,000	50	400,000	**Disperindag**
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jaringan pemasaran	5	10	300,000	10	330,000	15	375,000	15	405,000	20	420,000	30	450,000	**Disperindag**
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Permodalan	0,1%	0,25%	700.000	0,27%	840.000	0,30%	1.008.000	0,35%	1.209.600	0,37%	1.451.520	0,40%	1.741.824	**Dinas Koperasi UKM**
			Persentase Usaha Mikro yang memiliki Produk Unggulan	0,1%	0,25%		0,27%		0,30%		0,35%		0,37%		0,40%		
			Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi sarana dan legalitas usaha	0,1%	0,25%		0,27%		0,30%		0,35%		0,37%		0,40%		
			Persentase Usaha Mikro Yang Dilatih dan DIiberdayakan	0,10%	0,25%		0,27%		0,30%		0,35%		0,37%%		0,40%		
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Produk Usaha Mikro yang mengikuti Promosi	0,15%	0,17%	300.000	0,20%	360.000	0,22%	432.000	0,25%	518.400	0,27%	622.080	0,30%	746.496	**Dinas Koperasi UKM**
		Program Pengawasan Dan	Persentase Koperasi yang Patuh	10,00%	12,00%		14,00%		15,00%		16,00%		17,00%		19,00%		**Dinas Koperasi**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pemeriksaan Koperasi	terhadap Aturan			300.000		360.000		432.000		518.400		622.080		746.496	**UKM**
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	10,00%	12,00%	300.000	14,00%	360.000	15,00%	432.000	16,00%	518.400	17,00%	622.080	19,00%	746.496	**Dinas Koperasi UKM**
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi bantuan sarana usaha	4,00%	4,00%	280.000	4,50%	336.000	5,00%	403.200	6,00%	483.840	7,00%	580.608	7,50%	696.729	**Dinas Koperasi UKM**
		Sasaran 4.1.3 Meningkatnya investasi Di Kabupaten Musi Rawas															
		Program Pengembangan IklimPenanaman Modal	Jumlah Kajian Penanaman Modal, Persentase Regulasi Daerah Yang Mendukung Investasi	90%	100%	100.000	100%	110.000	100%	121.000	100%	133.100	100%	146.410	100%	161.051	**DPMPTSP**
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Publikasi Promosi, Persentase Peningkatan Konten Promosi Daerah, Jumlah Potensi Unggulan, Persentase Pelaku Usaha Yang berkontribusi aktif	90%	100%	383.1000	100%	421.300	100%	463.430	100%	509.773,000	100%	560.750,300	100%	616.825,330	**DPMPTSP**
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi Yang Terbit, Persentase sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, Persentase regulasi pelayanan, Jumlah aplikasi perizinan online, Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Tuntas Ditindak Lanjuti	90%	100%	230.000	100%	253.000	100%	278.300	100%	306.130	100%	336.743	100%	370.417,300	**DPMPTSP**
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Aturan Berinvestasi, Jumlah Pelaku Usaha Yang di Awasi	90%	100%	204.900	100%	225.390	100%	247.929	100%	272.721,900	100%	299.994,090	100%	329.993,499	**DPMPTSP**
		Program Pengelolaan DataDan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Aplikasi Prizinan Online	90%	100%	90.000	100%	99.000	100%	108.900	100%	119.790	100%	131.769	100%	144.945,900	**DPMPTSP**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tujuan 4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat															
		Sasaran 4.2.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan															
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial yang Akti dalam Pelayanan Sosial	70	75	716,389	75	875,000	80	885,000	80	935,000	85	965,000	85	4,376,389	**Dinas Sosial**
			Persentase Organisasi Sosial yang Aktif Dalam Pelayanan Sosial	50	55		60		70		75		85		90		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	90	90	1.126.400	95	1.326.399	95	1.326.399	95	1.526.399	95	1.526.399	95	6.831.996	**Dinas Sosial**
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga PMKS Penerima Manfaat Yang memperoleh Jaminan Sosial Sesuai Ketentuan	86	90	10.830.499	93	16.655.000	95	16.660.000	97	16.700.000	98	16.725.000	100	77.570.499	**Dinas Sosial**
			Persentase PMKS yang Memiliki Kemampuan Keterampilan Berwirausaha	50	55		80		82		84		85		90		
			Persentase PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar	70	75		80		82		84		85		90		
		Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100	100	1.952,388	100	2.025.000	100	2.035.000	100	2.110.000	100	2.120.000	100	10.242.388	**Dinas Sosial**
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Siap Pakai	20	20	0	30	180.000	40	180.000	50	210.000	60	210.000	40	780.000	**Dinas Sosial**
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan stok barang (%)	80	80	545.029.000	85	750.000.000	85	780.000.000	85	800.000.000	90	830.000.000	90	830.000.000	**Disperindag**
		Sasaran 4.2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran															
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Keahlian	7,91%	11%	270.000	15%	590.000	21%	678.500	26%	780.200	32%	897.000	37%	1.030.000	**Disnakertrans**
		Program Penempatan	Persentase tenaga kerja terlatih	87,5%	88%		89%		89%		91%		91%		93%	1.150.000	**Disnakertrans**

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tenaga Kerja	yang berwirausaha			1.200.000		670.000		770.500		886.000		1.018.000			
			Persentase informasi pasar kerja yang di akses masyarakat	60%	60%		65%		65%		70%		70%		75%		
			Persentase perusahaan yang menerapan perda tenaga kerja local	60%	60%		65%		65%		70%		70%		75%		
		4.2.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan															
		Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	100%	100%	5.803.790,664	100%	6.693.288,797	100%	7.754.360,556	100%	8.961.968,067	100%	10.399.970,621	100%	11.439.967,683	**DKP**
			Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Komulatif Nilai Rata-rata Kompetensi dan Kualifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	81		85		88		90		95		100		
			Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja ASN Dinas Ketahana Pangan	80	83		87		90		95		95		100		
			Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	90		90		95		97		100		100		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Lumbung Pangan dan Kelengkapannya yang Dibantu Untuk Masyarakat	35 Unit	1 Unit	824.400	1 Unit	906.840	1 Unit	997.524	1 Unit	1.097.276,400	1 Unit	1.207.004,040	1 Unit	1.327.704,444	**DKP**
			Jumlah Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Desa	10 Ton	4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Konsumsi Energi	82.9	80	768,200	80	1,000,220	84.3	1,185,122	88.6	1.276.114,200	92.6	1.373.805,620	97.2	1.511.186,182	**DKP**
			Nilai Konsumsi Protein	104.5	88		94		97		100		100		100		
			Persentase peningkatan produk pangan olahan	88.3	90		91,7		93,4		95,1		96,8		98,5		
			Persentase desa yang memanfaatkan Lahan	28.14%	42,21%		57,29%		67,84%		78,90%		89,45%		100%		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pekarangan untuk tanaman pangan														
			Persentase Gapoktan yang Mandiri	7.05%	2.50%		2.50%		2.60%		2.70%		2.80%		2.90%		
			Persentase Ketersedian Pangan sesuai dengan kebutuhan Pangan	80%	80%		85%		85%		88%		88%		95%		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	83 Ton Beras, 25 Ton Gabah	10 TON		12 TON		14 TON		16TON		18 TON		20 TON		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	17.85%	13%	226.000	20%	270.000	25%	306.000	33.30%	343.100	50%	381.410	100%	394.410	**DKP**
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman	80%	80%	311.200	82%	364.497,980	84%	400.947,778	86%	441.042,556	88%	485.146,811	90%	519.020,494	**DKP**
		Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91	660.000	92	3.250.000	93	4.670.000	94	5.090.000	95	6.510.000	96	6.510.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Produktivitas Peternakan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Telur (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian	Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91	370.000	92	1.470.000	93	1.570.000	94	1.670.000	95	1.770.000	96	1.770.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94	10.100.000	95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	4.900.000	92	7.200.000	93	8.650.000	94	10.100.000.000	95	11.550.000	96	11.550.000	**Dinas Pertanian dan Peternakan**
			Persentase Capaian Luas Tanam Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Luas Panen	90	91		92		93		94		95		96		

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		OPD Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tanaman Pangan (%)														
			Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
		Tujuan 4.3. Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa															
		Sasaran 4.3.1 Meningkatnya status desa															
		Program Penataan Desa	Persentase Aparatur Desa Yang Memiliki Kompetensi	80%	80%	60.000	80%	60.000	80%	266.000	80%	266.000	80%	266.000	80%	266.000	**Dinas PMD**
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Aparatur Desa Yang Memiliki Kompetensi	80%	80%	148.000	80%	148.000	80%	462.800	80%	462.800	80%	462.800	80%	462.800	**Dinas PMD**
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Peraturan	100%	100%	4.740.081,750	100%	1.322.365,950	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	**Dinas PMD**
			Persentase Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa Yang Aktif	20%	22%	1,501,000,000	24%	1.510.000.100	26%	2.894.040.659	28%	2.894.040.659	30%	2.894.040.659	32%	2.894.040.659	**Dinas PMD**
			Persentase Peningkatan Inovasi TTG dalam membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Desa Yang Mendukung Perekonomian Masyarakat	75%	76%		77%		78%		79%		80%		81%		
			Persentase LPM yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	75%	76%		77%		78%		79%		80%		81%		
			Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga yang meningkat dari prasejahtera ke sejahtera/mampu	98,39%	97%	100.000	97%	310.000	97%	356.500	97%	409.800	97%	471.200	97%	541.880	Disnakertrans

6.5. Program Unggulan Daerah

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Musi Rawas merupakan hal-hal yang strategis dan perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) program, meliputi:

1. Jalan mulus sampai ke desa-desa
2. Sekolah gratis
3. Perlengkapan sekolah gratis
4. Berobat gratis
5. Bantuan pondok pesantren di tiap kecamatan
6. Pendirian rumah tahfidz Al Quran dari kecamatan ke desa
7. Bantuan alat berat untuk pembukaan lahan
8. Mobil ambulan untuk desa
9. Santunan Kematian

Program-program unggulan di atas akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah di masing-masing urusan pemerintahan melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan untuk membiayai program pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN**	**1.768.123.357.201,00**	**1.717.565.121.922**	**1.739.899.629.811,00**	**1.764.705.135.760,00**	**1.793.725.414.630,00**	**1.824.059.598.792,00**
4.1	***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	***199.070.974.521,00***	***219.303.196.226,00***	***234.317.655.638.00***	***251.781.787.082.00***	***273.438.274.159.00***	***296.387.856.068,00***
4.1.01	Pajak Daerah	86.173.894.375,00	100.203.083.833,00	115.584.492.194,00	132.501.016.413,00	151,755,399,304.00	173.223.012.672,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.315.733.125,00	3.071.510.925,00	3.238.820.431,00	3.427.172.315,00	3,614,375,843.00	3.859.390.879,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.581.347.021,00	108.028.601.468,00	106.494.343.013,00	105.853.598.354,00	107.068.499.012,00	107.305.452.517,00
4.2	***PENDAPATAN TRANSFER***	***1.503.612.785.930,00***	***1.441.818.425.696,00***	***1.447.858.974.173,00***	***1.453.918.648.678,00***	***1.459.997.640.471,00***	***1,466.096.142.724,00***
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.434.813.691.000,00**	**1.368.891.385.070,00**	**1.370.803.987.851,00**	**1.372.735.716.660,00**	**1.374.686.762.757,00**	**1.376.657.319.315,00**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	280.774.098.000,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00	224.252.734.950,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	606.181.929.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00	594.887.320.000,00
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00	306.149.785.000,00
4.2.01.02.01	Dana Intensif Daerah (DID)	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00
4.2.01.02.05	Dana Desa	189.366.612.000,00	191.260.278.120,00	193.172.880.901,00	195.104.609.710,00	197.055.655.807,00	199.026.212.365,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**68.799.094.930,00**	**72.927.040.626,00**	**77.054.986.322,00**	**81.182.932.017,00**	**85.310.877.713,20**	**89.438.823.409,00**
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.799.094.930,00	72.927.040.626,00	77.054.986.322,00	81.182.932.017,00	85.310.877.713,00	89.438.823.409,00
4.2.02.01.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya						
4.3	***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***	***65.439.596.750,00***	***56.443,500.000,00***	***57.723.000.000,00***	***59.004.700.000,00***	***60.289.500.000,00***	***61.575.600.000,00***
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.186.054.350,00					
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri	-	1.200.000.000,00	2.200.000.000,00	3.200.000.000,00	4.200.000.000,00	5.200.000.000,00
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	53.253.542.400,00	55.243.500.000,00	55.523.000.000,00	55.804.700.000,00	56.089.500.000,00	56.375.600.000.00

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	**BELANJA**	**1.832.421.446.761,00**	**1.712.565.121.922,00**	**1.734.899.629.811,00**	**1.759.705.135.760,00**	**1.798.725.414.630,00**	**1.829.059.598.792,00**
5.1	***BELANJA OPERASI***	***1.121.562.251.863,00***	***996.950.600.466,00***	***1.017.875.412.526,00***	***1.041.996.569.556,00***	***1.057.468.857.679,00***	***1.080.254.404.497,00***
5.1.01	Belanja Pegawai	558.981.425.376,00	554.862.908.665,00	571.127.374.811,00	568.534.848.489,00	583.782.768.764,00	592.244.341.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.844.051.987,00	431.350.917.301,00	436.011.263.215,00	432.724.946.566,00	462.949.314.414,00	477.273.288.497,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00	40.736.774.500,00	10.736.774.500,00	10.736.774.500,00
5.2	***BELANJA MODAL***	***462.772.131.548,00***	***467.527.458.106,00***	***468.937.153.935,00***	***469.621.502.854,00***	***493.169.493.601,00***	***500.718.130.945,00***
5.3	***BELANJA TAK TERDUGA***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***
5.4	***BELANJA TRANSFER***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***	***238.087.063.350,00***
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00	238.087.063.350,00
6	**PEMBIAYAAN**	**64.298.089.560,00**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**(5.000.000.000,00)**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
6.1	***PENERIMAAN PEMBIAYAAN***	***74.298.089.560,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***	***5.000.000.000,00***
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	74.298.089.560,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	***10.000.000.00,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***-***	***-***
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Wajib															
	Terkait Pelayanan Dasar															
	Pendidikan															
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	90%	100 %	270.447.443,862	100%	283.969.816,055	100%	298.168.306,858	100%	313.076.722,201	100%	328.730.558,311	100%	345.167.086,226	Dinas Pendidikan
		Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	80%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	75%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase kualifikasi Pendidikan ASN	70%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan	45%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kompetensi minimal 20 JP														
				Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik	70%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin	97%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PAUD dalam kondisi Baik	70%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase SD,SMP dalam kondisi Baik	75%	75,50%		76,00 %		76,30 %		76,50%		77,00 %		77,30 %		
				Persentase PAUD Cukup Sarpras	65%	65,30%		66,00 %		66,30 %		67,00%		67,30 %		68,00 %		
				Persentase SD,SMP Cukup Sarpras	65%	65,30%	123.719.388,900	66,00 %	129.905.358,346	66,30 %	136.400.626,263	67,00%	143.220.657,576	67,30 %	150.381.690,455	68,00 %	150.381.690,455	Dinas Pendidikan
				Persentase Lembaga Penerima Subsidi	80%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Siswa Penerima Subsidi	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		
				Persentase Sekolah Yang Menerapkan	80%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				MBS														
				Persentase Kunjungan Pembinaan Pengawas Sekolah	75%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Siswa Berprestasi	20%	20%		25%		30%		30%		30%		35%		
				Persentase guru berprestasi	25%	25%		25%		30%		35%		35%		35%		
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang mengembangkan kurikulum	33.00%	33%	113.388.500	45%	119.057.925	50%	125.010.821	55%	131.261.362	60%	137.824.430	75%	137.824.430	Dinas Pendidikan
				Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Anti Korupsi	15.00%	25%		30%		35%		40%		45%		50%		
			Program Pendidik Dan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase kualifikasi guru berpendidikan S1	85,96%	65%	46.954.000	70%	48.923.700	75%	51.368.885	80%	53.938.379	85%	56.635.298	90%	56.635.298	
				Persentase guru bersertifikasi	74,83%			75%		75,30 %		75,60%		75,80 %		76%		Dinas Pendidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang mendapat izin operasional	361	1.31 %	14.987.000	1.31%	15.736.350	1.31 %	16.523.168	1.64%	17.349.326	2.29 %	18.216.792	2.29 %	18.216.792	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang mengembangkan bahasa dan sastra daerah	10%	20%	14.613.000	40%	15.343.650	60%	16.110.883	80%	16.916.374	100%	17.762.193	100%	17.762.193	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesehatan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	150.000.000	100%	170.000.000	100%	190.000.000	100%	210.000.000	100%	230.000,000	100%	250,000,000	Dinas Kesehatan
				Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kualifikasi ASN Dinas Kesehatan														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Kesehatan	≥ 80 %	≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (5 M)	54%	80%	220.000.000	85%	250.000.000	90%	260.000.000	95%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase upaya kesehatan keluarga dan gizi	85%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks keluarga sehat	12 indikator	12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		12 indikator		
				Cakupan Penemuan Kasus penyakit menular termasuk covid-19 dan penyakit tidak menular	72.93%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan vaksin covid-19	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan Surveilans Aktif 3 T (Tracing, Testing dan Treatmen)	95%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kasus penyakit menular yang ditatalaksanakan sesuai standar	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Kasus penyakit tidak menular (PTM) yang ditatalaksanakan sesua standar	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penyembuhan (kuratif dan rehabilitatif) termasuk penyakit covid-19	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase peningkatan layanan kesehata termasuk covid-19	95%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase angka kesembuhan penyakit	95%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase peningkatan tatalaksana rehabilitatif	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase meningkatnya kemitraan dibidang pelayanan kesehatan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan obat covid-19	80%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan fasyankes sesuai standar termasuk covid-19	78%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketersediaan SDMK yang berkompeten di bidang kesehatan	100	100 %	10.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase manajemen layanan kesehatan yang sesuai standar	100%	100 %	1.000.000	100%	1.010.000	100%	1.020.000	100%	1.030.000	100%	1.040.000	100%	1.040.000	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu aktif (Termasuk promosi 5M dll)	Persentase Posyandu aktif (Termasuk promosi 5M dll)	75,60%	600.000	85%	610.000	90%	620.000	95%	630.000	100%	640.000	100%	640.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Desa Siaga Aktif / Desa Tanggap Covid19	Persentase Desa Siaga Aktif / Desa Tanggap Covid19	54,53 %		85%		90%		95%		100%		100%		
			Rs. dr. Sobirin															
			'Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah daerah yang profesional dan terstandarisasi	80%	100	90.475.000	100	102.000.000	100	109.780.000	100	120.758.000	100	120.758.000	100	120.758.000	RS. Sobirin
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	90%	100 %	33.000.000	100%	65.200.000	100%	82.300.000	100%	90.530.000	100%	90.530.000	100%	90.530.000	RS. Sobirin
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Prosentase peningkatan kapasitas SDM	90 %	100 %	755.000	100%	792.750	100%	832.350	100%	874.000	100%	920.000	100%	966.000	RS. Sobirin
			Pekerjaan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Umum dan Penataan Ruang															
			PU Bina Marga															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	70,92	71	8.552.000	72	8.800.700	73	8.975.300	74	9.336.300	75	9.592.800	76	9.948.800	Dinas PUBM
				Indeks Profesionalisme ASN	59,68	51,85		52,85		53,85		54,85		55,85		56		
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pembangunan Jalan	6,77	12,79	353.170.000	17,44	434.190.000	17,44	467.540.000	17,44	486.390.000	17,44	506.240.000	17,44	645.090.000	Dinas PUBM
				Persentase Peningkatan Jalan	16,32	12,08		16,57		17,70		18,28		19,05		20,00		
				Persentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5,55	8,59		17,89		20,04		22,90		25,04		26,04		
				Persentase Pembangunan Jembatan	20,00	17,50		10,00		15,00		17,50		20,00		20,00		
				Persentase Peningkatan Jembatan	16,67	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		
				Persentase Jembatan Yang terpelihara	21,05	15,79		15,79		15,79		15,79		15,79		15,79		
				Persentase Perencanaan Teknis yang tersusun	80	83		85		90		95		100		100		
				Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	79	80		81		83		85		90		90		
			PU Cipta Karya, Tata															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ruang dan Pengairan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Persentae, Pelanggaran, Pelaporan kinerja dan Keuangan, Serta Pengelola BMD Yang terbit tepat waktu dan Sesuai Peraturan (%)	100	100	38.143.218	100	41.957.540	100	46.153.294	100	50.768.623	100	55.845.485	100	61.430.034	DPUCKTRP
				Kumulatif Nilai rata-rata dimensi kuaifikasi dan komponen ASN DPU CKTRP	18,4	18,6		18,8		19		19,4		19,8		20		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN DPU CKTRP	25,06	25,15		25,25		25,35		26		25,45		25,5		
				Nilai rata-rata dimensi Disiplin ASN DPU CKTRP	5	5		5		5		5		5		5		
				Persentase Tersedianya perencanaan teknis yang berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase terlaksananya pengawasan dan pengendalian teknis (%)	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Negara yang Laik Fungsi (%)	92,77	93	8.787.618	93,15	9.666.380	93,35	10.633.018	93,45	11.696.320	93,55	12.865.952	93,65	14.152.547	DPUCKTRP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Minum per SPAM IKK (%)	23	25	9.617.741	27	10.579.515	29	11.637.467	31	12.801.213	33	14.081.335	35	15.489.468	DPUCKTRP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Rumah Tangga Bersanitasi per IPAL Komunal (%)	90,15	90,35	3.152.834	90,65	3.468.117	91	3.814.929	91,35	4.196.422	91,65	4.616.064	92	5.077.671	DPUCKTRP
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase sarana penunjang yang tersedia (%)	21,43	28,57	18.366.246	28,57	20.202.871	35,71	22.223.158	35,71	24.445.473	35,71	26.890.021	42,85	29.579.023	
				Persentase sarana penunjang yang terpelihara (%)	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Jangkauan Jaringan Listrik (%)	34,77	35,5		36,7		37,9		39,1		40,3		42		
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (%)	Persentase Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (%)	25	7.000.000	30	18.370.000	44	20.207.000	58	22.227.700	72	24.450.470	86 0	26.895.517	DPUCKTRP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	20,94	22	37.087.921	23	21.550.000	25	58.600.000	27	57.075.000	29	64.975.000	31	70.750.000	DPUCKTRP
				Persentase Prasarana Penunjang, Personalia, dan Dokumentasi dalam Kondisi Baik (%)	13,96	14		16		17		18		19		20		
				Persentase Produktivitas Tanam (%)	6,98	7		8		8		9		10		10		
				Persentase P3A (%)	4,65	5		5		6		6		6		7		
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air (%)	55,76	59		62		65		68		72		75		
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang yang Aktual (Perda RTRW Revisi dan RDTRK) (%)	0	0	845.912	6,67	930.503	20	1.023.554	33,33	1.125.909	46,67	1.238.500	60	1.362.350	DPUCKTRP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang Diterbitkan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Evaluasi Ketidaksesuaian Tata Ruang (%)	100	100		100		100		100		100		100		
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan	100%	100 %	5.679.733	100%	7.552.965	100%	7.774.965	100%	8.189.965	100%	8.199.965	100%	7.579.965	Dinas Perkim
				2. Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				3. Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				4. Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				5. Persentase ASN yang	12%	12%		20%		25%		30%		35%		405%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP														
				6. Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik	78%	78%		80%		83%		85%		87%		90%		
				7. Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan pelayanan dasar rumah korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai standar	100%	100 %	100.000	100%	30.105.000	100%	42.900.000	100%	34.550.000	100%	33.350.000	100%	22.850.000	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	PersentasePemenuhan kebutuhan MBR mendapatkan akses bantuan peningkatan RTLH	70%	1%	3.847.000	29%	50.495.000	50%	49.540.000	75%	49.440.000	85%	48.665.000	100%	48.140.000	Dinas Perkim
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang	0	10%	25.035.000	30%	28.285.000	50%	31.285.000	75%	31.285.000	85%	28.285.000	100%	26.285.000	Dinas Perkim

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ditangani														
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase PSU Perumahan Yang Layak	40%	5%	46.500.000	30%	100.500.000	40%	85.450.000	60%	85.450.000	75%	75.450.000	100%	70.450.000	Dinas Perkim
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang Teregistrasi dan Tersertifikasi	60%	0%	0	10%	100.000	30 %	100.000	50%	100.000	75%	100.000	100%	100.000	Dinas Perkim
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	12.000.000	100%	13.200.000	100%	14.520.000	100%	15.972.000	100%	17.569,200	100%	19.326.120	Satpol PP & Damkar
				Komulatif nilai rata-rata demensi kompetensi	30,15	33,50		36,75		39,10		41,35		43,20		45,10		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dan kualifikasi ASN Satpol PP dan Damkar														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja Satpol PP dan Damkar	25,10	25.55		25,80		26'10		26,60		27,10		27,35		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Satpol PP dan Damkar	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90	2.500.000	90	2.750.000	90	3.025.000	90	3.327.500	90	3.660.250	90	4.026.275	Satpol PP & Damkar
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	96	97	1.000.000	97	1.100.000	98	1.210.000	98	1.331.000	98	1.464.100	100	1.610.510	Satpol PP & Damkar
				Tingkat Waktu tanggap daerah pelayanan willayah managemen kebakaran	97	97		97		98		98		100		100		
			Dinas Sosial															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan	100	100	4.942.335	100	5.247.766	100	5.494.750	100	5.695.250	100	5.900.250	100	27.280.351	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				keuangan serte pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif Nilai Rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Sosial	52,26	53,00		54,00		55,00		56,00		57,00		58,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja Dinas Sosial	27,42	27,42		27,50		27,50		27,50		27,58		27,58		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Sosial	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial yang Akti dalam Pelayanan Sosial	70	75	716.389	75	875.000	80	885.000	80	935.000	85	965.000	85	4.376.389	Dinas Sosial
				Persentase Organisasi Sosial yang Aktif Dalam Pelayanan Sosial	50	55		60		70		75		85		90		
			Program Penanganan Warga Negara Migran	Persentase Orang Terlantar Yang Terlindungai	90	95	30.000	95	35.000	95	35.000	95	40.000	95	40.000	95	180.000	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Korban Tindak Kekerasan	Kembali ke Daerah Asal atau daerah Tujuan														
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	90	90	1.126.400	95	1.326.399	95	1.326.399	95	1.526.399	95	1.526.399	94	6.831.996	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga PMKS Penerima Manfaat Yang memperoleh Jaminan Sosial Sesuai Ketentuan	86	90	10.830.499	93	16.655.000	95	16.660.000	97	16.700.000	98	16.725.000	100	77.570.499	Dinas Sosial
				Persentase PMKS yang Memiliki Kemampuan Keterampilan Berwirausaha	50	55		80		82		84		85		90		
				Persentase PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar	70	75		80		82		84		85		90		
			Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100	100	1.952.388	100	2.025.000	100	2.035.000	100	2.110.000	100	2.120.000	100	10.242.388	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Siap Pakai	20	20	0	30	180.000	40	180.000	50	210.000	60	210.000	40	780.000	Dinas Sosial
			Urusan Wajib															
			Tidak Terkait Pelayanan Dasar															
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100,00%	100 %	5.002.731,620	100%	5.352.731,620	100%	5.694.436,320	100%	6.682.626,240	100%	7.450.888,860	100%	8.225.575,500	Disnakertrans
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN	23,19%	23,19%		23,20 %		24,50 %		24,70%		25,00 %		25,00 %		
				Nilai Rata-rata dimensi kinerja ASN	25,15%	25,15%		25,15 %		25,16 %		25,17%		25,17 %		25,17 %		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai Rata-rata Disiplin ASN	5,00%	5,00 %		5,00%		5,00 %		5,00%		5,00 %		5,00 %		
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdata	-	-	-	55%	185.000.000	55%	212.700.000	57%	244.600.000	58%	281.200.000	60%	323.300.000	Disnakertrans
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Keahlian	7,91%	11%	270.000	15%	590.000	21%	678.500	26%	780.200	32%	897.000	37%	1.030.000	Disnakertrans
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang berwirausaha	87,5%	88%	1.200.000	89%	670.000	89%	770.500	91%	886.000	91%	1.018.000	93%	1.150.000	Disnakertrans
				Persentase informasi pasar kerja yang di akses masyarakat	60%	60%		65%		65%		70%		70%		75%		
				Persentase perusahaan yang menerapan perda tenaga kerja lokal	60%	60%		65%		65%		70%		70%		75%		
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang perusahaan yang menerapkan syarat kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan	55,00%	57%	170.000	60%	260.000	63%	299.000	67%	343.800	71%	395.300	75%	454.500	Disnakertrans
				Persentase perusahaan yang menerapkan	75,00%	75%		75%		80%		80%		85%		85%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				regulasi pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial														
				Persentase penanganan pengaduan terhadap kasus perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan	33,33%	40%		47%		56%		67%		77%		89%		
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	2.799.796	100%	3.079.775	100%	3.387.753	100%	3.726.528	100%	4.099.181	100%	4.099.181	Dinas PP-PA
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas	57,61	63,37		65,90		68,54		71,28		74,13		77,10		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				PPPA														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas PPPA	25,00	26,00		27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas PPPA	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah PUG	75%	77%	303.260	80%	333.586	82%	366.945	85%	403.639	87%	444.003	90%	444.003	Dinas PP-PA
				Persentase perempuan yang aktif di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	15%	18%		20%		23%		25%		27%		30%		
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	70%	73%	253.368	75%	278.704	77%	306.574	80%	337.232	82%	370.955	85%	370.955	Dinas PP-PA
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender	65%	67%	360.449	70%	396.494	73%	475.793	75%	523.372	77%	575.709	80%	575.709	Dinas PP-PA
			Program	Persentase	70%	72%	46.700	75%	51.370	77%	61.644	80%	73.973	82%	88.767	85%	88.767	Dinas PP-PA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	data gender dan anak yang valid														
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	75%	77%	474.563	80%	522.020	82%	626.424	84%	689.066	85%	757.973	90%	757.973	Dinas PP-PA
			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	81%	82%	49.930	83%	200.000	84%	220.000	85%	220.000	86%	240.000	87%	240.000	Dinas PP-PA
			Pangan															
			Dinas Ketahanan Pangan															
			Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan	100%	100 %	5.803.790,664	100%	6.693.288,797	100%	7.754.360,556	100%	8.961.968,067	100%	10.399.970,621	100%	1.439.967,683	DKP
				Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
		Komulatif Nilai Rata-rata Kompetensi dan Kualifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	81		85		88		90		95		100		
		Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja ASN Dinas Ketahana Pangan	80	83		87		90		95		95		100		
		Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN Dinas Ketahanan Pangan	80	90		90		95		97		100		100		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Lumbung Pangan dan Kelengkapannya yang Dibantu Untuk Masyarakat	35 Unit	1 Unit	824.400	1 Unit	906.840	1 Unit	997.524	1 Unit	1.097.276,400	1 Unit	1.207.004,040	1 Unit	1.327.704,444	DKP
		Jumlah Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Desa	10 Ton	4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		4 Ton		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Nilai Konsumsi Energi	82.9	80	768.200	80	1.000.220	84.3	1.185.122	88.6	1.276.114,200	92.6	1.373.805,620	97.2	1.511.186,182	DKP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Konsumsi Protein	104.5	88		94		97		100		100		100		
				Persentase peningkatan produk pangan olahan	88.3	90		91,7		93,4		95,1		96,8		98,5		
				Persentase desa yang memanfaatkan Lahan Pekarangan untuk tanaman pangan	28.14%	42,21%		57,29%		67,84%		78,90%		89,45%		100%		
				Persentase Gapoktan yang Mandiri	7.05%	2.50%		2.50%		2.60%		2.70%		2.80%		2.90%		
				Persentase Ketersedian Pangan sesuai dengan kebutuhan Pangan	80%	80%		85%		85%		88%		88%		95%		
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	83 Ton Beras, 25 Ton Gabah	10 TON		12 TON		14 TON		16TON		18 TON		20 TON		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	17.85%	13%	226.000	20%	270.000	25%	306.000	33.30%	343.100	50%	381.410	100%	394.410	DKP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman	80%	80%	311.200	82%	364.497,980	84%	400.947,778	86%	441.042,556	88%	485.146,811	90%	519.020,494	DKP
			Pertanahan															
			Dinas Perumahan Rakyat dan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kawasan Permukiman															
			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	0%	0	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	DInas Perkim
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	100 %	550.000	100%	700.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	400.000	100%	100.000	DInas Perkim
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	0	100 %	350.000	100%	350.000	100%	200.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	DInas Perkim
			Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	0%	0%	0	100%	1.200.000	100%	1.100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	900.000	DInas Perkim
			Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	0	0%	0	20%	950.000	40%	850.000	60%	700.000	80%	700.000	100%	700.000	DInas Perkim
			Program Pengelolaan	Persentase tanah kosong	0	0%	0	20%	1.500.000	40%	1.450.000	60%	1.400.000	80%	1.350.000	100%	1.300.000	DInas Perkim

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tanah Kosong	yang dimanfaatkan														
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	100%	0%	0	20%	500.000	40%	500.000	60%	500.000	80%	500.000	100%	500.000	DInas Perkim
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase hak pemilikan sertifikat tanah	50%	10%	54.700.000	20%	32.700.000	40%	22.700.000	60%	12.700.000	80%	10.700.000	100%	10.700.000	DInas Perkim
			Lingkungan Hidup															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas	BB	BB	7.130.582	BB	7.487.111	BB	7.861.467	BB	8.254.540	BB	8.667.267	BB	9.100.631	DLH
				Indeks Profesionalitas ASN DLH	58.08	59.00		60.00		60.10		63.00		66.00		70.00		
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun sesuai dengan aturan	100%	100 %	45.000	100%	45.000	100%	55.000	100%	65.000	100%	70.000	100%	75.000	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Emisi GRK	1.68%	1.68 %	679.000	1.65	933.000	1.63 %	983.000	1.61%	1.046.000	1.59 %	1.095.000	1.59 %	1.152.000	DLH
				Indeks Kualitas Air	63.33	63.33		63.46		63.86		63.98		63.91		63.91		
				Indeks Kualitas Udara	99.99	90.37		90.48		90.58		90.69		90.98		90.98		
				Indek Tutupan Hutan dan	33.60	41.07		42.91		44.75		46.59		47.93		47.93		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Lahan														
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah RTH dan Hutan Kota yang di pelihara	100%	100 %	293.000	100%	340.000	100%	350.000	100%	360.000	100%	350.000	100%	350.000	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha/kegiatan yang patuh dalam mengelola B3 dan Limbah B3	57.68%	60.00%	35.000	64.00 %	40.000	68.00 %	48.000	72.00%	57.600	76.00 %	69.120	76.00 %	82.944	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait lingkungan hidup	90	90	110,000	90	119,250	90	129,338	90	140,342	90	152,350	90	164,350	DLH
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang di akui		3	30.000	3	60.000	3	70.000	3	70.000	3	80.000	3	80.000	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyulluhan Lingkungan	100%	100 %	65.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Hidup Untuk Masyarakat														
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100 %	240.000	100%	420.000	100%	420.000	100%	420.000	100%	420.000	100%	420.000	DLH
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Pencemaran Lingkungan yang terselesaikan	100%	100 %	50.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	24.26%	27.00%	3.020.000	31.00 %	6.674.000	34.00 %	7.069.200	37.00%	6.558.500	40.00 %	6.116.000	40.00 %	6.454.000	DLH
				Jumlah Sampah yang diangkut ke TPA	1000	1500		2100		2700		3300		3600		3900		
			Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil															
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang	100%	100 %	5.689.808,104	100%	6.258.788	100%	6.468.880	100%	6.907.760	100%	7.159.661	100%	7.159.661	Disduk Capil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.65%	41.65 %		42.65 %		43.65 %		44.65%		45.65 %		46.65 %		Disduk Capil
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25%	26%		27%		28%		29%		30%		30%		Disduk Capil
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		Disduk Capil
				Persentase sarpras yang sesuai standar pelayanan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang mengakses	94.09%	100 %	130.189.500	95.09 %	175.600	96.09 %	200.000	97.09%	262.000	98.09 %	300.200	99.09 %	300.200	Disduk Capil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				pelayanan dokumen kependudukan														
				Persentase pengaduan pelayanan pendaftaran penduduk yang di tindak lanjuti	85%	86%		87%		88%		89%		90%		91%		
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang mengakses pelayanan dokumen pencatatn sipil	29.74%	32.74%	106.044,800	35.74%	178.900	38.74%	195.000	41.74%	231.000	44.74%	267.000	47.74%	267.000	Disduk Capil
				Persentase pengaduan pelayanan pencatatan sipil yang di tindak lanjuti	85%	86%		87%		88%		89%		90%		91%		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah akses layanan administrasi kependudukan	3	3	2.283.078,100	3	2.511.385	3	2.651.700	3	2.776.555	3	2.929.355,500	3	2.929.355,500	Disduk Capil
				Persentase ASN yang bersertifkat layanan	10%	15%		20%		25%		30%		35%		40%		
				Jumlah Inovasi Pelayanan	9	12		15		18		21		24		27		
				Jumlah sertifikasi mutu layanan	2	3		3		3		4		4		4		
				Jumlah	0	5		10		15		20		25		30		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				perjanjian kerja sama pemanfataan data kependudukan														
				Persentase data penduduk yang berada di desa/kelurahan dengan data pada SIAK	94%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	persentase data profil kependudukan yang akurat	94%	95%	0	96%	100.000	97%	135.000	98%	160.000	99%	200.000	100%	200.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Permerintah Desa															
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan	100%	100 %	5.500.555,175	100%	9.192.409,392	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	100%	6.037.482,292	Dinas PMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Dinas PMD	32,50	32,60		32,70		32,80		32,90		33,00		33,10		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas PMD	25,16	25,20		25,25		25,30		25,35		25,40		25,45		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas PMD	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
				Meningkatnya kinerja individu ASN Dinas PMD	37 Orang	37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		
				Meningkatnya kedisiplinan ASN Dinas PMD	37 Orang	37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		37 Orang		
			Program Penataan Desa	Persentase Aparatur Desa Yang Memiliki Kompetensi	80%	80%	60.000	80%	60.000	80%	266.000	80%	266.000	80%	266.000	80%	266.000	DPMD
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Aparatur Desa Yang Memiliki Kompetensi	80%	80%	148.000	80%	148.000	80%	462.800	80%	462.800	80%	462.800	80%	462.800	DPMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Peraturan	100%	100 %	4.740.081,750	100%	1.322.365,950	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	100%	1.283.940,300	DPMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa Yang Aktif	20%	22%	1.501.000	24%	1.510.000,100	26%	2.894.040,659	28%	2.894.040,659	30%	2.894.040,659	32%	2.894.040,659	DPMD
				Persentase Peningkatan Inovasi TTG dalam membangun Desa	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Desa Yang Mendukung Perekonomian Masyarakat	75%	76%		77%		78%		79%		80%		81%		
				Persentase LPM yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	75%	76%		77%		78%		79%		80%		81%		
				Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		
			Pengendalian															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penduduk dan Keluarga Berencana															
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan	28,64	29,64	5.768.598,054	30,64	6.345.457,859	31,64	6.980.003,645	32,64	7.678.004,010	33,64	8.445.804,411	34,64	8.445.804,411	DPPKB
				Kumulatif Nilai rata-rata Dimensi Kompetensi dan Kualifiksi ASN DPPKB	58,64	60,64		62,64		64,64		66,64		68,64		70,64		
				Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja DPPKB	25,00	26,00		27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		
				Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN DPPKB	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB (%)	69,86	70,00	3.393.300	70,25	3.732.630	70,50	4.105.893	70,75	4.516.482,300	71,00	4.968.130,530	71,25	4.968.130,530	DPPKB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia yang Aktif (BKL) (%)	89,44	89,46		89,48		89,50		89,52		89,54		89,56		
				cakupan Anggota BKR Ber-KB (%)	69,80	69,82		69,84		69,86		69,88		69,90		69,92		
				Persentase UPPKS yang Aktif (%)	44,48	45,00		46,00		47,00		48,00		49,00		50,00		
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	25	30	436.131	35	479.744,100	35	527.718,510	40	580.490,361	40	638.539,397	45	678.539,397	DPPKB
				Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk	4	5		6		7		8		9		10		
				Persetase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100		100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	75	75,25	5.057.102,400	75,50	5.562.812,640	75,75	6.119.093,904	80	6.731.003,294	80,25	7.404.103,624	80,50	7.404.103,624	DPPKB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(KB)	Indeks Kepuasan Layanan Fasiliasi KB	0	70		70,25		70,50		70,75		80		80,25		
				Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1,25	1,24		1,23		1,22		1,21		1,20		1,90		
				Persetase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70	70,20		70,30		70,40		70,50		70,60		70,70		
				Persentase kampung kb dengan katagori purna	25	30		30		35		35		40		40		
			Perhubungan															
			Dinas Perhubungan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100 %	5.801.763,690	100%	5.870.000	100%	5.940.000	100%	6.100.000	100%	6.170.000	100%	6.240.000	Dinas Perhubungan
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen pelaporan	37%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				keuangan yang terbit tepat waktu dan standar akutansi pemda														
				Persentase Dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	57%	60%		70%		75%		80%		85%		90%		
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kopetensi dan Kualitas ASN Dinas	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas transportasi layak fungsi	70%	75%	1.255.800	80%	1.950.000	85%	2.460.000	90%	2.715.000	95%	2.900.000	100%	3.122.250	Dinas Perhubungan
				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		80%		
				Survey Kepuasan Masyarakat	2 Kali	2 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
			Komunikasi dan informatika															
			Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik															
			Program Penunjang	Meningkatnya pelayanan	10	15	4.383.976	25	7.306.627	35	10.229.277	45	13.151.928	55	16.074.579	70	20.458.555	Dinas Komifo dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	publik yang baik														Statistik
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang disajikan	10%	15%	2.382.935	35%	3.216.962	55%	3.693.549	75%	4.170.136	95%	4.646.723	100%	4.765.870	Dinas Komifo dan Statistik
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang diintegrasikan	10%	15%	3.540.200	35%	4.779.270	55%	5.487.310	75%	6.195.350	95%	6.903.390	100%	7.080.400	Dinas Komifo dan Statistik
				Persentase Desa yang tersedia jaringan TIK	10%	15%	3.540.200	35%	4.779.270	55%	5.487.310	75%	6.195.350	95%	6.903.390	100%	7.080.400	
			Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah															
			Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah															
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai peraturan	80%	80%	3.963.330,270	85%	5.743.996,324	85%	6.869.795,589	85%	8.207.154,707	85%	9.536.033,648	85%	11.093.099,578	Dinas Koperasi UKM
				Persentase Laporan Keuangan sesuai Peraturan dan tepat waktu	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		Dinas Koperasi UKM
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Tepat	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		Dinas Koperasi UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Waktu														
				Persentase Laporan BMD Sesuai Aturan dan tepat waktu	80%	80%		85%		85%		85%		85%		85%		Dinas Koperasi UKM
				Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	70%	70%		80%		80%		80%		80%		80%		Dinas Koperasi UKM
				Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Koperasi UKM
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Patuh terhadap Aturan	10,00%	12,00%	300.000	14,00 %	360.000	15,00 %	432.000	16,00%	518.400	17,00 %	622.080	19,00 %	746.496	Dinas Koperasi UKM
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	10,00%	12,00%	300.000	14,00 %	360.000	15,00 %	432.000	16,00%	518.400	17,00 %	622.080	19,00 %	746.496	Dinas Koperasi UKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Kelembagaan Koperasi yang baik	7,00%	8,00 %	230.000	9,00%	276.000	9,50 %	331.200	10,00%	397.440	11,00 %	476.928	11,50 %	572.313,600	Dinas Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi bantuan sarana usaha	4,00%	4,00 %	280.000	4,50%	336.000	5,00 %	403.200	6,00%	483.840	7,00 %	580.608	7,50 %	696.729,600	Dinas Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Usaha	Persentase Usaha Mikro yang	0,1%	0,25 %	700.000	0,27%	840.000	0,30 %	1.008.000	0,35%	1.209.600	0,37 %	1.451.520	0,40 %	1.741.824	Dinas Koperasi UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	mendapatkan Permodalan														
				Persentase Usaha Mikro yang memiliki Produk Unggulan	0,1%	0,25 %		0,27%		0,30 %		0,35%		0,37 %		0,40 %		
				Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi sarana dan legalitas usaha	0,1%	0,25 %		0,27%		0,30 %		0,35%		0,37 %		0,40 %		
				Persentase Usaha Mikro Yang Dilatih dan DIiberdayakan	0,10%	0,25 %		0,27%		0,30 %		0,35%		0,37 %%		0,40 %		
			Program Pengembangan Umkm	Persentase Produk Usaha Mikro yang mengikuti Promosi	0,15%	0,17 %	300.000	0,20%	360.000	0,22 %	432.000	0,25%	518.400	0,27 %	622.080	0,30 %	746.496	Dinas Koperasi UKM
			Penanaman Modal															
			Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100 %	9.839.223,217	100%	10.823.145,539	100%	11.905.460,093	100%	13.096.006,102	100%	14.405.606,712	100%	15.846.167,383	DPMPTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Kajian Penanaman Modal,	90%	10 0	100.000	100 %	110.000	100 %	121.000	100%	133.100	100 %	146.410	100 %	161.051	DPMPTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Modal	Persentase Regulasi Daerah Yang Mendukung Investasi		%												
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Publikasi Promosi, Persentase Peningkatan Konten Promosi Daerah, Jumlah Potensi Unggulan, Persentase Pelaku Usaha Yang berkontribusi aktif	90%	100 %	383.l00	100%	421.300	100%	463.430	100%	509.773	100%	560.750,300	100%	616.825,330	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi Yang Terbit, Persentase sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, Persentase regulasi pelayanan, Jumlah aplikasi perizinan online, Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Tuntas Ditindak Lanjuti	90%	100 %	230.000	100%	253.000	100%	278.300	100%	306.130	100%	336.743	100%	370.417,300	DPMPTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Aturan Berinvestasi, Jumlah Pelaku Usaha Yang di Awasi	90%	100 %	204.900	100%	225.390	100%	247.929	100%	272.721,900	100%	299.994,090	100%	329.993,499	DPMPTSP
			Program Pengelola an Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Terselenggar anya Aplikasi Prizinan Online	90%	100 %	90.000	100%	99.000	100%	108.900	100%	119.790	100%	131.769	100%	144.945,900	DPMPTSP
			Kepemudaa n dan Olah Raga															
			Dinas Pemuda dan Olah Raga															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggara n, pelaporan kinerja dan keuangan serte pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	90	4.942.335	100%	5.247.766	100%	5.494.750	100%	5.695.250	100%	5.900.250	100%	27.280.351	DIspora
				Kumulatif Nilai Rata-rata dimensi kompetensi	30,15	33,5 0		36,75		39,10		41,35		43,20		45,10		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dan kualifikasi ASN Dinas Pemuda dan Olahraga														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	25,15	25.55		25,80		26'10		26,60		27,10		27,35		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Pemuda dan Olahraga	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang dibina	100%	0	2.090.000	80%	2.299.000	86%	2.528.900	90%	2.781.790	94%	3.059.969	100%	3.365.965	DIspora
				Persentase Pemuda yang mengikuti dialog Pemuda yang Inklusif	0	0		80%		86%		90%		94%		100%		
				Persentase Pemuda yang dibina	0	0		80%		86%		90%		94%		100%		
				Persentase Pemuda yang mengikuti dialog Pemuda yang Inklusif	0	100 %		80%		86%		90%		94%		100%		
				Persentase Pemuda yang aktif berorganisasi	0	100 %		80%		86%		90%		94%		100%		
			Program Pengembangan Kapasitas	Persentase Sarana dan Prasarana	100%	100 %	10.181.500	80%	11.199.650	84%	12.319.615	92%	13.551.576	96%	14.906.734	100%	16.397.407	DIspora

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daya Saing Olahraga	Olahraga yang memenuhi standarisas														
				Persentse Pelatih yang memiliki sertifikat pelatih	0	0		80%		84%		92%		96%		100%		
				persentase penyelenggaran kejuaraan olahraga	50%	50%		80%		84%		92%		96%		100%		
				Persentase Sekolah yang mendapatkan pembinaan olahraga	50%	50%		80%		84%		92%		96%		100%		
				Jumlah Olahraga Rekreasi dan tradisional yang diKembangkan	0	0		25 cabor		25 cabor		25 cabor		25 cabor		25 cabor		
				persentase atlet berprestasi yang mendapatkan apresiasi	0	0		80%		84%		92%		96%		100%		
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gugus Tugas Pramuka yang aktif	0	0	100.000	80%	110.000	84%	121.000	92%	133.100	96%	146.410	100%	161.051	DIspora
			Statistik															
			Dinas Komunikasi,															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi dan Statistik															
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang disusun dan dipublikasikan	10%	20%	185.000	35%	249.750	50%	277.500	70%	314.500	85%	342.250	100%	370.000	Dinas Kominfo dan Statistik
			Persandian															
			Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik															
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi yang diamankan	5%	10%	150.000	35%	202.500	50%	225.000	70%	255.000	90%	285.000	100%	300.000	Dinas Kominfo dan Statistik
			Kebudayaan															
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	erintahan Daerah Kabupaten/ Kota erintahan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	75%	4.252.447,918	80%	4.465.070,314	85%	4.688.323,830	87%	4.922.740,021	90%	5.168.877,022	95%	5.427.320,873	Disbudpar
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	75	70	2.166.073,200	75	2.274.376,860	80	2.501.814,546	85	2.751.996	90	3.027.195,600	95	3.329.915,160	Disbudpar
			Program Pengembang	Persentase Program	0	70	367.000	75	385.350	80	404.617,500	85	424.484,375	90	446.090,794	95	468.395,333	Disbudpar

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional														
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Program Pembinaan Sejarah	0	45	357.000	50	374.850	55	393.592,500	60	413.272,125	65	433.935,731	70	455.632,518	Disbudpar
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	70	260.000,030	75	273.000,031	80	286.650,033	85	300.982,534	90	316.031,661	95	331.833,244	Disbudpar
			Perpustakaan															
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100,00	100	3.705.720,176	100	5.772.424,680	100	5.217.087,280	100	5.763.837,280	100	5.978.137,280	100	6.253.087,280	Disperpus Arsip
				Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100		100		100		100		100		100		Disperpus Arsip
				Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				standar akuntansi Pemda														
				Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100		100		100		100		100		100		
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas ...	30,10	30,10		30,50		30,80		4,00		4,25		4,5		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas ...	25	25		28		30		33		37		40		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas	5	5,00		5,30		5,75		6,00		6,25		6,50		
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	47,167	47,167		47,167		48,00		50,0		50,50		50,50		
				Rasio pengunjung perpustakaan	9,50	10,25	10.558.545	12,50	2.800.000	15,00	3.500.000	17,50	3.500.000	18,00	4.000.000	19,00	4.500.000	Disperpus Arsip
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup	Cukup		Cukup		Baik		Baik		Baik		Baik		
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	0	1,00	85.000	1,00	125.000	1,00	145.000	2,00	145.000	2,00	165.000	2,00	165.000	Disperpus Arsip

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	0	0		9		14		18		23		23		
			Arsip															
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
			Program Pengelolaan Arsip	Rata-rata Nilai Audit Kearsipan internal (LAKI)	61,50	65,00	75.000	70,00	310.000	72,00	325.000	74,00	225.000	75,00	240.000	75,00	240.000	Disperpus Arsip
				Prosentase OPD yang nilai lakinya masuk dalam kategori baik	6,00	12		18,00		25,00		25,00		30,00		35,00		
				% Tenaga Pengelola Kearsipan yang sudah tersertifikasi	-	0		30,00		60,00		80,00		90,00		100,00		
				% Sarana dan Prasarana yang telah sesuai dengan standar	-	0		10,00		18,00		25,00		30,00		35,00		
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah regulasi kearsipan yang telah diterbitkan dan disosialisasikan	1	1	65.000	3,00	135.000	4,00	145.000	5,00	275.000.	5,00	300.000.	6,00	325.000	Disperpus Arsip
			Program Perizinan Penggunaan	Jumlah regulasi kearsipan	0	0	0	-	-	-	-	1,00	45.000	1,00	35.000	1,00	25.000	Disperpus Arsip

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Arsip	yang telah diterbitkan dan disosialisasikan														
			Urusan Pilihan															
			Kelautan dan Perikanan															
			Dinas Perikanan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan dokumen pengaanggaran, dokumen pelaporan kinerja, dokumen pelaporan keuangan dan dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100	4.765.78,632	100	5.368.000	100	6.663.000	100	7.841.000	100	9.578.000	100	10.604.000	Dinas Perikanan
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas	15	15		16		17		18		19		20		
				Nilai rata-rata dimensi	25.50	25.5		28.50		28.05		30.85		33.93		37.32		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja ASN Dinas Perikanan		0												
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Perikanan	5.00	5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Luas lahan potensial budidaya yang dimanfaatkan	8,000	8,000	3.088.598,470	8.000	4.245.000	8.000	4.620.000	8.000	5.010.000	8.000	5.395.000	8.000	5.780.000	Dinas Perikanan
				Luas lahan pekarangan yang dimanfaatkan (hektar)	4%	0.1		0.4		0.1		0.10		0.10		0.80		
				Persentase pemanfaatan tenologi/ inovasi perikanan	12	7.50 %		8.13%		6.25 %		6,25%		6,25 %		34,38 %		
				Persentase teknologi/ inovasi baru yang dimanfaatkan	40	2.33 %		3.49%		3.49 %		3,49%		3,49 %		16,29 %		
				Persentase Pelaku usaha Pemanfaatan teknologi /Inovasi	20	1.16 %		1.74%		1.74 %		1,74%		1,74 %		8,12 %		
				Persentase peningkatan Luas Lahan perikanan budidaya	0,25	(0,22)		(0,31)		0,40		0,45		0,50		0,55		
				Persentase peningkatan pembudidaya ikan yang	4,65	4,75		4,90		5,10		5,25		5,40		5,55		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				berpengetahuan tentang budidaya perikanan														
				Persentase peningkatan luas lahan budidaya yang dikendalian terhadap hama penyakit ikan	0,75	0,78		0,80		0,83		0,85		0,87		0,90		
				Persentase peningkatan pemanfaatan bibit unggul	0,63	0,65		0,69		0,71		0,73		0,75		0,79		
				Persentase peningkatan benih ikan unggul yang dihasilkan BBI	0,95	(0,15)		(0,20)		1,15		1,20		1,25		1,30		
				Persentase peningkatan benih ikan unggul yang dihasilkan UPR	0,62	0,68		0,73		0,76		0,79		0,82		0,85		
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Luas Perairan Umum yang dimanfaatkan	0	2,384.83	223.000	2,384.83	278.000	2,384.83	330.000	2,384.83	400.000	2,384.83	470.000	2,384.83	535.000	Dinas Perikanan
				Persentase peningkatan kelembagaan nelayan kecil yang terbentuk	0	2%		4%		6%		8%		10%				
			Program Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Pelaku usaha pemanfaat teknologi /	1	2	966.925	3	1.058.000	3	1.171.000	3	1.284.000	3	1.397.000	14	1.510.000	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ikan	inovasi Pengelolaan hasil dan pemasaran														
				Persentase teknologi/ inovasi Pengelolaan hasil dan Pemasaran	7%	10%		15%		15%		15%		15%		70%		
				Persentase pemanfaatan teknologi/ inovasi perikanan	7%	10%		15%		15%		15%		15%		70%		
			Pariwisata															
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata															
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan dya tarik Pariwisata	44	52,5	3.811.449,638	55,5	4.002.022,120	57,5	4.202.123,226	60	4.412.229,387	62,5	4.632.840,857	65	4.864.482,899	Disbudpar
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata34	34	48	541.251,600	50,25	568.314,180	52,75	596.729,889	53,45	626.566,383	55	657.894,703	57,5	690.789,438	Disbudpar
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan IntelektuaL	Prosentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		24	320.300	29	336.315	34	353.130,750	36	370.787,288	42	389.326,652	43,5	408.792,984	Disbudpar
			Program Pengembang	Persentase Pengembang		25	346.000	28	363.300	32	381.465	38	400.538,250	43	420.565,163	46	441.593,421	Disbudpar

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an Sumber Daya dn Ekonomi Kreatif	an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
			Dinas Pertanian dan Peternakan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Yang Dipenuhi (%)	95	95	26.156.000	95	46.040.000	95	47.055.000	95	48.070.000	95	49.085.000	95	49.085.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Yang Dipenuhi (%)	95	95		95		95		95		95		95		
				Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (%)	95	95		95		95		95		95		95		
				Persentase Cakupan Pemberdayaan Aparatur (%)	95	95		95		95		95		95		95		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	4.500.000	92	12.770.000	93	15.430.000	94	18.590.000	95	21.750.000	96	21.750.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase	90	91		92		93		94		95		96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Capaian Luas Tanam Hortikultura (%)														
				Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Peternakan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)	90	91	7.920.000	92	15.650.000	93	17.650.000	94	24.650.000	95	26.650.000	96	26.650.000	Dinas Pertanian dan Perternakan
				Persentase Capaian Luas Tanam	90	91		92		93		94		95		96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Hortikultura (%)														
				Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Pesentase Capaian Populasi Ternak (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)	90	91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Peternakan (%)	90	91		92		93		94		95		96		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)		91	370.000	92	1.470.000	93	1.570.000	94	1.670.000	95	1.770.000	96	1.770.000	Dinas Pertanian dan Perternakan
				Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)		91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas		91		92		93		94		95		96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tanaman Pangan (%)														
				Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)		91		92		93		94		95		96		
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan (%)		91	4.900.000	92	7.200.000	93	8.650.000	94	10.100.000	95	11.550.000	96	11.550.000	Dinas Pertanian dan Perternakan
				Persentase Capaian Luas Tanam Hortikultura (%)		91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (%)		91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura (%)		91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (%)		91		92		93		94		95		96		
				Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura (%)		91		92		93		94		95		96		
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Pesentase Capaian Populasi Ternak (%)		91	660.000	92	3.250.000	93	4.670.000	94	5.090.000	95	6.510.000	96	6.510.000	Dinas Pertanian dan Perternakan
				Persentase Capaian		91		92		93		94		95		96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Veteriner	Produktivitas Peternakan (%)														
				Persentase Capaian Produktivitas Telur (%)		91		92		93		94		95		96		
			Dinas Perkebunan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	1.278.160.000	100,00	7.276.645,086	100,00	7.968.909,595	100,00	8.750.100,554	100,00	9.618.460,609	100,00	10.562.659,920	100,00	10.779.467,111	Dinas Perkebunan
				Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Petani Pengguna Bibit Unggul Persertifikat	3.790.500	100,00	4.681.500	100,00	5.091.150	100,00	5.596.765	100,00	6.152.941,500	100,00	6.762.248,650	100,00	7.434.973,515	Dinas Perkebunan
				Persentase Petani Pengguna Pupuk sesuai Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK)		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Penurunan Angka Losis		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Peningkatan Luas Lahan yang diremajakan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Peningkatan Penerapan Good Agriculture Practice (GAP)		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Benih Bersertifikat		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Alsintan	4.850.000	100	5.215.000	100	4.869.000	100	5.615.900	100	5.859.990	100	6.710.989	100	7.339.087,900	Dinas Perkebunan
				Persentase Peningkatan Jalan Produksi		100		100		100		100		100		100		
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kasus Kebakaran Kebun	475,000	40	560.000	35	575.000	30	604.500	25	638.850	20	672.435	15	713.678,500	Dinas Perkebunan
				Persentase Penurunan Konflik Lahan Perkebunan		40		35		30		25		20		15		
				Persetase Luas Kebun yang Terbakar		40		35		30		25		20		15		
				Persentase Hospot yang berkurang		40		35		30		25		20		15		
				Persentase Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) Sertifikat, Akte Notaris dan Surat Pengakuan Hak (SPH)		100		100		100		100		100		100		
				Menurunnya Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)		40		35		30		25		20		15		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanam Baru	390.000	100	395.000	100	406.500	100	413.650	100	421.515	100	430.166,500	100	439.683,150	Dinas Perkebunan
				Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		40		35		30		25		20		15		
				Persentase Peningkatan Harga Komoditi Perkebunan		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peningkatan pasar		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peningkatan Usaha Kemitraan Perkebunan		100		100		100		100		100		100		
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Petani Sesuai Standar Teknis	95.000	100	145.000	100	159.500	100	175.450	100	192.995	100	212.294,500	100	233.523,950	Dinas Perkebunan
			Kehutanan															
			Dinas Lingkungan Hidup															
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah RTH dan Hutan Kota yang di pelihara	100%	100 %	293.000	100%	340.000	100%	350.000	100%	360.000	100%	350,000	100%	350.000	DLH
			Perdagangan															
			Dinas Perindustrian dan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perdagangan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	5.414.087	100%	6.521507	100%	6.521.507	100%	6.521.507	100%	6.521.507	100%	6.521507	Disperindag
				Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemda	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Nilai rata-rata dimensi kompetensi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,14%	15%		15%		20%		20%		25%		20%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25%	25%		25%		26%		26%		27%		28%		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	15	25	100.000	25	110.000	25	120.000	35	130.000	35	140.000	50	140.000	Disperindag
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Pasar Yang Ditingkatkan	5%	10%	6.885.383	15%	7.150.000	20%	10.000.000	22%	10.000.000	25%	10.000.000	30%	10.000.000	Disperindag
				Persentase capaian pendapatan pasar	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan stok barang	80	80	545.029	85	750.000	85	780.000	85	800.000	90	830.000	90	830.000	Disperindag
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Yang Dipromosikan	5%	10%	500.000	10%	500.000	15%	500.000	20%	500.000	25%	500.000	30%	500.000	Disperindag
				Persentase peningkatan jaringan pemasaran	5%	10%		10%		15%		20%		25%		30%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks kepuasan masyarakat (Poin)	40	50	207.309	55	6.715.000	60	6.720.000	65	6.760.000	70	6.750.000	75	6.705.000	Disperindag
				Persentase alat -alat ukur (UTTP) yang bertanda tera sah (%)	30%	40%		50%		55%		60%		65%		70%		
			Perindustrian															
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pembinaan kelembagaan IKM	5	10	1.000.000	10	1.100.000	20	1.250.000	30	1.350.000	40	1.400.000	50	1.500.000	Disperindag
				Persentase pelaku IKM bersertifikat	0 IKM	2 IKM		3 IKM		6 IKM		9 IKM		12 IKM		15 IKM		
				Persentase IKM yang menerapkan teknologi industry	5 IKM	5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		
				Persentase produk IKM berdaya saing (%)	5	5		10		15		20		25		30		
				Persentase peningkatan infrastruktur sentra industry	-	-		5		5		10		15		20		
			Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase Pembinaan Kelembagaan	10	15	300.000	20	320.000	30	350.000	35	370.000	40	380.000	50	400.000	Disperindag

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Industri	IKM														
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jaringan pemasaran	5	10	300.000	10	330.000	15	375.000	15	405.000	20	420.000	30	450.000	Disperindag
			Transmigrasi															
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga yang meningkat dari prasejahtera ke sejahtera/mampu	98,39%	97%	100.000	97%	310.000	97%	356.500	97%	409.800	97%	471.200	97%	541.880	Disnakertrans
			Urusan Penunjang															
			Perencanaan Pembangunan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat	100%	100%	6.597.146, 100	100%	7.256.860, 710	100%	7.982.546, 781	100%	8.401.431, 459	100%	9.658.881, 605	100%	10.624.770,065	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Bappeda	31.97%	32%		33%		34%		35%		36%		37%		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Bappeda	25%	25%		26%		27%		28%		29%		30%		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Bappeda	4.94%	4.95 %		4.96%		4.96 %		4.97%		4.98 %		4.98 %		
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional	90%	95 %	2.800.000	95%	3.080.000	100%	3.388.000	100%	3.726.800	100%	4.099.480	100%	4.509.428	Bappeda
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tahunan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen perencanaan tahunan yang selaras	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				RPJMD, RPJMD Provinsi dan RPJMN														
				Persentase Ketersediaan Informasi Pembangunan Daerah	90%	92 %		94%		96%		98%		99%		100%		
				Nilai Pemenuhan pengukuran kinerja Kabupaten	90%	92 %		94%		96%		98%		99%		100%		
				Nilai Kualitas pengukuran kinerja Kabupaten	80%	85%		90%		92%		94%		98%		100%		
				Nilai Implementasi pengukuran kinerja Kabupaten	80%	82%		84%		86%		88%		89%		90%		
				Tingkat Capaian Kinerja Minimal Daerah	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
				Persentase Rekomendasi Capaian Kinerja yang ditindaklanjuti	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Strategis	100%	100 %	3.525.000	100%	3.877.500	100%	4.265.250	100%	4.691.775	100%	5.160.953	100%	5.677.048	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Renstra yang selaras dengan RPJMD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tahunan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase dokumen perencanaan tahunan yang selaras dengan perencanaan strategis	90%	92 %		94%		96%		98%		99%		100%		
				Nilai Rata-rata Aspek Pengukuran Kinerja	80%	85%		90%		92%		94%		98%		100%		
				Nilai Rata-rata Aspek Kualitas Pengukuran	80%	84%		86%		88%		90%		93%		95%		
				Nilai Rata2 Aspek Implementasi Pengukuran Kinerja	80%	82%		84%		86%		88%		89%		90%		
				Tingkat Capaian Kinerja Minimal PD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		
				Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Hasil Evaluasi PD	90%	92%		94%		96%		98%		99%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keuangan															
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP BPKAD	75.00	75.00	30.000.000	75.50	35.000.000	76.00	37.500.000	76.30	40.000.000	77.00	42.500.000	77.50	45.000.000	BPKAD
				- Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	71.00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		76.00		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100 %	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tingkat Pengelolaan Aset Daerah	90%	90%	1.500.000	91%	2.500.000	92%	2.750.000	93%	3.000.000	94%	3.250.000	95%	4.000.000	BPKAD
			Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	89%	90%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	BPPRD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap kontribusi Pendapatan	89%	90%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	BPPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Daerah														
			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan															
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan	100%	100 %	6.157.062,200	100%	6.647.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	100%	6.869.000	BKPSDM
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Peraturan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemda	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Pengelolaan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				BMD yang Terbit Tepat Waktu dan sesuai Peraturan														
				Kumulatif Nilai Rata-Rata Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi ASN BKPSDM	26,55	27,00		28,00		29,00		30,00		31,00		32,00		
				Nilai Rata-Rata Dimensi Kinerja ASN BKPSDM	25,12	25,50		25,60		25,70		25,18		25,19		26,00		
				Nilai Rata-Rata Dimensi Disiplin ASN BKPSDM	5	5		5		5		5		5		5		
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan dengan Jumlah Jabatan	50%	50%		60%		70%		80%		90%		95%		BKPSDM
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi Jabatan ASN	58,39%	58,39%	2.581.510,400	58,50%	3.675.000	58,60%	3.775.000	58,70%	3.800.000	58,80%	3.925.000	58,90%	3.925.000	
				Nilai Dimensi Kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	25,19	25,19		25,30		25,40		25,60		25,70		25,80		
				Persentase OPD yang	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Memberikan Tunjangan Kinerja														
				Persentase PNS yang Mendapatkan Satya Lancana	14,25%	14,25%		16%		18%		20%		22%		24%		
				Nilai Dimensi Disiplin ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4,99	4,99		4,99		4,99		4,99		4,99		4,99		
				Nilai Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	12,65	12,65		13,00		13,25		13,50		13,75		14,00		
				Persentase Regulasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	90%	90%		92%		94%		96%		98%		100%		
				Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang didukung TI	57%	60%		75%		75%		75%		75%		75%		
			Program Pengembangan Sumber	Nilai Dimensi Kompetensi	14,25	14,25	4.954.686	14,75	6.495.000	15	6.495.000	15,25	6.495.000	15,50	6.495.000	16	6.495.000	BKPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daya Manusia	Aparatur ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas														
			Penelitian dan Pengembangan															
			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	BB	BB	1.002.307	BB	1.100.000	BB	1.250.000	BB	1.300.000	BB	1.350.000	BB	1.350.000	Balitbang
				Nilai Indeks Proffesional Pegawai	71	71		73		75		75		77		77		Balitbang
			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan Sosial Budaya yang dimanfaatkan	75%	75%	1.012.189	80%	2.400.000	85%	2.500.000	90%	2.600.000	95%	2.800.000	100%	2.800.000	Balitbang
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kependudukan	75%	-		75%		80%		85%		90%		100%		Balitbang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Balitbang
			Pengawasan															
			Inspektorat															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	12.544.768	100%	13.172.006	100%	13.830.607	100%	14.522.137	100%	14.522.137	100%	15.248.244	Inspektorat
				Persentase ASN Inspektorat yang memiliki sertifikat kompetensi Auditor dan/atau P2UPD	86,44%	89,83%		91,53 %		93,22 %		94,92%		94,92 %		96,61 %		
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Inspektorat	54,82	55,06		55,16		55,16		55,26		55,26		55,36		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Inspektorat	25,27	25,3		25,35		25,4				25,45		25,5		
				Nilai rata-	5	5		5		5		25,45		5		5		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				rata dimensi disiplin ASN Inspektorat														
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase realisasi pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT dan mandatori kebijakan pengawasan	95%	95%	4.699.817	96%	4.934.808	97%	5.181.548	98%	5.440.626	99%	5.712.657	100%	5.998.290	Inspektorat
				Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 3	15 PD	15 PD		17 PD		19 PD		21 PD		23 PD		25 PD		
				Jumlah PD yang menerapkan penilaian risiko	36 PD	36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		
				Jumlah rekomendasi BPK, Inspektorat dan APIP lainnya yang tuntas ditindaklanjuti	2386 rekom	2386 rekom		2395 rekom		2400 rekom		2405 rekom		2410 rekom		2415 rekom		
				Jumlah PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal kategori BB	25 PD	25 PD		28 PD		31 PD		35 PD		38 PD		40 PD		
				Persentase pengaduan yang ditelaah dan diteruskan pada proses	89%	90%		91%		92%		93%		94%		95%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				pemeriksaan khusus														
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase ketersediaan dokumen sistem, kebijakan dan prosedur pengawasan yang mendukung capaian kapabilitas APIP sesuai IACM	90%	90%	1.717.760	92%	1.803.648	94%	1.893.830	96%	1.988.522	98%	2.087.948	100%	2.192.345	Inspektorat
				Nilai rata-rata hasil peer reviu antar Irban	70%	70%		72%		74%		76%		78%		80%		
				Persentase PD yang didampingi dan dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	20%	20%		30%		34%		38%		42%		46%		
				Persentase target aktivitas rencana aksi pencegahan korupsi yang terealisasi	95,47%	95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		95,47%		
				Jumlah PD yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBB	0	2 OPD		2 OPD		3 OPD		3 OPD		3 OPD		3 OPD		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				M														
				Persentase ASN yang tertib melaporkan LHKASN dan tidak terlibat dalam pungutan liar	80%	70%		87%		89%		91%		93%		95%		
				Nilai hasil evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi	70,00	70,00		70,35		70,70		71,06		71,41		71,77		
			Sekretariat DPRD															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai peraturan	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Persentase Laporan Keuangan Sesuai Peraturan dan Tepat Waktu	90%	93%	53.128.490	95%	53.128.490	96%	58.441.339	98%	64.285.474	100%	70.714.021	100%	77.785.423	Sekretriat DPRD
				Persentase Dokumen pelaporan Tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Persentase Laporan BMD Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	80	80		85		90		95		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kantor yang tersedia (Unit)														
				Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kopetensi (Orang)	5	5		6		7		8		8		8		
				Persentase Pegawai yang tidak Mendapat Hukuman disiplin	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Persentase pelayanan administrasi DPRD tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Persentase pelayanan keuangan DPRD tepat waktu	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Risalah Rapat Persidangan yang di buat tepat waktu	90%	93%	51.567.261	95%	51.567.261	96%	56.723.987	98%	62.396.386	100%	68.636.024	100%	75.499.627	Sekretriat DPRD
				Persentase Aspirasi Masyarakat yang dipasilitas	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
				Persentase Pokir yang dipasilitasi	90%	93%		95%		96%		98%		100%		100%		
			Pemerintahan Umum															
			Sekretariat Daerah															
				1. Persentase	80%	82%	55.109.805	84%	60.620.786	86%	66.709.864	88%	73.371.851	90%	80.697.036	92%	88.751.740	Sekretariat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SOTK sesuai dengan peraturan perundang-undangan														Daerah (Bag. Perencanaan Keuangan Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Umum)
				2. Persentase PD yang mendapat pendampingan RB	50%	75		100%		100%		100%		100%		100%		
				3. Persentase peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada setda	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				4. Persentase Administrasi Keuangan setda yang terlaksana	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				5. Persentase dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja setda yang di selesaikan tepat waktu	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				6. Persentase pelayanan pimpinan yang dilaksanakan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				7. Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				8. Persentase	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				sarana dan prasarana perkantoran dan rumah tangga KDH / WKDH dan Sekretaris daerah														
				9. Persentase pelayanan rumah tangga KDH,WKDH dan Sekda	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
				10. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Pendampuingan Pelayanan Publik	50%	50%		75%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Perangkat daerah yang di dampingi penyusunan LPPD	100%	100 %	55.457.680	100%	47.953.448	100%	48.498.793	100%	49.098.672	100%	49.758.539	100%	50.305.773	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem dan Kerjasama, Bag. Hukum, Bag. Kesra)
				2. persentase Perangkat daerah yang di dampingi penyusunan laporan SPM	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				3. persentase kasus batas wilayah yang diselesaikan	50%													
				4. persentase MoU antar daerah yang ditindak lanjuti	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5. Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				6. Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan Bidang Keagamaan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				7. Persentase Berkas Kebijakan Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan yang Dimanfaatkan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	laporan kebijakan perekonomian yang dimanfaatnkan	100%	100 %	3.208.948	100%	3.529.843	100%	3.882.827	100%	4.271.110	100%	4.698.221	100%	5.168.043	set (Bag, Ekonomi SDA, Bag. Administrasi Pemerintahan, Bag. Pengadaan Barang Jasa)
				persentase pemantauan pelaksanaan kebijakan SDA	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				persentase Peningkatan pelaksanaan Administrasi pembangunan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		
				persentase ketepatan waktu pelaksanaan	100%	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PBJ														
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100	100	363.243	100	4.801.428	100	5.281.571	100	5.809.728	100	6.390.701	BB	7.029.771	Kesbangpol
		Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,15	33,5		36,75		39,10		41,35		43,2		45,10		
		Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	13,33		21,08		25,17		5,00		64,58		100		
		Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
	Program penguatan ideologi pancasila dan	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan	86	87	353.380	88	1.024.882	89	1.505.025	90	2.033.182	91	2.614.155	92	3.253.225	Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			karakter kebangsaan	Kebangsaan														
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90	373.263	91	1.933.675	92	2.413.818	93	2.941.975	94	3.522.948	95	4.162.018	Kesbangpol
				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90		91		92		93		94		95		
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan OKP	74	75	373.263	76	726.271	77	1.206.414	78	1.734.571	79	2.315.544	80	2.954.614	Kesbangpol
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan	Cakupan Pembinaan ketahanan ekonomi, seni budaya,	87	88	383.280	89	1.054.497	90	1.534.640	91	2.062.797	92	2.643.770	93	2.954.614	Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ekonomi, sosial, dan budaya	agama dan kemasyarakatan														
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	Persentase Penanganan Konflik Sosial	84	85	983.430	86	1.343.313	87	1.823.456	88	2.351.613	89	2.932.586	90	3.571.656	Kesbangpol
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan publik dan penyelenggaraan tata kelola yang baik	94,73	95	3.129.310	96	3.215.651	97	3.362.101	98	3.431.678	99	3.551.700	99	3.338.088	BPBD
			Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan bencana	75	77	3.212.504	78	3.308.910	79	3.375.080	82	3.548.340	84	3.702.145	84	3.429.396	BPBD
			Kecamatan Tuah Negeri															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta	100%	100 %	1.668.666,913	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	Kec. Tuah Negeri

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Tuah Negeri	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Tuah Negeri	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tuah Negeri	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	35.792	100,00	40.000	100,00	45.000	100,00	50.000	100,00	55.000	100,00	60.000	Kec. Tuah Negeri
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan		75%	-	60%	-	65%	52.000	70%	55.000	75%	58.000	80%	60.000	Kec. Tuah Negeri
			Program Koordinasi Ketentraman	Persentase Pengaduan Masyarakat		65,00%	-	65,00%	55.000	70,00%	57.000	75,00%	60.000	80,00%	63.000	80,00%	65.000	Kec. Tuah Negeri

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dan Ketertiban Umum	terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti														
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik		70,00%	57.050	100,00%	60.000	100,00%	63.000	100,00%	66.000	100,00%	69.000	100,00%	75.000	Kec. Tuah Negeri
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi		70,00%	-	70,00%	57.000	75,00%	81.000	80,00%	85.000	85,00%	87.000	90,00%	90.000	Kec. Tuah Negeri
			Kecamatan Tugumulyo															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	7.393.500	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	Kec. Tugumulyo
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tugumulyo														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Tugumulyo	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tugumulyo	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	540.000	84,00	648.000	85,00	712.800	87,00	784.080	88,00	862.488	90,00	948.736	Kec. Tugumulyo
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	85%	2.640.000	87%	3.168.000	90%	3.484.800	92%	3.833.280	95%	4.216.608	97%	4.638.268	Kec. Tugumulyo
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90,00%	1.250.000	92,00%	1.500.000	94,00%	1.650.000	96,00%	1.815.000	97,00%	1.996.500	98,00%	2.196.150	Kec. Tugumulyo
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	555.000	100,00%	666.000	100,00%	732.600	100,00%	805.860	100,00%	886.446	100,00%	975.090	Kec. Tugumulyo
			Program	Persentase	N/A	85,0	500.000	87,00	600.000	90,00	660.000	92,00%	726.000	95,00	798.600	97,00	878.460	Kec.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Yang Tertib Administrasi		0%		%		%				%		%		Tugumulyo
			Kecamatan Megang Sakti															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	9.912.739	100%	10.904.013	100%	11.994.414	100%	13.193.856	100%	14.513.242	100%	15.964.566	**Kec. Megang Sakti**
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Megang Sakti	11,32	15,0 0		20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Megang Sakti	25,00	25,5 0		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Megang	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Sakti														
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	550.000	84,00	605.000	85,00	665.500	87,00	732.050	88,00	805.255	90,00	885.780	**Kec. Megang Sakti**
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	80%	2.745.000	85%	2.745.000	90%	3.019.500	95%	3.321.450	97%	3.653.595	99%	4.018.954	**Kec. Megang Sakti**
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	100 %	1.550.000	100%	1.705.000	100%	1.875.500	100%	2.063.050	100%	2.269.355	100%	2.496.290	**Kec. Megang Sakti**
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100 %	755.000	100%	906.000	100%	996.600	100%	1.096.260	100%	1.205.886	100%	1.326.474	**Kec. Megang Sakti**
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	90%	560.000	90%	565.600	90%	622.160	92%	684.376	94%	752.813	95%	828.094	**Kec. Megang Sakti**
			Kecamatan Purwodadi															
			Program Penunjang	Persentase dokumen	100%	100 %	3.291.986,526	100%	3.621.185,179	100%	3.983.303,696	100%	4.381.634,066	100%	4.819.797,473	100%	5.301.777,220	Kec. Purwodadi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Purwodadi	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Purwodadi	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Purwodadi	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	20.000	84,00	22.000	85,00	24.200	87,00	26.620	88,00	29.282	90,00	32.210	Kec. Purwodadi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan	N/A	80%	802.713	82%	882.984	84%	971.283	86%	1.068.411	88%	1.175.252	90%	1.292.777	Kec. Purwodadi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kelurahan dalam pembangunan														
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	100 %	370.000	100%	407.000	100%	447.700	100%	492.470	100%	541.717	100%	595.889	Kec. Purwodadi
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100 %	200.622	100%	220.684	100%	242.753	100%	267.028	100%	293.731	100%	323.104	Kec. Purwodadi
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	90%	55.300	91%	60.830	92%	66.913	93%	73.604	94%	80.965	96%	89.061	Kec. Purwodadi
			Kecamatan STL Ulu Terawas															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	7.393.500	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	10.735.362	100%	11.808.898	100%	12.989.788	Kec. STL Ulu Terawas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan STL Ulu Terawas	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	85%	650.000	90%	715.000	92%	786.500	93%	865.150	94%	951.665	95%	1.046.781	Kec. STL Ulu Terawas
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	60%	60%	2.640.000	65%	3.168.000	70%	3.484.800	75%	3.833.280	80%	4.216.608	85%	4.638.268	Kec. STL Ulu Terawas
			Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait	85%	85%	1.500.000	90%	1.650.000	95%	1.815.000	96%	1.996.500	97%	2.196.150	98%	2.415.765	Kec. STL Ulu Terawas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti														
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	90%	90%	600.000	95%	660.000	100%	726.000	100%	798.600	100%	878.460	100%	966.306	Kec. STL Ulu Terawas
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	80%	80%	550.000	85%	605.000	90%	665.500	95%	732.050	96%	805.255	97%	855.780	Kec. STL Ulu Terawas
			Kecamatan BTS Ulu															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	9.800.000	Kec. BTS Ulu
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi	10,90	12,0 0		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ASN Kecamatan BTS. Ulu														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan BTS. Ulu	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan BTS. Ulu	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	80,00	440.000	81,00	548.000	82,00	612.800	83,00	684.080	84,00	762.488	85,00	122.984	Kec. BTS Ulu
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75%	2.440.000	77%	3.068.000	80%	3.284.800	82%	3.433.280	85%	4.016.608	90%	4.238.268	Kec. BTS Ulu
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	1.200.000	86,00%	1.300.000	87,00%	1.450.000	88,00%	1.515.000	89,00%	1.796.500	90,00%	2.096.150	Kec. BTS Ulu
			Program Penyelenggar	Persentase Desa dan	N/A	100,00%	505.000	100,00%	566.000	100,00%	632.600	100,00%	705.860	100,00%	786.446	100,00%	875.090	Kec. BTS Ulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			aan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Yang Bebas Konflik														
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	500.000	81,00 %	600.000	82,00 %	660.000	83,00%	726.000	84,00 %	798.600	85,00 %	878.460	Kec. BTS Ulu
			Kecamatan Selangit															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	6.336.688,785	100%	7.604.026,542	100%	8.364.429,196	100%	9.284.516,408	100%	11.141.419,689	100%	13.369.703,628	Kec. Selangit
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Selangit	22,63	25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Selangit	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kecamatan Selangit														
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	370.000	84,00	407.000	85,00	447.700	87,00	492.470	88,00	541.717	90,00	595.888	Kec. Selangit
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75%	1.200.000	80%	1.320.000	85%	1.452.000	87%	1.597.200	90%	4.216.608	92%	4.638.269	Kec. Selangit
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90%	1.400.000	92%	1.540.000	94%	1.694.000	96%	1.864.000	97%	1.756.920	98%	1.932.612	Kec. Selangit
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100 %	572.000	100%	629.200	100%	692.120	100%	761.332	100%	913.598	100%	1.096.318	Kec. Selangit
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	85%	400.000	86%	500.000	89%	550.000	90%	605.000	92%	665.500	95%	732.000	Kec. Selangit
			Kecamatan Tiang Pumpung															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kepungut															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	5.000.000	100%	6.500.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	9.500.000	100%	9.800.000	Kec. TPK
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	10,90	12,0 0		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	25,00	25,5 0		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,0 0	350.000	81,00	400.000	82,00	550.000	93,00	600.000	84,00	650.000	85,00	700.000	Kec. TPK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	(IKM)														
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75%	1.550.000	77%	2.500.000	80%	3.250.000	82%	4.500.000	85%	4.750.000	90%	5.000.000	Kec. TPK
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	1.850.000	86,00%	1.900.000	87,00%	2.150.000	88,00%	2.500.000	89,00%	2.750.000	90,00%	2.900.000	Kec. TPK
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	550.000	100,00%	600.000	100,00%	700.000	100,00%	720.000	100,00%	750.000	100,00%	800.000	Kec. TPK
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	500.000	81,00%	600.000	82,00%	660.000	83,00%	726.000	84,00%	798.600	85,00%	878.460	Kec. TPK
			Kecamatan Jayaloka															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan	100%	100%	6.000.000	100%	7.500.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	15.658.970,458	Kec. Jayaloka

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/ Kota	kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Jayaloka	10,90	12,00		14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Jayaloka	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Jayaloka	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	80,00	450.000	81,00	560.000	82,00	650.800	93,00	700.080	84,00	770.488	85,00	850.736	Kec. Jayaloka
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam	N/A	75%	2.440.000	77%	3.068.000	80%	3.284.800	82%	3.433.280	85%	4.016.608	90%	4.238.268	Kec. Jayaloka

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				pembangunan														
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	1.200.000	86,00%	1.300.000	87,00%	1.450.000	88,00%	1.515.000	89,00%	1.796.500	90,00%	2.096.150	Kec. Jayaloka
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	505.000	100,00%	566.000	100,00%	632.600	100,00%	705.860	100,00%	786.446	100,00%	875.090	Kec. Jayaloka
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	500.000	81,00%	600.000	82,00%	660.000	83,00%	726.000	84,00%	798.600	85,00%	878.460	Kec. Jayaloka
			Kecamatan Muara Beliti															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	6.336.688,785	100%	7.604.026,542	100%	8.364.429,196	100%	9.284.516,408	100%	11.141.419,689	100%	13.369.703,628	Kecamatan Muara Beliti
				Kumulatif nilai rata-rata	17,19	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Beliti														
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Beliti	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara Beliti	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,00	585.000	84,00	643.500	85,00	707.850	87,00	850.000	88,00	933.500	90,00	10.285.000	Kecamatan Muara Beliti
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	84,00%	2.640.000	85,00%	3.168.000	90,00%	3.484.800	92,00%	3.833.280	95,00%	4.216.608	98,00%	4.638.268	Kecamatan Muara Beliti
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	N/A	85%	1.250.000	94%	1.500.000	95%	1.650.000	96%	1.815.000	97%	1.950.000	98%	2.200.000	Kecamatan Muara Beliti

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ditindaklanjuti														
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	90%	550.000	100%	650.000	100%	750.000	100%	800.000	100%	850.000	100%	950.000.	Kecamatan Muara Beliti
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	90,00%	550.000	90,00%	600.000	92,00%	650.000	95,00%	700.000	95,00%	750.000	97,00%	800.000	Kecamatan Muara Beliti
			Kecamatan Sumberharta															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	8.393.500	100%	9.872.200	100%	10.759.420	100%	11.735.362	100%	12.808.898	100%	12.989.788	Kec. Sumberharta
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Sumber Harta	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja ASN Kecamatan Sumber Harta														
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Sumber Harta	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	640.000	84,00	748.000	85,00	812.800	87,00	884.080	88,00	962.488	90,00	998.736	Kec. Sumberharta
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	85%	2.640.000	87%	3.168.000	90%	3.484.800	92%	3.833.280	95%	4.216.608	97%	4.638.268	Kec. Sumberharta
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90,00%	1.250.000	92,00%	1.500.000	94,00%	1.650.000	96,00%	1.815.000	97,00%	1.996.500	98,00%	2.196.150	Kec. Sumberharta
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	555.000	100,00%	666.000	100,00%	732.600	100,00%	805.860	100,00%	886.446	100,00%	975.090	Kec. Sumberharta
			Program Pembinaan	Persentase Desa Yang	N/A	85,00%	500.000	87,00%	600.000	90,00%	660.000	92,00%	726.000	95,00%	798.600	97,00%	878.460	Kec. Sumberharta

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertib Administrasi														
			Kecamatan Muara Kelingi															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	3.059.176	100%	8.872.200	100%	9.759.420	100%	3.998.747	100%	4.659.050	100%	5.402.774	Kec. Muara Kelingi
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Kelingi	20,87	21,0 0		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Kelingi	25,00	25,5 0		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kelingi														
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75,00	95.702	77,00	105.272	80,00	115.799	82,00	127.378	84,00	140.115	90,00	222.105	Kec. Muara Kelingi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	60	75%	387.750	80%	426.525	85%	469.177	87%	516.094	90%	567.703	92%	624.473	Kec. Muara Kelingi
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	75	75,00%	192.330	77,00%	192.330	80,00%	150.000	82,00%	150.000	85,00%	150.000	90,00%	200.000	Kec. Muara Kelingi
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	80	75,00%	178.023	76,00%	195.815	79,00%	215.397	80,00%	236.937	83,00%	260.631	86,00%	320.000	Kec. Muara Kelingi
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	75	70,00%	200.000	75,00%	220.000	80,00%	264.000	84,00%	312.400	87,00%	365.640	90,00%	420.000	Kec. Muara Kelingi
			Kecamatan Sukakarya															
			Program Penunjang	Persentase dokumen	100%	100%	2.592.756	100%	4.992.756	100%	5.592.756	100%	6.592.756	100%	7.592.756	100%	7.592.756	Kec. Sukakarya

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Sukakarya	20,87	21,00		25,00		30,00		35,00		49,00		50,00		
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Sukakarya	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Sukakarya	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	75	32.690	77	452.000	80	502.000	83	532.000	85	562.000	87	612.000	Kec. Sukakarya
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan	70%	70%	207.357	75%	1.568.000	80%	2.484.800	85%	2.984.800	90%	2.984.800	92%	3.638.268	Kec. Sukakarya

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kelurahan dalam pembangunan														
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	85%	85%	500.000	87%	600.000	90%	700.000	93%	800.000	95%	900.000	97%	1.000.000	Kec. Sukakarya
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	85%	85%	555.000	90%	666.000	95%	732.600	97%	805.860	100%	886.446	100%	975.090	Kec. Sukakarya
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	80%	80%	146.512	85%	500.000	90%	520.000	95%	550.000	96%	600.000	97%	600.000	Kec. Sukakarya
			Kecamatan Muara Lakitan															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai	100%	100 %	7.500.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	9.600.000	Kec. Muara Lakitan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				peraturan														
				Kumulatif nilai rata-rata dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN Kecamatan Muara Lakitan	10,41	11,00		12,00		13,00		14,00		15,00		16,00		Kec. Muara Lakitan
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Kecamatan Muara Lakitan	25,00	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50		28,00		Kec. Muara Lakitan
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Kecamatan Muara Lakitan	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Kec. Muara Lakitan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,00	81,00	640.000	82,00	648.000	83,00	712.800	84,00	784.080	85,00	862.488	86,00	948.736	Kec. Muara Lakitan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	76%	2.340.000	77%	3.168.000	78%	3.284.800	79%	3.533.280	80%	4.216.608	81%	4.638.268	Kec. Muara Lakitan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait	N/A	86,00%	1.500.000	87,00%	1.600.000	88,00%	1.750.000	89,00%	1.815.000	90,00%	1.996.500	91,00%	2.196.150	Kec. Muara Lakitan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti														
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	605.000	100,00%	666.000	100,00%	732.600	100,00%	755.860	100,00%	780.000	100,00%	800.000	Kec. Muara Lakitan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	N/A	81,00%	550.000	82,00%	600.000	83,00%	660.000	84,00%	700.000	85,00%	760.000	86,00%	800.000	Kec. Muara Lakitan

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator tujuan pembangunan daerah yang dicapai melalui sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di bab-bab sebelumnya. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dirumuskan dari indikator setiap tujuan pembangunan daerah disajikan dalam tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks RB	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB Ket : -AA : nilai >90-100, Predikat istimewa -A : Nilai > 80-90, predikat Sangat Baik -BB : Nilai .70-80, predikat Baik -B : Nilai >60-70, predikat Cuukup Baik -CC : Nilai >50-60, predikat Cukup -C : Nilai >30-50, predikat Buruk -D : Nilai 0-30, predikat Sangat Buruk	53,37 (CC)	55,62 (CC)	57,85 (CC)	60.12 (B)	62.37(B)	64.62(B)
2	Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB	B (68,52)	BB (70,01)	BB (71,02)	BB (72,03)	BB (73,5)	BB (73,5)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan	$" = (15\%n1) + (20\%n2) + (15\%n3) + (20\%n4) + (15\%n5) + (15\%n6)"$ n1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran n2 = pengelolaan anggaran belanja	81,52	81,51	81,52	81,54	81,56	81,57

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	dalam APBD n3 = transparansi pengelolaan keuangan daerah n4 = penyerapan anggaran n5 = kondisi keuangan daerah n6 = opini BPK atas LKPD						
4	Indeks SPBE	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang	2.85	2.95	3.1	3.5	4	4.3
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	IP = IP1 +IP2+IP3+IP4 Keterangan : IP= Indeks Profesionalisme -IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi -IP2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi -IP3=Indeks Profesionalisme Dimeni Kinerja -IP4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	60	62,92	65,84	68,76	71,68	74,6
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	=nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah	82,22 (A)	83,44 (A)	84,66 (A)	85,88 (A)	87,10 (A)	88,31 (A)
7	Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui	$= (\frac{I\ RLS - I\ HLS\ (min)}{2})$ I RLS = Indeks rata-rata lama	69,17	69,39	69,61	69,83	70,5	70,27

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		perkembangan pendidikan	sekolah I HLS(min)= Indeks harapan lama sekolah minimal						
8	Indeks kesehatan	Sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat.	$I\ Kesehatan = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$	78,8	79,2	79,5	79,8	80,3	80,6
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara memperbandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laku	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki Ket: Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Nammun semakin besarjarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.	86.45	87.45	88.45	89.45	90.45	91,45
10	Kabupaten Layak Pemuda	Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabuapaten/Kota	Hasil penelitian dan penilaian Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		yang memiliki sistem layanan kepemudaan bebasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematik, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kamajuan dan kemandiriaan pemuda							
11	Status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem p embangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komi tmen dan sumber daya pemerintah,	Hasil penilaian dari Kementerian PPPA	600 Pratam a	650 Pratama	700 Madya	725 Madya	745 Madya	770 Madya

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak							
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Indeks komposit dari persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	$= \%\text{jumlah penegakan perda} + \%\text{penanganan unjuk rasa}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%	72	73	74	75	76	77
14	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya (Benda atau tak berbenda) yang merupakan jati diri suatu masyarakat, yang diwariskan dari generasi-generasi	Adapun cara pengukuran Persentase warisan budaya dilestarikan adalah $\frac{\textit{jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ter data}} \text{ x } 100\%$	60	70	72	74	79	77

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		sebelumnya dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang							
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkatan budaya membaca dan keilmuan serta keberadaan dan kondisi perpustakaan	= (UPLM/AM)x100% UPLM = Unsur pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan ke perpustakaan, perpustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. AM= Aspek masyarakat	29.8	30	30,5	31	31.5	31.5
16	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	Hubungan antar ruas jalan dengan ruas jalan lainnya,yang menghubugkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dengan tingkat kemantapan jan sebagai salah satu indikatornya	$\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik} + \text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Jalan} + \text{Jumlah Jembatan}} \text{ x } 100\%$	78,1	80,27	82,44	84,61	86,78	87
17	Indeks Infrastruktur dasar	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah	Persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, rasio elektrifikasi	91,26	92,19	93,12	94,06	95	95

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik							
18	Indeks Sumber Daya Air	Penilaian kinerja sistem irigasi suatu wilayah yang meliputi prasaranan fisik, prasarana penunjang, personil, dokumentasi, dan kelembagaan P3A. Semakin tinggi indeks yang dicapai maka dapat dikatakan kinerja semkin baik	Persentase indeks prasarana fisik, indeks prasarana penunjang, indeks dokumentasi, indeks produktivitas tanam, indeks P3A dan indeks organisasi personalia	48	52	56	60	64	68
19	IKLH	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	69.41	69,90	70,50	70.99	71.37	71.37

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
20	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW adalah penilaian kesesuaian realisasi penataan ruang terhadap recana peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW. Semakin tinggi persetase yang dicapai maka tingkat ketaatan dinilai semakin baik.	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \text{ x } 100\%$	94	96	97	98	99	100
21	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	Angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bencana yang tertangani maka semakin tinggi juga persentase dampak penurunan resiko bencana	Bencana yang tertangani x Jumlah Bencana tiap tahun	48,27	50	51,72	53,57	55,17	58,62
22	PDRB sektor pertanian	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari : Tanaman	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya}} \text{ X } 100$	Rp 5.938,42 Milyar	Rp.6.057,19 milyar	Rp 6.178,33 milyar	Rp 6.301,90 milyar	Rp 6.427,94 milyar	Rp 6.556,50 milyar

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan							
23	PDRB sektor Industri	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}} \text{X100}$	1636,85	1682,29	1727,73	1773,16	1818,60	1841,32
24	PDRB sektor perdagangan	Gambaran perkembangan perekonmian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}} \text{X100}$	943,6	982,5	1021,4	1060,3	1099,2	1138,1
25	Persentase peningkatan investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang dikurang Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}} \text{X100}$	5	8	11	14	17	17

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		tahun 2007							
26	Angka kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$(Pa) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{q} \left[\frac{z - yi}{z}\right] a$ a = 0,1,2 z =garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan (i=1,2,...q), y, <z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= Jumlah penduduk	13.35	13.2	13.05	11.9	10.85	9.9
27	Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlah pengangguran/Angkatan Kerja) x 100%	3.25	3.21	3.15	3.09	3.04	2.98
28	Indeks Ketahanan Pangan	Capaian ketahanan Pangan dan Gizi Kab/Kota/provinsi dan peringkat (rangking) relatif antara satu wilayag dibandingkan	Hail hitungan foo security and Vurnerability (FSVA) yaitu analisis ketahanan dan kerentanan Pangan	77,72	77,94	78,18	78,44	78,74	78,74

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		dengan wilayah yang lain							
29	Persentase peningkatan Desa Maju	Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.	Jumlah desa maju/Total desa dalam Kabupaten Musi Rawas x 100	88,36	89,57	90,79	92,01	93,23	93,23

8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/ TK (%)	66,52	68,00	68,50	69,00	70,00	71,00	72,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	110,56	112,00	113,00	114,00	115,00	116,00	116,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	101,34	102,00	103,00	104,00	105,00	105,00	105,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	97,36	98,00	98,30	98,50	98,60	98,80	98,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	96,36	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
	Persentase Sekolah SD dan SMP terakreditasi A (%)	21,38	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SD/MI/Sederajat	20,00	20,50	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP- SMP/MTs/Sederajat	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	66,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kesehatan							
	Angka harapan hidup	68,14	68,54	69,01	69,50	69,75	70,01	70,05
	Angka kematian Ibu	94,01	88,12	88,09	88,05	88,05	75,45	62,86
	Angka Kematian Bayi	4,2	3,7	3,2	3,01	2,5	2	2
	Prevalensi Stunting	4,59%	10%	8%	6%	4%	2%	0%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skrining kesehatan	93,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sesuai standar							
	Persentase penderita hipertensi yang mnedapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	54,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rs. dr. Sobirin							
	Indeks Kesehatan (%)	71.9	73	73.4	74.1	75	76	76
	Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	PU Bina Marga							
	Persentase Pembangunan Jalan	6,77	14,44	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Peningkatan Jalan	16,32	12,08	16,57	18,28	19,05	19,05	20,00
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	5,55	8,59	17,89	22,90	25,04	25,04	26,04
	Persentase Pembangunan Jembatan	20,00	17,50	10,00	15,00	17,50	20,00	20,00
	Persentase Peningkatan Jembatan	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	21,05	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
	PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan							
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak (%)	98,04	98,35	98,66	99	99,35	99,66	100
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	98,32	98,5	98,75	99	99,5	99,75	100
	Rasio Elektrifikasi (%)	90,19	91	93	95	97	99	100
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	58,02	60	65	70	75	80	85
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	98,04	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	98,32	100	100	100	100	100	100
	Indeks Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan Yang Terlindungi (%)	56,44	59	62	65	68	72	75

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	91,18	94	96	97	98	99	100
	Persentase gedung negara beserta sarana penunjang yang besOSrfungsi baik (%)	93,13	93,5	93,75	94	94,5	94,75	95
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	71.8%	96	97	98	99	100	100
	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	18.6%	19.7%	22.5%	25.3%	28.1%	30.9%	36.6%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	40	45	60	70	80	95	95
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota (SPM)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota (SPM)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran							
	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	90	91	91	91	92	92	93
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	90	91	91	91	92	92	93
	Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	89	89	89	90	91	91	92
	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	89	90	90	90	91	92	92
	Dinas Sosial							
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	89,8	90	91	92	93	94	95
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	93,32	94	94,5	94,5	95	96	96
	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	85,7	90	91	92	93	94	95
	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara korban bencanaa kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Wajib							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,80	74,10	72,23	72,66	73,10	73,54	73,98
	2. Angka Angkatan Kerja (Orang)	215684	216023	216482	217280	218145	219852	220132
	3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,29	3,25	3,21	3,15	3,09	3,04	2,98
	4. Cakupan Tenaga Kerja Terlatih (%)	68	80	288	288	288	288	288
	5. Cakupan Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	5	75	75	75	75	75	75
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
	Angka partisipasi angkatan kerja perempuan	76,05	76,05	77,57	79,12	80,70	82,32	83,97
	Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah	8,10	8,40	9,24	10,16	11,18	12,30	13,53
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,00069	0,00068	0,000476	0,000428	0,000386	0,000347	0,000312
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	0,00070	0,00069	0,000552	0,000497	0,000447	0,000402	0,000362
	Pangan							
	Dinas Ketahanan Pangan							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skor PPH Ketersediaan Pangan	87,63 %	87,63 %	90,10 %	92,57 %	95,05 %	97,53 %	100 %
	Skor PPH Konsumsi Pangan	86,1 %	88,42 %	90,74 %	93,06 %	95,37 %	97,68 %	97,68 %
	Pertanahan							
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase luas lahan bersertifikat	50	60	70	80	90	100	100
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah negara	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100
	lingkungan hidup							
	Dinas Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Air	63.33	63.33	63.46	63.86	63.98	63.91	63.91
	Indeks Kualitas Udara	99.99	90.37	90.48	90.58	90.69	90.98	90.98
	Persentase penurunan Emisi GRK (%)	1.68	1.68	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57
	Indek Tutupan Hutan dan Lahan	33.60	41.07	42.91	44.75	46.59	47.93	47.93
	Persentase Sampah yang dikelolah (%)	24.26	27.00	31.00	34.00	37.00	40.00	45.00
	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	57.58	60	64	68	72	76	80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil							
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	65.33%	65.83%	66.33%	66.83%	67.33%	67.83%	68.33%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%
	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Permerintah Desa							
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	74%	75%	76%	77%	78%	79%	80%
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	74%	75%	76%	77%	78%	79%	80%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	0	0	52	54	56	58	60
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) (%)	19,06	19,03	19	18,97	18,94	18,91	18,88
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) (%)	77,34	77,44	77,54	77,64	77,74	77,84	77,94
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	50	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3
	Perhubugan							
	Dinas Perhubungan							
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	83	85	87	89	91	93	95
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	67	57	47	37	27	17	10
	Komunikasi dan informatika							
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik							
	Persentase penuntasan blank spot area (%)	77	80	85	87	90	95	100
	Persentase pengmbangan dan	73	75	79	85	87	95	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemanfaatan aplikasi (%)							
	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah (%)	70	75	80	85	90	95	100
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	Dinas Koperasi dan Usahakecil Menengah							
	Persentase Koperasi Aktif (%)	83	67	70	72	75	77	80
	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,20	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34
	Penanaman Nodal							
	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu							
	Realisasi Nilai Investasi	8,6 T	8,9 T	9,1 T	9,4 T	9.7 T	10 T	10,3 T
	Kepemudaan dan Olah Raga							
	Dinas Pemuda dan Olah Raga							
	Persentase Prestasi Pemuda	75%	76%	77%	78%	79%	80%	85%
	Persentase Prestasi Olahraga	80%	81%	82%	83%	84%	85%	88%
	Persentase Prestasi Keparamukaan	70%	71%	72%	73%	74%	75%	79%
	Statistik							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik							
	Jumlah Ketersedian data/informasi/statistik daerah	3	3	4	5	5	5	5
	Persandian							
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik							
	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	25	35	45	55	65	95	100
	Kebudayaan							
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	92	67,2	67,8	45,5	24	30,25	100
	Perpustakaan							
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	47,17	47,17	47,17	48,00	50,00	50,50	50,50
	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	0,00	0,00	9,00	14,00	18,00	23,00	23,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Arsip							
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
	Rata- rata nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	61,50	65,00	70,00	72,00	74,00	75,00	75,00
	Urusan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							
	Dinas Perikanan							
	Persentase peningkatan produksi perikanan per tahun	1,99%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	Persentase luas lahan dilakukan intesifikasi	0,03%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%
	Persentase luas lahan dilakukan ekstensifikasi	4,00%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%
	Pariwisata							
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	74,5	67,8	72,8	67,2	74,2	87,2	94
	Pertanian							
	Dinas Pertanian dan Peternakan							
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	1	3	3	3	3	3	3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	1	3	3	3	3	3	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Peternakan (%)	1	3	3	3	3	3	3
	Dinas Perkebunan							
	Meningkatnya Produksi Perkebunan (%)							
	Persentase peningkatan produksi karet	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1	1	1	1	1	1	1
	Perdagangan							
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar							
	PDRB Sektor Perdagangan (Rp x M)	904,65	943,60	982,50	1.021,40	1.060,30	1.099,20	1.138,10
	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan (%)	2	4	4	5	5	5,5	6
	Tingkat Inflasi (%)	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Perindustrian							
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PDRB Sektor Perindustrian (Rp x M)	1.591,42	1.636,85	1.682,29	1.727,73	1.773,16	1.818,60	1.841,32
	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	2	3	3	4	4	4,5	5
	Transmigrasi							
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
	Cakupan Tingkat Kesejahteraan Eks Transmigrasi (Juta/orang/bulan)	3,85	4,21	4,25	4,29	4,33	4,37	4,41
	Urusan Penunjang							
	Perencanaan Pembangunan							
	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP	22.53	23	24	25	26	27	28
	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	15.57	16	16	17	18	19	20
	Nilai Capaian Kinerja Pada Komponen SAKIP	11.95	12	13	14	15	16	17
	Keuangan							
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,54	81,52	81,51	81,52	81,54	81,56	81,57

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah							
	Persentase Peningkatan PAD (Pajak Daerah) terhadap Kontribusi Pendapatan Daerah (%)	89	90	100	100	100	100	100
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM							
	Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	40	40	45	50	55	60	65
	Indeks Profesionalitas Aparatur	57,08	60	62,92	65,84	68,76	71,68	74,6
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	88,02	88,03	88,04	88,05	88,06	88,07	88,08
	Penelitian dan Pengembangan							
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	75%	75%	75%	80%	85%	90%	100%
	Persentase Meningkatnya Reward Hasil Riset dan Inovasi	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan							
	Inspektorat							
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	4
	Persentase rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti	94,22	94,27	94,32	94,37	94,42	94,47	94,52
	Persentase PD yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB	50	50	56	62	70	76	80
	Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi	20	20	30	34	38	42	46
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	97,22	97,32	97,46	97,71	97,95	98,2	98,44
	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	4
	Sekretariat Dewan							
	Persentase Propemperda yang di sahkan	80	80	82	85	90	90	100
	Indeks Kepuasan layanan Anggota DPRD	80	80	82	85	90	90	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Umum							
	Sekretariat Daerah							
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	60	60	60	60	60	60	60
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60	60	60	60	60	60	60
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Tingkat Konflik Sara	86	87	88	89	90	91	92
	Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan	89	90	91	92	93	94	95
	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam mengunakan hak-hak politik	74	75	77	78	79	80	81
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
	Indeks Penurunan dampak resiko bencana	0	48,27	50	51,72	53,57	55,17	58,62
	Persentase Penanggulangan bencana (%)	0	49,70	51,27	52,32	54,94	57,03	62,26
	Kecamatan							
	Kecamatan Tugumulyo							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	85,00%	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	97,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	97,00%	98,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	85,00%	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	97,00%
	Kecamatan Sumber Harta							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	85,00%	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	97,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	97,00%	98,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	85,00%	87,00%	90,00%	92,00%	95,00%	97,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Jayaloka							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75,00%	77,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%
	Kecamatan Megang Sakti							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	97,00%	99,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	95,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan STL Ulu Terawas							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90	92	93	94	95	97
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan		85%	87%	90%	92%	95%	97%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		85%	87%	90%	92%	95%	97%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik		90%	92%	93%	94%	95%	97%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		90%	91%	92%	93%	94%	95%
	Kecamatan Muara Beliti							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	84,00%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	98,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85%	94%	95%	96%	97%	98%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	90%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	90,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%	97,00%
	Kecamatan Selangit							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75%	80%	85%	87%	90%	92%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	90%	92%	94%	96%	97%	98%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	85%	86%	89%	90%	92%	95%
	Kecamatan Sukakarya							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75	77	80	83	85	87
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan		70%	75%	80%	85%	90%	92%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		85%	87%	90%	93%	95%	97%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik		85%	90%	95%	97%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		80%	82%	85%	88%	90%	93%
	Kecamatan Muara Lakitan							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%
	Kecamatan Muara Kelingi							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	75,00	75,00	78,00	79,00	80,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan		65,00%	70,00%	72,00%	74,00%	75,00%	78,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat		85%	85,00%	85,00%	86,00%	87,00%	89,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti							
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik		85%	85%	85%	87%	89%	90%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		80,00%	83,00%	85,00%	86,00%	90,00%	95,00%
	Kecamatan BTS Ulu							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75,00%	77,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%
	Kecamatan Purwodadi							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00%
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti							
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	96,00%
	Kecamatan Tuah Negeri							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan		75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik		70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		70,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	N/A	75,00%	77,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	N/A	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dalam periode 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama dengan DPRD Kabupaten Musi Rawas bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Guna terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas serta warga masyarakatnya harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Musi Rawas dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Musi Rawas yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Musi Rawas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang harapkan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Renstra Tahun 2021–2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021–2026 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh Bupati.
2. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 adalah merupakan sasaran

dan indikator kinerja Kabupaten. Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.

4. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, pada kondisi pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Musi Rawas atau di Sumatera Selatan, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
5. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, Bappeda Kabupaten Musi Rawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya kedalam Renstra Perangkat Daerah serta ketercapaian dalam pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas.